

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(RKPD)  
Kabupaten Belu Tahun 2023**



**Pemerintah Daerah Kabupaten Belu  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah**



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Belu Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

f-

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 147);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

## Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V	:	Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
BAB VI	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
BAB VII	:	Penutup.
- (3) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
  - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Belu.
- (2) RKPD mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai Desember 2023.

k


Pasal 4

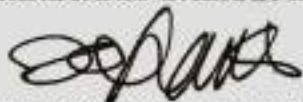
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BELU,   
  
TAOLIN AGUSTINUS 

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 



JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 24

2017 yaitu RKPD Tahun 2023 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Dokumen Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan "Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif".

Bupati Belu, 



R. dr. Agustinus Taolin, SpPD., KG-EH, FINASIM 

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BELU, *[Signature]*  
*[Signature]*  
TAOLIN AGUSTINUS *[Signature]*

The seal of Kabupaten Belu is circular, featuring a central emblem with a star and a banner. The words "KABUPATEN BELU" are written around the perimeter of the seal.

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, *[Signature]*

*[Signature]*

JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 24

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini. Dokumen RKPD ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional Dan Provinsi NTT Tahun 2023, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan turunannya. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai yang tercantum dalam RPJMD. Selain itu, penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam rancangan RKP serta program strategis nasional lainnya. Dalam proses penyusunannya, BP4D Kabupaten Belu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Belu yang kita cintai bersama ini.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Grafik .....	vi
Daftar Gambar .....	ix
BAB I Pendahuluan .....	I.1
1.1 Latar Belakang .....	I.1
1.2 Dasar Hukum .....	I.2
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I.6
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I.8
1.5 Sistematikan Penulisan .....	I.9
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II.1
2.1 Kondisi Umum Kabupaten Belu .....	II.1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD.....	II.83
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II.192
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan .....	III.1
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah .....	III.1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III.17
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Daerah .....	IV.1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV.3
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah .....	V.1
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	VI.1
BAB VII Penutup .....	VII.1
LAMPIRAN .....	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2021 .....	II-2
Tabel 2.2 Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2021 .....	II-3
Tabel 2.3 Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu .....	II-4
Tabel 2.4 Jenis Tanah di Kabupaten Belu .....	II-12
Tabel 2.5 Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu Tahun 2021 ...	II 15
Tabel 2.6 Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu Tahun 2021 .....	II 16
Tabel 2.7 Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu Tahun 2021 .....	II-23
Tabel 2.8 Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu .....	II-28
Tabel 2.9 Kawasan Lindung di Kabupaten Belu .....	II-31
Tabel 2.10 Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Belu .....	II-40
Tabel 2.11 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2021 (Semester 1) .....	II-48
Tabel 2.12 Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2021 .....	II-52
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Belu Tahun 2021.....	II-52
Tabel 2.14 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha ( <i>Miliar Rupiah</i> ) di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-57
Tabel 2.15 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha ( <i>Miliar Rupiah</i> ) di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-59
Tabel 2.16 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu.....	II-61
Tabel 2.17 Presentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang dimiliki Tahun 2017-2021.....	II-77
Tabel 2.18 Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian Kabupaten Belu 2018-2022 .....	II-86
Tabel 2.19 Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-88
Tabel 2.20 Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu Tahun 2021.....	II-100
Tabel 2.21 Standar Ketenagaan Pada Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Pedesaan....	II-103
Tabel 2.22 Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-106
Tabel 2.23 Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten Belu dan Jalan Desa Di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-107
Tabel 2.24 Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu Sampai Dengan Tahun 2021.....	II-108
Tabel 2.25 Panjang dan Kondisi Salurah Irigasi di Kabupaten Belu Tahun 2021.....	II-109
Tabel 2.26 Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu 2016-2021 .....	II-110
Tabel 2.27 Drainase Terbangun Di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-111
Tabel 2.28 Cakupan Layanan Air Minum Di Kabupaten Belu Tahun 2016 -2021.....	II-113
Tabel 2.29 Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021....	II-115
Tabel 2.30 Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021..	II-115



Tabel 2.31	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-117
Tabel 2.32	Presentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-117
Tabel 2.33	Lokasi Kawasan Kumuh yang tertangani di Kabupaten Belu Pada Tahun 2021 .....	II-120
Tabel 2.34	Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-122
Tabel 2.35	Capaian Urusan Sosial Tahun 2017-2021 .....	II-123
Tabel 2.36	Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2017-2021.....	II-123
Tabel 2.37	Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-124
Tabel 2.38	Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Dilaporkan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021.....	II-125
Tabel 2.39	Capaian Indikator Urusan Pertahanan Kabupaten Belu Tahun 2016-2021..	II-126
Tabel 2.40	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 ..	II-127
Tabel 2.41	Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2017-202 .....	II-128
Tabel 2.42	Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-130
Tabel 2.43	Status Desa di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021 .....	II-131
Tabel 2.44	Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-131
Tabel 2.45	Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-132
Tabel 2.46	Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-134
Tabel 2.47	Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-135
Tabel 2.48	Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-136
Tabel 2.49	Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Belu 2016-2020 .....	II-137
Tabel 2.50	Capaian Penerbitan Ijin Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-137
Tabel 2.51	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-138
Tabel 2.52	Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-139
Tabel 2.53	Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-140
Tabel 2.54	Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-140
Tabel 2.55	Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-141
Tabel 2.56	Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 .....	II-141
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Tahun 2017-2021.....	II-143
Tabel 2.58	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-145
Tabel 2.59	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2019 .....	II-146
Tabel 2.60	Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-150
Tabel 2.61	Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu .....	II-151



Tabel 2.62 Hasil Kinerja Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-155
Tabel 2.63 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 ....	II-157
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-158
Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-159
Tabel 2.66 Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-159
Tabel 2.67 Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-160
Tabel 2.68 Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-161
Tabel 2.69 Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-162
Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-164
Tabel 2.71 Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-165
Tabel 2.72 Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-166
Tabel 2.73 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-167
Tabel 2.74 Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-168
Tabel 2.75 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.	II-169
Tabel 2.76 Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-170
Tabel 2.77 Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2021 .....	II-174
Tabel 2.78 Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020	II-175
Tabel 2.79 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2021 .....	II-177
Tabel 2.80 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-180
Tabel 2.81 Jumlah Dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah .....	II-181
Tabel 2.82 Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Ketergantungan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-183
Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I .....	II-184
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi II .....	II-184
Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi III .....	II-185
Tabel 2.86 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi IV .....	II-186
Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi V .....	II-186
Tabel 2.88 Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 .....	II-187
Tabel 2.89 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021.....	II-193
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2020- 2021.....	III-2
Tabel 3.2 Perkembangan PDRB ADHb dan ADHk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu Tahun 2020 s/d 2021 .....	III-3
Tabel 3.3 Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2020 .....	III-5
Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2021	III-6



Tabel 3.5	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu Tahun 2021–2024 .....	III-14
Tabel 3.6	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2021 – 2024 .....	III-16
Tabel 3.7	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tahun 2020–2024 .....	III-17
Tabel 3.8	Ringkasan APBD Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Anggaran Kabupaten Belu Tahun 2023 – 2024 .....	III-20
Tabel 4.1	Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Belu .....	IV-4
Tabel 4.2	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT Tahun 2023 .....	IV-12
Tabel 4.3	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belu Tahun 2023 .....	IV-23
Tabel 5.1	Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023 .....	V-2
Tabel 5.2	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 .....	V-11
Tabel 6.1	Target dan Capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021–2023 .....	VI-3
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu Tahun 2021-2023 .....	VI-3



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 .....	II-48
Grafik 2.2	Grafik Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2021 .....	II-49
Grafik 2.3	Data kelahiran, Kematian, Migrasi masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2021.....	II-50
Grafik 2.4	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021.....	II-54
Grafik 2.5	Pertumbuhan PDRB atas Tahun Harga Berlaku (PDRB HB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.....	II-62
Grafik 2.6	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021 .....	II-63
Grafik 2.7	Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Belu dan Provinsi NTT tahun 2016-2021 .....	II-65
Grafik 2.8	Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021 .....	II-66
Grafik 2.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2021.....	II-67
Grafik 2.10	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021 .....	II-69
Grafik 2.11	Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2021..	II-69
Grafik 2.12	Perbandingan Persentase Melek Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	II-71
Grafik 2.13	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	II-72
Grafik 2.14	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	II-73
Grafik 2.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-74
Grafik 2.16	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-75
Grafik 2.17	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-76
Grafik 2.18	Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	II-78
Grafik 2.19	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-79
Grafik 2.20	Persentase Balita Stunting Kabupaten Belu Tahun 2018-2020.....	II-80
Grafik 2.21	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu Tahun 2017-2020 .....	II-81



Grafik 2.22	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2020 .....	II-82
Grafik 2.23	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian di Kabupaten Belu 2021.....	II-83
Grafik 2.24	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 .....	II-85
Grafik 2.25	Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-87
Grafik 2.26	Rasio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-89
Grafik 2.27	Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-90
Grafik 2.28	APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-91
Grafik 2.29	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-92
Grafik 2.30	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-93
Grafik 2.31	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-94
Grafik 2.32	Angka Kematian Balita Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-95
Grafik 2.33	Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019.....	II-96
Grafik 2.34	Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Umur di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019 .....	II-97
Grafik 2.35	Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Belu Tahun 2015-2019 .....	II-98
Grafik 2.36	Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021 .....	II-99
Grafik 2.37	Perkembangan Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Poskesdes per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2020.....	II-101
Grafik 2.38	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-102
Grafik 2.39	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-104
Grafik 2.40	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-105
Grafik 2.41	Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-121
Grafik 2.42	Nilai Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020.....	II-149
Grafik 2.43	Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-163
Grafik 2.44	Perkembangan NTP Provinsi NTT tahun 2016-2020 .....	II-173



Grafik 2.45	Capaian Rumah Tangga Berakses Air Bersih di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-176
Grafik 2.46	Capaian Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-177
Grafik 2.47	Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 .....	II-178
Grafik 2.48	Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 .....	II-179
Grafik 3.1	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021 .....	III-4





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Belu .....	II.2
Gambar 2.2 Peta Kelerengan di Kabupaten Belu .....	II.5
Gambar 2.3 Peta Geologi di Kabupaten Belu .....	II.9
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu .....	II-13
Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu .....	II-25
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu .....	II-26
Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu .....	II-30
Gambar 2.8 Peta Pola Ruang Kabupaten Belu .....	II-38
Gambar 2.9 Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Belu .....	II-39
Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu .....	II-46



## DAFTAR SINGKATAN

1. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. RKP : Rencana Kerja Pemerintah
4. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
5. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
6. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
7. SIMREDA : Sistem Informasi manajemen Perencanaan Daerah
8. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
9. KUA : Kebijakan Umum Anggaran
10. PPAS : Penetapan Plafon Anggaran Sementara
11. RAPBD : Rencana Anggaran Pemerintah Daerah
12. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
13. RDTL : *Republic Democratic of Timor-Leste*
14. TTU : Timor Tengah Utara
15. NTT : Nusa Tenggara Timur
16. PKSN : Pusat Kawasan Strategis Nasional
17. DAS : Daerah Aliran Sungai
18. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
19. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
20. CAT : Cakupan Air Tanah
21. CSR : *Corporate Sosial Responsibility*
22. RTH : Ruang Terbuka Hijau
23. DIBI : Data dan Informasi Bencana Indonesia
24. BPBD : Badan Penggulangan Bencana Daerah
25. HIV : *Human immunodeficiency Virus*
26. AIDS : *Acquired Immune Deficiency Syndrome*
27. SDA : Sumber Daya Alam
28. KK : Kepala Keluarga
29. KB : Keluarga Berencana
30. SDM : Sumber Daya Manusia
31. SD : Sekolah Dasar
32. TTS : Timur Tengah Selatan
33. NTB : Nusa Tenggara Barat
34. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
35. ADHb : Atas Dasar Harga Berlaku



36. ADHk : Atas Dasar Harga Konstan
37. BPS : Badan Pusat Statistik
38. IPM : Indeks Pembangunan Manusia
39. *BOD* : *Biochemical Oxygen Demand*
40. *COD* : *Chemical Oxygen Demand*
41. IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
42. IKA : Indeks Kualitas Air
43. IKU : Indeks Kualitas Udara
44. ITL : Indeks Tutupan Lahan
45. ITH : Indeks Tutupan Hutan
46. UKL : Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup
47. UPL : Upaya pemantauan Lingkungan hidup
48. TPS : Tempat Penampungan Sampah
49. HPL : Hak pengelolaan
50. HGB : Hal Guna Bangunan
51. AMH : Angka Melek Huruf
52. *UNDP* : *United Nation Development Program*
53. HLS : Harapan Lama Sekolah
54. APK : Angka Partisipasi Kasar
55. APM : Angka Partisipasi Murni
56. SD : Sekolah Dasar
57. MI : Madrasah Ibtidaiyah
58. SMP : Sekolah Menengah Pertama
59. MTs : Madrasah Tsanawiyah
60. PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
61. SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
62. SMA : Sekolah Mengengah Atas
63. TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
64. AKI : Angka Kematian Ibu
65. AKHB : Angka Kelangsungan Hidup Bayi
66. AKB : Angka Kematian Bayi
67. AKBA : Amgka Kematian Balita
68. *SDGs* : *Susteainable Development Goals*
69. BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah
70. *VCT* : *Voluntary, Counseling, and Testing*
71. STBP : Survei Terpadu Biologis dan Perilaku



72. TBC : *Tuberculosis*
73. WHO : *World Health Organisation*
74. PCR : *Polymerase Chain Reaction*
75. TCM : Tes Cepat Molekuler
76. ODGJ : Orang Dengan Gangguan Jiwa
77. UKK : Usaha Kesehatan Kerja
78. DI : Daerah Irigasi
79. RTH : Ruang Terbuka Hijau
80. IMB : Ijin Mendirikan Bangunan
81. RDTR : Rencana Detail Tata Ruang
82. KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Sederhana
83. PKSM : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
84. PSK : Pekerja Seks Komersil
85. PPH : Pola Pangan Harapan
86. AKE : Angka Kecukupan Energi
87. HM : Hak Milik
88. HGB : Hak Guna Bangunan
89. HP : Hak Pakai
90. LKPD : Laporan Kinerja Perangkat Daerah
91. IKL : Indeks Kualitas Lingkungan
92. KTP : Kartu Tanda Penduduk
93. KIA : Kesehatan Ibu Anak
94. GISA : Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
95. PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
96. ADD : Alokasi Dana Desa
97. UED-SP : Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam
98. BUMDES : Badan Usaha milik Desa
99. LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
100. PPK : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
101. IDM : Indeks Desa Membangunan
102. TTG : Teknologi Tepat Guna
103. NKKBS : Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
104. PUS : Pasangan Usia Subur
105. LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk
106. TFR : *Total Fertility Rate*
107. BKB : Bina Keluarga Balita



- 108.BKR : Bina Keluarga Remaja
- 109.BKL : Bina Keluarga Lansia
- 110.KB : Keluarga berencana
- 111.TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 112.KIM : Kelompok Informasi Masyarakat
- 113.UKM : Usaha Kecil Menengah
- 114.LEPMM : Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
- 115.PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- 116.PMA : Penanaman Modal Asing
- 117.DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 118.SIUP : Surat Ijin Usaha Perdagangan
- 119.TDU : Tanda Daftar Usaha
- 120.IUJK : Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- 121.PERDA : Peraturan Daerah
- 122.PERKADA : Peraturan Kepala Daerah
- 123.DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 124.BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
- 125.RB : Reformasi Birokrasi
- 126.PD : Perangkat Daerah
- 127.AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 128.LPPD : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 129.BP4D : Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 130.WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- 131.PAD : Pendapatan Asli Daerah
- 132.APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 133.SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Daerah
- 134.Anjab : Analisis Jabatan
- 135.ABK : Analisis Beban Kerja
- 136.SPM : Standar Pelayanan Minimum
- 137.SPP : Standar Pelayanan Pemerintah
- 138.SOP : Standar Operasional Prosedur
- 139.LKPJ : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
- 140.ILPPD : Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 141.LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
- 142.PPK : Pegawai dengan Perjanjian Kerja



- 143.ASN : Aparatur Sipil Negara
- 144.APIP : Aparat Pengawas Internal Pemerintah
- 145.SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 146.LKIP : Laporan kinerja instansi Pemerintah
- 147.OBRIK : Obyek Pemeriksaan
- 148.e-LHP : Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan
- 149.KPP : Kawasan Pengembangan Pariwisata
- 150.HMT : Hijauan Makanan Ternak
- 151.UTTP : Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya
- 152.PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
- 153.DAU : Dana Alokasi Umum
- 154.NTP : Nilai Tukas Petani
- 155.ATM : Anjungan Tunai Mandiri
- 156.RT : Rumah Tangga
- 157.PLN : Perusahaan Listrik Negara
- 158.OSS – RBA : *Online Single Submission - Risk Based Approach*
- 159.IKU : Indikator Kinerja Utama
- 160.DBD : Demam Berdarah Dengue
- 161.KLB : Kejadian Luar Biasa
- 162.UCI : *Universal Child Immunization*
- 163.FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- 164.STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- 165.PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 166.TOGA : Taman Obat Keluarga
- 167.STPT : Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
- 168.SIPT : Surat Ijin Pengobatan Tradisional
- 169.PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 170.PSKS : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- 171.PB : Perjanjian Bersama
- 172.BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 173.DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
- 174.SPPH : Sekolah Pembantu Penilik Higiene
- 175.KIA : Kartu Identitas Anak
- 176.GISA : Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
- 177.Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
- 178.Bumdes : Badan Usaha Milik Desa



179. Posyantek : Pos Pelayanan Teknis
180. LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk
181. TFR : *Total Fertility Rate*
182. MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
183. KIM : Kelompok Informasi Masyarakat
184. IKK : Indikator Kinerja Kunci
185. PNF : Pendidikan Non Formal
186. IRB : Indeks Reformasi Birokrasi
187. IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
188. TMP : Taman Makam Pahlawan
189. B3 : Bahan Beracun dan Beracun
190. MHA : Masyarakat Hukum Adat
191. KEHATI : Keanekaragaman Hayati
192. PPLH : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
193. LLAJ : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
194. KS : Keluarga Sejahtera
195. ASFR : *Age Specific Fertility Rate*
196. CPR : Centra Pengembangan Remaja
197. SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
198. KSP : Koperasi Simpan Pinjam
199. USP : Usaha Simpan Pinjam
200. SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik
201. SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
202. Ekososbud : Ekonomi Sosial Budaya
203. HAM : Hak Asasi Manusia
204. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
205. IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
206. FKA : Forum Kerukunan Lintas Agama
207. P3K : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
208. CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
209. KTI : Kawasan Timur Indonesia
210. ALKI : Alur Laut Kepulauan Indonesia
211. MEA : Masyarakat Ekonomi Asean
212. RI : Republik Indonesia
213. PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya
214. PRUKAB : Program Unggulan Kabupaten



215. Lokpri : Lokasi Prioritas
216. GRK : Gas Rumah Kaca
217. KKN : Korupsi Kolusi dan Neopotisme
218. Tusi : Tugas dan Fungsi
219. SIDa : Sitem Inovasi Daerah
220. *R&D* : *Research and Deveelopment*
221. YME : Yang Maha Esa





# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pemerintah Kabupaten Belu merupakan rencana kerja pemerintah tahunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Belu. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RPJMD, Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan program strategis nasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Belu memasuki tahun kedua periode RPJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 serta RPJMN 2020-2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. penyusunan Rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Era perencanaan pembangunan ke depan dengan menggunakan data informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang memenuhi prinsip satu data Indonesia, dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah). Dokumen Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai basis penyusunan Rencana Anggaran Pemerintah Daerah (RAPBD) Tahun 2023 sehingga penyusunan RKPD ini penting peranannya dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Belu.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 didasari oleh beberapa ketentuan hukum yakni:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030; (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0045);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 27);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020–2040 ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 147).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Belu yang dituangkan dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dokumen perencanaan Kabupaten Belu. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Belu



Tahun 2022 adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023; dan RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020–2040. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2023, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Belu Tahun 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tahun 2023 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunannya akan diarahkan untuk mewujudkan Visi yang telah Kepala Daerah, yaitu **“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”** dengan 5 (lima) misinya yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan.
2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan Perbatasan Yang Berbasis Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Terknologi Informasi.
5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal.

Dalam rangka mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Belu maka Tema RKPD kabupaten Belu Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 yaitu **“PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

***MANUSIA MENUJU PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH*** dengan prioritas pembangunan daerah yang meliputi:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pendidikan;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja;
5. Penyediaan infrastruktur;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Belu;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Belu dengan Bupati Belu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023; dan



7. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.

### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2022, Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VII PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2023, sebagai pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2023 bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum Kabupaten Belu**

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Belu.

##### **2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi**

###### **2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km<sup>2</sup>, dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL)
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)



**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu**



*Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040*

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 Km<sup>2</sup> atau 19,50% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 Km<sup>2</sup> atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Belu**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Prosentase (%)</b>
1	Raimanuk	9	129,924	11,55
2	Tasifeto Barat	8	223,914	19,50
3	Kakuluk Mesak	6	129,320	11,49
4	Nanaet Duabesi	4	67,818	6,03
5	Kota Atambua	4	16,301	1,45
6	Atambua Barat	4	10,994	0,98



No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
7	Atambua Selatan	4	11,198	1,00
8	Tasifeto Timur	12	209,477	18,62
9	Raihat	6	75,528	6,71
10	Lasiolat	7	61,492	5,47
11	Lamaknen	9	92,500	8,22
12	Lamaknen Selatan	8	96,674	8,59
<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>1.125,14</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 149,1 Km. Jumlah desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2021**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoeka	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutarato, Sisi Fatuberal, dan Debululik	6

Sumber: SIPD, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2021



Selain 7 kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL, terdapat 1 kecamatan transit yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan Negara RDTL ke Distrik Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan yang juga ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

### 2.1.1.3 Topografi

Kondisi Topografi di wilayah Kabupaten Belu berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan  $\pm 1500$  m.dpl (meter di atas permukaan laut). Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kondisi Topografi Kabupaten Belu dapat tergambar seperti pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu**

No	Kecamatan	Luas Lahan berdasarkan Kemiringan Lereng							
		0-2	2-5	5-8	8-15	15-22	22-30	30-45	>45
1	Atambua Barat	0	3,830	5,448	0	0	0	1,717	0
2	Atambua Selatan	0	3,716	6,464	0	0	0	1,018	0
3	Kakuluk Mesak	19,635	8,081	8,966	4,243	1,250	1,953	77,145	8,048
4	Kota Atambua	0	8,130	6,691	0,013	1,466	0	0	0
5	Lamaknen	5,269	6,702	1,474	0,990	16,372	11,230	49,030	1,434
6	Lamaknen Selatan	0,022	0,125	0	0,823	15,735	17,739	62,231	0
7	Lasiolat	0,003	0,059	0,187	0,885	24,909	19,647	15,802	0
8	Nanaet Duabesi	0,044	0	0	0,495	6,25	28,525	7,894	24,61
9	Raihat	9,283	9,487	0,004	0,163	33,835	15,872	6,884	0
10	Raimanuk	0,004	21,628	4,805	34,403	2,230	41,921	24,934	0
11	Tasifeto Barat	0,030	35,757	29,288	70,298	25,035	19,352	6,862	37,292
12	Tasifeto Timur	84,550	18,386	99,387	0,003	7,114	0,022	0,016	0
TOTAL		118,841	115,900	162,713	112,316	134,197	156,259	253,532	71,383

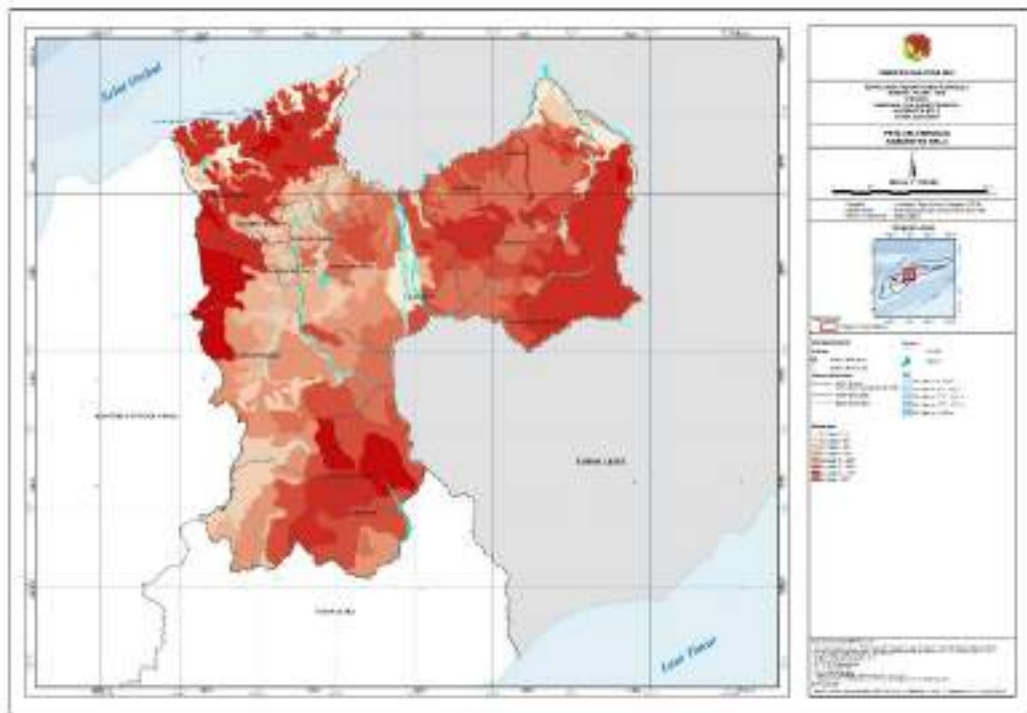
Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu dikelompokkan menjadi 5 tingkatan dengan rincian sebagai berikut:



1. Kelerengan 0-8% atau kelerengan tingkat I, tanah dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil.
2. Kelerengan 8-15% atau kelerengan tingkat II (landai), tanah dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengolahannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 15-25% atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya.
4. Kelerengan 25-45% atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi.
5. Kelerengan >45% atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatannya harus bersifat non budidaya.

**Gambar 2.2.**  
**Peta Kelerengan di Kabupaten Belu**



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040



#### **2.1.1.4 Geologi**

Jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks Mutis terdiri atas batuan malihan (metamorf), dimana secara umum disusun oleh batusabak, filit, sekis, amfibolit, sekis amfibolit, kuarsit, gneis amfibolit dan granulit. Semua indikator ini berada pada bagian utara Pulau Timor, sepanjang sabuk metamorfik tersebut. Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raimanuk.

b. Formasi Maubisse Gamping

Formasi Maubisse Gamping terdiri dari batu gamping kecokelatan sampai ungu. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Formasi Maubisse Lava Bantal

Formasi Maubisse Lava Bantal terdiri dari susunan beberapa Batuan Vulkanik seperti Trakit, Senit Porafir dan Andesit Leuko yang telah mengalami perubahan yang mengakibatkan batuan berwarna kehijauan. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

d. Formasi Bisane

Formasi Bisane terdiri dari serpih, Batu Pasir Gampingan dan Batu Sabak. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Tasifeto Barat.





e. Formasi Aitutu

Formasi Aitutu terdiri dari dua bagian, dimana bagian bawah terdiri dari selang-seling batu Napal dan batu gamping sedangkan bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

f. Kompleks Bobonaro

Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

g. Formasi Noele

Formasi Noele Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosin. Formasi Noele dapat dijumpai di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

h. Formasi Batu gamping coral

Formasi Batu Gamping Koral Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkorall. Berumur quarter. Formasi ini dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur.

i. Alluvium

Alluvium merupakan sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi



sawah sangat sesuai ditanam di tanah jenis alluvium. Tanah alluvium biasanya terdapat di tebing sungai, delta sungai dan dataran yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah alluvium di tepi sungai. Alluvium dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

j. Batuan Ultra Basa

Batuan Ultra Basa adalah batuan beku yang kandungan silikanya rendah (18%), tinggi akan kandungan FeO, rendah akan kandungan kalium dan umumnya kandungan mineral mafiknya lebih dari 90%. Batuan ultrabasa umumnya terdapat sebagai opiolit. Batuan Ultra Basa dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

k. Formasi Noil Toko

Formasi Noil Toko tersusun oleh Batuan Konglomerat, Batu Gamping Konglomeratan, Batu Gamping Globigerina, Batupasir Gampingan, Napal, Tuf, Tuf Gampingan dan serpih. Formasi Noil Toko dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk.

l. Formasi Wailuli

Formasi Wailuli didominasi oleh batu lanau homogen yang berwarna gelap dan batu serpih yang berselang-seling dengan Batu Gamping Kaya Organik, kalsilitit dan Batu Lempung. Formasi Wailuli dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.

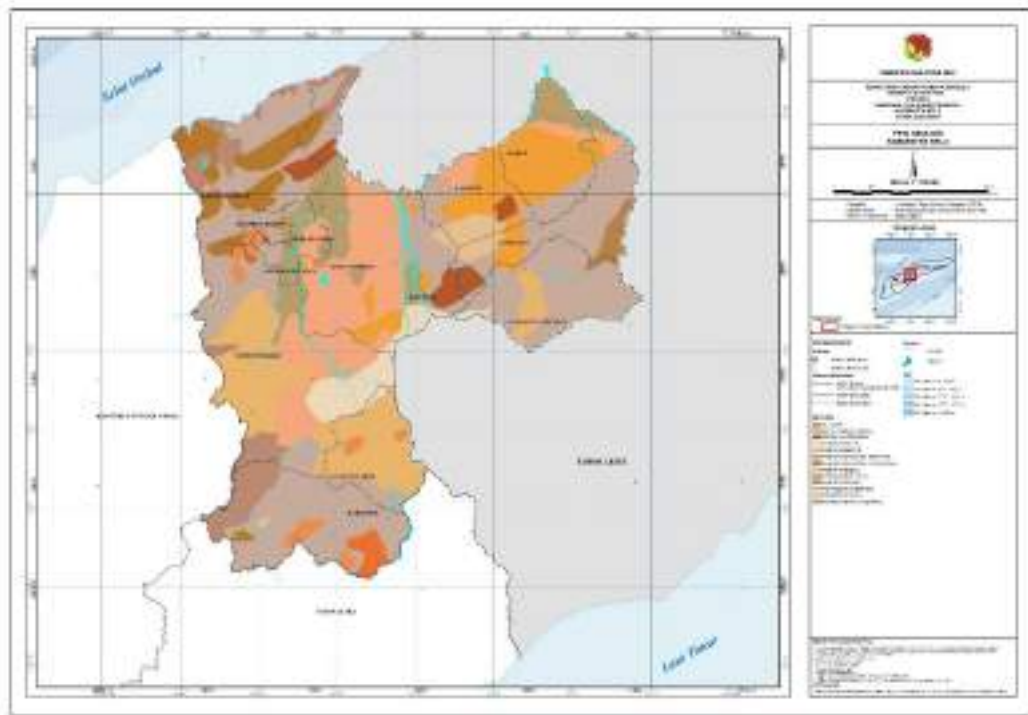
m. Batuan Konglomerat dan Kerakal

Batuan Konglomerat adalah batuan sedimen klastik yang mempunyai bentuk fragmen membundar (*rounded*). Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2mm, ruang antara fragmen umumnya diisi dengan partikel yang lebih kecil dan/atau semen kimia yang mengikat batuan bersama-sama. Batu Kerakal



adalah potongan batuan yang berukuran 150–250 mm. Batuan Konglomerat dan Batuan Kerakal dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

**Gambar 2.3.**  
**Peta Geologi di Kabupaten Belu**



*Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040*

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Belu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aluvial:

Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Tanah aluvial menjadi tanah yang subur karena unsur hara yang ada di dalam air secara perlahan terserap ke dalam tanah. Keunggulan tanah aluvial sangat bermanfaat untuk irigasi, kaya akan sumber daya



mineral, cenderung mudah diolah dan dapat menyerap air secara maksimal. Jenis tanah Aluvial dapat dijumpai hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu kecuali Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Raihat.

b. Grumosol

Tanah grumosol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak ada aktivitas organik didalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. Karakteristik tanah grumosol memiliki karakteristik bertekstur lempung, Struktur lapisan atas dan lapisan bawah sangat berbeda, koefisien pemuaiannya tinggi, kandungan zat organik rendah dan memiliki pH netral hingga alkali. Meskipun memiliki sifat dan karakteristik yang tidak begitu menguntungkan, tanah grumosol masih menyimpan prospek salah satunya untuk areal persawahan. Namun sebelumnya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung seperti drainase yang baik dan jaringan irigasi yang memadai dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dan kekurangan tanah grumosol ini. Jenis tanah grumosol dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Latosol

Tanah latosol atau tanah incepticol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter dan bahkan lebih. Batas horizon dari tanah ini tidaklah begitu terlihat jelas. Karakteristik tanah latosol adalah Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm



hingga lebih dari 5 meter. Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning-kuningan, tekstur tanah pada umumnya adalah liat, struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur, memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam, memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja, mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. Unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit, Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat, daya tanah air cukup baik dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap erosi tanah. Jenis tanah Latosol dapat dijumpai di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu.

d. Mediteran

Tanah mediteran adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah ini juga mengandung banyak mineral seperti besi, air, aluminium, dan senyawa organik lainnya yang membantu menyuburkan tanah. Selain itu, pada umumnya tanah ini dimanfaatkan untuk menanam padi. Jenis tanah Mediteran dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

e. Renzina

Tanah Renzina atau tanah mollisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan basalt, batu kapur, dan granit. Ciri-ciri tanah Renzina antara lain harus kering, berwarna cokelat, merah, dan hitam, serta mengandung bahan organik. Tanah Renzina, adalah tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan kapur yang ada di daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Adapun ciri-ciri tanah jenis ini antara lain warnanya kehitaman



serta sangat miskin unsur hara. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah berkapur. Renzina merupakan tanah organik diatas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol. Tanah Renzina memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan menahan air dan mengikat air tinggi. Tanah Renzina berasal dari pelapukan batuan kapur dengan curah hujan yang tinggi. Tanah memiliki kandungan Ca dan Mg yang cukup tinggi, bersifat basa, berwarna hitam, serta hanya mengandung sedikit unsur hara. Jenis tanah Renzina dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

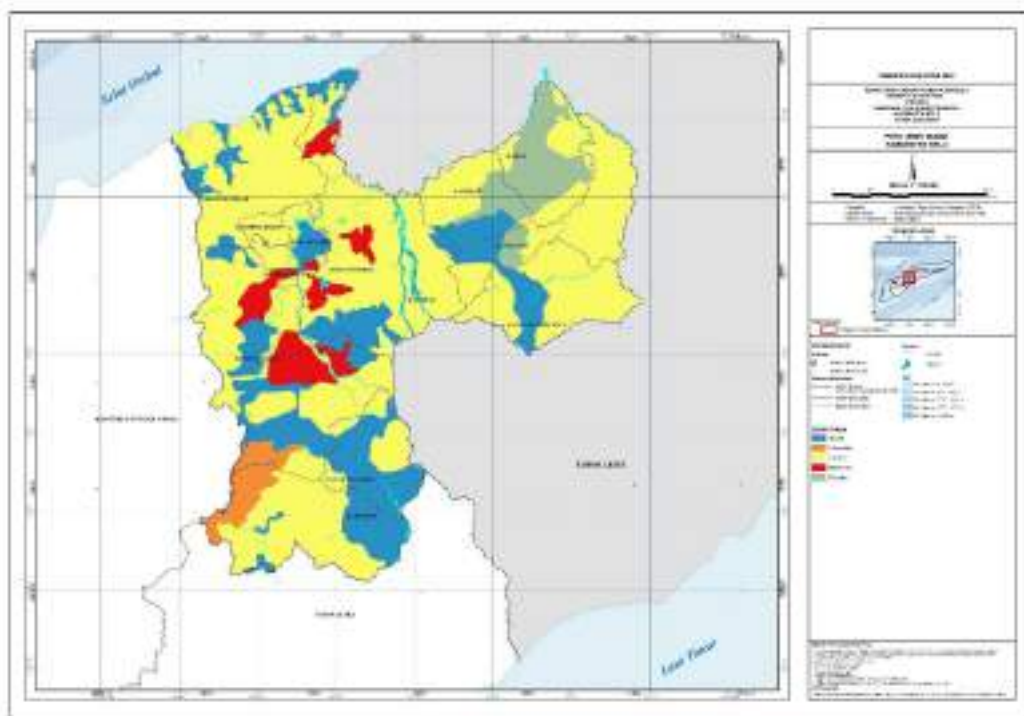
**Tabel 2.4.**  
**Jenis Tanah di Kabupaten Belu**

<b>No</b>	<b>Jenis Tanah</b>	<b>Lokasi</b>
1	Aluvial	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
2	Grumosol	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.
3	Latosol	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
4	Mediterran	Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat,

No	Jenis Tanah	Lokasi
		Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.
5	Renzina	Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

**Gambar 2.4**  
**Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu**



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Belu dijelaskan sesuai kondisi air permukaan dan air tanah.

#### A. Air Permukaan

Air permukaan yaitu sumber air yang mengalir di permukaan bumi, dapat dilihat secara visual tanpa menggunakan peralatan tertentu. Air permukaan sebagian besar terdiri dari air sungai, mata air, air waduk dan air yang terdapat di dalam danau. Potensi



sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Belu cukup merata di beberapa kecamatan, umumnya berupa mata air yang banyak digunakan sebagai kebutuhan air bersih. Kualitas mata air cukup baik, debit rata-rata mata air berkisar antara 5–200 liter per detik dan akan mengalami kekurangan debit hingga 70% saat musim kemarau (September, Oktober dan November).

#### 1. Air Sungai

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lereng, sehingga membentuk Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun DAS mikro. Sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 10-50 km dengan anak sungai membentuk orde yang bersifat *horton* dan *shreve*. Pada umumnya sungai-sungai ini mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi pada musim hujan berair dan sering terjadi banjir dengan pola aliran air sepanjang tahun (*perennial*), mengalir hanya pada musim hujan saja (*intermiten*); sedangkan pada musim kemarau kestabilan airnya berkurang bahkan ada yang tidak berair sama sekali atau berair pada waktu datang hujan saja (*ephemeral*).

Salah satu potensi air permukaan diperoleh dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan areal tangkapan air hujan dan pengaliran air permukaan berlangsung. DAS di Kabupaten Belu didominasi oleh topografi dengan kelas lereng yang termasuk kategori agak curam dengan kemiringan 26-40%, sehingga sangat peka terhadap erosi. Pola aliran DAS tersebut bersifat dendritik dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang diantaranya adalah DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatuketi, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamaksanulu, DAS Talau, DAS Lamaknen dan DAS Duarato.





## 2. Mata Air

Sumber air bersih dari mata air adalah jenis sumber air baku yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Belu. Pada saat ini PDAM Kabupaten Belu telah memanfaatkan 5 (lima) mata air. Tabel berikut menyajikan data sumber mata air yang telah dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu.

**Tabel 2.5**  
**Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu**  
**Tahun 2021**

No	Nama Sumber Air Baku	Jenis Sumber	Debit (lt/detik)	Wilayah Pelayanan
1	Lahurus	Mata air	20	Ds.Lasiolat, Ds.Sarabau, Ds.Bauho, Ds.Manleten, Kel.Fatubena sebagian, Kel.Beirafu, Kel.Tulamalae, Kel. Berdao, Kel. Umanen, Kel.Manuaman.
2.	Weoe	Mata air	10	Kel. Beirafu, Kel. Tulamalae, Kel. Berdao, Kel. Umanen, Kel. Manuaman
3.	Molosoan	Mata air	20	Ds. Manleten, Ds. Bauho, Ds. Sarabau, Kel.Fatubena, Kel. Tenukiik, Kel. Manumutin Sebagian
4.	Wefia	Mata air	5	Ds. Lasiolat, Ds. Maneikun
2	Wematan Tirta A	Mata air	7	Kel.Fatukbot,Kel.Rinbesi,Kel. Berdao,Kel. Atambua, Kel. Manuaman, Kel. Lidak
3	Wematan Tirta C	Mata air	5	Kel.Rinbesi,Kel. Atambua, Kel.Berdao.
4	We Utu	Mata air	20	Kel.Manumutin, Kel.Tulamalae.
5	Sumur Bor Bautasik	Sumur bor	2,5	Ds.Kabuna
6	WeKiar - WeBenahi	Mata air	2	Ds.Silawan
7	Sumur Bor Beilaka	Sumur bor	5	Ds.Silawan
8	Sumur Bor Motabena	Sumur bor	NA	Ds.Silawan

Sumber: PDAM Kabupaten Belu, 2021

Wilayah Kabupaten Belu memiliki sumber mata air yang tersebar di 11 wilayah kecamatan dari total 12 kecamatan. Secara kuantitas, potensi air baku dari sumber mata air berkisar antara 0.5 liter per detik sampai dengan 250 liter per detik. Secara



kualitas sebagian besar sumber air yang ada cukup baik apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagian besar sumber mata air akan mengalami penurunan (defisit) jumlah debit pada saat musim kemarau di Agustus, September, Oktober dan November.

Berikut ini tabel kelompok sumber mata air yang belum dimanfaatkan (belum ada jaringan atau pelayanan) secara optimal, sehingga berpotensi untuk dikembangkan guna menambah pemenuhan kebutuhan air baku penduduk Kabupaten Belu.

**Tabel 2.6**  
**Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu Tahun 2021**

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
1	Tasifeto Timur	Dafala	1	We Totan	3	Pamsimas 2018 dan ADD 2019
			2	We Fulan	2	
		Halimodok	3	Salulun	0,3	DAU 2016 dan 2017, DAK Penugasan 2018, ADD 2018
			4	Wekabaan	3	
			5	Webora	-	Pamsimas 2020
			6	Lasaka	-	
			7	Wetoi	-	
			8	Welaksai	-	
		Fatuba'a	9	We Aisiba	-	Pembangunan di Taeksoruk 2016 (DAU)
			10	Mata air		ADD 2018 dan 2019
		Manleten	11	We has	2	DAK 2021
			12	Wedomu	2	
			13	Bendung Haekrit	30	
			14	Sumur Bor 1 Dsn Lamasi		Dana APBD Provinsi
		Silawan	15	Sumur Bor Motabenar	3	
			16	Sumur Bor Waskita/Silawan 1	3	



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air	Debit (L/det)	Keterangan	
			17	Sumur Bor Silawan 2	5	
			18	SMA Webenahi / Wekiar	1,8	
		Sadi	19	Sumur Bor Sadi	1,2	
			20	Biapuruk	1	Pamsimas 2017, ADD 2018 & 2020
		Sarabau	21	Lebun		dibangun Pamsimas 2017
		Tulakadi	22	Sumur Bor 1	2,85	Aset Desa
		Bauho	23	We Oi	< 1	
		Umaklaran	24	Sumur Bor Umaklaran	1,8	
			25	We utu	12,5	
			26	Bendung Sirani	-	
			27	SMA Bea Klitin	-	Pamsimas 2021
		Tialai	28	We Abat Kiik	-	Pamsimas 2018
2	Tasifeto Barat	Naekasa	29	SB 1	1,01	Dsn Nela
			30	SB 2	1,52	Dsn Nela
			31	SB 3	2,03	Dsn Batumera A
			32	SB 4	2,03	Dsn Naresa/Badan Geologi
			33	SB 5	1,5	Seminari Lalian
			34	SB 6	1,4	Seminari Lalian
			35	SB 7	3,3	Kompleks Keuskupan
			36	Wekabu	5,67	
			37	Oetfo	-	
			38	Kruitaman	-	DAU 2015 dan 2016
		Tukuneno	39	Sumur Bor 1	-	BWS NTT II (kondisi baik)
			40	Sumur Bor 2	-	Dusun Tala B



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			41	Sumur Bor 3	-	SMAN 2 Kab. Belu
			42	SMA Wenaka & We ebun	-	DAU 2016, Pamsimas 2018
		Bakustulama	43	Sumur Gali	-	PUPR 2019
			44	Mata air	-	Pamsimas 2014
		Derokfaturene	45	Rotiren	-	PUPR 2014
			46	Derokfaturene	-	PUPR 2018
			47	Lebun	6,9	
			48	We Hedanfehan	>1	
			49	Tulatidik	1	
		Lookeu	50	Mata air	-	Pamsimas 2021
			51	We Likis	11,58	
			52	Builara	-	
		Rinbesi hat	53	seo A	2	
			54	Seo B	1	
		Naitimu	55	SMA	-	Pamsimas 2020
			56	Sumur Bor 1	-	Halilulik
			57	SB 2	-	Halilulik / Dsn Haliseri
			58	SB	-	Halilulik
			59	Mata air	-	PUPR 2017
		Lawalutolus	60	Wekfau	-	PUPR 2015
			61	Mata air	-	Pamsimas 2020 (Rehab HU)
3	Raimanuk	Renrua	62	We Abad	-	PUPR 2021
			63	Mata air	-	Pamsimas 2020
		Raimanus	64	SMA Mauasu	< 1	Pamsimas 2017
		Faturika	65	We Hanetan	> 2	Pamsimas 2019
			66	Wekanukur	> 2	
		Mandeu	67	Sumur Bor 1	2,77	Distamben 2016
			68	Sumur Bor 2	2,5	Distamben 2016 (Motamauk)



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			69	Sumur Bor 3	1,04	PUPR 2018 (Dsn Anao Loro B)
			70	Mata air	-	Pamsimas 2014
		Teun	71	Oehonis	-	Pamsimas 2020
			72	Botinaiku	5,96	PUPR 2015
			73	Abatbuti 1	28,47	
			74	Abatbuti 2	1,5	
			75	Abatbuti 3	0,5	
		Rafae	76	Wenanan	-	Pamsimas 2020
			77	Sumur Bor 1	-	PUPR 2017 (Dsn Obor)
			78	Mata air	-	DAK Reguler 2018
		Tasain	79	Mata air	-	Pamsimas 2019
		Leontolu	80	Sumur Belakang Kantor Desa	-	Pamsimas 2018
4	Nanaet Duabesi	Nanaet	81	Borakwer	-	Pamsimas 2021
			82	Sumur Bor 1	0,15	PUPR 2021
		Dubesi	83	We Uas	0,5	PUPR 2021
			84	We Bot	1	
			85	Tubaki	2	
		Fohoeka	86	We hedan	< 1	
		Nanaenoe	87	We Dare	2,2	
			88	We Buimesak	< 1	
			89	Hutan Kopi	3	
5	Kakuluk Mesak	Fatuketi	90	Bendungan Rotiklot	-	Rencana Kerja Thn 2022
			91	Mata air	-	Pamsimas 2021(Sumur Kantor Desa)
			92	Mata air	-	PUPR 2012 (Lok.Ainiba)
		Leosama	93	Sumur Bor 1	1,6	Ds. Leosama 2019 (Dsn. Fatuatis)
			94	Sumur Bor 2	1,1	PUPR 2016 ( Dsn Halimea)



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
			95	Sumur Bor 3	1,1	Ds. Leosama 2019 (Dsn. Takantade)
			96	Hatfoho	-	Pamsimas 2018
		Dualaus	97	Sumur Bor 1	2,7	Sdh peningkatan hingga 40 SR (Dsn. Berluli)
			98	Sumur Bor 2	5	Kementerian PUPR 2017(Dsn. Wekiar)
			99	Sumur Bor 3	7	Kementerian PUPR 2017 (Dsn Lakartairai)
			100	Sumur Bor 4	2	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. Lakafehan)
		Jenilu	101	Sumur Bor 1	3,33	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. Abat)
		Kenebibi	102	Loo Weain	-	Pamsimas 2015
			103	Sumur Bor 1	3,5	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. We inggris)
			104	Sumur Bor 2	3,5	Kementerian PUPR 2017 (Dsn Talilaran)
		Kabuna	105	We Hor	-	Pamsimas 2020
			106	Sumur Bor 1	2,6	SSB Bintang Timur 2017
			107	Sumur Bor 2	-	Distamben Belu 2016 (Haliwen)
			108	Sumur Bor 3	-	BWS NTT II ( Haliwen )
6	Atambua Barat	Tulamalae	109	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019
			110	Sumur Bor 2	-	PUPR Belu 2018
		Umanen	111	SMA Tuntuni	-	
7	Atambua Selatan	Fatukbot	112	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019
			113	Sumur Bor 2	-	Badan Geologi 2020
			114	Sumur Bor 3	-	Badan Geologi 2021
			115	Tirta A	7	
			116	Tirta C	5	
		Lidak	117	Sumur Bor 1	2,7	kantor Lurah Lidak



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
8	Kota Atambua	Manumutin	118	Sumur Bor 1	-	PUPR Belu 2017 (Raimaten/Kondisi rusak )
		Tenukiik	119	Sumur Bor 1	2,7	PUPR Belu 2018 (Kodim/ Pompa Rusak)
			120	Sumur Bor 2	-	PUPR Belu 2020 (Kodim)
		Kota	121	Sumur Bor 1	2,08	PUPR Belu 2017 (DPRD)
9	Lasiolat	Lasiolat	122	Fohowai	1	
			123	We Fia	7,8	
			124	Fafakur	1	
		Maneikun	125	We Subaer	2	Pamsimas 2019
			126	We Tunamutin	-	PUPR Belu 2015
		Lakanmau	127	We Matanwai	-	Pamsimas 2018 / PUPR 2016
		Fatulotu	128	Tunamuti	4,42	
			129	Abatmatan	2,8	
			130	We Au	3,06	
		Baudaok	131	We Tihu	13	
			132	We Maruut	2	
			133	We Kaen	2	
		Dualasi Raiulun	134	Siata	28,57	
10	Raihat	Asumanu	135	Asumanu 1	2	
			136	Asumanu 2	> 1	
			137	We hitas	> 1	
			138	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019 / Debit Kurang
		Tohe	139	We Sanis	17,26	
			140	Wee Bot 1	144,9	
			141	We Bot 2		
			142	We Kiik	0,74	
		Maumutin	143	We Saseik	1,08	
			144	Maumuku	0,12	
			145	We Sakis	1,2	



No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
		Raifatus	146	Beabot	0,3	
			147	Wetear	-	
		Aitoun	148	Rusan	53,7	
11	Lamaknen	Dirun	149	Lesuama	0,35	
			150	Selle	-	
			151	Ewigelon	0,5	
			152	Berewen	0,8	
			153	Mauhalek	99,5	
			154	Sumur Bor 1	2	Badan Geologi 2019
		Maudemu	155	Mata Air	> 1	
		Leowalu	156	Holtojo	-	Pamsimas 2021
		Fulur	157	Beiseran	-	Pamsimas 2021
		Kewar	158	Wesei	-	
		Lamaksenulu	159	Manuaben	-	
		Makir	160	Weabat Teu	-	pamsimas 2014
		Duarato	161	Halutu	-	
12	Lamaknen Selatan	Lakmaras	162	il Gubul	1,94	
			163	Lano	-	Pamsimas 2017
		Lutharato	164	Bontil	0,02	
			165	Giraitul	2,72	
			166	Foholulik	> 1	
			167	Amahale	-	Pamsimas 2019
		Nualain	168	Koban	-	Pamsimas 2018
		Debululik	169	Mata air	> 1	
		Ekin	170	Sumur Belakang Kantor desa	-	
		Looluna	171	SMA Wemauat	> 1	
		Henes	172	SMA Asahale	-	
		Sisi Fatuberal	173	Mata Air	-	Pamsimas 2015

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021





### 3. Embung dan Bendungan

Selain sungai dan mata air, potensi sumber air baku di Kabupaten Belu yaitu berupa tampungan air. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi dan kebutuhan bagi ternak maupun usaha pertanian tanaman hortikultura (sayuran).

Potensi tampungan air baku di Kabupaten Belu adalah embung dan bendungan. Embung atau biasa disebut cekungan penampung adalah cekungan yang dalam disuatu daerah perbukitan. Air yang berada di dalam cekungan tersebut adalah limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan dan berguna untuk meningkatkan kualitas air di badan terkait dan menjaga kualitas air tanah. Berikut ini adalah uraian nama, lokasi dan perkiraan debit embung dan bendungan di Kabupaten Belu.

**Tabel 2.7**  
**Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama Embung /Bendungan	Kondisi
1	Tasifeto Timur	Desa Manleten	Embung Haekrit	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
		Desa Dafala	Embung Sirani	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
2	Kakuluk Mesak	Desa Fatuketi	Bendungan Rotiklot	Kualitas air buruk, perlu dilakukan pengolahan Sebelum dikonsumsi

Sumber: Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu, 2021

#### a. Embung Sirani

Embung Sirani terletak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur. Embung ini dibangun pada Tahun 2002 sampai 2006 dengan sumber dana dari APBN. Adapun data teknis dari Embung Sirani adalah sebagai berikut:

- a) Luas DAS : 230 Ha



- b) Panjang Tanggul: 220 m
- c) Tinggi Tanggul : 16,5 m
- d) Tampung Kotor : 2.396.000 m<sup>3</sup>

Kapasitas debit terpasang Embung Sirani ±20 liter/detik, namun saat ini sumber air baku dari embung tersebut belum dapat dimanfaatkan karena airnya tidak layak digunakan sebagai air baku sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu penyebabnya karena sedimen di dalam embung terlalu tebal dan IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Sirani tidak dioperasikan akibat biaya pengoperasian unit instalasi pengolahan air yang mahal sehingga jaringan eksisting yang ada dialihkan ke Mata Air Wae Utu.

b. Embung Haekrit

Embung Irigasi Haekrit adalah embung irigasi yang terdapat di Kabupaten Belu yang dibangun pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 dengan sumber dana LOAN IP-509. Embung Haekrit berada di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Luas DAS Embung Haekrit sebesar 29,4 km<sup>2</sup> dengan tata guna lahan di daerah aliran sungai pada umumnya berupa hutan ringan dan semak belukar. Pada saat ini sumber air baku dari Embung Haekrit yang digunakan oleh PDAM memiliki kapasitas debit terpasang sebanyak 30 liter/detik dan belum dimanfaatkan sama sekali, sehingga debit tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

c. Bendungan Rotiklot

Bendungan Rotiklot berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan salah satu kecamatan perbatasan RI-RDTL. Saat ini bendungan Rotiklot belum dapat dilakukan pengukuran debit produksi sumber air baku, disebabkan karena bendungan ini masih dalam tahap



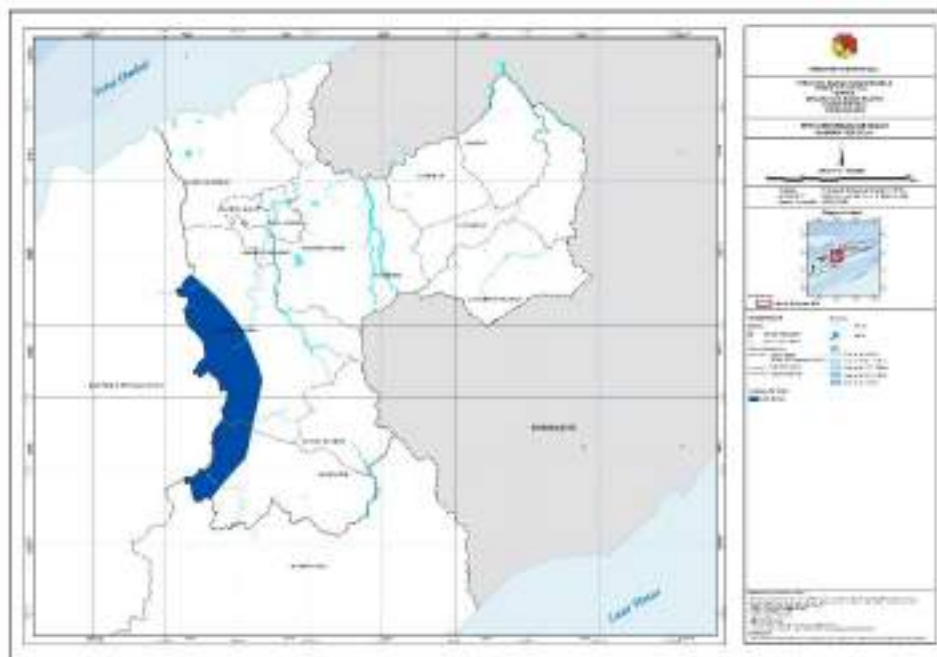
pengisian. Kapasitas debit sumber air baku bendungan ini juga diprediksi memiliki debit yang cukup besar karena bendungan tersebut memiliki volume sebesar 2,79 juta m<sup>3</sup> sehingga berpotensi sebagai sumber air baku.

## B. Air Tanah

Air tanah merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi dari sumber daya air di daerah aliran sungai. Air tanah mengalir lambat dan kapasitas keseluruhannya ditentukan oleh kondisi geologi, morfologi dan kondisi hidrogeologi setempat.

Potensi air tanah di wilayah Kabupaten Belu adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat di wilayah Kabupaten Belu. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air pada sumur-sumur yang digali merupakan cerminan kedalaman air tanah pada suatu tempat. Sebaran potensi sumber air tanah (*ground water basin*) di wilayah Kabupaten Belu memiliki satu Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Aeroiki.

**Gambar 2.5**  
**Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu**



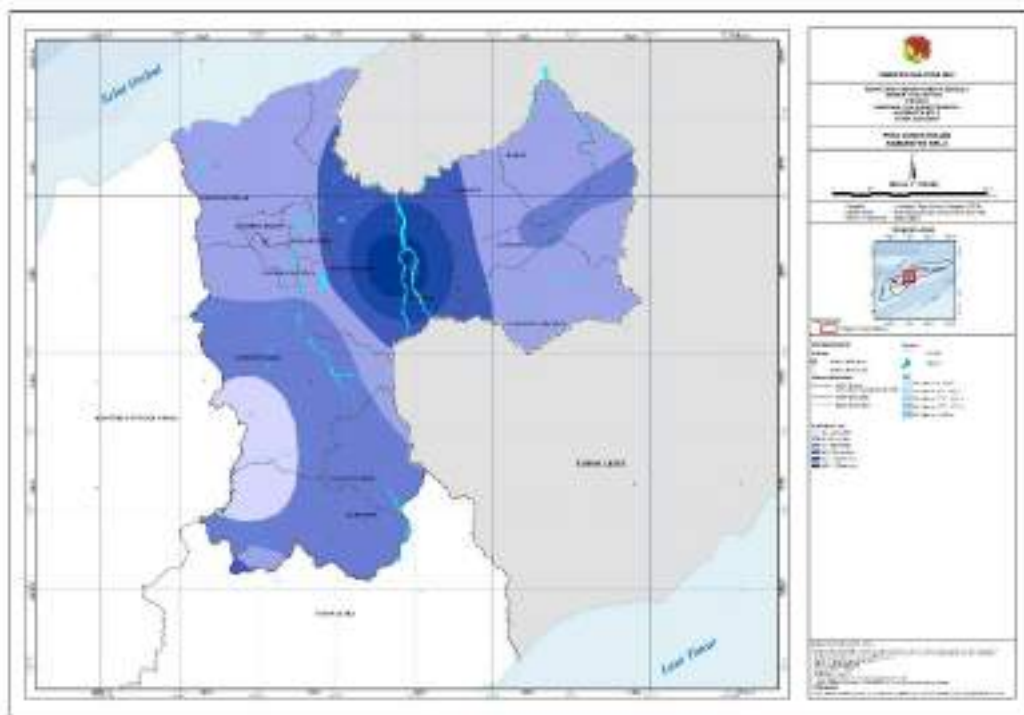
Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040



### 2.1.1.6 Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim hujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6°C dengan interval suhu 21,5-33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk. Rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Belu secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.6.

**Gambar 2.6**  
**Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu**



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### 2.1.1.7 Hidro-Oseanografi

Hidro-oseanografi menggambarkan tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut yang meliputi gelombang laut, pasang surut dan arus laut.

- a. Gelombang:** Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76%) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1-0,2 m dengan besaran gelombang signifikan ( $H_s$ ) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30-0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.
- b. Pasang Surut:** Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode *least square* diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi  $\pm 3,95$  m *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL) = + 1,89 m.
- c. Arus Laut:** Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara Kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik dimana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir Digitasi Peta Lingkungan Laut NTT, 2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang



dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batu karang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = -0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat mengerosi lahan darat (Hasil Elaborasi dengan Distrik Navigasi Kelas II-Kupang, 2016). Kondisi Hidro-oceanografi ini dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir yang ada di wilayah Kabupaten Belu.

#### **2.1.1.8 Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menuntut adanya permintaan jumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pemukiman maupun fasilitas perdagangan lainnya. Penggunaan lahan ini mengindikasikan bahwa penambahan penggunaan lahan di salah satu sektor akan diikuti dengan pengurangan jenis lahan di sektor lainnya karena tidak adanya konsistensi implementasi rencana tata ruang wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan berkaitan dengan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Adapun uraian penggunaan lahan di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu**

<b>No</b>	<b>Jenis Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten ( % )</b>
1	Air Danau/Situ	1,37	0.12
2	Air Rawa	0,24	0.02
3	Air Tawar Sungai	19,21	1.71
4	Bandara	0,31	0.03
5	Hutan Rawa	2,85	0.25
6	Hutan Rimba	13,00	1.16



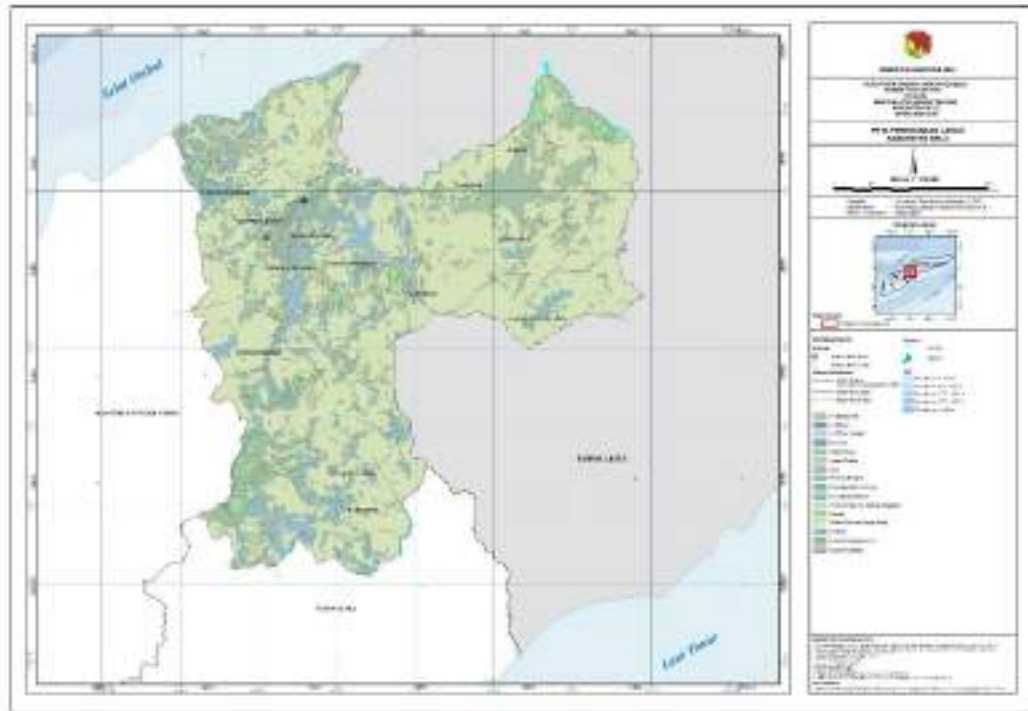
<b>No</b>	<b>Jenis Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten ( % )</b>
7	Laut	0,09	0.01
8	Padang Rumput	88,39	7.86
9	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,13	0.01
10	Perkebunan/Kebun	45,80	4.07
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	39,54	3.51
12	Sawah	40,96	3.64
13	Semak Belukar/Alang-alang	727,70	64.68
14	Tambak	1,15	0.10
15	Tanah Kosong/Gundul	0,79	0.07
16	Tegalan/Ladang	143,62	12.76
TOTAL		1125,14	100,00

*Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040*

Berdasarkan data penggunaan lahan di atas, jenis penggunaan lahan di Kabupaten Belu yang memiliki luasan paling besar adalah semak belukar/alang-alang, dengan persentase 64,68% diikuti dengan jenis penggunaan tegalan/ladang dengan persentase luasan 12,76%. Sesuai dengan analisis kesesuaian lahan, sebagian jenis penggunaan lahan semak belukar/alang-alang dan tegalan/ladang dapat dimanfaatkan sebagai lahan potensial pengembangan pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Penyebaran penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Belu dapat dilihat pada Gambar 2.7.



**Gambar 2.7**  
**Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu**



*Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040*

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Belu. Hal ini merupakan potensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Belu yang dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

Rencana pola ruang Kabupaten Belu telah dibagi menjadi: kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

#### **2.1.2.1 Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung di Kabupaten Belu dapat dilihat pada





tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9**  
**Kawasan Lindung di Kabupaten Belu**

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Hutan Lindung		
	• Tukubesi	272	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak
	• Bifemnasi-Sonmahole	8.536	Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan
	• Lakaan Mandeu	21.712	Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan
	• Lakaan	3.144	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen
	• Fatukaduak	1.700	Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur
	• Fatusakar	9	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
2.	Kawasan Resapan Air	36.335	Terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi
3.	Kawasan Sempadan Pantai.	197	Sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur
4.	Kawasan Sempadan Sungai	2.255	Sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau
5.	Kawasan Sekitar Bendungan	80	Sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan
6.	Kawasan Ekosistem Mangrove	52	Hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040



Selain kawasan yang disebutkan diatas, kawasan lindung juga meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, kawasan lindung geologi dan kawasan cagar budaya. Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan Atambua sebesar 433.86 Ha atau 11,27% dari luas wilayah perkotaan Atambua.

#### **2.1.2.2 Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:
  - a. Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 653 Ha;
  - b. Kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas
    - 1) Kawasan produksi tetap Halilulik terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 604 Ha;
    - 2) Kawasan produksi tetap Wemata terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 203 Ha;
    - 3) Kawasan produksi tetap Udukama terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 155 Ha;
2. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:
  - a. Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 Ha atau 3,42% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kawasan tanaman pangan ini ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
  - b. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 58.198 Ha atau 51,73% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas hortikultura meliputi alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar,



jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung dan kangkung.

- c. Kawasan Perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 2.892 Ha atau 2,57% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas perkebunan meliputi kemiri, kelapa, kopi, jambu mete, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain sesuai potensi wilayah.
- d. Kawasan Peternakan meliputi:
  - 1) Kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Teun dan Desa Tasain
  - 2) Kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Desa Duakoran dan Desa Faturika, Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe dan Kecamatan Tasifeto barat meliputi Desa Lawalutolus.
  - 3) Kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Desa Derokfaturene dan Desa Naekasa.
  - 4) Kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Desa Sarabau, Desa Bauho, Desa Umaklaran dan Desa Manleten.
  - 5) Kawasan usaha peternakan Makun Kawasan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus.
  - 6) Kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Loonuna, Desa Lutarato, Desa Henes dan Desa Debululik.



3. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi:
- a. Kawasan perikanan tangkap di laut meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dan kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak dengan luas kurang lebih 218 Ha;
  - b. Kawasan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat dengan luas kurang lebih 1.624 Ha. Kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng berada di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas kurang lebih 111 Ha;
  - c. Kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
  - d. Sarana penunjang perikanan terdiri atas:
    - 1) Pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
    - 2) Tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.
4. Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi:
- a. Kawasan pertambangan mineral logam meliputi potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan;



- b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat; dan
  - c. Kawasan pertambangan batuan meliputi:
    - 1) Potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
    - 2) Potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;
    - 3) Potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk;
    - 4) Potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
    - 5) Potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.
5. Kawasan Peruntukan Industri meliputi rencana kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas kurang lebih 80 Ha.
- Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
- a. Sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
  - b. Sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;



- c. Sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu;
  - d. Sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Loonuna Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;
  - e. Sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - f. Sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gawang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, meliputi:
- a. Panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;
  - b. Panorama gunung Lakaan, Fulan Fehan dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen;
  - c. Sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Tohe Leten di Kecamatan Raihat;
  - d. Pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih, Berluli dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - e. Pantai Motaain (perbatasan RI –RDTL) di Kecamatan Tasifeto Timur;
  - f. Pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;
  - g. Gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Bobotok/Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat;
  - h. Air Terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;
  - i. Rumah Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;
  - j. Rumah Adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua;



- k. Rumah Adat Loe Gatal dan Holhara Ranu Hitu di Kecamatan Lamaknen;
- l. Rumah Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
- m. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;
- n. Embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
- o. Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- p. Gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- q. Patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- r. Kolam Renang Tirta Kencana di Kecamatan Atambua Selatan; dan
- s. Kolam Renang We Bot di Kecamatan Raihat.

#### 7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibu kota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935 Ha dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 Ha.

#### 8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

- a. Kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;
- b. Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
- c. Batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;
- d. Markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat;
- e. Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;
- f. Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat;



- g. Pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan RI - RDTL; dan
- h. Pos Angkatan Laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

#### 9. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi yaitu Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua dengan luas kurang lebih 59 Ha.

**Gambar 2.8**  
**Peta Pola Ruang Kabupaten Belu**



*Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040*

#### 2.1.2.3 Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas pengembangan

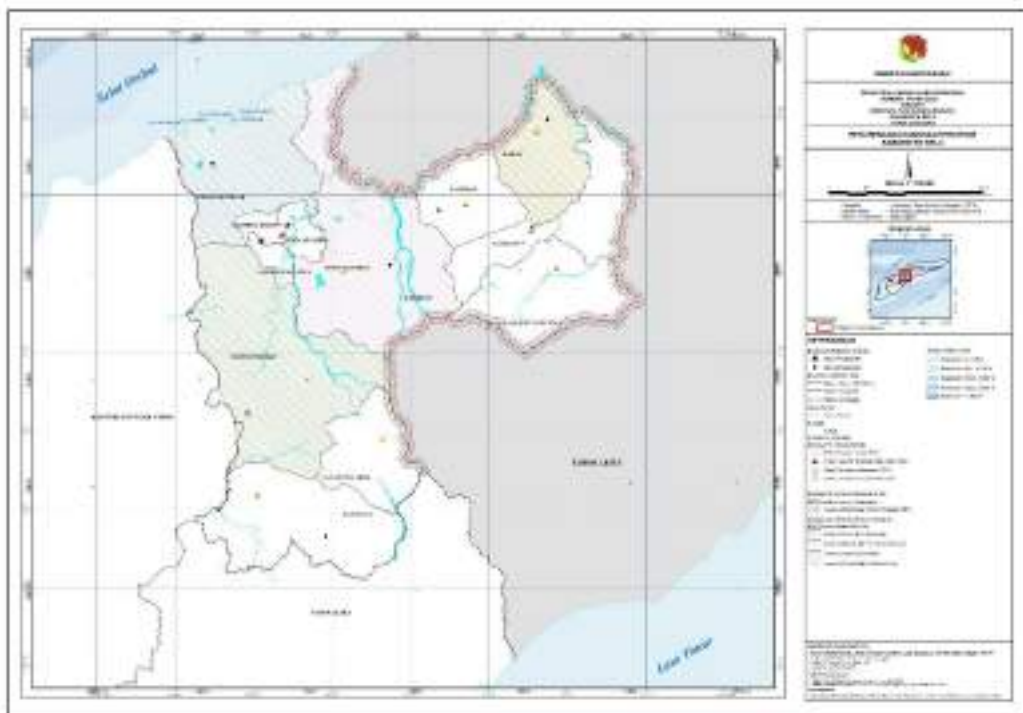




wilayah di Kabupaten Belu. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
2. Kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
3. Kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
4. Kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

**Gambar 2.9**  
**Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu**



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena berada pada pesisir, dataran dan perbukitan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan



data dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil kajian risiko bencana yang dapat mengancam Kabupaten Belu adalah banjir, tsunami, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem, abrasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jenis-jenis ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk bencana yang disebabkan oleh:

1. Aspek geologi meliputi: gempa bumi, tsunami dan tanah longsor;
2. Aspek hidrometeorologi meliputi banjir, cuaca ekstrem (angin puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan; dan
3. Aspek biologi meliputi epidemi dan wabah penyakit.

Uraian secara rinci sebaran kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini.

**Tabel 2.10**

**Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Belu**

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR	Lamaknen	Dirun, Lamaksanulu, Leowalu, Fulur
		Tasifeto Timur	Bauho, Takirin, Halimodok, Sarabau, Sadi, Umaklaran, Manleten
		Raihat	Tohe, Maumutin, Asumanu
		Tasifeto Barat	Naitimu, Lawalutolus, Rinbesihat, Naekasa
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Leosama, Jenilu, Kenebibi, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Fatubena, O, Tenukiik, Manumutin
		Raimanuk	Teun, Tasain, Leuntolu, Rafae, Renrua
		Lasiolat	Lasiolat
		Lamaknen Selatan	Nualain, Lutarato, Lakmaras, Kewar



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Fatukbot, Rinbesi
		Nanaet Duabesi	Nanaenoe
2	KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Looku, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafe, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
			Nanaenoe
3	KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Kenebibi, Leosama, Jenilu
		Tasifeto Timur	Silawan
4	KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umakalaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutolus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubenaok, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafe, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamalaek, Beirafu



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe
5	KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Takirin, Fatubaa, Dafala, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua Duakoran, Mandeu, Rafe, Faturika, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamala, Beirafu
		Atambua	Manuaman, Rinbesi, Lidak,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Selatan	Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu Kenebibi
		TasifetoTimur	Silawan

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, 2021*

Untuk bencana yang disebabkan oleh aspek biologis yang meliputi epidemi dan wabah penyakit terjadi pada waktu tertentu dengan tingkat penyebaran di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Jenis wabah penyakit yang ada meliputi malaria, demam berdarah dan HIV-AIDS.

Banyaknya jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Belu, menuntut adanya penanganan bencana yang sistematis, terukur dan terarah. Penanganan bencana ini dilakukan baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sesuai dengan karakteristik Kabupaten Belu. Upaya penanganan bencana penting dilaksanakan antara lain untuk menghindari kerugian daerah, baik individu maupun masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan sedini mungkin (sebelum bencana terjadi) guna meminimalisir kerugian yang berkaitan dengan jiwa, fisik, ekonomi dan lingkungan terpapar bila bencana terjadi. Selain itu juga untuk meminimalisir dampak yang ditanggung oleh individu masyarakat yang terkena bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Belu saat ini telah bergerak mengikuti Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belu akan memasukkan penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Belu. Selain itu, perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam



penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan perencanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu juga diatur tentang sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah:

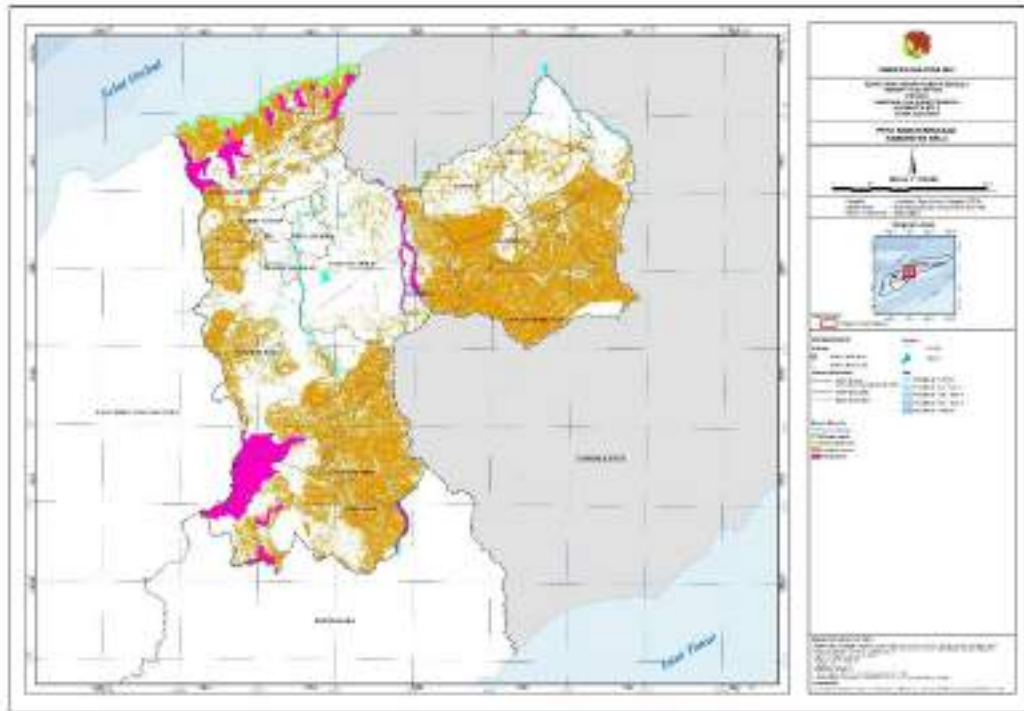
1. Jalur evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Belu menggunakan jalan penghubung utama dari desa-desa ke titik kumpul utama di ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan menggunakan jalan penghubung utama ke titik kumpul paling aman yaitu di Kota Atambua. Adapun jalan utama yang digunakan dari ibukota kecamatan ke Kota Atambua terdiri atas:

- a. Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk dan Nanaet Duabesi menggunakan ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua;
  - b. Kecamatan Kakuluk Mesak menggunakan ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain;
  - c. Sebagian Kecamatan Kakuluk Mesak dan bagian utara Kecamatan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua-Salore-Silawan; dan
  - d. Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat dan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua Weluli.
2. Ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada di luar lokasi bencana berupa sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.



**Gambar 2.10**  
**Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu**



*Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040*

Peta rawan bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, maupun bencana alam lainnya. Berbeda dengan peta rupa bumi pada yang menyajikan informasi topografis dan batas administratif, Peta rawan bencana berupa peta yang menyajikan satu atau sejumlah informasi tematik.

Pembuatan peta rawan bencana merupakan salah satu aspek dari mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Fungsi peta rawan bencana diantaranya adalah untuk menentukan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana. Selain itu peta rawan bencana akan menyediakan berbagai informasi tentang masalah kebencanaan pada satu wilayah sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.





## **2.1.4 Demografi**

### **2.1.4.1 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk**

Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan SDA yang memadai, maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya, bila percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lambat dari percepatan penambahan SDA dan sumber dana yang ada, maka penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan masalah kependudukan sebagai kerangka acuannya, karena penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagai obyek yang menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih adil dan berperikemanusiaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sampai akhir Tahun 2021 sesuai hasil registrasi sebanyak 227.203 jiwa (58.221 KK) yang terdiri dari perempuan 113.181 jiwa (49,81%) dan laki-laki 114.022 jiwa (50,19 %). Data ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,05 %. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3,90 (tiga koma sembilan puluh) orang dan kepadatan penduduk 176,82 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepala keluarga didominasi oleh Laki-laki dengan persentase 78,44 %, sedangkan keluarga yang dikepalai oleh perempuan hanya 21,56 %. Mayoritas keluarga di Kabupaten Belu dikepalai oleh KK yang berumur antara 35-39 Tahun (13,67 %) atau berada pada kategori kelompok produktif.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, di samping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 Kecamatan dengan pola relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada



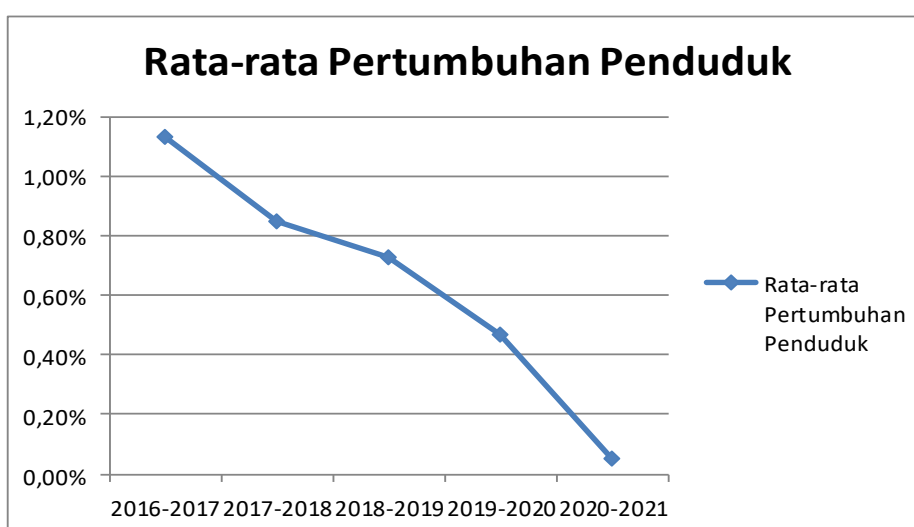
di Kecamatan Kota Atambua yakni sebanyak 31.434 jiwa (13,84 %) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 5.162 jiwa (2,27 %). Sedangkan rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 100,74 artinya di setiap 100 penduduk perempuan ada atau terdapat 100 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.11**  
**Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			KELUARGA (KK)
		LK (jiwa)	PR (jiwa)	LK + PR (jiwa)	
1	LAMAKNEN	652	6,662	13,182	3,459
2	TASIFETO TIMUR	13,599	13,504	27,103	7,216
3	RAIHAT	7,696	758	15,276	3,905
4	TASIFETO BARAT	13,266	13,214	2,648	6,622
5	KAKULUK MESAK	11,405	11,483	22,888	6,247
6	KOTA ATAMBUA	15,677	15,886	31,563	8,152
7	RAIMANUK	9,085	9,148	18,233	4,604
8	LASOLAT	3,849	377	7,619	1,957
9	LAMAKNEN SELATAN	4,621	4,606	9,227	225
10	ATAMBUA BARAT	12,219	11,991	2,421	6,407
11	ATAMBUA SELATAN	13,448	12,975	26,423	6,701
12	NANAET DUABESI	2,511	2,682	5,193	1,303
<b>JUMLAH</b>		<b>113,896</b>	<b>103,286</b>	<b>227,397</b>	<b>56,798</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2021

**Grafik 2.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2021



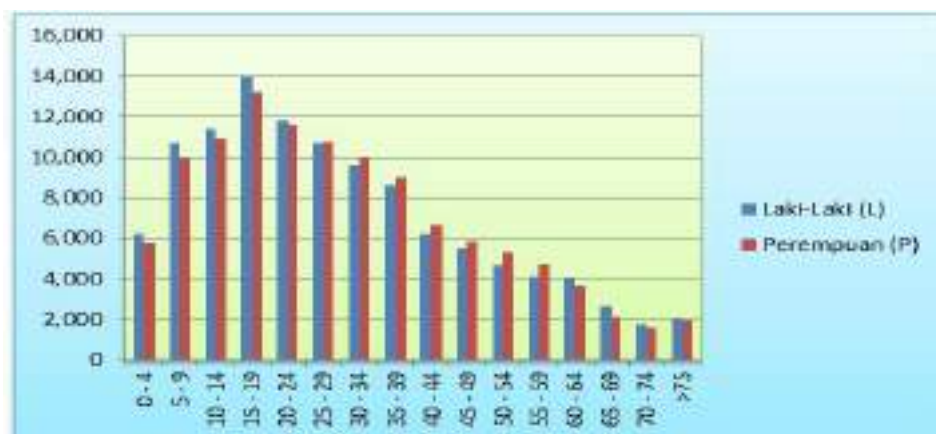
Angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 dengan rata-rata 0,65 %. Tingkat pertumbuhan ini masih dianggap normal karena masih berada di bawah batas toleransi yaitu <2%. Persoalannya walaupun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu masih dikatakan normal tetapi perlu dikendalikan dengan program Keluarga Berencana (KB), pengembangan struktur ruang kota dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja produktif.

#### 2.1.4.2 Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Grafik penduduk berwarna biru menggambarkan banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki dan grafik merah menunjukkan banyaknya penduduk perempuan menurut kelompok umur seperti pada Gambar 2.2 di bawah.

Pada grafik dapat dilihat bahwa penduduk usia muda lebih dominan yaitu usia dari 15-19 Tahun sebesar 11,97 %. Pada dasar dan badan piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi sebesar 24,22%, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua yaitu sebesar 5,40%.

**Grafik 2.2**  
**Grafik Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2021**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu , 2021



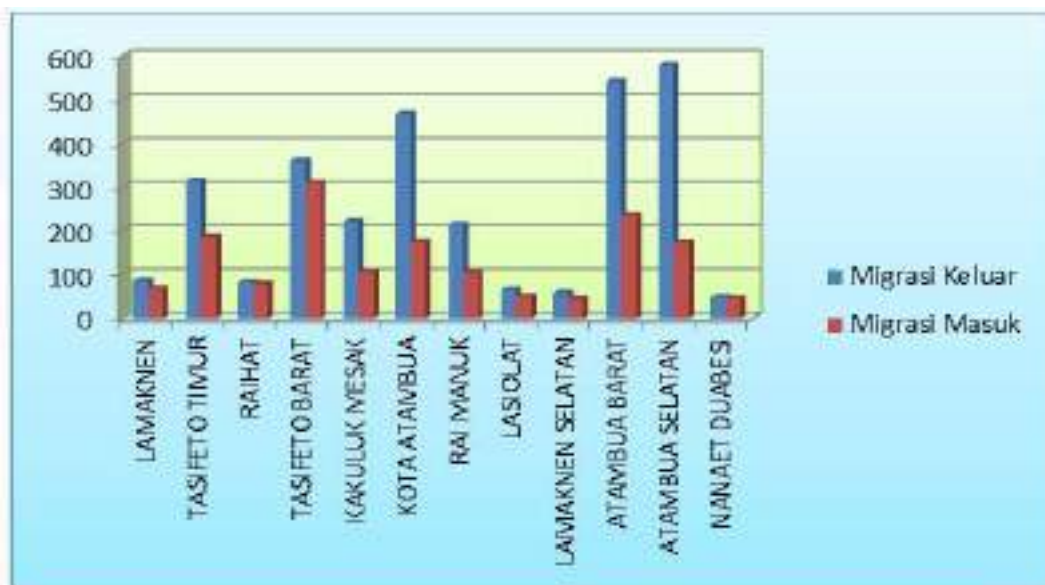
Kondisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat dijelaskan bahwa beban tanggungan masyarakat atau penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Belu cukup tinggi, di mana pada Tahun 2021 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 30 orang (41,87%) penduduk tidak produktif.

### 2.1.4.3 Kelahiran, Kematian, Datang dan Migrasi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu pada tahun 2021 angka kelahiran hidup bayi adalah 4.091 orang dengan jumlah angka kematian penduduk sebesar 695 orang. Angka kematian ini mencerminkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan kurang baik dan langsung mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk. Hal lain dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada penduduk, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di luar rumah.

**Grafik 2.3**

### Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2021



Jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) sebesar 1.583 orang pada Tahun 2021 karena hubungan keluarga ataupun karena urusan bisnis maupun sebagai pelancong untuk kegiatan pariwisata dengan rata-rata lama tinggal antara 1 hari dan selanjutnya akan pergi lagi. Sedangkan migrasi keluar sebanyak 3.043 orang yang lebih dipengaruhi oleh kegiatan melanjutkan sekolah di luar wilayah maupun karena urusan sebagai tenaga kerja di tempat lain.

#### **2.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa persentase tertinggi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Belu Tahun 2021 adalah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 30.56 %. Persentase penduduk pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA sebesar 26.19% dan pada jenjang diploma dan sarjana hanya sebanyak 4.86%.



**Tabel 2.12**  
**Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021**

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK + PR	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Tidak/Belum Sekolah	33,190	29.11	32,050	28.34	65,240	28.73
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9,101	7.98	8,649	7.65	17,750	7.82
3	Tamat SD/Sederajat	37,446	32.84	36,012	31.85	73,458	32.35
4	SLTP/Sederajat	11,343	9.95	12,486	11.04	23,829	10.49
5	SLTA/Sederajat	18,140	15.91	17,850	15.79	35,990	15.85
6	Diploma I/II	296	0.26	523	0.46	819	0.36
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	881	0.77	1,604	1.42	2,485	1.09
8	Diploma IV/Strata I	3,484	3.06	3,833	3.39	7,317	3.22
9	Strata II	135	0.12	67	0.06	202	0.09
10	Strata III	6	0.01	1	0.00	7	0.003
<b>JUMLAH</b>		<b>114,022</b>	<b>100</b>	<b>113,075</b>	<b>100.00</b>	<b>227,097</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2021

#### 2.1.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2021 mayoritas memeluk agama Katolik sebanyak 88,32% sedangkan agama Kristen sebanyak 7,34%, pemeluk agama Islam sebanyak 4,15% dan selebihnya memeluk agama lainnya. Untuk lebih jelas mengenai Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Belu Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Belu Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JLH. PENDUDUK	ISLAM		KRISTEN		KATOLIK		HINDU		BUDHA		KONGHUCU		LAINNYA	
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	LAMAKNEN	13,407	16	0.12	38	0.28	13,353	99.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
2	TASIFETO TIMUR	27,087	640	2.36	709	2.62	25,617	94.57	120	0.44	1	0.00	0	0.00	0	0
3	RAIHAT	15,317	36	0.24	48	0.31	15,233	99.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
4	TASIFETO BARAT	26,490	582	2.20	1,173	4.43	24,720	93.32	10	0.04	5	0.02	0	0.00	0	0
5	KAKULUK MESAK	22,879	732	3.20	1,615	7.06	20,530	89.73	2	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0
6	KOTA ATAMBUA	31,434	1355	4.31	3,126	9.94	26,759	85.13	174	0.55	18	0.06	2	0.01	0	0
7	RAI MANUK	18,124	90	0.50	864	4.77	17,158	94.67	12	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0
8	LASOLAT	7,627	5	0.07	38	0.50	7,583	99.42	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0
9	LAMAKNEN SELATAN	9,186	7	0.08	19	0.21	9,159	99.71	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0
10	ATAMBUA BARAT	24,197	4040	16.70	3,364	13.90	16,724	69.12	57	0.24	11	0.05	1	0.004	0	0
11	ATAMBUA SELATAN	26,293	1954	7.43	5,450	20.73	18,856	71.71	30	0.11	3	0.01	0	0.00	0	0
12	NANAET DUABESI	5,162	1	0.02	14	0.27	5,147	99.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>227,203</b>	<b>9,458</b>	<b>4.16</b>	<b>16,458</b>	<b>7.24</b>	<b>200,839</b>	<b>88.40</b>	<b>407</b>	<b>0.18</b>	<b>38</b>	<b>0.02</b>	<b>3</b>	<b>0.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2021



#### **2.1.4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis**

Dalam konteks pertumbuhan penduduk, Kabupaten Belu telah menyerap penduduk yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya di Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba, Flores dan pulau lainnya di Indonesia yang masuk ke Kabupaten Belu melalui hubungan *family*, kerabat, teman sekampung ataupun faktor pekerjaan dan bisnis-usaha perdagangan. Beberapa suku/etnis yang sekarang menetap di wilayah Kabupaten Belu di antaranya adalah: (1) Etnis Lokal yaitu: Tetun, Dawan R, Kemak, dan Bunak; (2) Etnis Flores seperti: Ende/Lio, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Lembata, Lamaholot, dan Sikka; (3) Etnis Jawa: Sunda, Jawa dan Madura; (4) Etnis Alor; (5) Etnis Bali; (6) Etnis Rote; (7) Etnis Sabu; (8) Etnis Sulawesi seperti: Makasar, Toraja, Bugis, Soping, Wajo, Buton dan Manado; (9) Etnis Dawan L (Atoin Meto): TTU, TTS, Kupang; (10) Etnis Helong; (11) Etnis Timor Leste; (12) Etnis Sumatra: Batak dan Minang; (13) Etnis Ambon; (14) Etnis Tionghoa; (15) Etnis Sumba; (16) Etnis NTB; Bima dan Lombok.

Konsentrasi suku/etnis ini lebih banyak berada di pusat Kota Atambua, sehingga permukiman kota itu tumbuh menjadi kelompok-kelompok permukiman etnis yang semakin lama semakin padat dan melebar serta dengan tingkat homogenitas identitas etnisnya. Akibat dari perkembangan kota dan pertumbuhan permukiman demikian, pada gilirannya dapat memunculkan pola permukiman seagregatif dan pada gilirannya mengakibatkan polarisasi serta segregasi kehidupan permukiman dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti: etnis, strata sosial, okupasi dan juga agama. Segregasi permukiman yang demikian, pada akhirnya membawa dampak pada polarisasi karakteristik budaya atau sub-budaya yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menyimpan potensi konflik antar penduduk.



## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

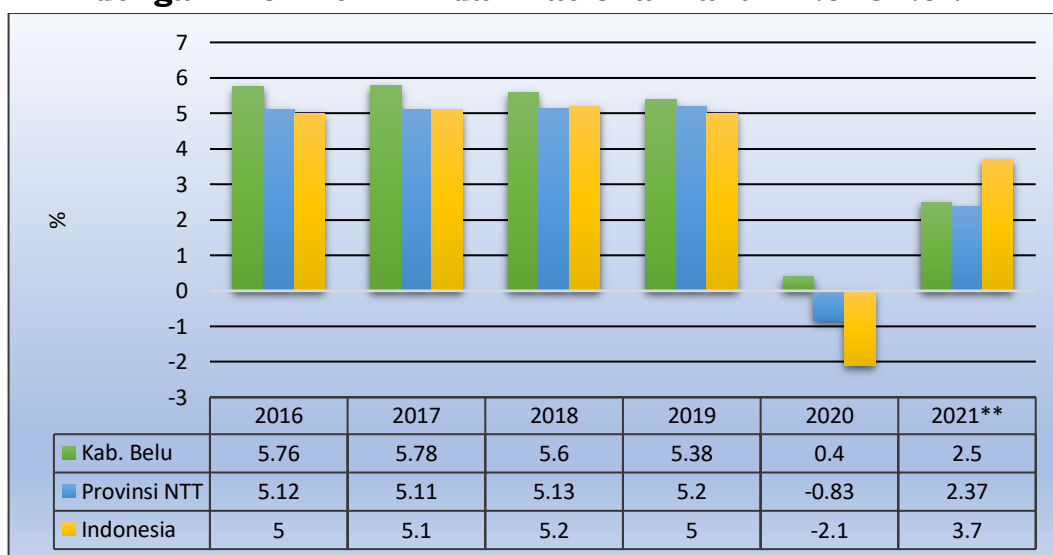
### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

**Grafik 2.4**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021

BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021





Berdasarkan Grafik 2.4 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,75 % dibandingkan Tahun 2020 hanya mencapai 0,4 % atau mengalami peningkatan sebesar 1,35 %. Hal ini didukung dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilakukan pemerintah pusat menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama 2021. Meski demikian, program ini belum mampu membuat semua lapangan usaha dapat pulih sepenuhnya. Pandemi Covid-19 masih berdampak, terutama pada lapangan usaha jasa perusahaan, jasa lainnya, jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

#### **2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2021 berdasarkan ADHb mencapai 4.700.075,4 triliun Rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,95 %; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 15,75 %; dan (3) sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,29 %. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belu. Hal ini didukung oleh lokasi Kabupaten Belu sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada pada jalur perbatasan sebagai pintu masuk Negara RDTL yang menjadikannya strategis untuk melakukan usaha di bidang jasa dan perdagangan.

Selain itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan karena banyak masyarakat Kabupaten Belu yang bekerja pada sektor ini. Kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB dipengaruhi oleh tingginya biaya dan belanja untuk sektor pendidikan



diantaranya variabel lama tahun bersekolah dan peningkatan jumlah populasi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.14.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan hargayang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.15.



**Tabel 2.14**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (*Miliar Rupiah*) di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

Kategori/ <i>Category</i>	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	848.308,7	918.660,1	982.652,1	995.112,6	1.031.732,8
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining &amp; Quarrying</i>	120.522,7	119.044,0	116.220,6	92.327,3	96.026,0
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	41.897,1	45.890,4	49.443,2	49.453,7	50.269,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity &amp; Gas</i>	2.303,0	2.678,1	2.698,3	3.151,9	3.371,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	891,7	968,7	1.025,2	1.088,8	1.217,8
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	323.795,0	358.962,8	397.125,3	382.989,6	408.859,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	499.207,9	552.572,5	608.552,9	627.423,8	671.450,3
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportatio n &amp; Storage</i>	183.264,0	197.245,6	211.182,4	211.680,5	220.267,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>	14.851,5	16.992,4	18.438,3	16.515,5	17.181,9
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information</i>	156.496,3	167.539,6	176.834,5	192.187,0	201.496,4



	<i>&amp;Communication</i>					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	218.316,0	234.080,9	247.200,6	269.207,0	288.468,7
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	97.049,1	103.858,8	104.290,9	103.333,2	104.528,7
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	2.606,2	2.793,9	2.975,7	2.554,6	2.215,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	475.186,3	538.552,6	592.990,0	612.132,7	613.525,3
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	592.487,2	658.402,7	718.148,5	744.565,1	740.178,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	84.131,4	94.185,5	103.410,3	114.444,8	124.288,2
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	123.357,0	134.763,7	149.065,5	133.599,8	124.999,4
	<b>Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>3.784.671,2</b>	<b>4.147.192,4</b>	<b>4.482.254,4</b>	<b>4.551.768,1</b>	<b>4.700.075,4</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara



**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha (*miliar rupiah*) di Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2021**

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i></b>	607.653,5	634.001,2	660.906,8	663.679,3	682.510,9
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i></b>	89.521,2	87.133,4	85.088,1	61.221,4	63.500,6
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i></b>	29.448,9	30.873,6	32.282,3	32.092,9	32.192,5
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i></b>	1.638,0	1.845,9	1.858,1	2.164,0	2.276,3
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i></b>	566,5	608,8	634,8	664,5	730,1
<b>F</b>	<b>Konstruksi/ <i>Construction</i></b>	204.789,1	218.934,3	231.520,4	224.036,8	234.599,0
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i></b>	312.582,1	335.058,6	359.699,8	359.207,8	375.646,8
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i></b>	131.190,5	139.011,4	146.304,8	145.597,9	150.294,3
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i></b>	10.418,5	11.698,0	12.533,3	11.296,5	11.765,3
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i></b>	126.962,5	133.886,7	138.834,7	150.929,0	156.776,5
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i></b>	161.040,9	165.593,3	170.717,7	185.952,6	190.434,8



<b>L</b>	<b>Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i></b>	76.953,6	80.731,6	80.872,4	80.177,7	81.952,3
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i></b>	1.801,4	1.874,2	1.976,6	1.651,6	1.414,4
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i></b>	341.950,9	368.192,5	399.631,1	417.382,1	413.243,2
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan/ <i>Education</i></b>	411.929,6	435.903,7	460.001,8	465.876,9	458.098,2
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i></b>	62.306,8	67.652,7	73.286,8	78.025,9	82.720,2
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i></b>	86.295,1	92.711,6	100.374,7	88.419,0	82.042,3
<b>Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		2.657.049,0	2.805.711,5	2.956.524,1	2.968.375,9	3.020.197,9

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara



**Tabel 2.16**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2017-2021**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu**

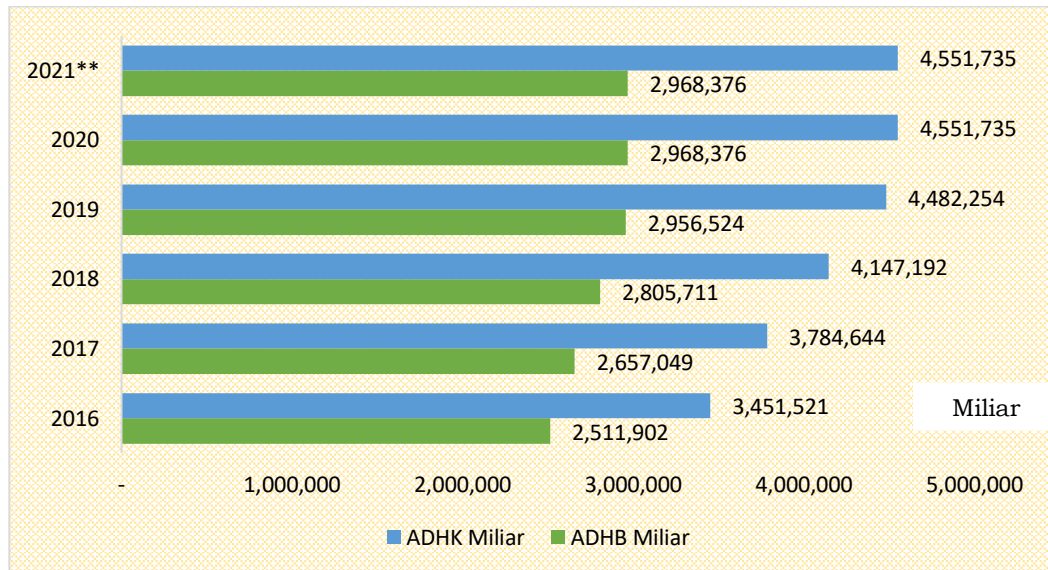
Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017		2018		2019		2020*		2021**	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	22,41	4,87	22,15	4,34	21,92	4,24	21,86	0,42	21,95	2,84
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	3,18	-1,73	2,87	-2,67	2,59	-2,35	2,03	-28,05	2,04	3,72
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,11	6,85	1,11	4,84	1,1	4,56	1,09	-0,59	1,07	0,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	0,06	1,4	0,06	12,7	0,06	0,66	0,07	16,46	0,07	5,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	0,02	2,12	0,02	7,47	0,02	4,27	0,02	4,68	0,03	9,86
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,56	7,28	8,66	6,91	8,86	5,75	8,41	-3,23	8,7	4,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	13,19	4,06	13,32	7,19	13,58	7,35	13,78	-0,14	14,29	4,58
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	4,84	5,78	4,76	5,96	4,71	5,25	4,65	-0,48	4,69	3,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>	0,39	13,84	0,41	12,28	0,41	7,14	0,36	-9,87	0,37	4,15
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	4,14	5,47	4,04	5,45	3,95	3,70	4,22	8,71	4,29	3,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	5,77	6,59	5,64	2,83	5,52	3,09	5,91	8,92	6,14	2,41
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,56	4,87	2,5	4,91	2,33	0,17	2,27	-0,86	2,22	2,21
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,07	2,7	0,07	4,04	0,07	5,46	0,06	-16,44	0,05	-14,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	12,56	7,41	12,99	7,67	13,23	8,54	13,45	4,44	13,05	-0,99
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	15,65	7,67	15,88	5,82	16,02	5,53	16,36	1,28	15,75	-1,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,22	8,16	2,27	8,58	2,31	8,33	2,51	6,47	2,64	6,02
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	3,26	5,18	3,25	7,44	3,33	8,27	2,94	-11,91	2,66	-7,21
<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>		100,00	5,78	100,00	5,60	100,00	5,38	100,00	0,40	100,00	1,75

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2021

Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara



**Grafik 2.5**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB HB) Dan**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara

Dari data grafik diatas menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 mencapai 4.700.075,4 triliun rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) sektor jasa pendidikan (3) sektor perdagangan besar dan eceran, ketiga sektor ini merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian kabupaten Belu. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang diproyeksi tahun 2021 mencapai 3.020.197,9 triliun.

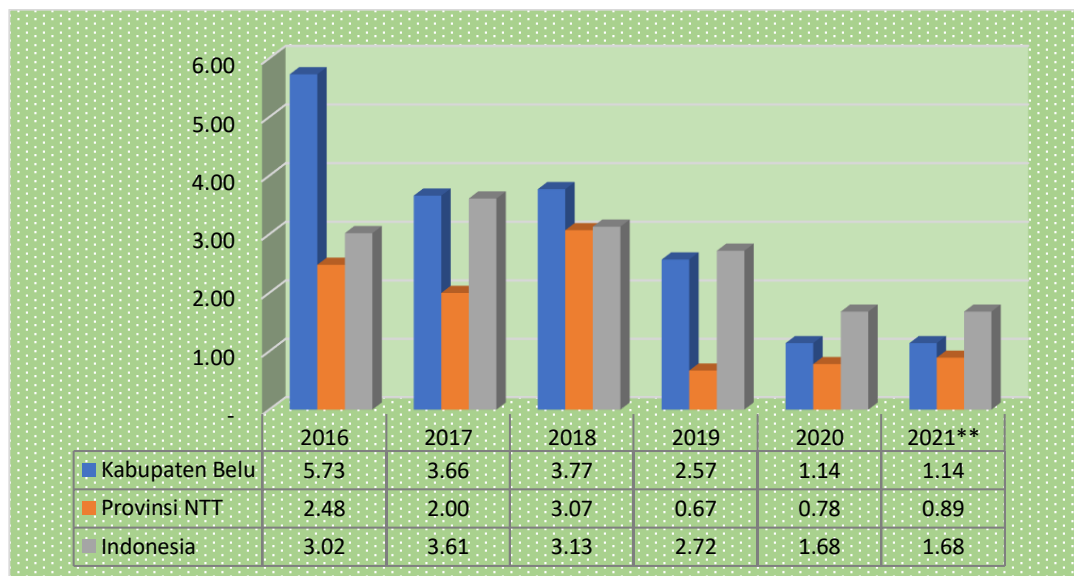


### 2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena tidak merupakan kota inflasi, maka untuk data inflasi Kabupaten Belu dihitung dengan menggunakan pendekatan laju inflasi Kota Kupang, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.6**  
**Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021; BPS, Provinsi NTT, Tabel Indikator Inflasi Menurut Bulan Periode 1983-2020; BPS, Kabupaten Belu Laju Implisit PDRB\*\*

Rata-rata inflasi Kabupaten Belu (1,86%) lebih tinggi dari pada rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (0,89%) dan Nasional (0,56%). Hal ini bahwa meningkatnya kegiatan ekonomi yang diharapkan untuk mampu mendorong peningkatan



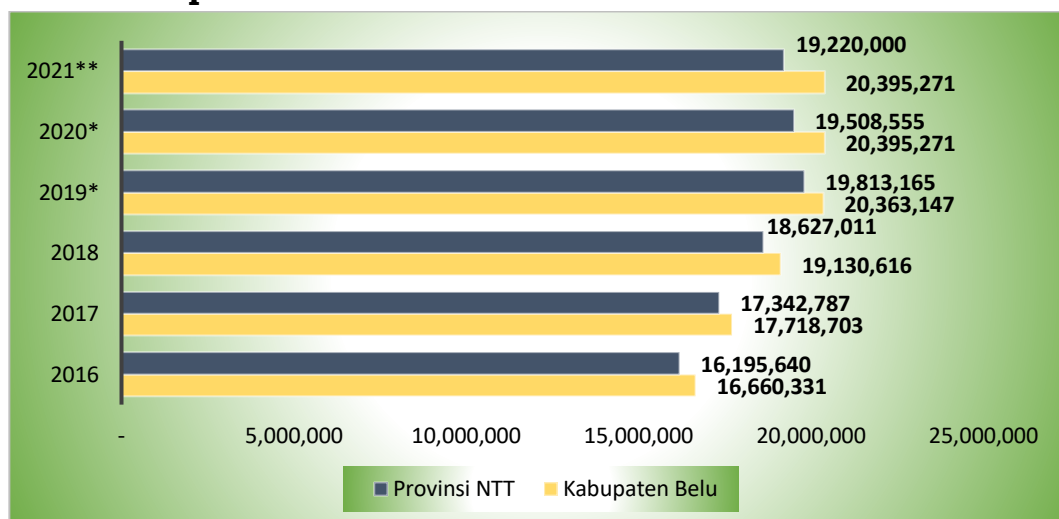
permintaan ternyata tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran, karena adanya kendala struktural perekonomian di wilayah Kabupaten Belu. Menurunnya produksi tanaman pangan menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Kabupaten Belu.

#### **2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita**

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; dengan asumsi bahwa semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita sebuah daerah juga merefleksikan PDRB per kapita. Jika kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal yaitu pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

**Grafik 2.7**  
**Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku**  
**Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021  
 Keterangan : \* data sementara, \*\* data sangat sementara

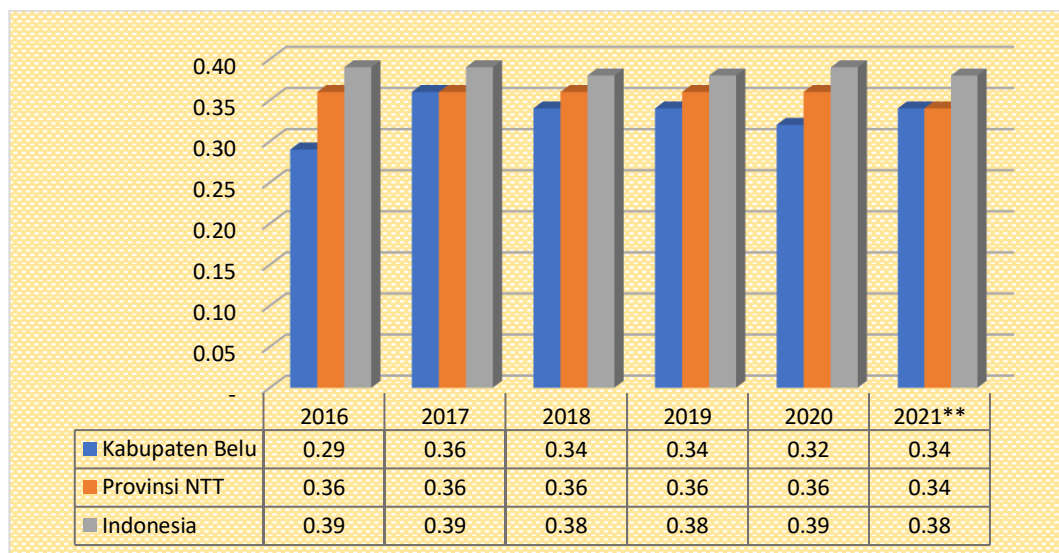
Grafik di atas menggambarkan bahwa dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 PDRB per kapita ADHb Kabupaten Belu menggambarkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 17,71 juta Rupiah pada Tahun 2017 menjadi 21,28 juta Rupiah pada Tahun 2021. Hal ini ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan alternatif teknologi tepat guna maupun dari aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik. PDRB per kapita ADHb dari Tahun 2021 berada di atas angka Provinsi NTT sebesar 18,26 juta.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) kabupaten Belu tahun 2021 diproyeksi berada diatas Provinsi NTT dengan nilai mencapai 21.289.739,2, hal ini karena masih ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna maupun aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik.

### 2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Belu dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif yang menunjukkan adanya fluktuatif pola ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 2.8 di bawah ini. Tahun 2016 sebesar 0,29 kemudian naik pada Tahun 2017 menjadi 0,36 dan mengalami penurunan menjadi 0,36 pada Tahun 2018 serta mengalami penurunan menjadi 0,32 pada Tahun 2020. Capaian Indeks Gini kabupaten Belu ini masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi NTT dan nasional yaitu sebesar 0,32 poin. Pada tahun 2021 capaian Indeks Gini kabupaten Belu sama dengan provinsi NTT, meningkat menjadi 0,34 poin atau meningkat sebesar 0,02 poin. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Belu belum menurun secara baik, tetapi masih berada dalam kategori ketimpangan rendah dan nilai ketimpangan ini sama dengan nilai ketimpangan Provinsi NTT maupun secara nasional.

**Grafik 2.8**  
**Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021**



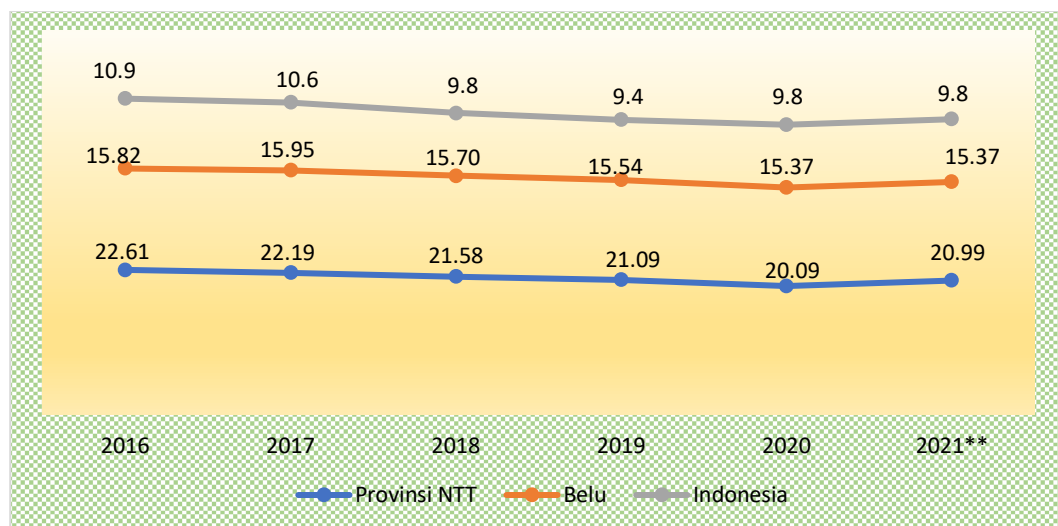
Sumber : BPS, GINI Ratio Indonesia Tahun 2002-2020  
Belu Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021  
Hasil olah data BP4D berdasarkan Pengeluaran rata-rata per kapita Data BPS



### 2.1.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2019-2020 berfluktuasi, tertinggi 15,95% (33,95 ribu jiwa) pada Tahun 2017 dan terendah 15,37% (34,18 ribu jiwa) pada Tahun 2020, dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini.

**Grafik 2.9**  
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021  
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2021 diproyeksi masih sama dengan Tahun 2020 sebesar 15,37% dan masih lebih rendah dari Provinsi NTT, tetapi masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional secara keseluruhan. Hal ini masih harus menjadi perhatian serius yang perlu penanganan secara terintegrasi dari lintas program/kegiatan perangkat daerah.



### **2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan salah satu data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (indikator kesehatan), pengetahuan (indikator pendidikan) dan standar hidup layak (indikator ekonomi). Dimensi umur panjang dan hidup sehat, dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan representasi kualitas kesehatan penduduk, dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang memberikan gambaran kualitas pendidikan penduduk, sedangkan dimensi standar hidup dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.

Pada grafik 2.10 menunjukkan bahwa kinerja sumber daya manusia kabupaten Belu tahun 2021 mengalami peningkatan dari capaian angka ditahun 2020 yaitu sebesar 62,77%. Capaian IPM Kabupaten Belu ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional.

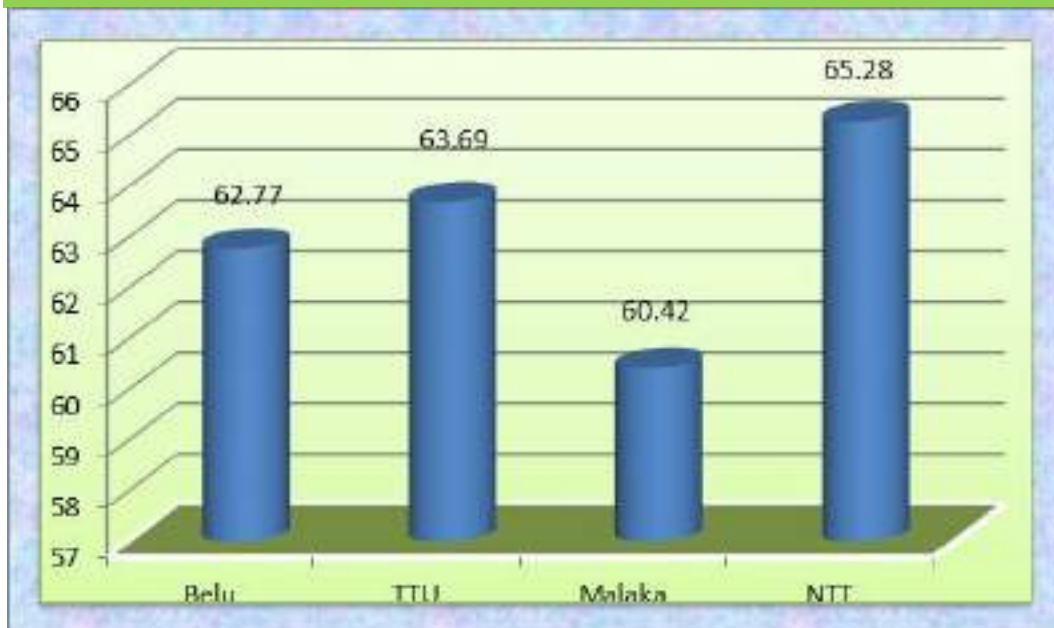
**Grafik 2.10**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten**  
**Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional**  
**Tahun 2016-2021**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun2021

BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021

**Grafik 2.11**  
**Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Malaka, dan Provinsi NTT**  
**Tahun 2021**



*Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021*

Dari Grafik 2.11 terlihat perbandingan capaian komponen IPM Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2021. Capaian Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu lebih rendah dari Kabupaten TTU dan Provinsi NTT, sedang capaian Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Belu lebih tinggi dari Kabupaten TTU dan masih lebih rendah dari Provinsi NTT.

### **2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf yang telah diperbarui dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).

#### **2.1.2.2.1 Pendidikan**

##### **a. Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka melek huruf merupakan tolok ukur capaian kinerja pendidikan dalam skala makro yang didasarkan pada kemampuan membaca dan menulis penduduk yang dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca, sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Belu juga selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 namun masih berada di



bawah rata-rata angka melek huruf Provinsi NTT seperti pada Grafik 2.12 di bawah ini. Terlihat bahwa angka melek huruf Kabupaten Belu pada Tahun 2021 sebesar 93.78 masih lebih rendah dari capaian Provinsi NTT sebesar 97.8% dan Nasional sebesar 98.29%.



Sumber : BPS, Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas menurut Provinsi BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

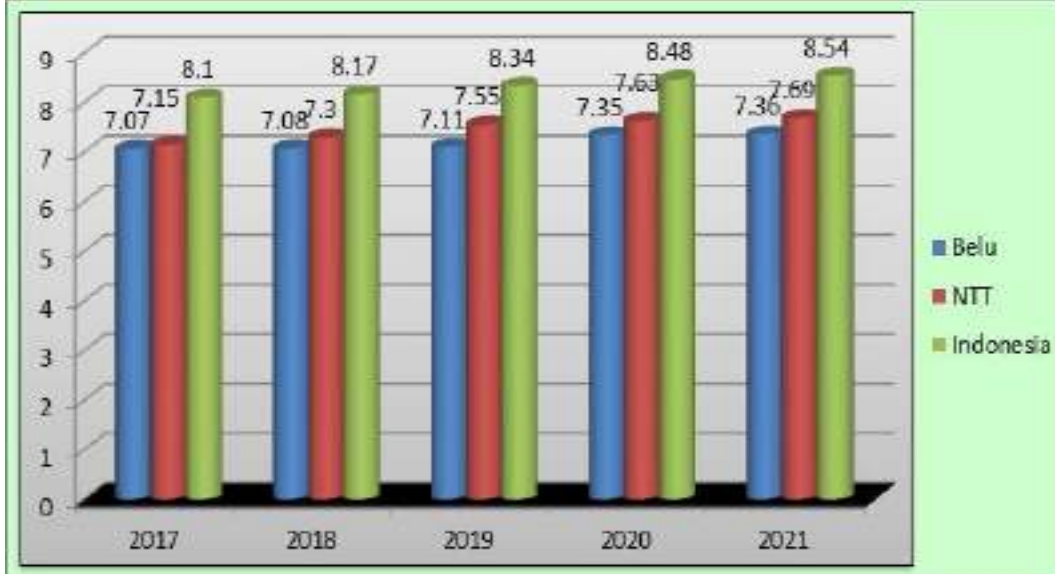
#### **b. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai sejumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan *United Nations Development Program* (UNDP) untuk penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi hanya pada penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 Tahun sebagian besar masih dalam proses sekolah sehingga



belum pantas dijadikan lokus.

**Grafik 2.13**  
**Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS, (Metode Baru) Rata-rata Lama Sekolah Periode 2017-2021

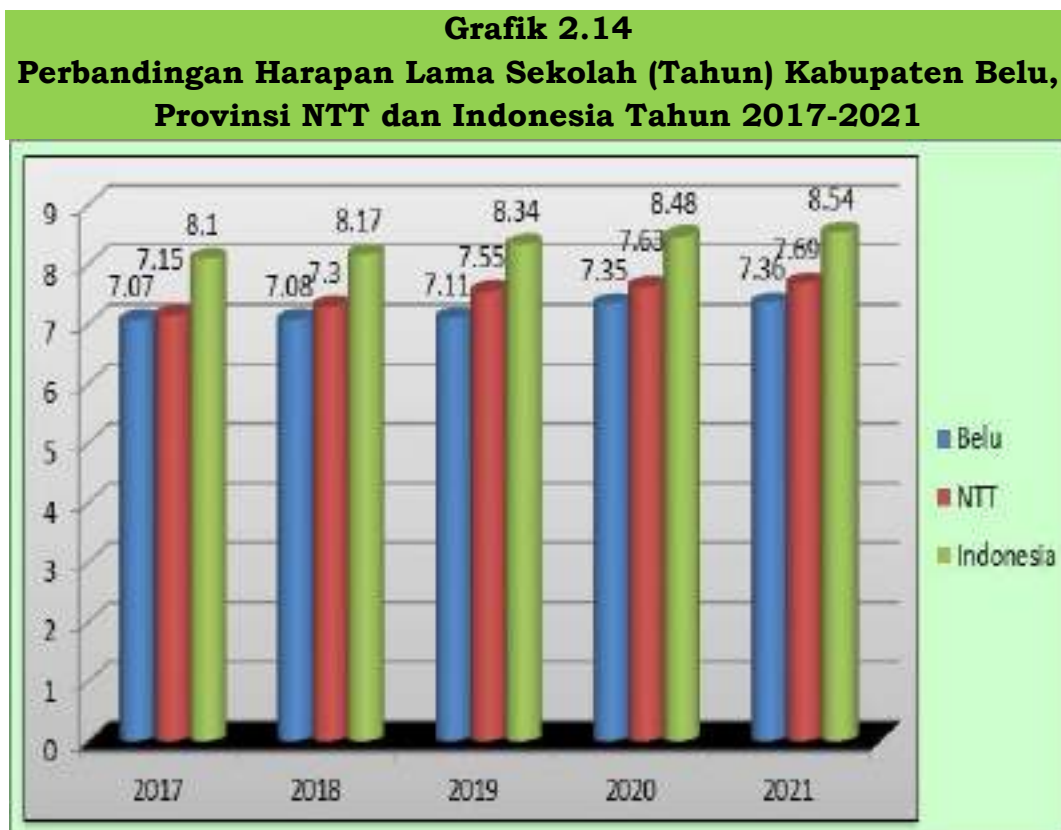
Terlihat pada Grafik 2.13 di atas, capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu menunjukkan trend yang meningkat. Untuk Tahun 2020 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu sebesar 7,35 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT sebesar 7,63 Tahun dan Indonesia sebesar 8,48 Tahun. Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Belu tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 meskipun tidak signifikan yaitu berada pada angka 7,36.

### **c. Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan gambaran persentase penduduk usia 7 tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun. HLS tidak mengcover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Harapan lama sekolah Kabupaten Belu 2017-2021 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia. HLS menggambarkan persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dengan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perbandingan capaian HLS Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2017-2021 tergambar pada Grafik 2.14 di bawah ini yang menunjukkan capaian angka HLS Kabupaten Belu 2017-2021 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia.



Sumber : BPS, (Metode Baru) Harapan Lama Sekolah Periode 2017-2021

Kondisi Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belu tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 7,36.

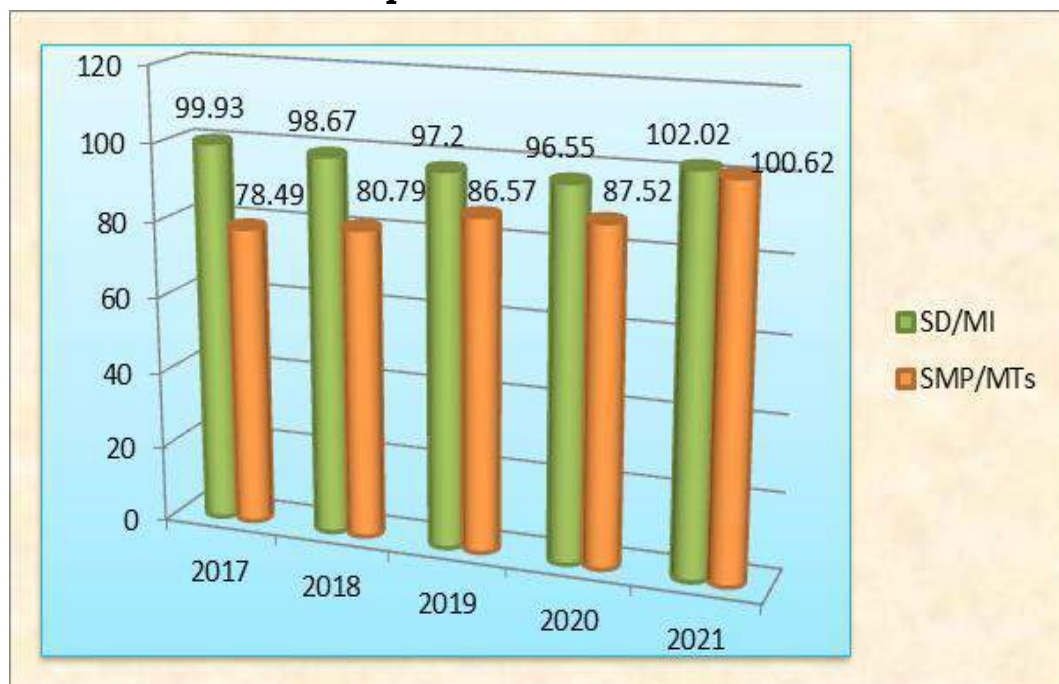


#### d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan tertentu.

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

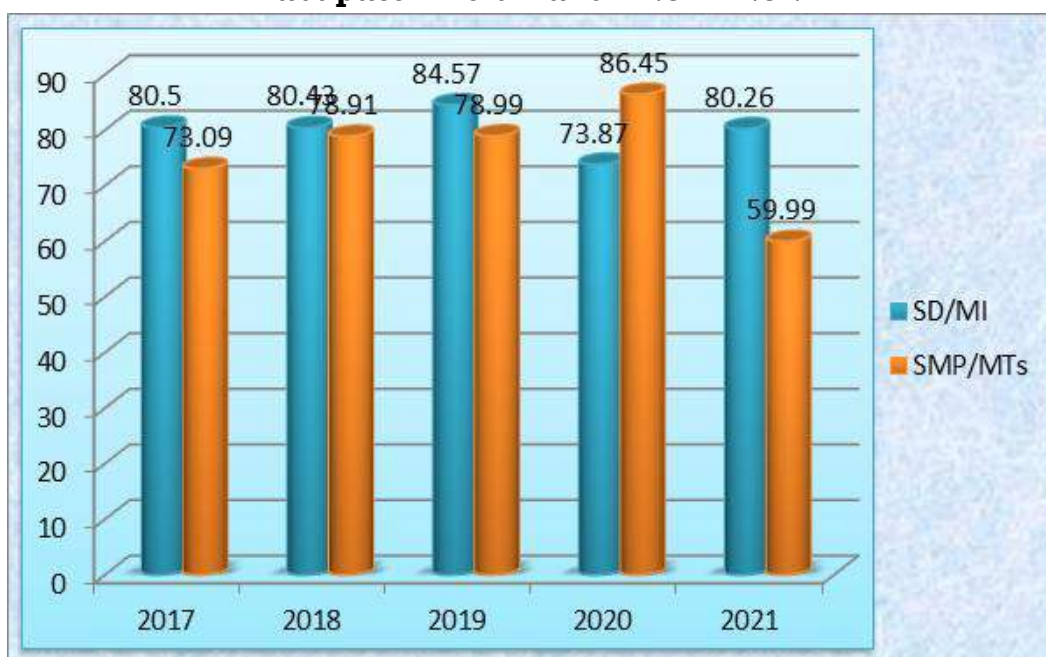
**Grafik 2.15**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2021

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

**Grafik 2.16**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

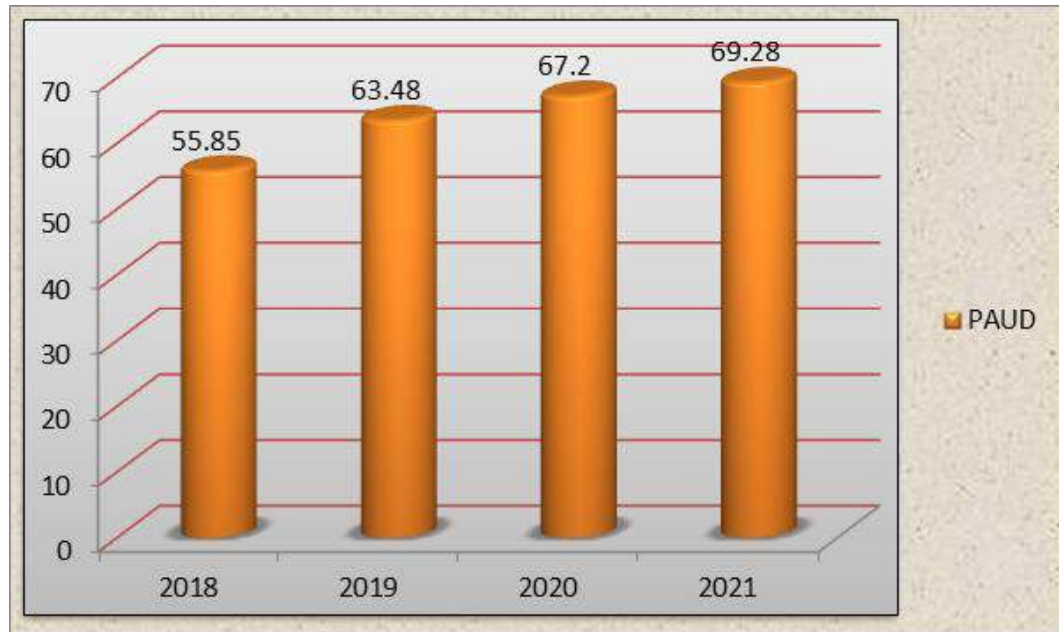


Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2021

Grafik 2.15 dan Grafik 2.16 di atas menggambarkan capaian APK dan APM Kabupaten Belu 2017-2021. APK SD/MI mengalami tren penurunan tertinggi 84.57% di Tahun 2019, terendah 73.87% di Tahun 2020. APK SMP/MTs mengalami kenaikan terendah 59.99% di Tahun 2021, tertinggi 86.45% di Tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum semua anak usia sekolah di Kabupaten Belu yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar terutama pada jenjang SMP/MTs walaupun mengalami kenaikan. Capaian APM juga menggambarkan belum semua anak usia sekolah pada usia kelompok tertentu (SD/MI dan SMP/MTs) yang bersekolah pada

jenjang pendidikan tertentu.

**Grafik 2.17**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu Tahun 2021

Pada Grafik 2.17 menggambarkan capaian APK PAUD tertinggi sebesar 69,28% Tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa belum semua anak usia dini yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD.

#### **e. Persentase Pendidikan yang Ditamatkan**

Tabel 2.17 menggambarkan pada Tahun 2021 sebagian besar penduduk yang berumur 10 ke atas atau sebesar 30.58% penduduk Kabupaten Belu hanya memiliki ijazah SD. Angka ini merupakan tertinggi dibandingkan dengan pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 10.33%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 15.86%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk berumur 10 Tahun ke atas. Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan kampanye kebijakan

pendidikan wajib belajar pendidikan 12 tahun maupun gong belajar di Kabupaten Belu.

**Tabel 2.17**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2017–2021**

NO	PENDIDIKAN	2017		2018		2019		2020		2021	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Tidak atau belum sekolah	26.397	13.71%	27.439	14,16%	29.168	14,93%	35.863	18,38%	68.534	30,14%
2	Belum tamat SD / Sederajat	19.606	10.19%	19.529	10,06%	21.094	10,80%	15.134	7,76%	18.756	8,25%
3	Tamat SD atau sederajat	78,212	40.64%	77.181	39,76%	74.363	38,06%	73.458	37,65%	69.496	30,56%
4	SLTP / Sederajat	24,298	12,62%	23,746	12,23%	24.161	12,37%	23.829	12,21%	23.491	10,33%
5	SLTA / Sederajat	34,152	17.74%	35.578	18.33%	35.907	18,38%	35.990	18,45%	36.062	15,86%
6	Diploma I/II	924	0.48%	899	0.46%	851	0,44%	819	0,42%	779	0,34%
7	Akademi/ Diploma III / S. Muda	2,380	1.24%	2.514	1.29%	2,491	1,28%	2.485	1,27%	2.508	1,10%
8	Diploma IV / Strata I	6,300	3.27%	6.996	3.60%	7,128	3,65%	7.317	3,75%	7,559	3,32%
9	Strata II	195	0.10%	198	0.10%	197	0,10%	202	0,10%	206	0,09%
10	Strata III	8	0.00%	7	0.00%	8	0.00%	7	0,004%	6	0,003%
	<b>JUMLAH</b>	<b>192.472</b>	<b>100%</b>	<b>194.14</b>	<b>100%</b>	<b>195.37</b>	<b>100%</b>	<b>195,104</b>	<b>100%</b>	<b>227,397</b>	<b>100%</b>

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2021

Untuk kondisi tahun 2021 belum dapat ditampilkan karena perangkat daerah yang berwenang belum merilis data terbaru.

#### **2.1.2.2.2 Kesehatan**

Sesuai panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator *outcome* kesehatan aspek dari kesejahteraan sosial dapat diukur antara lain melalui angka usia harapan hidup dan persentase Balita Gizi Buruk.

##### **a. Angka Harapan Hidup**

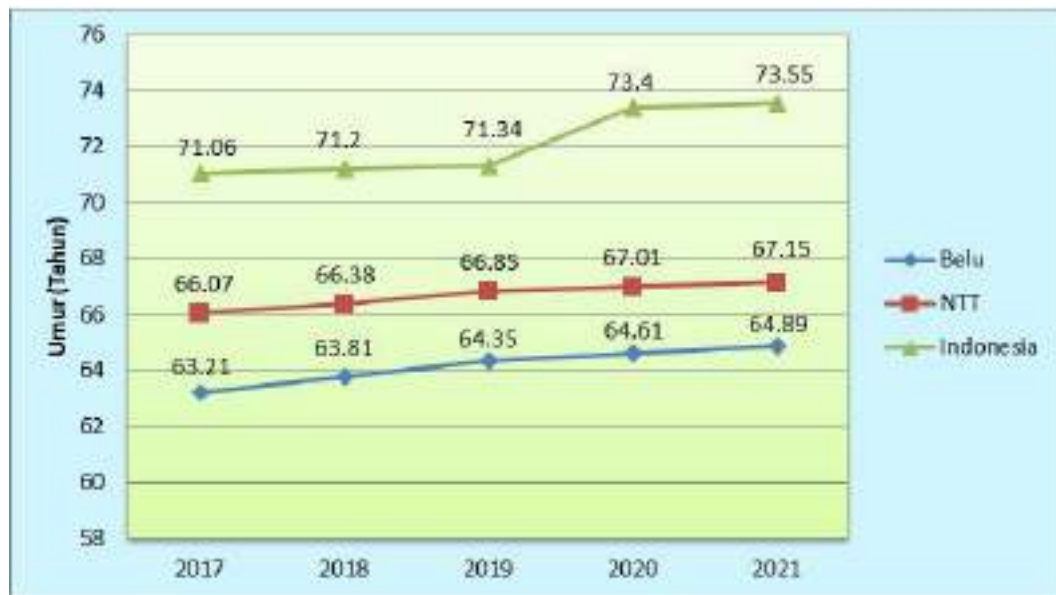
Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perbandingan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu



Tahun 2017-2021 dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada Grafik 2.18 di bawah ini.

**Grafik 2.18**  
**Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2022  
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2022  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT dan Indonesia. Ini menunjukkan kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Belu relatif belum baik dibandingkan Provinsi NTT dan Indonesia secara umum. Kondisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Belu tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 64,89 tahun.

#### **b. Persentase Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan

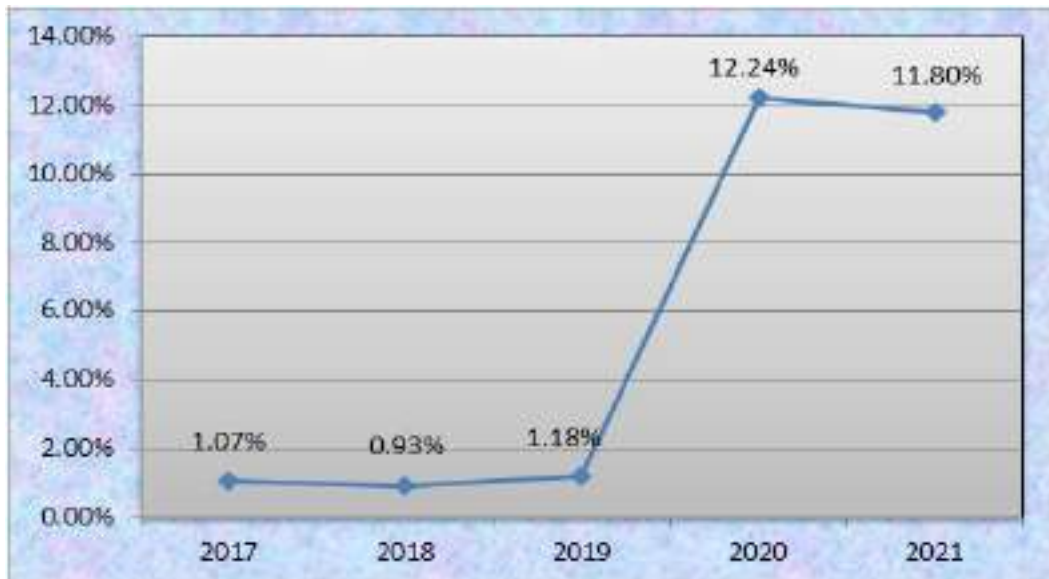


nutrisi.

Penyebab paling umum gizi buruk pada balita adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi yang seimbang. Bila orang tua tidak mengetahui jenis dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan anak, asupan nutrisi yang diberikan bisa tidak mencukupi kebutuhan anak sehingga ia menjadi kurang gizi.

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Belu, selain faktor di atas, juga disebabkan oleh faktor kemiskinan. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 digambarkan pada Grafik 2.19 berikut ini.

**Grafik 2.19**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

Grafik di atas menggambarkan capaian persentase balita yang mengalami gizi buruk dari Tahun 2017-2021 berfluktuasi (turun/naik). Kondisi Tahun 2021 untuk persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu dari 12,24% menjadi 11,80% karena ada perubahan standar penentuan balita gizi buruk.



### c. Persentase Balita *Stunting*

*Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (berdasarkan WHO-MGRS).

Penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir). Beberapa faktor yang mengakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain: faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan), kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Persentase *Stunting* Balita di Kabupaten Belu Tahun 2018-2020 dapat dilihat Grafik 2.20 di bawah ini.

**Grafik 2.20**

#### **Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Belu Tahun 2018-2021**



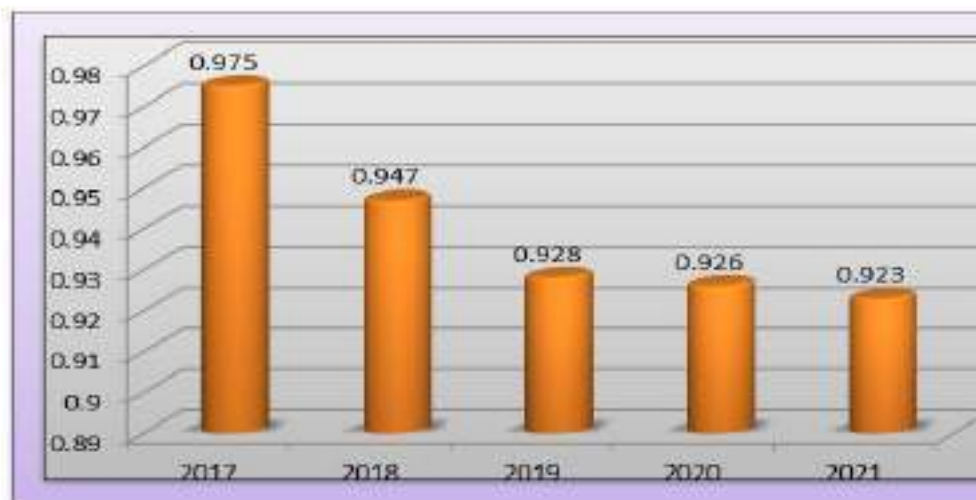
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

Grafik di atas menggambarkan capaian persentase Balita *Stunting* Kabupaten Belu Tahun 2018-2021 yang mengalami penurunan sebesar 9,05%. Kondisi tahun 2021 untuk persentase balita *stunting* mengalami penurunan menjadi 17,9%. Hal ini dipengaruhi pula oleh penyempurnaan metode pengukuran dan sumber daya manusia petugas pengukuran.

### 2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja). Rasio penduduk yang bekerja dihitung berdasarkan penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja di kali dengan 100% (tertera pada Grafik 2.21).

**Grafik 2.21**  
**Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2020**

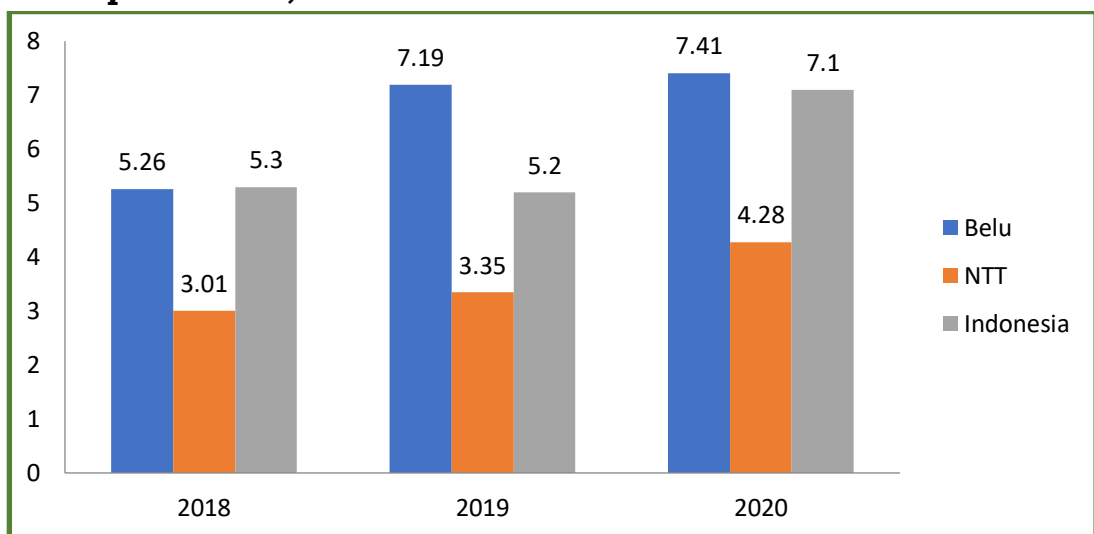


Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021  
Hasil olahan BP4D Kabupaten Belu

Grafik di atas menunjukkan rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2017-2021 mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja mengalami penurunan seiring dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang disebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi terutama dampak pandemi COVID-19 pada Tahun 2021 di Kabupaten Belu.

Sejalan dengan penurunan rasio penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbuka pun mengalami tren peningkatan (Grafik 2.22).

**Grafik 2.22**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2018-2020**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2021,  
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021  
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Belu secara umum lebih tinggi dari pada Provinsi NTT dan TPT Nasional. TPT di Kabupaten Belu disebabkan karena:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100.000 jiwa, pada Tahun 2020 jumlah usia produktif



Kabupaten Belu (15-64 Tahun) sebesar 156.101 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana, karena adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;

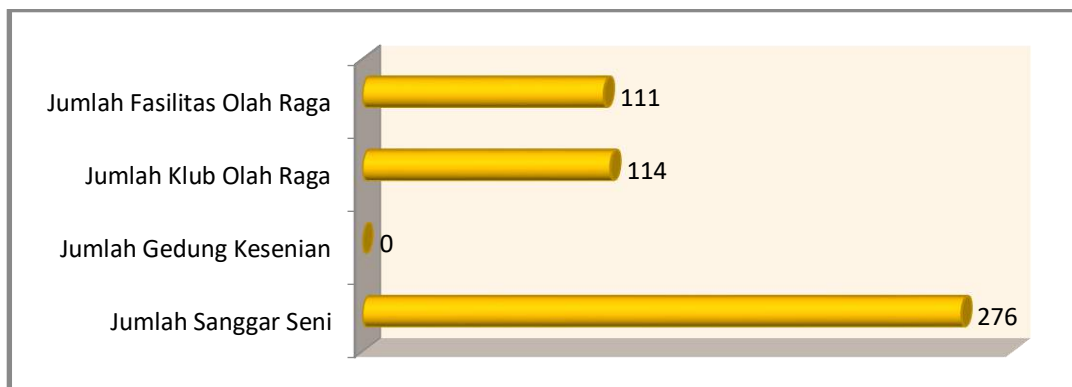
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja).
5. Dampak Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan semua kegiatan.

#### **2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga**

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan bidang sosial budaya yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab serta berdaya saing menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

#### **Grafik 2.23 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian di Kabupaten Belu Tahun 2021**





Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi fasilitas olahraga dan kesenian di Kabupaten Belu masih sangat terbatas, sehingga sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan dibenahi secara baik dengan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas gedung olahraga dan gedung kesenian maupun pembinaan terhadap klub olahraga dan sanggar/grup kesenian.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di sini menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Belu.

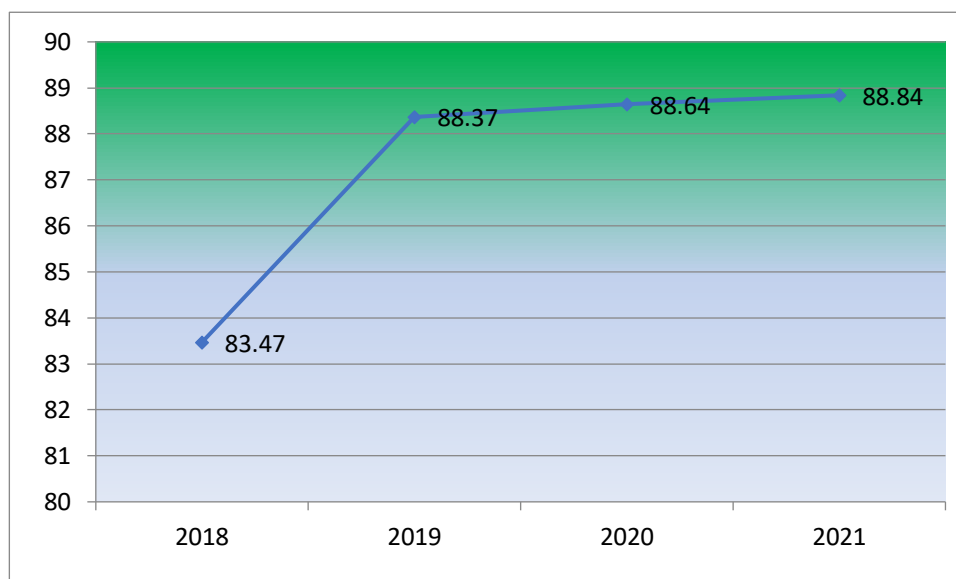
Kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Belu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan data dan informasi dari pendapat masyarakat secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai tingkat kepuasan pelayanan. Nilai IKM ini menunjukkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahun terhadap SKPD



pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang tersaji pada grafik berikut.



**Grafik 2.24**  
**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu**  
**Tahun 2018-2021**



*Sumber: SIPD, DPMTSP Kabupaten Belu Tahun 2021*

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Belu Tahun 2018-2021 mempunyai tren positif/meningkat, dengan capaian total konversi layanan Tahun 2020 sebesar 88,64 (mutu layanan A/sangat baik), dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 88,84. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja pelayanan publik sudah baik. Secara detail penilaian indeks kepuasan masyarakat Tahun 2018-2021 berdasarkan unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.18**  
**Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian**  
**Kabupaten Belu Tahun 2018–2021**

NO	UNSUR LAYANAN	KINERJA UNSUR PENILAIAN				KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021	
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Kategori Mutu Pelayanan A = Sangat Baik (81,26 - 100) B = Baik (62,51 - 81,25) C = Kurang Baik (43,76 - 62,50) D = Tidak Baik (25 - 43,74)
2	Kemudahan prosedur pelayanan	Baik	Baik	Baik	Baik	
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Baik	Baik	Baik	Baik	
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	Kurang Baik	Baik	Baik	Baik	
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	Baik	Baik	Baik	Baik	
8	Kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Kurang Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
9	Penanganan dan pengaduan pengguna layanan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
<b>Keseluruhan pelayanan</b>		<b>Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Sumber: SIPD, DPMTSP Kabupaten Belu Tahun 2021

### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.1.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang menjadi pendukung capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

#### a. Pendidikan Dasar

##### 1) Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan

Angka putus sekolah dan angka kelulusan. Melengkapi kinerja rata-rata lama sekolah, dapat disajikan angka tingkat angka putus sekolah dan tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di



suatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut:



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2021

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs kecuali di Tahun 2020. Angka putus sekolah berfluktuasi, Angka Putus Sekolah SD/MI Tahun 2017 sebesar 0.17 dan SMP/MTs 0,3. Tahun 2018 meningkat menjadi 0,29 untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dan 0,69 untuk SMP/MTs. Tahun 2019-2021 mengalami perubahan untuk SD/MI di tahun 2019 sebesar 0,68 menjadi 1,27 di Tahun 2021, sedangkan untuk SMP/MI pada angka 1.61 di Tahun 2019 menjadi 1,03 di Tahun 2021.

Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan



capaian tingkat kelulusan di Kabupaten Belu. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat bahwa Kabupaten Belu belum mampu untuk mencapai angka kelulusan dan angka melanjutkan secara berkelanjutan.

**Tabel 2.19**  
**Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelulusan SD	99,3	97,59	98,55	99,24	99,14
2	Angka Kelulusan SMP	99,26	99,14	99,17	99,65	99,37
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,98	105,6	100,2	106,5	99
4	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97	97,83	100,3	108,6	99
5	Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV	2148	2233	2346	2649	1423

Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2021

## 2) Ketersediaan Tenaga Pendidik

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni ketersediaannya dibandingkan murid dan juga persebarannya. Rasio guru/murid merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Grafik 2.26 menyajikan rasio guru murid SD dan SMP. Terlihat bahwa rasio guru murid untuk 2 jenjang sekolah itu terus mengalami penurunan, artinya tersedia semakin banyak guru untuk melayani siswa yang bersekolah.



**Grafik 2.26**  
**Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

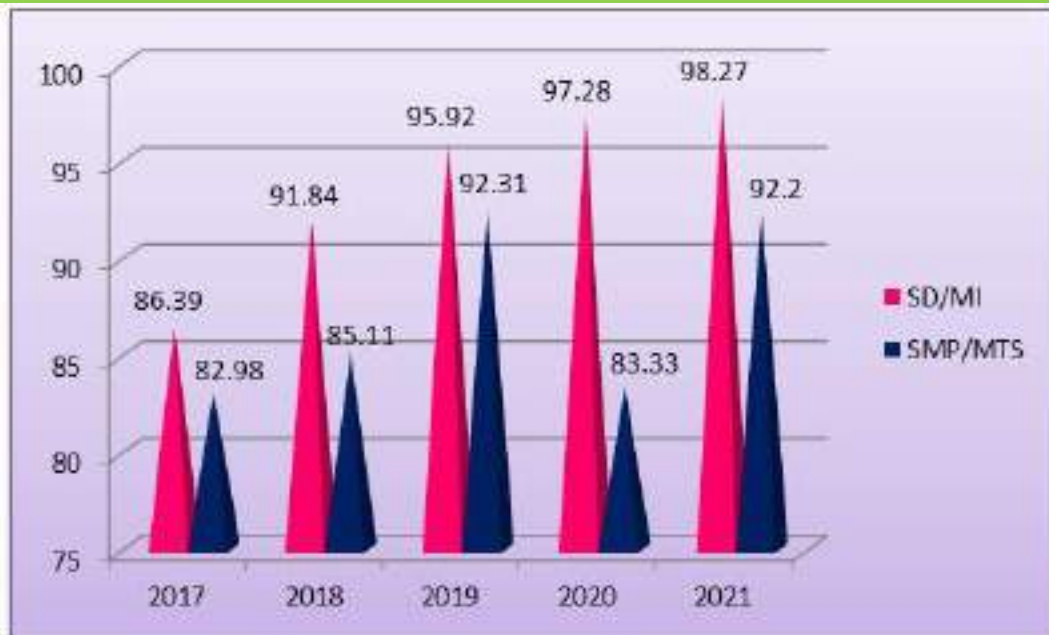


Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2021

### **3) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan**

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia. Pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembangunan di sebuah daerah. Data sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Belu sebagai berikut:

**Grafik 2.27**  
**Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2021

Di Tahun 2021 dari hasil analisis terhadap 147 SD/MI terdapat 21,53% ruang kelas dalam rusak ringan dan 8,13% rusak berat. Ruang guru 20,82% rusak ringan dan 3,60% rusak berat. Bangunan perpustakaan 23,75% rusak ringan dan 9,58% rusak berat. Bangunan KM/WC Guru 31,49% rusak berat dan 13,09% rusak ringan. Bangunan KM/WC Siswa 33,95% rusak berat dan 18,95 rusak ringan.

Kerusakan itu disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diakibatkan karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, akibat ulah manusia, akibat perilaku alam (gempa bumi, penurunan tanah, dan lain-lain), akibat beban fungsi yang berlebih, atau akibat pengaruh fisi/kimia/serangga dinamakan kerusakan bangunan.

Di Tahun 2021 dari hasil analisis terhadap 54 SMP/MTS terdapat 21,53% ruang kelas dalam rusak ringan dan 8,13% rusak berat. Ruang guru 20,82% rusak ringan dan 3,60% rusak berat.

Bangunan perpustakaan 23,75% rusak ringan dan 9,58% rusak berat. Bangunan KM/WC Guru 31,49% rusak berat dan 13,09% rusak ringan. Bangunan KM/WC Siswa 33,95% rusak berat dan 18,95 rusak ringan.

#### **b. Pendidikan Anak Usia Dini**

Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa APK PAUD Kabupaten Belu masih fluktuatif (Lihat Grafik 2.28).



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2021

APK PAUD Kabupaten Belu meningkat pada Tahun 2018 sebesar 55,85 menjadi 63,48 pada Tahun 2019 dan menjadi 69,28 pada Tahun 2021. Partisipasi PAUD ini masih rendah jika dibandingkan dengan APK SD/MI pada angka diatas 100. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa usia dini yang menduduki jenjang SD/MI sehingga berkontribusi terhadap capaian APK SD/MI menjadi lebih dari 100.

#### **2.1.3.1.2 Kesehatan**

Situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB),

Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) serta status gizi pada balita serta indikator pendukung lainnya.

#### a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

Dengan kondisi akhir Tahun 2021 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 171.1 dari 100.000 kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa AKI masih cukup jauh dari target SDGs sebesar 70 di Tahun 2030. Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek

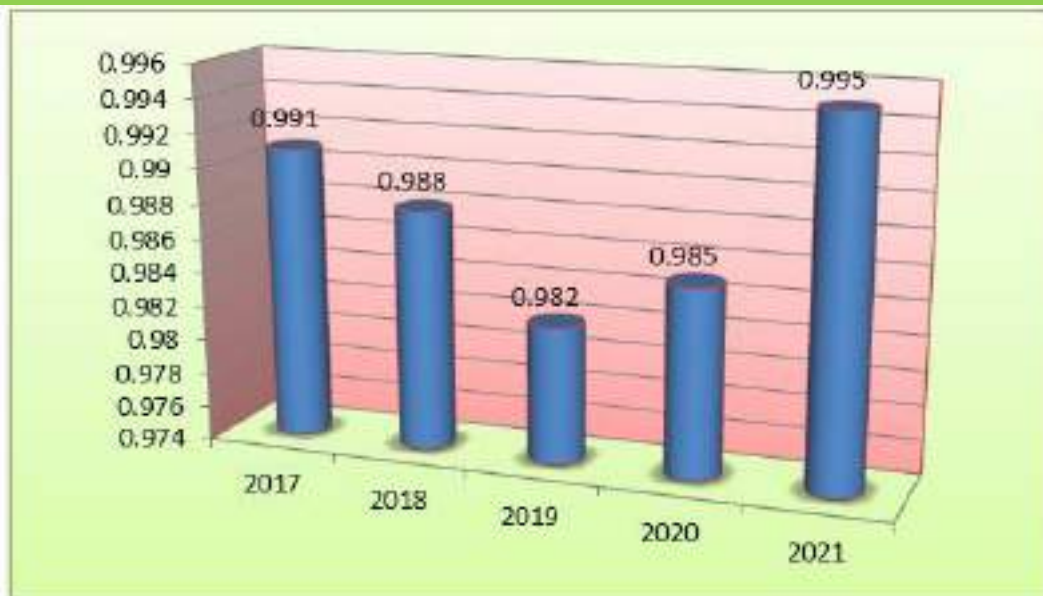


kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

**b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)**

AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran hidup bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran. Dari grafik di bawah ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan, yang puncaknya pada Tahun 2019 jumlah kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir hidup hal ini dikarenakan penyebab langsung yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur dan kelainan kongenital, serta penyebab tidak langsungnya yaitu ibu hamil risiko tinggi yang kurang gizi, kehamilan pada usia terlalu muda (kurang dari 20 Tahun) dan terlalu tua (lebih dari 35 Tahun). Pada Tahun 2021 angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan, ini menunjukkan indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan.

**Grafik 2.30**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2021`**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021





### c. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi secara garis besar, dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain, karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021



Dengan kondisi akhir Tahun 2021 angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Belu sebesar 5.13 dari 1000 kelahiran (Grafik 2.31). Kondisi ini menunjukkan bahwa AKB tergolong rendah dari standar kesehatan kabupaten yaitu >40. Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

#### **d. Angka Kematian Balita**

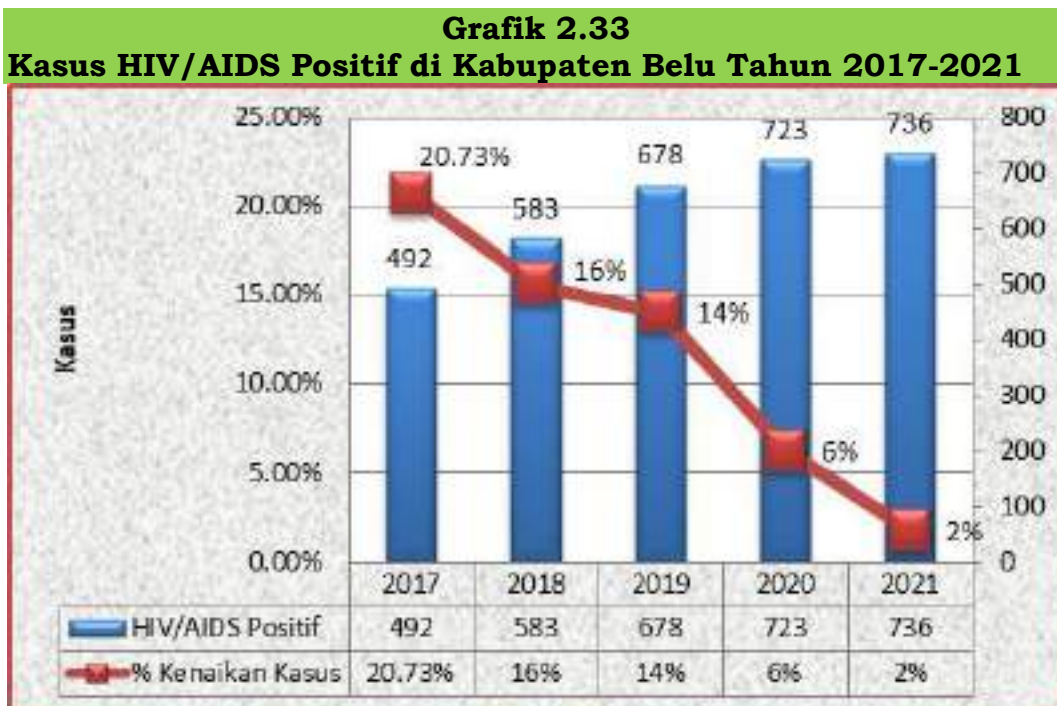
Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak umur 0-4 Tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Grafik 2.32 menunjukkan angka kematian anak balita berfluktuasi.



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

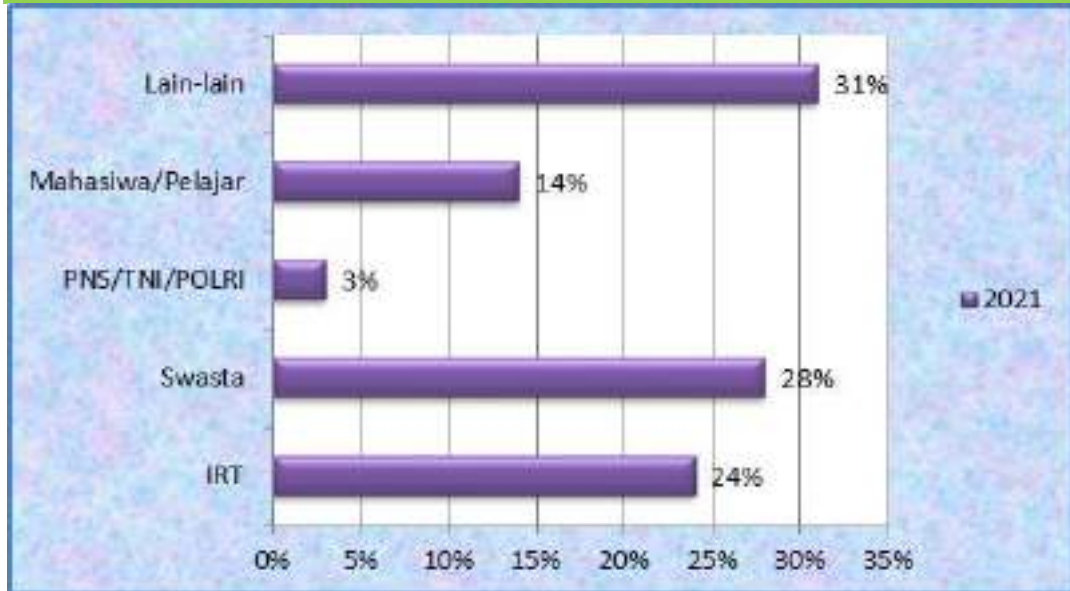
### e. HIV dan AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immuno Deficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalantubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderitaterlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 (tiga) metode,yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing (VCT)*, *serosurvey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Kabupaten Belu dengan kondisi penemuan kasus HIV positif empat tahun terakhir dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

**Grafik 2.34**  
**Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2021**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

#### **f. Tuberculosis**

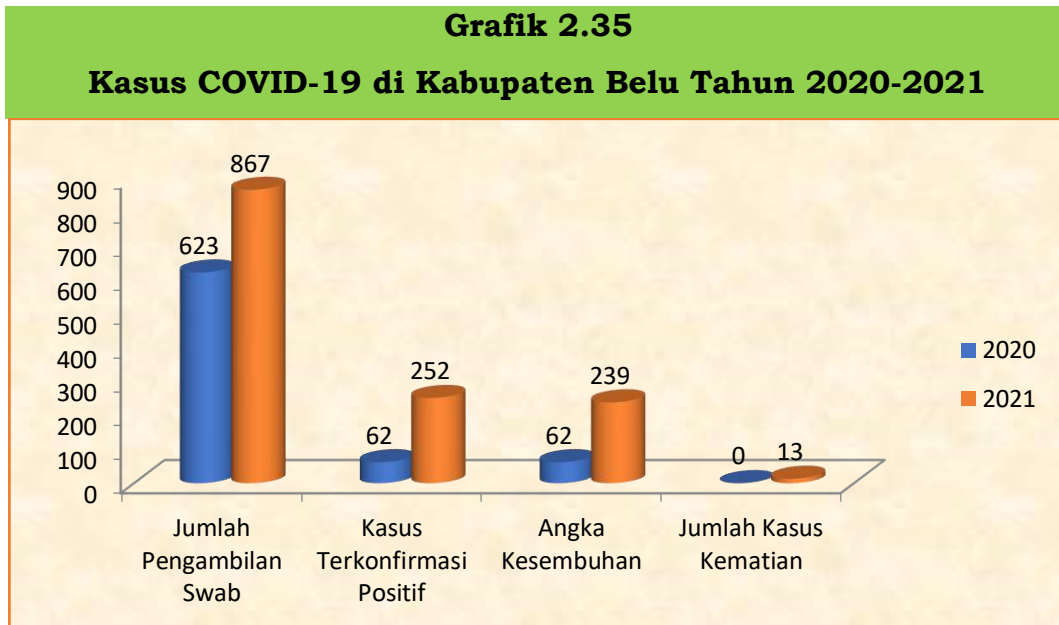
Jumlah kasus TBC di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2021 sebesar 336 kasus dengan penemuan kasus baru positif/CDR sebesar 57,76%. Capaian penemuan kasus baru /CDR masih di bawah target nasional yaitu 70%. Di Tahun 2021 jumlah kasus TB yang terdaftar dan diobati sebanyak 440 kasus. Angka kesembuhan pengobatan (*cure rate*) 100% (104/104) untuk kasus TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang terdaftar dan diobati. Angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus TB sebanyak 336 kasus. Angka keberhasilan (*sukses rate/SR*) pengobatan semua kasus TB 100%. Jumlah kematian akibat TB sebanyak 1 kasus.

#### **g. COVID-19**

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru



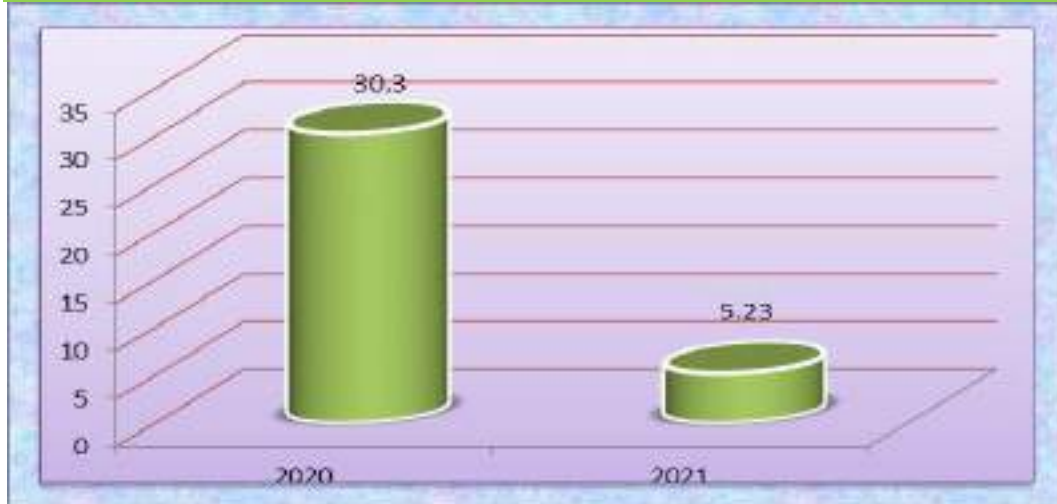
dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Berdasarkan data surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2020 dan 2021 gambaran situasi kasus COVID-19 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

Grafik di atas menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif 62 kasus di Tahun 2020 menjadi 252 pada tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 75.4%. Kasus kematian juga meningkat dari nol menjadi 13 kasus. Persentase kesembuhan mengalami penurunan dari 100% menjadi 94.84%. Rata-rata Angka *Positive Rate* tahun 2020 sampai 2021 masih di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu <5% yang tergambar dari Grafik 2.36 di bawah ini.

**Grafik 2.36**  
**Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2020-2021**



*Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021*

Secara umum kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk itu. Tabel 2.20 menyajikan komponen pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Belu.

**Tabel 2.20**  
**Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Skor</b>
1	Persentase warga negara usia 15–59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	9.3
2	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	67.9
3	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	6.8
4	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	55.7
5	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	125.8
6	Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas (%)	96,11
7	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD (%)	100
8	Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya (%)	100
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji (%)	100
10	Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standar (%)	17,56
11	Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standar (%)	75,82
12	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar (%)	22,22
13	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	57.1
14	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	66.1
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	82
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	78.9
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	83.6
18	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	68.2
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100

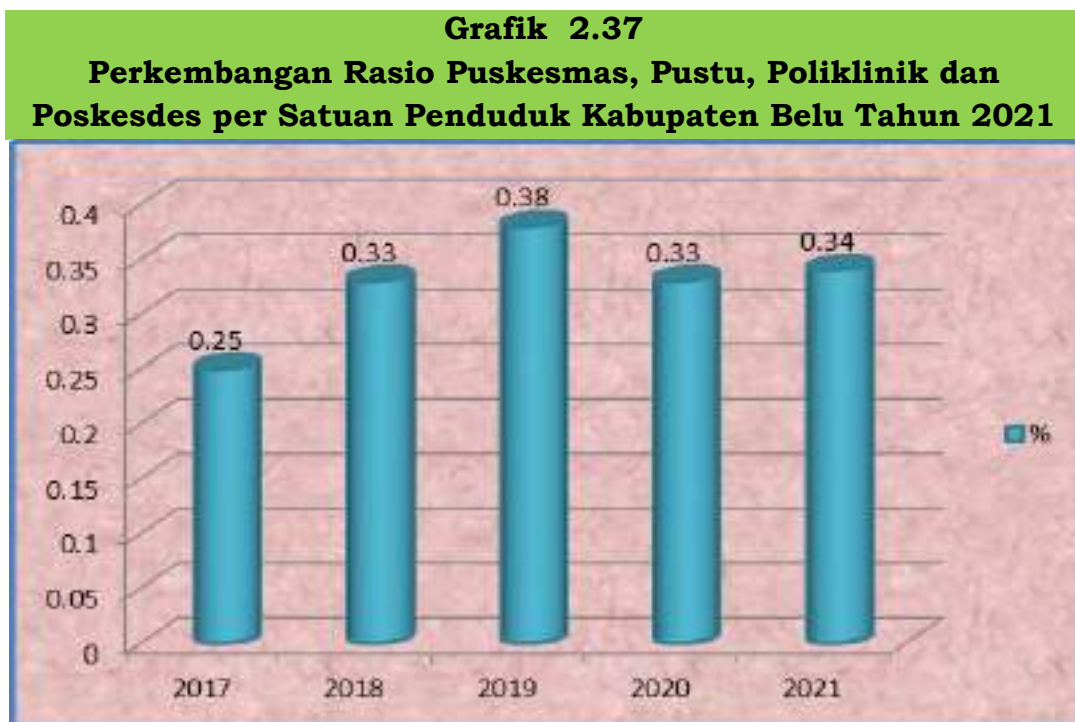
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Belu Tahun 2021 telah dilakukan cukup



baik. Dari 19 indikator hanya terdapat 5 indikator yang belum memenuhi standar.

Ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tengah-tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Grafik 2.37 menggambarkan Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan poskesdes terhadap jumlah penduduk Tahun 2017-2021 yang menggambarkan tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

Grafik 2.37 menggambarkan perkembangan rasio puskesmas, pustu, poliklinik dan poskesdes per satuan penduduk di Kabupaten Belu pada Tahun 2021 sebesar 0,34. Khusus untuk puskesmas, sampai dengan Tahun 2021 rasio puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1:13.376. Standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk.



Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Belu disajikan dalam Grafik 2.38.



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

Grafik 2.38 menggambarkan dari Tahun 2017-2021 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk menurun dari 0,0180 pada Tahun 2017 menjadi 0,0175 pada Tahun 2021, hal ini disebabkan jumlah penduduk bertambah sedangkan Rumah Sakit tidak bertambah. Standar idealnya 1 (satu) Rumah Sakit melayani



100.000 penduduk, Tahun 2021 kondisi di Kabupaten Belu 1 (satu) Rumah Sakit melayani 56.850 penduduk.

Indikator rasio tenaga medis (dokter) per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berikut standar ketenagaan pada Puskesmas wilayah perkotaan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Tabel 2.21**

**Standar Ketenagaan Pada Puskesmas  
Kawasan Perkotaan dan Pedesaan**

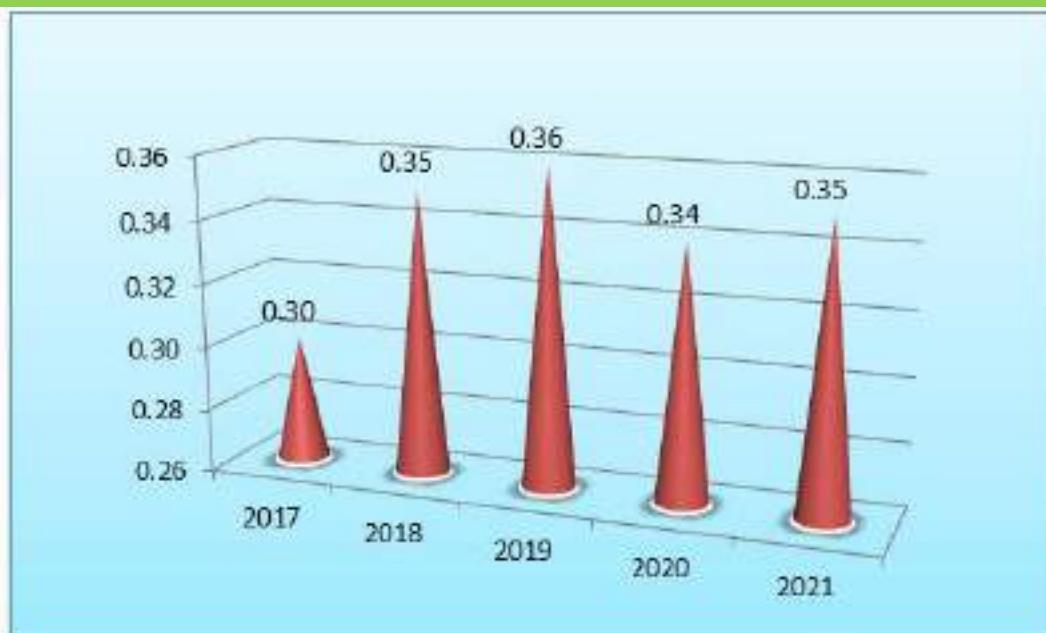
No.	Jenis Ketenagaan	Puskesmas Kawasan Perkotaan		Puskesmas Kawasan Pedesaan	
		Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap
1	Dokter/ Dokter Layanan Primer	2	1	2	1
2	Dokter Gigi	1	1	1	1
3	Perawat	8	5	8	5
4	Bidan	7	4	7	4
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	1	1
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	1	1	1
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	1	1	1
8	Tenaga Gizi	2	1	2	1
9	Tenaga Kefarmasian	2	1	1	1
10	Tenaga Administrasi	3	3	2	2
11	Pekarya	2	2	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>19</b>

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021



Grafik 2.39 menyajikan perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021. Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Belu berfluktuasi, terendah pada Tahun 2017 sebesar 0,30 meningkat menjadi sebesar 0,36 pada Tahun 2019 dan menurun pada Tahun 2021 sebesar 0,35 atau 1 (satu) dokter melayani 2.949 penduduk. Capaian ini belum mencapai standar (1 : 2.500).

**Grafik 2.39**  
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan diperuntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan.

**Grafik 2.40**  
**Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2021

#### **2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana ke-PU-an yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih.

##### **a. Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan**

Berdasarkan status jalan, sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Belu terdiri dari jalan nasional dengan panjang 67,33 km, jalan provinsi dengan panjang 63,42 km, jalan kabupaten dengan panjang 353,02 km, jalan desa strategis dengan panjang 85,60 km, jalan desa non strategis dengan panjang 241,84 km dan jalan lingkungan dengan panjang 49,354 km. Pada Tahun 2021 panjang jalan di Kabupaten Belu secara keseluruhan sebesar 860,564 km seperti pada Tabel 2.22.



**Tabel 2.22**  
**Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2021**

No	Status Jalan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan Nasional (Km)						
	1) Kondisi Baik	63,805	63,88	66,08	67,23	67,23	67,23
	2) Kondisi Sedang	3,525	3,45	1,25	0,10	0,10	0,10
	3) Kondisi Rusak Ringan	0	0	0	0	0	0
	4) Kondisi Rusak Berat	0	0	0	0	0	0
	Total Panjang	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33
2	Jalan Provinsi (Km)						
	5) Kondisi Baik	55,11	56,33	56,52	54,72	54,72	54,72
	6) Kondisi Sedang	6,58	6,28	5,90	7,70	7,70	7,70
	7) Kondisi Rusak Ringan	0,94	0,83	0,60	0,60	0,60	0,60
	8) Kondisi Rusak Berat	1,54	0,74	0,40	0,40	0,40	0,40
	Total Panjang	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42
3	Jalan Kabupaten (Km)						
	9) Kondisi Baik	136,72	162,77	105,65	138,95	213,82	182,065
	10) Kondisi Sedang	43,89	29,39	63,30	64,37	36,90	64,05
	11) Kondisi Rusak Ringan	45,32	44,52	45,42	0	13,60	20,75
	12) Kondisi Rusak Berat	127,09	116,34	138,65	149,70	88,70	86,15
	Total Panjang	353,02	353,02	353,02	353,02	353,02	353,02
4	Jalan Desa Strategis (Km)						
	13) Kondisi Baik	-	-	-	6,16	12,51	16,31
	14) Kondisi Sedang	-	-	-	-	-	-
	15) Kondisi Rusak Ringan	-	-	-	-	-	-
	16) Kondisi Rusak Berat	-	-	-	79,44	73,09	69,29
	Total Panjang	-	-	-	85,60	85,60	85,60
5	Jalan Desa (Km)						
	17) Kondisi Baik	12,96	20,71	20,96	26,29	29,68	29,68
	18) Kondisi Sedang	0,90	0,9	4,42	6,99	6,99	6,99
	19) Kondisi Rusak Ringan	207,43	208,32	208,32	202,44	202,44	202,44
	20) Kondisi Rusak Berat	106,15	97,51	93,74	6,12	2,73	2,73
	Total Panjang	327,44	327,44	327,44	241,84	241,84	241,84
6	21) Jalan Lingkungan (Km)				49,354	49,354	49,354

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021*

Kondisi jalan kabupaten yang merupakan indikator RPJMD



Periode 2016-2021, pada Tahun 2016 dalam kondisi baik sebesar 38,73% dan meningkat pada Tahun 2021 menjadi 51,57%. Secara keseluruhan jalan kabupaten lebih besar mengalami kerusakan jika dibandingkan dengan jalan nasional maupun jalan provinsi. Hal ini dikarenakan bahwa pada ruas jalan kabupaten lebih banyak lalu lintas pelayanan transportasi untuk mengangkut arus barang dan orang. Kondisi panjang bentangan jembatan di Kabupaten Belu ditahun 2021 adalah 1.060,8m, sedangkan untuk jembatan pada jalan desa mengalami sebesar 103,9m. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.23**  
**Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**

No	Status Jalan	Panjang Bentangan Jembatan Terbangun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan Kabupaten (m)	1.038	1.038	1.044	1.054	1.060,8	1.060,8
2	Jalan Desa (m)	73	73	73	88	103,9	103,9
Jumlah		<b>1.111</b>	<b>1.111</b>	<b>1.117</b>	<b>1.142</b>	<b>1.164,7</b>	<b>1.164,7</b>

*Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021*

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana di wilayah Kabupaten Belu adalah mengembangkan dan memperbaiki kualitas pelayanan jalan dan jembatan dengan tetap melakukan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan termasuk peningkatan jalan lingkungan.

#### **b. Pembangunan Irigasi**

Pembangunan layanan jaringan irigasi di Kabupaten Belu untuk menjamin pasokan kebutuhan air untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum dapat terlayannya secara optimal. Oleh karena itu untuk memperbaiki kondisi tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dan peningkatan saluran irigasi agar intensitas pertanaman tanaman pangan dan hortikultura dapat ditingkatkan. Lokasi pembangunan irigasi



teknis yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat di 24 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area sebesar 1,243.18 Ha (tertera pada Tabel 2.24). Data Umum Infrastruktur pada Profil Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021, panjang total saluran irigasi teknis 18.022,37 meter, dengan kondisi rusak berat 3.771,56 meter. Sedangkan untuk saluran irigasi non teknis total panjang 13.856,66 meter, dengan kondisi rusak berat 841,72 meter.

Daerah irigasi di Kabupaten Belu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT sebesar 4.815 Ha yang tersebar pada daerah irigasi Fatubesi = 1.650 Ha; Obor = 1.815 Ha dan Maubusa = 1.350 Ha serta daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdapat di Haekesak sebesar 4.400 Ha.

**Tabel 2.24**  
**Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu Sampai Dengan Tahun 2021**

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi (ha)	Lokasi Bangunan Utama		LUAS LAHAN ( Ha )	
			Kecamatan	Desa	Baku	Fungsional
1.	Buitasik	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	83.09	58.22
2.	Halisikun	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	127.06	79.54
3.	Derok	permukaan	Raihat	Maumutin	60.44	57.36
4.	Halilulik	permukaan	Tasifeto Barat	Naitimu	71.77	64.61
5.	Nubelu	permukaan	tasifeto timur	Bauho-Sarabau	119.51	85.91
6.	Raimetan	permukaan	Raihat	Maumutin	115.99	115.99
7.	Seopasar	permukaan	Raimanuk	Leontolu	11.78	3.28
8.	Taeksoruk	permukaan	Tasifeto Timur	Fatubaa	150.26	132.19
9.	Teun	permukaan	Raimanuk	Teun	48.32	24.92
10.	Webuni	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	13.57	12.30
11.	Kimbana	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	11.30	11.92
12.	Lalosuk	permukaan	Tasifeto Timur	Manleten	47.81	9.62
13.	Wekari	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	10.09	5.82
14.	Hasmetan	permukaan	Tasifeto Timur	Takirin	23.98	23.98
15.	Lahurus	permukaan	Lasiolat	Fatulotu	13.70	13.70
16.	Dualasi Raiulun	permukaan	Lasiolat	Dualasi	4.66	1.93
17.	Leowalu	permukaan	Lamaknen	Leowalu	36.77	32.02



No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi (ha)	Lokasi Bangunan Utama		LUAS LAHAN ( Ha )	
			Kecamatan	Desa	Baku	Fungsional
18.	Buburlaran	permukaan	Tasifeto Barat	Lawalutulus	56.60	36.04
19.	Raiikun	permukaan	Tasifeto Timur	Tialai	63.37	30.54
20.	Halimodok	permukaan	Tasifeto Timur	Halimodok	29.06	29.06
21.	Lelowai	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	26.69	10.76
22.	Tulatudik	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	34.51	34.51
23.	Lookeu	permukaan	Tasifeto Barat	Lookeu	41.43	9.76
24	Ekin	permukaan	Lamaknen Selatan	Ekin	41.43	3.01
<b>LUAS TOTAL</b>					<b>1,243.18</b>	<b>886.95</b>

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ,2021

Panjang saluran irigasi pada Tahun 2021 mengalami perubahan berdasarkan kondisinya, yaitu untuk Saluran Teknis dengan kondisi baik sepanjang 3.022,52 m dan Saluran Non Teknis dengan kondisi baik sepanjang 2.758,93 m.

**Tabel 2.25**  
**Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2021**

No	Jenis Saluran dan Kondisi	Volume	Satuan
1	Panjang Saluran Non Teknis		
	Kondisi Baik	3,022.52	Meter
	Kondisi Sedang	6,193.88	Meter
	Kondisi Rusak Ringan	5,034.41	Meter
	Kondisi Rusak Berat	3,771.56	Meter
	<b>Total Panjang</b>	<b>18,022.37</b>	<b>Meter</b>
2	Panjang Saluran Teknis		
	Kondisi Baik	2,758.93	Meter
	Kondisi Sedang	5,788.89	Meter
	Kondisi Rusak Ringan	4,467.13	Meter





No	Jenis Saluran dan Kondisi	Volume	Satuan
	Kondisi Rusak Berat	841.72	Meter
<b>Total Panjang</b>		<b>13,856.67</b>	Meter
<b>Total Panjang Saluran Irigasi</b>		<b>31,879.04</b>	Meter

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

### c. Pembangunan Drainase

Berdasarkan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2016, luas daerah genangan air di Kabupaten Belu sebesar 9,58 Ha. Hingga tahun 2021 daerah genangan air yang sudah ditangani sebesar 4,78 Ha sedangkan yang belum ditangani sebesar 4,8 Ha. Adapun daerah genangan air di wilayah kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 2.26.

**Tabel 2.26**  
**Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu 2016-2021**

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan Eksisting di Area Permukiman (Ha)	Penanganan
1	Jl. Pemuda (Belakang PLTD Atambua - RS Sito Husada) Kelurahan Tulamalae	1,58	Sudah ditangani 1,58 Ha pada tahun 2017
2	Simpang Jl Mente - Jembatan Mota Buik (SDK Mota Buik) Kelurahan Fatukbot	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2020
3	Jl. TN Bakel (Hutan Jati Wemata - SDI Nukfuak) Kelurahan Fatukbot	1,70	Belum ditangani
4	RT 3 (Simpang Jl. Hot Gol- Jl. Liku Baunleo Walu) Kelurahan Fatubena	1,50	Belum ditangani
5	Cabang Haliwen-Ursulin (Jalan St. Angela) Kelurahan Manumutin (Jln. Sutami - St. Angela)	1,60	Belum ditangani

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan Eksisting di Area Permukiman (Ha)	Penanganan
6	Jl. Laksda adisucipto (depan kantor bencana s/d SDLB)Kelurahan Manumutin	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2021
	<b>Total</b>	<b>9,58</b>	Sudah ditangani: 49,90% Belum ditangani : 50,10%

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2021

Untuk menangani daerah genangan air, dilakukan dengan pembangunan drainase. Pembangunan drainase selama periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

**Tabel 2.27**  
**Drainase terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2021**

No	Tahun	Nama Pekerjaan	Volume (m)
1	2016	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	190
2	2016	Pembangunan drainase lingkungan Wekatimun	170
		<b>TOTAL PANJANG</b>	<b>360</b>
3	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tulamalae	328
4	2017	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	154
5	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tenukiik	270
6	2017	Pembangunan drainase lingkungan Umanen	371
7	2017	Pembangunan drainase lingkungan Bardao	305
		<b>TOTAL PANJANG</b>	<b>1.428</b>
8	2018	Pembangunan drainase/gorong-gorong Fatubenao RT. 26	200
9	2018	Pembangunan drainase/gorong-gorong Fatukbot (belakang Klinik Abdi Kasih)	75
		<b>TOTAL PANJANG</b>	<b>275</b>
10	2019	Pembangunan drainase/gorong-gorong Manumutin	306
11	2019	Pembangunan drainase/gorong-gorong Tulamalae, Tenukiik, Lolowa	895
12	2019	Pengadaan bangunan pembuang saluran drainase Dusun Motamauk, Desa Mandeu	850
		<b>TOTAL PANJANG</b>	<b>2.051</b>
13	2019	Drainase/gorong-gorong Beirafu (cor beton)	250



No	Tahun	Nama Pekerjaan	Volume (m)
14	2019	Drainase/gorong-gorong Beirafu (belakang puskot lama)precast	500
15	2019	Drainase/gorong-gorong Fatubena	400
16	2019	Drainase/gorong-gorong Tenukiik	895
<b>TOTAL PANJANG</b>			<b>2.045</b>
17	2020	Tidak Ada Pekerjaan	-
<b>TOTAL PANJANG</b>			-
18	2021	Drainase/gorong-gorong di Kelurahan Manumutin	<b>1107.5</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

Terkait dengan pembangunan jaringan drainase masih jauh dari yang diharapkan, mengingat di beberapa kawasan permukiman masih ditemukan aliran air pada drainase kurang lancar. Selain itu, di beberapa kawasan permukiman belum dilengkapi dengan jaringan drainase, sehingga sering kali terjadi banjir dan genangan air pada saat musim hujan. Selain itu, berdasarkan Rencana Induk Drainase Kota Atambua Tahun 2020, total luas daerah genangan berubah menjadi 31,251 Ha yang meliputi 42 daerah genangan. Hal ini disebabkan karena aktivitas pembangunan yang menyebabkan kurangnya daerah resapan.

#### **d. Pembangunan Air Bersih**

Keberadaan air bersih merupakan tuntutan yang sangat vital karena menyangkut kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk telah membawa dampak pada peningkatan jumlah dan ragam permintaan akan air bersih. Status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Belu Tahun 2021 adalah 30,84% rumah tangga telah memiliki akses perpipaan terhadap sumber air bersih layak di perkotaan dan perdesaan.



**Tabel 2.28**  
**Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Cakupan Layanan Air Minum Per Tahun (Jumlah Rumah Tangga)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDAM	4,510	4,790	5,061	5,496	6,036	4,212
2	Non PDAM (PAMSIMAS)	1,120	2,045	3,636	4,386	5,224	6,567
3	Non PDAM (di Pedesaan)	1,567	2,078	3,152	4,741	6,355	7,005
4	Total Rumah Tangga Terlayani	7,197	8,913	11,849	14,623	17,615	17,784
5	Total Rumah Tangga di Kabupaten Belu	48,061	47,364	54,831	56,387	58,330	58,221
6	Persentase Layanan Air Bersih (%)	14.97	18.82	21.61	25.93	30.20	30.55

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021*

#### **e. Penataan Ruang**

Aspek penataan ruang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari keempat aspek tersebut, yang cukup penting adalah aspek pelaksanaan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Selama ini yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah lemahnya koordinasi dalam pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disiapkan dokumen-dokumen rencana tata ruang, antara lain rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Kabupaten Belu sudah memiliki dokumen rencana umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini dianggap penting sehingga fokus target kinerja bidang penataan ruang Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 adalah presentase dokumen rencana rinci tata ruang.

Jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun hingga 2021 adalah sebanyak 2 (dua) dokumen rencana, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKSN Atambua dan Rencana Detail Tata



Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Halilulik. Karena status Atambua sebagai PKSN maka saat ini penyusunannya RDTR PKSN Atambua diambil alih oleh pemerintah pusat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) yang akan dilegalisasi berupa Peraturan Presiden (Perpres). Dalam penyusunan RDTR PKSN Atambua ini pemerintah pusat masih tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu. Sedangkan RDTR Perkotaan Halilulik masih diperlukan beberapa perbaikan sehubungan dengan adanya regulasi-regulasi terbaru terkait penataan ruang. Selain itu RDTR Perkotaan Halilulik sampai dengan saat ini belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

#### **2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

##### **a. Pembangunan Perumahan**

Urusan perumahan sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi perumahan menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Urusan perumahan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat akan rumah layak huni.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Belu merupakan salah satu penyebab timbulnya kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dan banyaknya rumah yang tidak layak huni di pedesaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin melalui rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, peningkatan air bersih, sanitasi, serta usaha perbaikan dan lingkungan permukiman pada umumnya. Pembangunan Rumah layak huni di Kabupaten Belu pada periode 2016-2021 sebanyak 5.248 Unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.29.

**Tabel 2.29**  
**Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	Unit
1	Rumah Khusus	285	-	13	-	100	100	<b>498</b>
2	Pembangunan Baru (PB)	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
3	Peningkatan Kualitas (PK)	-	1137	1001	1336	1114	157	<b>4745</b>
4	Rumah Kopel untuk Perbatasan	-	-	-	-	-	0	<b>0</b>
5	Rumah Susun	4	-	-	1	-	0	<b>5</b>
	Jumlah	<b>289</b>	<b>1137</b>	<b>1014</b>	<b>1337</b>	<b>1214</b>	<b>257</b>	<b>5248</b>

Sumber : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, 2021

Realisasi kinerja bidang perumahan di Kabupaten Belu periode 2016–2021 diukur dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Belu dari 64,10% di Tahun 2016 menjadi 66,00 % di Tahun 2021.

**Tabel 2.30**  
**Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Layak Huni ( Unit )	32380	NA	NA	NA	36689	22020
2	Rumah Tidak Layak Huni ( Unit )	18136	NA	NA	NA	16,652	11343
3	Total Rumah ( Unit )	50516	NA	NA	NA	53341	33363
4	Penduduk ( Jiwa )	207170	213596	216783	226039	227097	227097
5	Rasio Rumah Layak Huni = ( $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ )	0.16	NA	NA	NA	0.16	0.10
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni = ( $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}}$ )x100	64.10	NA	NA	NA	68.78	66.00

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Jumlah Backlog (KK)					4989	8702

Sumber: Dinas PUPR Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

## b. Persampahan

Produksi sampah di Kota Atambua semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas setiap tahunnya, baik sampah produksi rumah tangga, perdagangan/komersial, maupun industri. Kelemahan utama pada pengelolaan persampahan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan dengan produksi sampah yang ada, antara lain karena laju penumpukan volume timbunan sampah yang cukup tinggi, kurangnya sarana prasarana persampahan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan masyarakat dalam membangun sarana dan mengolah sampah. Pengembangan pelayanan persampahan ke depan dilakukan dengan memprediksi volume sampah yang dihasilkan, sehingga akan diketahui kebutuhan besaran layanan sampah sampai dengan titik keseimbangan. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang persampahan, serta perbaikan kualitas tata cara pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah). Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Pada Periode 2016–2021, kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan meliputi :

- 1) Tong sampah 3 pilah 60 liter : 205 unit
- 2) Tong sampah roda 120 liter : 250 unit
- 3) Tong sampah roda 240 liter : 10 unit
- 4) Tong sampah roda 660 liter : 25 unit
- 5) Alat pencacah sampah (chooper) : 5 unit
- 6) Mobil Tanki air : 1 unit



- 7) Motor Roda 3/otonastrida : 2 unit
- 8) Mobil Dump Truck : 1 unit
- 9) Mesin Press Plastik : 1 unit
- 10) Mesin potong rumput : 4 unit

Di Tahun 2021, tercatat bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belu didukung pula oleh 96 tenaga kebersihan. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Belu serta penanganan sampah skala perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.31**  
**Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Volume Timbulan SRT	m <sup>3</sup> /tahun	207.946,89	214.396,99	217.595,94	221.051,85	224.012,91	231.786
2	Volume Timbulan SSSRT	m <sup>3</sup> /tahun	14.800,65	14.696,80	15.901,77	15.763,84	15.976,47	16.722
3	Total Volume Timbulan sampah	m <sup>3</sup> /tahun	222.747,53	229.093,78	233.497,71	236.815,69	239.989,38	248.507,00
4	Total Volume sampah yang di angkut ke TPA	m <sup>3</sup> /tahun	30.729,00	34.152,00	54.020,00	32.152,27	40.668,30	43.614,00
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu	%	13,80	14,91	23,14	13,58	16,95	17,55

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021*

**Tabel 2.32**  
**Persentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Volume Timbulan SRT	m <sup>3</sup> /tahun	77447.34	83245	83050.28	84272.84	85338.83	87434.27
2	Volume Timbulan SSSRT	m <sup>3</sup> /tahun	11524.52	11878.1	12518.55	12355.14	12506.89	13202.45
3	Total Volume Timbulan sampah	m <sup>3</sup> /tahun	88971.86	95123.11	95568.83	96627.99	97845.71	100637.00





4	Total Volume sampah yang diangkut ke TPA	m <sup>3</sup> /tahun	30729	34152	54020	32152.27	40668.3	43614.00
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu	%	34.54	35.9	56.52	33.27	41.56	43.34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terukur, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Target penanganan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut adalah sebesar 75% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target tersebut, maka untuk skala kabupaten belu tingkat capaian penanganan sampah skala kabupaten adalah sebesar 22,55% atau masih terdapat gap/kesenjangan sebesar -58,08 poin, dan apabila dibandingkan pada skala perkotaan, maka capaian penanganan sampah perkotaan atambua adalah sebesar 55,18%, dengan gap/kesenjangan sebesar -33,62 poin.

Pada tahun 2021, target penanganan sampah skala kabupaten yang ditetapkan adalah sebesar 17,81%, realisasi penanganan sampah adalah sebesar 17,55%, dengan tingkat capaian penanganan sebesar 98,52%. Angka persentase realisasi penanganan sampah sebesar 17,55% tersebut didapat dari hasil proyeksi total volume timbulan sampah (SRT+SSSRT) kabupaten sebesar 248.507 M3/Tahun dibagi dengan total volume



penanganan (pengangkutan) sampah sebesar 43.614 M<sup>3</sup>/Tahun dan dinyatakan dalam satuan %.

Untuk mendapatkan Volume Timbulan Sampah Rumah Tangga (SRT) Tahun 2021, dilakukan dengan cara proyeksi menggunakan metode Jumlah kuadrat terkecil (least square methode). Penggunaan metode ini dilakukan karena data jumlah penduduk pada tahun 2021 belum dipublikasikan secara resmi dari BPS maupun dari instansi teknis, sedangkan untuk Volume Timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) dilakukan dengan cara proyeksi menggunakan metode Geometrik karena metode ini menghasilkan angka yang realistis dan tidak menunjukkan deviasi angka yang besar dari hasil capaian pada tahun 2016 s/d 2020.

Persentase penanganan sampah skala kota menggunakan formulasi yang sama, namun terdapat perbedaan pada angka total volume timbulan sampah kota yang lebih kecil yaitu sebesar 100.637 M<sup>3</sup>/Tahun sehingga persentase penanganan sampah skala kota tahun 2021 adalah sebesar 43,34%.

### **c. Penataan Kawasan Kumuh Kota Atambua**

Berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor 205/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2020. Lokasi Kawasan kumuh di maksud tersebar di Kecamatan Kota Atambua sebanyak 25.45 Ha yang tersebar di 2 Kelurahan, sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengatasi persoalan utama lainnya seperti kondisi layanan air bersih, sanitasi dan penanganan kumuh perkotaan untuk mencapai target nasional pada Tahun 2019 yaitu target strategi 100-0-100 yang artinya mencapai layanan air bersih 100%, lingkungan kumuh 0% dan sanitasi layak 100%.

Pada tahun 2021, tidak ada kegiatan untuk Penataan Kawasan Kumuh Kota Atambua sehingga luasan kawasan kumuh

belum mengalami perubahan yaitu seluas 25,45 Ha. Adapun persentase kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.33**  
**Lokasi Kawasan Kumuh yang Tertangani**  
**di Kabupaten Belu pada Tahun 2021**

No	Lokasi	Kecamatan	Luas	Penanganan	
				Tahun	%
1	Raimaten Fohomea (RT031-RW009)	Kota Atambua	4,31	-	-
2	Fatubena (RT015-RW005)	Kota Atambua	3,98	-	-
3	Fatubena (RT021-RW007)	Kota Atambua	5,54	-	-
4	Fatubena (RT024-RW004)	Atambua Barat	1,86	-	-
5	Fatubena (RT026-RW004)	Atambua Barat	5,71	-	-
6	Fatubena (RT034-RW003)	Atambua Barat	4,05	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>25.45</b>	<b>Total penanganan: 0 Ha</b>	<b>Persentase penanganan: 0 %</b>

*Sumber: SK Bupati Belu Nomor 205/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2021*

Total persentase penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Belu hingga Tahun 2021 mencapai 0% sedangkan Kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 25,45 Ha.

#### **2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Belu. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Belu dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban



Kabupaten Belu terlihat bahwa Tahun 2018 mengalami peningkatan angka kriminalitas sebagaimana yang tersaji pada grafik berikut.

**Grafik 2.41**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**



Sumber: SIPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu Tahun 2021

Adanya angka kriminalitas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Belu. Untuk menurunkan angka kriminalitas perlu ditambah jumlah pamong praja dan Linmas. Tambahan petugas keamanan dan ketertiban dapat membantu mengantisipasi tindakan kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Belu. Disamping itu pula pemerintah Kabupaten Belu juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh *stakeholder* dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Belu. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran perda pada Tahun 2021.

#### **2.1.3.1.6 Sosial**

##### **A. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**



Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat lebih dari 26 item untuk penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data di Belu menunjukkan bahwa di luar penduduk miskin, terdapat 3 jenis PMKS yang cukup tinggi yakni lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar.

**Tabel 2.34**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan PMKS	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak Terlantar	559	559	559	559	178
2	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	13	16	41	34	16
3	Anak Dengan Kedisabilitas	-	-	79	79	172
4	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	-	-	15	15	-
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	3	3	-
6	Lanjut Usia terlantar	1477	1477	1477	1477	885
7	Penyandang Disabilitas	669	669	669	669	780
8	Gelandangan	-	-	7	7	-
9	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	734	734	126
10	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	802	-	-	992
<b>Jumlah</b>		<b>2718</b>	<b>3523</b>	<b>3584</b>	<b>3577</b>	<b>3149</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Belu Tahun 2021*

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



**Tabel 2.35**  
**Capaian Urusan Sosial Tahun 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	71,00%	54,00%	55,31%	54,60%	127,75%
2	Persentase PMKS yang direhabilitasi	15,58%	11,68%	9,20%	6,99%	329%
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	11,74%	15,56%	18,79%	15,26%	123 %
4	Persentase PSKS yang diberdayakan	43,54%	43,46%	41,35%	41,63%	122,06 %

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Belu, 2021*

### **2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **2.1.3.2.1 Tenaga Kerja**

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Tabel 2.36 menyajikan capaian kinerja ketenagakerjaan.

**Tabel 2.36**  
**Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	180	200	30	0



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	0	50	73	38	2,11
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	309	260	266	95	84,12
4	Besaran kasus yang diselesaikan bersama (PB)	31	30	34	32	86,67
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	1889	1962	4916	5400	2,23

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu, 2021

### 2.1.3.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

**Tabel 2.37**

#### **Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Tahun 2021**

No	Uraian	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,72
2	Gender "Vocal Point"	0
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
4	Profil Gender dan Anak	1
5	Desa/Kelurahan Layak Anak	0

Sumber : SIPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021



**Tabel 2.38**  
**Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2017 -2021**

No	Jenis Kasus	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	Fisik	2	-	4	2	1	2	5	0	18	1
2	Psikis	1	-	2	1	4	3	6	0	3	3
3	Pelecehan Seksual	-	0		0	0	2	0	0	1	0
4	Penelantaran	4	2	14	0	2	1	3	1	7	3
5	Penganiayaan	2	2	6	6	4	4	3	1	3	4
6	Pemeriksaan	-	12	0	12	0	12	1	7	1	0
7	Lain-lain	10	5	20	16	15	7	0	27	1	12
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>25</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

### 2.1.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keseimbangan dan keberagaman gizi konsumsi 9 (sembilan) kelompok pangan yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lain. Skor PPH maksimum mencapai 100%, dan samapi dengan Tahun 2021 Kabupaten Belu telah mencapai skor PPH sebesar 84,58%. Angka ini menunjukkan semakin beragam dan hampir seimbang konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Belu.

Ketersediaan kecukupan kalori untuk setiap komponen bahan pangan tergolong tinggi yaitu 3603 Kkal/Hari; Protein 87,2 Gram/hari namun komsumsi kalori per kapita di Kabupaten Belu termasuk kategori tinggi yaitu hanya sebesar 3603 Kkal/Kapita/Hari dan berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/Kapita/Hari. Hal ini menunjukkan





keterjangkauan atau aksesibilitas pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat yang sudah baik.

#### **2.1.3.2.4 Pertanahan**

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebanyak 133 bidang dari 599 bidang tanah pemerintah. Terhadap tanah yang belum bersertifikat tersebut diantaranya merupakan tanah untuk saluran dan juga hasil dari pengakuan tanah – tanah dibawah jalan daerah, jalan perkotaan ataupun jalan lingkungan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Tahun Anggaran 2020 yang belum dapat dimohonkan penyertifikatannya karena menunggu peraturan yang berlaku.

**Tabel 2.39**  
**Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%)	16,36%	18,20%	20,87%	21,04%	21,20%	22,20%

*Sumber :SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu,2021*

#### **2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.



Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Belu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah dimanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

**Tabel 2.40**  
**Capaian Indikator Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016 -2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan	57,93	67,79	73,24	77,28	80,91	70,39
2	Indeks Kualitas Air	36,67	56,67	66	75	80	57,14
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,6	66,6	68,6	71,6	75,6	50,64
4	Indeks Kualitas Udara	76,31	85,37	86,66	87,14	88,9	93,36

*Sumber :SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Tahun 2021*

Dari data pada tabel tersebut indikator yang tidak mencapai target adalah IKA, IKTL dan IKLH, sedangkan yang mencapai target adalah IKU. Nilai indeks kualitas air (IKA) sebesar 57,14 poin, kurang dari target kabupaten yang ditetapkan sebesar 58,67 poin atau terdapat gap/kesenjangan -1,53 poin, namun dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 97,40%. Jika dibandingkan dengan rentang angka predikat IKA, maka nilai IKA kabupaten



Belu Tahun 2021 masuk dalam kategori “**sedang**” (rentang angka  $50 < IKA \leq 70$ ).

Hasil pengujian kualitas udara diperoleh indeks kualitas udara sebesar 93,36 poin, melebihi target kabupaten yang ditetapkan sebesar 92,88 poin dengan tingkat capaian 100,52%. Nilai IKU ini apabila disandingkan dengan rentang angka nilai IKLH termasuk dalam masuk predikat “**sangat baik**” (rentang angka  $90 < IKU \leq 100$ ), sedangkan capaian kinerja pada indikator IKTL diperoleh nilai 50,64 poin termasuk dalam predikat “**sedang**” (rentang angka  $50 < IKTL \leq 70$ ), jika dibandingkan dengan target kabupaten yang ditetapkan sebesar 53,56 poin, maka persentase pencapaian kinerja sebesar 94,56%.

#### **2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

**Tabel 2.41**  
**Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Penerbitan KTP (%)	81,54	86,57	81,9	84,96	86.17
2	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-18 Tahun (%)	73,66	78,41	78,41	79,53	79.20
3	Cakupan Penerbitan Akta Nikah (%)	19,22	23,81	23,81	26,84	28.48
4	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	86,95	87,97	87,97	87,37	89.70
5	Penerbitan Akta Kematian	NA	NA	NA	309	183



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	(dokumen)					
6	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	NA	NA	NA	14,01	18.34
7	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	NA	NA	NA	2,47	7.40

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu , 2021

Tabel 2.41 menunjukkan capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil periode 2017-2021. Capaian sampai dengan Tahun 2021 meliputi Cakupan Penerbitan KTP sebesar 86,17%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-18 Tahun sebesar 79,20%, Cakupan Penerbitan Akta Nikah sebesar 28,48%, Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 89,70%, Penerbitan Akta Kematian sebanyak 183 Dokumen, Cakupan Penerbitan KIA sebesar 18,34% dan Cakupan Pengelolaan GISA Kependudukan pada Desa/Kelurahan sebesar 7.40%. Capaian-capaian ini belum maksimal terutama terhadap target nasional, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan.

#### **2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, mandiri perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna,



pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangan desa/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.42**  
**Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase LPM berprestasi (%)	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PKK aktif (%)	12	100	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Bumdes Aktif (%)		69	33	96	57	57
5	Persentase Posyantek Aktif (%)						
6	Indeks Membangun Desa (IDM)	69	69	69	69	69	69
7	Fasilitasi pengelolaan BUMDES (Orang)	138	294	483	245	182	28
8	Fasilitasi Perencanaan dan penganggaran Desa (Desa)	69	69	69	69	69	69
9	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Paket)	1	1	N/A	N/A	N/A	-
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Desa (Dok)	69	69	N/A	N/A	N/A	-
11	Fasilitasi Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)-(Klpk)	11	16	N/A	N/A	N/A	-

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu Tahun 2021*

Selain capaian indikator di atas, salah satu indikator yang menggambarkan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah peningkatan status desa. Sampai dengan Tahun 2021 status desa di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.43**  
**Status Desa di Kabupaten Belu Tahun 2020-2021**

No	Status Desa	Jumlah Desa	%	2020	2021	%
1	Desa Sangat Tertinggal	1	1,45%	1	1	1,45%
2	Desa Tertinggal	24	34,78%	24	24	34,78%
3	Desa Berkembang	39	56,52%	39	39	56,52%
4	Desa Maju	5	7,25%	5	5	7,25%
<b>Jumlah Total</b>		<b>69</b>	<b>100%</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu, 2021*

#### **2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%).

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut:

**Tabel 2.44**  
**Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,24	1,17	1,17	1,09	
2	Rasio Akseptor KB (%)	55	56	56	57	72



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Total Fertility Rate (TFR) (%)	3,3	3,29	3,29	3,28	3,26
4	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	22,38	22,65	22,65	22,85	106
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	60,5	60,7	73,6	74,9	76,2
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja(BKR) ber-KB (%)	54	55	56,5	50	40
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	51,7	53	54	52	47
8	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	40	45	47	35,4	44
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	6,38	10,64	17,02	19,15	19,15

Sumber : SIPD, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB Tahun 2017-2021. Rata-rata rasio akseptor KB 72% dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sebanyak 3,26.

#### **2.1.3.2.9 Perhubungan**

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka mencapai target indikator bidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, maka indikator kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Belu adalah persentase kepemilikan KIR angkutan umum.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016- 2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
----	--------	------	------	------	------	------	------



1.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	40.12	40.11	40.12	62.6	58.49	59.31
----	--	-------	-------	-------	------	-------	-------

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2021*

Tabel di atas menunjukkan jumlah uji kir angkutan umum cenderung meningkat dari Tahun 2016–2021. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2020 sebesar 58,49% meningkat menjadi 59,31% pada tahun 2021.

#### **2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika**

Bidang urusan komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam mewujudkan misi ke 3 dari RPJMD Kab. Belu 2021-2026 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi. Urusan ini menjalankan fungsi dengan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan mewujudkan good governance serta sasarannya yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Hingga tahun 2021, capaian pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika masih minim karena belum menciptakan SPBE. Hal ini dikarenakan fokus pelaksanaan SPBE baru dimulai pada tahun 2022.

Pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur pula melalui indikator (i) Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit); dan (ii) pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (iii) jumlah website milik pemda; (iv) jumlah Perangkat Daerah yang memiliki jaringan internet; (v) Jumlah website Perangkat Daerah yang aktif. Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerja sama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:





**Tabel 2.46**  
**Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	0
2	Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit)	0	0	0	5	10	10
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%)	4	4	9	12	35	35

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu, 2021

Tabel di atas menunjukkan capaian urusan komunikasi dan informatika Tahun 2016–2021. Pengelolaan *e-government* di Kabupaten Belu belum maksimal, dikarenakan kurangnya *update* aplikasi yang ada dan pengelolaan terhadap aplikasi tersebut belum berjalan dengan baik. Disamping itu aplikasi *e-government* yang dimiliki oleh Kabupaten Belu belum terintegrasi sehingga pengelolaannya masih parsial di masing-masing OPD.

#### **2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Belu masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Belu terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan



menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.47**  
**Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Persentase Koperasi Aktif	73.29	71, 33	64.67	65.13	63.34	81.30
2	Persentase UKM Aktif	137.98	137.41	123.71	131.30	127.20	89.27

*Sumber : SIPD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021*

Tabel 2.47 menggambarkan capaian indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021, persentase koperasi aktif mengalami tren penurunan dari 73,29% di Tahun 2016 menjadi 63,34% di Tahun 202. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021, persentase koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 81,30% sedangkan persentase UKM aktif sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 89,27%.

#### **2.1.3.2.12 Penanaman Modal**

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha



atau investor untuk menanamkan modalnya.



**Tabel 2.48**  
**Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	N/A	83.47	88.37	88.64	88,84
2	Jumlah Investor PMDN/PMA (badan usaha)	12	23	65	87	20
3	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp milyar)	47,896	98,616	242,681	469,681	8,120
4	Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang)	9.33	43.57	29.71	26.36	98

*Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Tahun 2021*

Tabel di atas menunjukkan investasi di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 mengalami tren fluktuatif yang cukup signifikan dengan peningkatan yang cukup besar dari Tahun 2017-2020 dan mengalami penurunan yang cukup tinggi pada Tahun 2021, dengan angka sebesar 8,120 sehingga mengurangi nilai investasi dan Rasio daya serap tenaga kerja.

Beberapa penyebab rendahnya realisasi investasi saat ini karena perubahan sistem yang dipakai untuk pengurusan NIB dan pelaporan LKPM yaitu dari OSS versi 1.1 ke OSS-RBA sehingga mengakibatkan semua perusahaan WAJIB LKPM tidak dapat melakukan pelaporan tersebut karena data perusahaan tidak terbaca oleh sistem, pemberlakuan PP 7 Tahun 2021 mengakibatkan perusahaan yang memiliki investasi dibawah 1 Miliar tidak melakukan LKPM dan Pandemi Covid-19 membuat investasi mengalami kelesuan.



**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	JUMLAH PERUSAHAAN					JUMLAH KEKAYAAN (MILIAR RUPIAH)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	SIUP skala Mikro	90	85	134	89	122	2,63	2,82	3,58	2,34	88,22
2	SIUP skala Kecil	132	145	151	145	62	29,14	36,46	40,58	31,31	44,70
3	SIUP skala Menengah	33	37	43	18	11	37,08	46,41	66,82	29,57	38,51
4	SIUP skala Besar	1	0	3	0	6	30,00	-	44,32	-	144,76
<b>Jumlah</b>		<b>256</b>	<b>267</b>	<b>331</b>	<b>252</b>	<b>201</b>	<b>98,85</b>	<b>85,69</b>	<b>155,3</b>	<b>63,21</b>	<b>236,81</b>

*Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Tahun 2021*

Dari Tabel 2.49 di atas menunjukkan bahwa jumlah penerbitan Surat Izin Usaha Tahun 2021 sebesar 201. Tabel 2.50 menggambarkan Capaian Penerbitan Izin Tahun 2017-2021, dengan jumlah izin terbanyak yang diterbitkan pada Tahun 2021 adalah SIUP 253, TDU Pariwisata 55 dan IUJK 54, seperti yang sudah disajikan dalam Tabel 2.54, oleh karena perkembangan penerbitan perizinan berusaha pada tahun 2021 yang mengalami perubahan sejak tanggal 04 Agustus 2021 dengan diberlakukannya OSS-RBA bahwa Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku lagi. Sehingga untuk penerbitan izin usaha perdagangan berubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jumlah sebesar 776 termasuk penerbitan SIUP.

**Tabel 2.50**  
**Capaian Penerbitan Ijin Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No.	Tahun	Jumlah Izin Yang Diterbitkan		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	2017	1100	1018	92,55
2	2018	1000	786	78,60
3	2019	1200	1280	106,67

No.	Tahun	Jumlah Izin Yang Diterbitkan		Capaian %
		Target	Realisasi	
4	2020	1300	1156	88,92
5	2021	1400	1023	73,07
<b>Total</b>		<b>6000</b>	<b>5263</b>	87,72

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Tahun 2021

### 2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan terhadap organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

**Tabel 2.51**  
**Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	0	5,2	6,5	7
2	Cakupan pembinaan olahraga (%)	0	1,6	1,4	1,4	1,4
3	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	0	0	7,8	7,8	8,5
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	0	0	5,8	5,8	5,8
5	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (cabor)	0	0	70	92	92

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, 2021

Tabel 2.51 menggambarkan capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021, persentase organisasi pemuda yang



aktif mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, cakupan pembinaan olahraga dari Tahun 2020 ke 2021 masih berada pada angka yang sama yaitu 1,4%, cakupan pembinaan atlet muda mengalami kenaikan, cakupan pelatih bersertifikat memiliki nilai stagnan, jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkanpun masih memiliki nilai stagnan. Hal ini menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga belum optimal.

#### **2.1.3.2.14 Statistik**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang andal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Indikator capaian urusan statistik Tahun 2017-2021 antara lain ketersediaan buku Kabupaten Belu Dalam Angka, Profil Kabupaten Belu dan SIPD.

**Tabel 2.52**

#### **Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Pengembangan data informasi dan statistik (dokumen)	9	12	14	17	17

*Sumber: SIPD, BP4D Kabupaten Belu, 2021*

#### **2.1.3.2.15 Persandian**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi



persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

#### **2.1.3.2.16 Kebudayaan**

Kegiatan even budaya Tahun 2020 tidak diselenggarakan disebabkan ada pembatasan mobilisasi orang dan larangan berkumpul akibat Pandemi COVID-19. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Belu terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.53**  
**Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	4	7	7	0	0
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi (unit)	25	1300	1300	1300	1300

*Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, 2021*

#### **2.1.3.2.17 Perpustakaan**

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran perpustakaan di Kabupaten Belu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 2.54**  
**Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Judul koleksi buku di perpustakaan (eksemplar)	0	6.594	7.137	7.395	21.340

*Sumber : SIPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2021*





Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Belu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Meskipun jumlah perpustakaan pada tahun terakhir tidak ada peningkatannya, namun jumlah koleksi buku perpustakaan terdapat peningkatan.

#### **2.1.3.2.18 Kearsipan**

Salah satu ukuran yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah adalah tertib tidaknya kearsipan daerah. Melalui arsip yang baik, dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan akan mudah ditemukan. Karenanya, tertib arsip menjadi cermin administrasi modern. Capaian Kinerja Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.55**

#### **Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan (Dok)	0	627	670	558	3651

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, 2021*

#### **2.1.3.2.19 Perencanaan Pembangunan**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Belu, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.56**

#### **Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersusunnya dokumen rencana prioritas pembangunan Kecamatan (Dokumen)	2	3	4	5	6
2	Tersusunnya dokumen rencana prioritas pembangunan Kabupaten	2	3	4	5	6

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	(Dokumen)					
3	Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang ekonomi (Dokumen)	2	3	4	5	6
4	Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang sosial budaya (Dokumen)	2	3	4	5	6
5	Tersusunnya dokumen rencana prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (Dokumen)	2	3	4	5	6
6	Pengembangan data informasi dan Statistik	6	9	12	14	17
7	Ketersediaan dokumen Hasil kajian penelitian dan pengembangan (Dokumen)	1	3	3	5	7
8	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kecamatan (%)	82	84	86	88	90
9	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kabupaten (%)	65	70	75	75	75
10	Tersedianya dokumen RTRW, RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)	2	2	2	3	4
11	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP (dokumen)	4	6	8	10	12
12	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan kabupaten (dokumen)	1	2	3	4	5
13	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BP4D Kabupaten Belu, 2021

Indikator urusan penunjang perencanaan, yaitu terealisasinya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan



PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD dan Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, jumlah dokumen perencanaan pembangunan, persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD, dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah disahkan dalam status “Ada”.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kecenderungan meningkat, Tahun 2017 sebanyak 2 buah dan Tahun 2021 sebanyak 6 buah. Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan kabupaten meningkat dari 2017 sebesar 65% menjadi 75% di Tahun 2018 hingga tahun 2021.

#### **2.1.3.2.20 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.57**  
**Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017 – 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	871	394	65	73	225
2	Pembinaan politik kepada masyarakat	611	357	146	179	114
3	Menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/ Demonstrasi (Kasus)	5	9	4	3	4

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu, 2021*



Indikator kinerja urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Belu Tahun 2017–2021 di antaranya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan politik kepada masyarakat dan menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/demonstrasi. Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pembinaan politik kepada masyarakat Tahun 2017–2021 jumlah pesertanya berfluktuatif. Jumlah demo berfluktuatif, Tahun 2016 sebanyak 8 menjadi 5 di Tahun 2017, naik menjadi 9 di Tahun 2018 dan turun menjadi 4 pada Tahun 2021.

#### **2.1.3.2.21 Sekretariat DPRD**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 31, mengamanatkan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Adapun indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.58**

**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2021**

No.	Uraian	2021
1	Jumlah Perda yang dihasilkan	40 Perda

*Sumber : SIPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2020*

**2.1.3.2.22 Pemerintahan Umum**

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Capaian indeks reformasi



birokrasi Kabupaten Belu tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.59**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2021**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot	Nilai
			2021
<b>A</b>	<b>KOMPONEN PENGUNGKIT</b>		
I	Pemenuhan	20.00	7.75
II	Hasil Antara Area Perubahan	10.00	4.79
III	Reform	30.00	7.07
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60.00</b>	<b>19.61</b>
<b>B</b>	<b>KOMPONEN HASIL</b>		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	6.61
2	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	7.30
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	7.38
4	Kinerja Organisasi	10.00	3.62
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40.00</b>	<b>24.91</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100.00</b>	<b>44.52</b>

*Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Belu, 2021*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu mengalami peningkatan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu pada Tahun 2021 meningkat dengan nilai sebesar 44,52 (C=agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan mendasar). Capaian ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Beberapa prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Belu yaitu:

- a. Konsistensi implementasi program reformasi birokrasi pada pemerintahan Kabupaten Belu masih belum optimal, hal ini dapat terlihat pada tahun 2019, Pemerintahan Kabupaten Belu telah mengisi penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB), sehingga dilakukan evaluasi penerapan reformasi birokrasi,



hanya saja pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Belu mengajukan PMPRB;

- b. Berbagai kebijakan dan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu belum tersosialisasi dan terinternalisasi secara efektif dan merata kepada seluruh individu pegawai, mulai dari level jabatan tertinggi hingga ke level jabatan paling rendah. Hal ini mengakibatkan belum adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Tim Reformasi Birokrasi belum berperan secara intensif dan konsisten dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Belu, hal ini ditandai dengan rencana kerja reformasi birokrasi yang sebagian besar belum dilaksanakan dengan baik serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih banyak dilakukan pada Perangkat Daerah (PD) tertentu saja yang terlibat dalam kelompok kerja reformasi birokrasi, sedangkan pada sebagian besar PD yang lain, pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilakukan;
- d. Agen perubahan yang bertugas sebagai roda penggerak perubahan di instansi pemerintah belum ditetapkan, sehingga perubahan-perubahan yang dapat memicu penerapan reformasi birokrasi belum terlihat;
- e. Belum dilakukan reviu secara berkala terhadap system pengendalian penyusunan perundangan, hal ini menggambarkan bahwa system penataan perundangan pada Pemerintah Kabupaten Belu masih perlu dioptimalkan;
- f. Belum terlihat kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja yang akan diwujudkan dan belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengukur jenjang organisasi, hal ini berpotensi menghambat pencapaian kinerja yang akan

diwujudkan;

- g. Pengelolaan manajemen SDM masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian, selain itu, belum sepenuhnya terdapat insiasi terhadap pengelolaan kinerja individu, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur di Kabupaten Belu, sehingga penguatan system manajemen SDM pada Kabupaten Belu belum berjalan dengan optimal;
- h. Penerapan system integritas dengan implementasi kebijakan penguatan pengawasan seperti pengendalian gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dan benturan kepentingan sebagian besar belum diterapkan dengan maksimal;
- i. Belum dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, sehingga masukan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayan publik, belum dapat diakomodir;
- j. Hasil dari survei kepuasan masyarakat belum dijadikan acuan dalam proses monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, sehingga arah perbaikan pelayanan publik belum dapat disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara setiap tahunnya. Nilai AKIP Kabupaten Belu pada Tahun 2021 mencapai 51,6 dengan kategori CC, sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:





**Grafik 2.43**  
**Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2021**



*Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belu Tahun 2021*

Berdasarkan grafik di atas, nilai AKIP terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2018 dengan nilai 2,78 dari Tahun 2017, tingkat akuntabilitas kinerja juga berubah dari C menjadi CC. Capaian dari Tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal sehingga tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah belum berubah, untuk itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain:

- a. Perangkat Daerah belum seluruhnya memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra) sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis Kinerja.
- b. Masih ada Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur.
- c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memrasyarkan adanya kinerja yang terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya.

d. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Sementara itu, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belu dari Tahun 2016-2018 berfluktuatif. Pada Tahun 2016 hasil evaluasi LPPD mendapatkan nilai skor 2,6561 (kategori tinggi), naik menjadi 2,6658 (kategori tinggi) dan turun menjadi 2,5439 (kategori tinggi) di Tahun 2018. Nilai LPPD Kabupaten Belu pada Tahun 2016 menempati peringkat ke 328 (tiga ratus dua puluh delapan) dan Tahun 2017 menempati peringkat 304 (tiga ratus empat) dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Belu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut.

**Tabel 2.60**  
**Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,6658	2,5439	N/A	N/A	N/A
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	304	N/A	N/A	N/A	N/A

*Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021*

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada indeks reformasi birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespons perubahan kewenangan dan urusan dalam tata kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Urusan wajib dan urusan pilihan diampu oleh 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Adanya 41 OPD yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Belu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

**Tabel 2.61**  
**Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu**

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian)	Fungsi penunjang untuk: a. Perumusan penyusunan kebijakan daerah b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah c. Pengoordinasian pelayan administratif dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara d. Penetapan pemantauan dan evaluasi perangkat daerah
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi penunjang pendukung kegiatan DPRD



<b>No.</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Tugas Pokok dan Fungsi</b>
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan
5.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi penunjang keuangan
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Fungsi penunjang kepegawaian dan diklat
7.	Inspektorat	Fungsi penunjang pengawasan
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
9.	Dinas Kesehatan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan pemerintahan bidang komunikasi informasi, bidang statistik dan persandian
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang pendidikan; kebudayaan
15.	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan
16.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan.
17.	Dinas Sosial	Urusan pemerintahan bidang sosial
18.	Dinas Pariwisata	Urusan pemerintahan bidang pariwisata
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan
21.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; transmigrasi
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian
	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro	Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
23.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
24.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	Fungsi penunjang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan
28.	Badan Kesbangpol	Urusan Kebangsaan dan Politik
29.	Badan Pengelola Perbatasan	Urusan pengelolaan perbatasan
30.	Kecamatan (12), Kelurahan (12)	Fungsi penunjang untuk: a. Pengoordinasian urusan pemerintahan umum b. Pengoordinasian urusan ketenteraman dan ketertiban c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan d. Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum h. Pengoordinasian pemerintahan kelurahan

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-size*). Namun pada implementasinya terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan



- urusan yang sama yaitu urusan pertanahan;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BP4D masih melaksanakan tugas terkait informasi dan publikasi Pembangunan Daerah;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

#### **2.1.3.2.23 Administrasi Keuangan Daerah**

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2018-2021 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, kinerja keuangan daerah Kabupaten Belu masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD Tahun 2021 baru mencapai 9,87%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Belu masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.62**  
**Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017–2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase proporsi PAD terhadap APBD (%)	10.55	9.57	8.89	9.11	8,19
3	Persentase belanja publik terhadap APBD (%)	26.43	20.50	21.46	18.44	11.28
4	Persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	118.77	114.11	116.53	91.65	135,36
5	Cakupan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset secara akuntabel (%)	60	65	70	78	82
6	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	1.58	2.44	2.26	16.90	2.41

*Sumber : BPKAD Kabupaten Belu Tahun 2021*

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di Bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Kultur budget maximer belum bisa dihilangkan.
- b. Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat.
- c. Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah
- d. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.



Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Belu belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa proses sertifikasi juga belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya komitmen pengguna barang dalam pengelolaan barang yang menjadi tupoksinya;
- b. Kurangnya pemahaman beberapa pengurus dan penyimpan barang di perangkat daerah terhadap administrasi pengelolaan BMD;
- c. Terbatasnya personel yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA barang;
- d. Belum sinerginya perencanaan anggaran dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan.

#### **2.1.3.2.24 Sekretariat Daerah**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat



- daerah;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - c. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.63**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu**  
**Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2021</b>
1	Nilai SAKIP	CC/51.60
2	LPPD	2.6
3	Persentasi Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	25%
4	Persentasi rumusan kebijakan bidang perekonomian	37.50%
5	Proporsi kesesuaian program pembangunan	94.79%
6	Proporsi pengadaan barang dan jasa	100%

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021*

#### **2.1.3.2.25 Kepegawaian**

Pemerintah Kabupaten Belu melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nnegara (ASN) untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara kualitas ASN Kabupaten Belu sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai, sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Pejabat Kabupaten Belu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan baru mencapai 35,76% bagi telah mengisi seluruh jabatan struktural yang ada, capaian urusan kepegawaian pendidikan dan pelatihan tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.64**  
**Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kabupaten Belu Tahun 2021**

No	Uraian	2021
1	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah	45.69%
2	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	29.98%

*Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021*

#### **2.1.3.2.26 Bidang Bencana**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Adapun indikator urusan pemerintahan bidang bencana Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.65**  
**Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana**  
**Kabupaten Belu Tahun 2016–2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase desa tangguh bencana	0	0	0	0	0	3,7

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belu , 2021*

Capaian kinerja bidang bencana yaitu persentase desa tangguh bencana pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,7% yaitu terdapat 3 (tiga) desa tangguh bencana dari 81 Desa/Kelurahan di Kabupaten Belu. Desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Fatuketi sebagai desa tangguh bencana banjir;
2. Desa Silawan sebagai desa tangguh bencana Tsunami; dan
3. Desa Fulur sebagai desa tangguh bencana tanah longsor.

#### **2.1.3.2.27 Pembinaan dan Pengawasan**

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Belu sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada.

**Tabel 2.66**  
**Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Level Kapabilitas APIP		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
2	Maturitas SPIP		2,85	2,85	2,85	2,85
3	Proporsi Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan operasional dan khusus) (dokumen)	108	110	120	130	0
4	Persentase tindak lanjut temuan	77	77,66	79	88,67	0



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	(%)					
5	Persentase Review dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah (%)	100	100	100	100	0
6	Proporsi Evaluasi LKIP OPD (%)	100	100	100	100	0

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belu, Tahun 2021

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Belu belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

- 1) Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan;
- 2) Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRIK;
- 3) Penerapan SPIP belum maksimal;
- 4) Belum adanya aplikasi e-LHP.

SPIP di Kabupaten Belu mulai dilaksanakan pada Tahun 2021 di 6 satuan organisasi pemerintah daerah antara lain Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Sedangkan level kapabilitas APIP di Kabupaten Belu masih pada level 3, guna meningkatkan ke level 4 diperlukan persyaratan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Satgas;
- 2) Menyusun Perbup tentang pedoman penilaian risiko;
- 3) Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP;
- 4) Standarisasi evaluator sejumlah  $\pm$  49 evaluator.

Disisi lain persentase fungsional auditor di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2021 baru mencapai 38,71%, terdapat peningkatan 1,98% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai persentase 36,73% sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.67**  
**Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Fungsional Auditor	18,37%	22,45%	30,61%	36,73%	38,71%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Belu, 2021

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.1.3.3.1 Perikanan

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai jual. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Tabel 2.68 menyajikan perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021, Angka produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun 2020. sedangkan produksi perikanan air tawar Tahun 2016-2021 mengalami tren penurunan mulai Tahun 2019 hingga tahun 2021.

**Tabel 2.68**

#### **Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1,513.70	1,517.28	1,573.80	1,675.52	1,620.83
2	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton)	28.2	26.6	24.5	16.2	20.30
3	Persentase belanja publik terhadap APBD (%)	116.2	102.4	72.8	42.7	55.50
4	Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang)	6.1	6.9	15.4	16.4	28

Sumber: SIPD, Dinas Perikanan Kabupaten Belu 2021

#### 2.1.3.3.2 Pariwisata

Urusan pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta



meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu dibagi menjadi 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) yaitu: (1) KPP Motaain dan sekitarnya; (2) KPP Kota Atambua dan sekitarnya; (3) KPP Fulan Fehan dan sekitarnya; (4) KPP Mandeu dan sekitarnya. Keempat KPP ini fokus pada wisata alam dan wisata minat khusus. Perkembangan indikator urusan pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut ini.

**Tabel. 2.69**  
**Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Revitalisasi Destinasi Wisata (unit)	2	2	1	3	2
2	Lama Kunjungan Wisata (hari)	1	1	1	1	1
3	Kunjungan Wisata (%)	19.91	10.59	19.91	5.02	3,36
4	PAD Sektor Pariwisata (%)	2.81	3.90	4.16	4.45	1,99

*Sumber : SIPD, Dinas Pariwisata, Kabupaten Belu 2020*

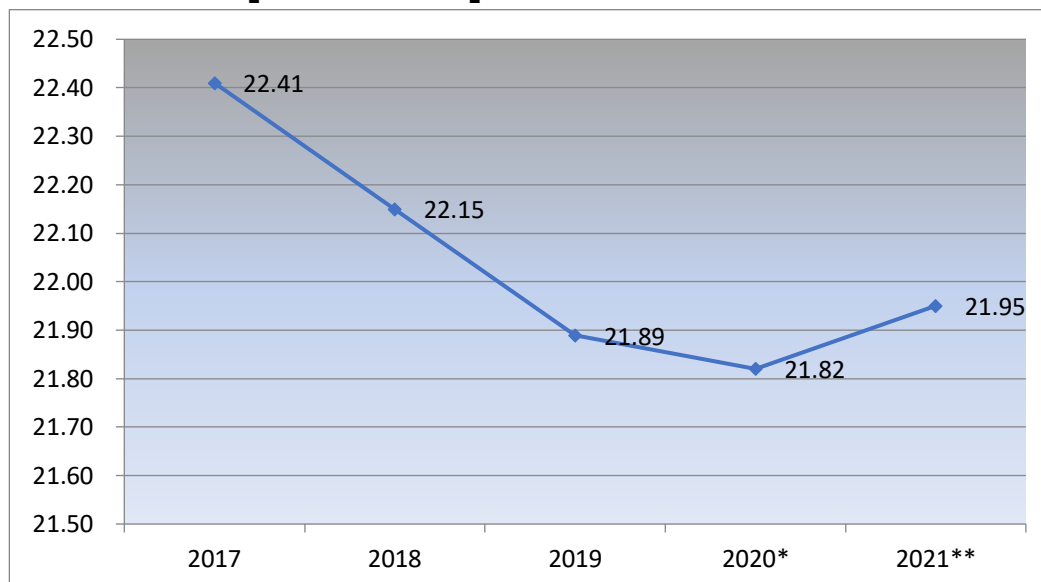
Tabel di atas menyajikan perkembangan urusan pariwisata antara lain persentase kunjungan wisata yang berfluktuatif. Penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020 hingga 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19. Lama kunjungan wisata stagnan selama 5 (lima) Tahun terakhir, oleh karena itu diperlukan program-program inovatif di bidang pariwisata agar menarik wisatawan untuk berkunjung dan menginap lebih lama.

#### **2.1.3.3.3 Pertanian**

Pertanian meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bina kelompok tani. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Grafik 2.44**  
**Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel 2.70 menyajikan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian 2017-2021.

**Tabel 2.70**  
**Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi produktivitas tanaman padi sawah (ton/ha)	3.65	3.73	3.65	3.56	3.82
2	Proporsi produktivitas tanaman kacang tanah (ton/ha)	1.59	1.60	1.59	1.28	1.40
3	Proporsi produktivitas tanaman kacang hijau (ton/ha)	0.78	0.87	0.87	0.68	0.82
4	Proporsi produktivitas tanaman jagung (ton/ha)	2.96	3.3	3.02	2.91	3.87



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
5	Proporsi produktivitas tanaman <i>maek bako</i> (ton/ha)	150	77	5.58	0	270
6	Proporsi produktivitas tanaman jambu mete (ton/ha)	40	0	0	0	2.242
7	Proporsi produktivitas tanaman kopi (ton/ha)	10	20	10	10	150
8	Proporsi produktivitas tanaman cabai (ton/ha)	1.95	2.26	2.42	2.35	3.98
9	Proporsi produktivitas tanaman bawang merah (ton/ha)	3.65	3.65	3.79	3.7	3.89
10	Proporsi produktivitas tanaman bawang putih (ton/ha)	3.66	4.04	3.95	3.86	3.98
11	Proporsi produktivitas tanaman pisang (ton/ha)	10	10	10	10	10

Sumber: SIPD, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021

Perkembangan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif (data pada Tabel 2.70). Fluktuatifnya produktivitas komoditas pertanian ini dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak menentu akibat *el nino* maupun *la nina*, kemampuan inovasi adopsi teknologi oleh petani yang masih lemah, di samping modal usaha yang terbatas, luas lahan garapan yang kecil (hanya 0,6 Ha per KK tani) serta angkatan kerja produktif yang kurang berminat dalam sektor pertanian tanaman pangan.

#### **2.1.3.3.4 Peternakan**

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah target pengembangan usaha peternakan secara nasional, karena didukung oleh karakter wilayah serta mempunyai potensi padang penggembalaan yang cukup luas dan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. Potensi tersebut merupakan suatu kekuatan dan peluang bagi daerah untuk melakukan pembangunan pada





sub sektor peternakan untuk dikelola secara lebih profesional demi meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.

**Tabel 2.71**  
**Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Populasi ternak sapi (ekor)	69,621	70,667	71,731	72,806	64,458
2	Populasi ternak babi (ekor)	56,712	57,682	58,666	52,256	28,435
3	Populasi luas lahan pengembangan HMT (ha)	30	20	32	15	15
4	Mempertahankan persentase vaksin ternak (%)	59	70.81	71.24	69.48	70
5	Meningkatnya kelas kemampuan tani ternak menjadi kelas madya (%)	0	0	0	0	1,02

*Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021*

Tabel 2.71 di atas menyajikan capaian bidang peternakan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021. Populasi ternak sapi meningkat dari 69.621 ekor di Tahun 2017 menjadi 64.458 ekor di Tahun 2021. Populasi ternak babi mengalami tren penurunan dari Tahun 2019-2021, tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2021 menjadi 28.435 ekor, hal ini diakibatkan oleh penyakit Flu Babi (*African Swine Fever*) yang merebak di Pulau Timor. Proporsi luas lahan pengembangan HMT selama lima tahun berjalan secara fluktuatif, tren peningkatan terjadi pada tahun 2017-2019 dan terjadi penurunan Tahun 2020-2021 dengan capaian angka yang sama sebesar 15Ha. Capaian persentase vaksinasi memiliki capaian 70% di Tahun 2021.

Tabel 2.72 menyajikan data pengeluaran jumlah ternak yang diantarpulaukan/dimutasi keluar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.72**  
**Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Jenis Ternak				
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
1	2017	4,611	51	40	320	59
2	2018	4,804	50	42	22	107
3	2019	4,804	50	30	351	22
4	2020	4,407	20	10	0	7
5	2021	4,440	20	30	170	7

*Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021*

#### **2.1.3.3.5 Perdagangan**

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator: (i) kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten; (ii) Jumlah pembangunan pasar; (iii) Ekspor bersih perdagangan (%); (iv) Jumlah jasa pelayanan terhadap UTTP. Perdagangan di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam daerah dengan pangsa pasar yang ada di Kabupaten Belu sendiri seperti pasar desa/pasar perbatasan berupa pasar harian dan pasar mingguan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 13,78%, yang berarti bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan darat langsung dengan negara RDTL merupakan potensi untuk pengembangan ekspor komoditi terutama komoditas unggulan.



### 2.1.3.3.6 Perindustrian

Indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui indikator: (i) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kabupaten (ii) Cakupan bina kelompok usaha industri (%); (iii) Jumlah event promosi produk unggulan daerah. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.73**  
**Capaian Indikator Urusan Perindustrian**  
**Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten	1,11	1,11	1,1	1,09	1,09
2	Cakupan Bina Kelompok usaha industri (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah event promosi produk unggulan daerah (kali)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan Perdagangan dan Industri Tahun 2021

Industri di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh industri kecil dan industri rumahan, sebagian besar pangsa pasarnya di wilayah Kabupaten Belu dan khusus untuk meubeler sebagian diekspor ke negara RDTL. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung stagnan sebesar 1,1% menandakan bahwa sektor industri belum berkembang.

### 2.1.3.3.7 Transmigrasi

Transmigrasi adalah sistem pengembangan terpadu yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk pelaksanaan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat sebagai upaya untuk pengembangan wilayah. Peningkatan jangkauan pelayanan transmigrasi di Kabupaten Belu dengan



sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat. Indikator urusan transmigrasi yaitu tersusunnya dokumen perencanaan transmigrasi. Intervensi dari Kabupaten masih di bidang pemberdayaan, sedangkan bidang pembangunan transmigrasi masih sebatas perencanaan.

**Tabel 2.74**

**Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Transmigrasi (dokumen)	1	1	1	0	0

*Sumber: SIPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2020*

**2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

**2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

**2.1.4.1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita**

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

**Tabel 2.75**

**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran	345.947	361.662	262.708	413.017	426.449

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Konsumsi Rumah Tangga per Kapita					
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita	258.750	258.509	670.364	741.934	772.546

Sumber: BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2021

#### **2.1.4.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Belu telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); melakukan optimalisasi retribusi daerah; mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Perolehan DAU, Lain-lain Pendapatan yang Sah, serta Bagi Hasil Pengelolaan Aset Pusat di daerah. Gambaran tentang kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu sebagaimana tergambar dalam Bab III.

#### **2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)**

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah

satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kabupaten Belu belum dapat memberikan gambaran Nilai Tukar Petani terhadap semua komoditas pertanian, hal ini dikarenakan belum ada lembaga yang melakukan penelitian terhadap semua jenis komoditas pertanian. Pada tahun 2020 Kabupaten Belu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu baru dapat melakukan Penelitian terhadap 1 (satu) Komoditas pertanian yakni Penelitian terhadap Nilai Tukar Bawang Putih dengan lokus kegiatan di 2 (dua Kecamatan) yakni Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa rerata harga yang diterima petani mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Peningkatan terjadi karena adanya kenaikan harga jual komoditas bawang putih setiap tahunnya.

Berikut Tabel Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal di Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020.

**Tabel 2.76**  
**Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal**  
**Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020.**

Tahun	Index Harga yang dibayar (IB)	Index Harga Yang Diterima (IT)	NTP
2018	108,27	100,24	92,58709104
2019	106,23	103,20	97,14730347
2020	103.65	102,86	99,24636195

*Sumber : data Diolah berdasarkan hasil isian Kuisisioner, 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat memberikan informasi bahwa NTP atau kesejahteraan petani bawang putih varietas lokal di kabupaten belu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami defisit, artinya kenaikan harga jual bawang putih relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsi ditandai dengan Nilai NTP yang kurang dari 100. Fenomena pergerakan nilai NTP bawang putih varietas Lokal dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh

kondisi harga yang dibayarkan dan diterima oleh petani tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai data NTP bawang putih varietas local di Kabupaten Belu dapat diketahui bahwa harga yang diterima petani bawang putih di Kabupaten Belu relative meningkat setiap tahun, meskipun dalam besaran yang kecil yaitu sebesar 0,13% tahun 2018, 2,98 % tahun 2019, dan 2,79 tahun 2020. Harga yang dibayar petani (IB) bawang putih varietas local relative meningkat meningkat setiap tahun dengan peningkatan terbesar pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,3% jika dibandingkan dengan peningkatan harga yang dibayarkan pada tahun 2019 sebesar 6,2% dan tahun 2020 sebesar 3,6%.

Dalam rangka peningkatan NTP bawang putih local Belu dan komoditas lainnya serta meningkatkan kesejahteraan petani lainnya maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui kegiatan:
  1. Melakukan pemulihan bibit;
  2. Menumbuhkan penangkar-penangkar benih;
  3. Penerapan paket teknologi intensifikasi (Sapta Usaha Tani);
  4. Perluasan areal tanam dan peningkatan intensitas pertanaman;
  5. Penataan Pola Usaha Tani dan Pola Tanam;
  6. Pengembangan Usaha Tani Belu Organik;
  7. Peningkatan Kapasitas petani.
- b. Strategi Peningkatan Kapabilitas Petani melalui optimalisasi Sistem penyuluhan kelembagaan petani melalui kegiatan :
  1. Penumbuhan Petani Muda;
  2. Penumbuhan penyuluh Swadaya;
  3. Penumbuhan, penilaian dan peningkatan kelas



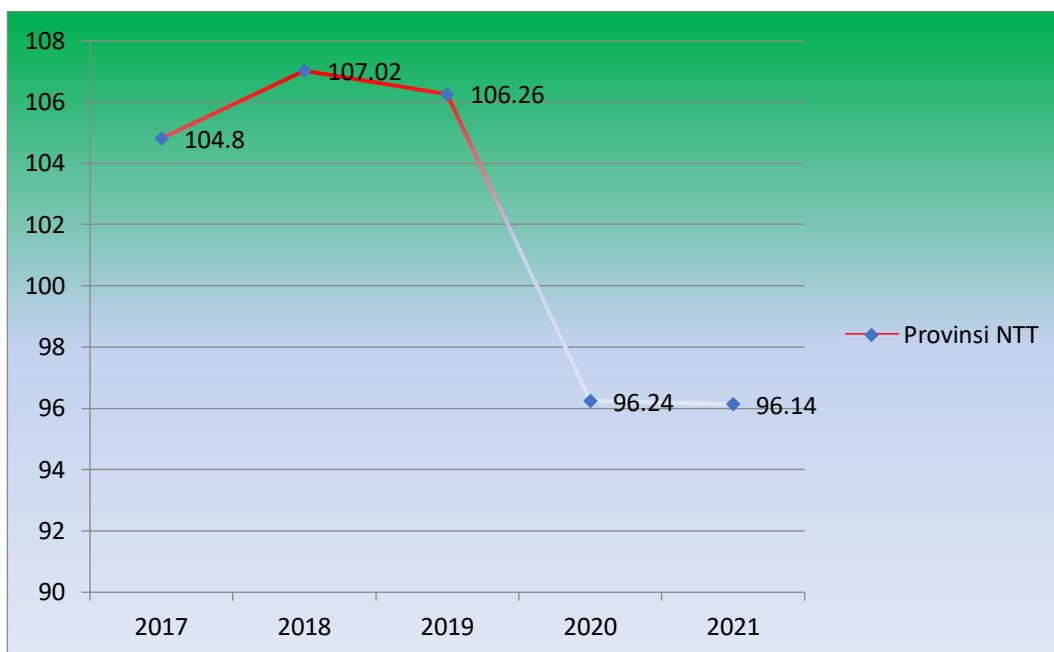
- kemampuan kelompok tani;
4. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
- c. Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dengan kegiatan:
1. Penetapan Kawasan-kawasan sentra produksi meliputi lokasi Petani, Kelompok Tani pelaksana serta pola pemasaran;
  2. Peningkatan skala ekonomi usaha petani dan kelompok tani;
  3. Pengembangan system agribisnis hulu dan hilir;
  4. Penumbuhan Koperasi kelompok tani;
  5. Pengembangan agroindustry;
  6. Pemberdayaan BUMDes sebagai ATM petani/kelompok tani.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan pada komoditas Bawang putih ini merupakan satu dari sekian banyak komoditas yang berada di Kabupaten Belu sehingga tentunya tidak dapat mewakili semua komoditas, dengan demikian diharapkan kedepan akan dilakukan penelitian ilmiah di berbagai komoditas unggulan di kabupaten ini sehingga dapat memberikan gambaran yang pasti tentang kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani di kabupaten Belu kedepan.

NTP Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 tidak dilakukan survei oleh BPS, sebagai data pembanding dalam dokumen ini diambil NTP Provinsi NTT.



**Grafik 2.45**  
**Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Provinsi NTT Tahun 2021

Data pada grafik di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan petani di NTT termasuk Kabupaten Belu masih rendah, karena nilai yang dikeluarkan petani masih lebih tinggi dari nilai yang diterima petani. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha tani yang digeluti petani yang meliputi penerapan teknologi tepat guna, dukungan perkuatan modal dan manajemen usaha tani.

## **2.1.4.2 Fokus Fasilitas Daerah/Infrastruktur**

### **2.1.4.2.1 Perhubungan**

Fungsi sektor perhubungan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor perhubungan tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia tetapi juga mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dan membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Sektor perhubungan berfungsi sebagai penunjang pembangunan (*the promotion sector*) dan pemberi jasa



(the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi. Adapun capaian dari urusan perhubungan Kabupaten Belu pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.77**

**Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	40.12	40.11	40.12	62.6	58.49	59.31

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2021

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa arus masuk dan keluar orang dan barang di Kabupaten Belu masih termasuk lancar, dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan volumenya seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Belu.

**2.1.4.2.2 Penataan Ruang**

Penataan wilayah di Kabupaten Belu bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten. Indikator capaian urusan penataan ruang Kabupaten Belu adalah persentase dokumen rencana rinci. Capaian kinerja urusan penataan ruang Tahun 2021 adalah nol persen karena sesuai target kinerja bidang penataan ruang pelaksanaannya akan dikerjakan pada Tahun 2023.

**2.1.4.2.3 Penunjang Urusan Pemerintahan**

Penunjang urusan pemerintahan yang mendukung fokus fasilitas wilayah dan juga mendukung aspek daya saing adalah indikator jumlah bank dan jumlah hotel/penginapan yang digambarkan sebagai berikut:



**Tabel. 2.78**  
**Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bank (Kantor pusat, Kantor Cabang, KCP, Unit )	26	26	26	27	27
2	Jumlah Hotel	12	12	12	12	12

*Sumber : BP4D Kabupaten Belu Tahun 2020*

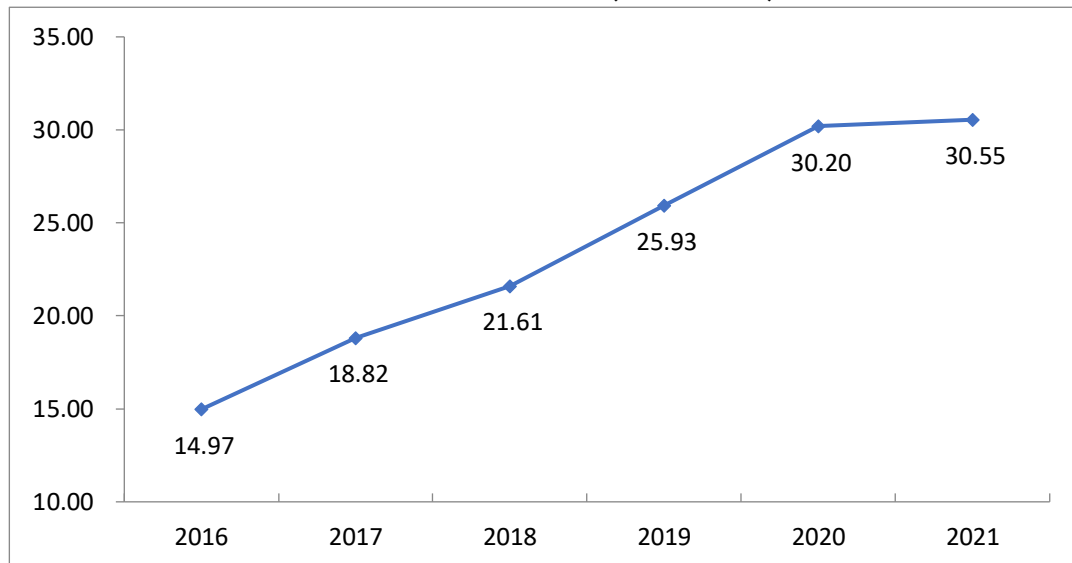
Sampai dengan Tahun 2021 lembaga perbankan yang berkembang di Kabupaten Belu sebanyak 27 Bank, dengan perincian 2 Kantor Pusat, 4 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu dan 17 Kantor Unit, yang didukung dengan ketersediaan ATM sebanyak 39 unit. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan atau orang yang berkunjung ke Kabupaten Belu baik untuk urusan keluarga, wisata maupun bisnis atau pekerjaan, didukung dengan ketersediaan hotel/penginapan sebanyak 12 hotel kelas melati dan juga fasilitas amenities lainnya seperti rumah makan, restoran, dan lain-lain. Hal ini memberikan gambaran bahwa dari aspek daya saing daerah, Kabupaten Belu sangat memiliki potensi yang memadai.

#### **2.1.4.2.4 Rumah Tangga menggunakan Air Bersih**

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (%). Kebutuhan air bersih dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan seperti tergambar pada grafik di bawah ini.



**Grafik 2.46**  
**Capaian Rumah Tangga Berakses Air Bersih di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2016-2021 (Dalam %)**



Sumber: SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu Tahun 2021

Grafik 2.46 menggambarkan capaian persentase rumah tangga menggunakan air bersih Kabupaten Belu 2016-2020 menunjukkan tren positif, dengan capaian Tahun 2020 sebesar 30,55%. Capaian ini belum termasuk Rumah Tangga yang menggunakan sumur gali.

#### **2.1.4.2.5 Rasio Elektrifikasi**

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Data mengenai listrik di kabupaten Belu diambil menurut sumber penerangan yaitu bersumber dari PLN, Non PLN dan bukan listrik dapat dilihat pada tabel berikut.



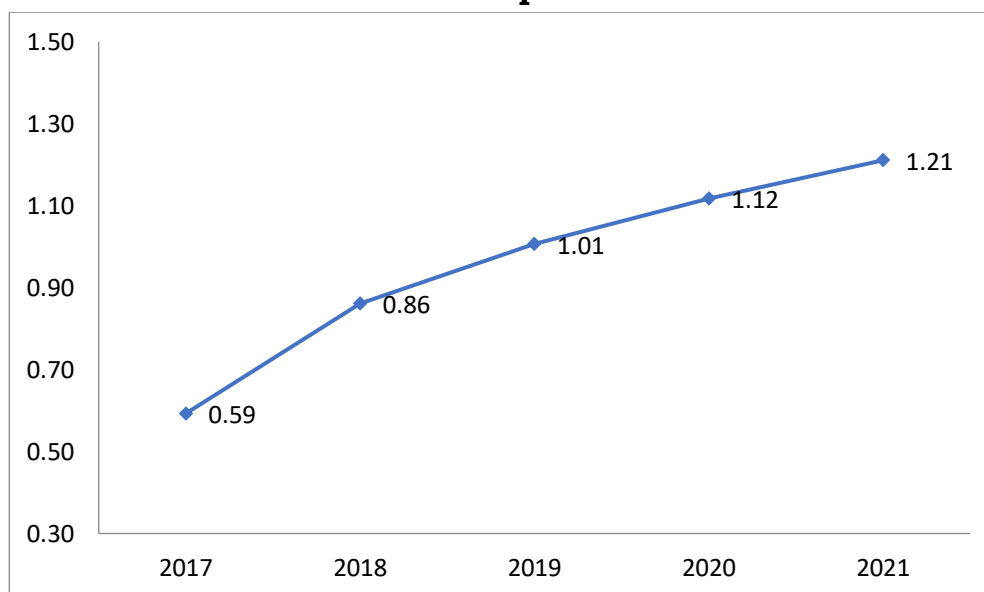
**Tabel 2.79**  
**Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah**  
**di Kabupaten Belu Tahun 2016 - 2021**

No	Jenis Penerangan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PLN (%)	72.95	83.52	80.29	86.43	89.77	92.92
2	Non PLN (%)	1.73	3.34	3.26	2.06	0.75	1.12
3	Bukan Listik (%)	25.32	13.14	16.46	11.51	9.47	5.95

*Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2022*

Adapun gambaran rasio elektrifikasi di Kabupaten Belu tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik.

**Grafik 2.47**  
**Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2021**



*Sumber: BPS Provinsi NTT, 2022*

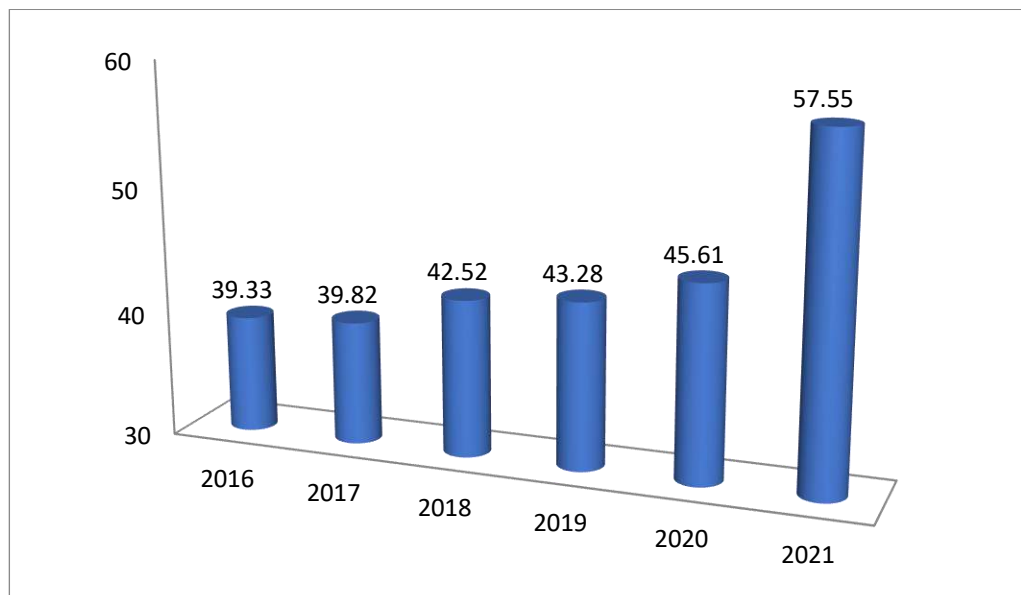
#### **2.1.4.2.6 Penduduk Menggunakan HP**

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mentransformasi masyarakat dengan pertumbuhan jumlah informasi dan sejumlah perangkat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, akses TIK menjadi alat pembangunan vital dan telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Salah satu indikator perkembangan TIK adalah jumlah penduduk yang



menggunakan Handphone (HP). Perkembangan persentase penduduk Kabupaten Belu 2018-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.48**  
**Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2018-2021**



Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2022

#### **2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi**

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap beberapa indikator di bawah ini.

##### **2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas**

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang



berisiko terkena tindak kejahatan (*crimerate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2016-2018 tergambar pada Grafik 2.49 berikut ini.

**Grafik 2.49**  
**Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021**



*Sumber : BPS, Belu Dalam Angka Tahun 2021*

Berdasarkan pada angka kriminalitas yang ada menggambarkan bahwa kondisi sosial kemasyarakatan perlu terus untuk dilakukan pembinaan dan pengendalian lewat forum komunikasi sosial kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan agar tumbuh perubahan sikap/perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan kemampuan ketahanan sosial.

#### **2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

**Tabel 2.80**  
**Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2017–2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Unjuk Rasa/Demonstrasi	5	9	4	3	5

*Sumber: SIPD, Badan Kesbangpol Kabupaten Belu Tahun 2021*

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Belu relatif aman dan terkendali, karena frekuensi demonstrasi yang relatif kurang di Kabupaten Belu. Kondisi ini tentunya sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Belu.

#### **2.1.4.3.3 Lama Proses Perijinan**

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Durasi waktu pengurusan izin berusaha dan Izin Usaha di Kabupaten Belu adalah minimal 1 (satu) hari selama jam dinas, apabila pelaku usaha/investor mengurus Izin Usaha dengan bantuan petugas *Front Office* DPMPSTP Kabupaten Belu. Namun sesuai dengan regulasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan diberlakukannya OSS-RBA (*Online Single*





*Submission*) bahwa pelaku usaha/investor berkewajiban mengurus perizinan berusahanya secara mandiri (*online*) melalui sistem OSS-RBA tersebut.

#### **2.1.4.3.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah**

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Belu Tahun 2021 yaitu:

**Tabel 2.81**  
**Jumlah Dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pajak Daerah	10
	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Bawah Tanah 9. PBB - P2 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2	Retribusi Daerah	3
	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	

*Sumber : Bapenda Kabupaten Belu Tahun 2020*

#### **2.1.4.3.5 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha**

Untuk mendukung pengembangan iklim investasi dan usaha di Kabupaten Belu, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan sebanyak 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
  - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu;
  - f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu 2020-2040.

#### **2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan**

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari (i) rasio lulusan S1/S2/S3; dan(ii) rasio ketergantungan. Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.82**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Ketergantungan di Kabupaten**  
**Belu Tahun 2016– 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	2,80%	2,92%	3,21%	3,24%	3,31%
2	Rasio Ketergantungan	22,99%	22,74%	23,19%	42,10%	42,09%

*Sumber : Hasil olah data BP4D Tahun 2021*

Data ketenagakerjaan Kabupaten Belu diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dari Tahun 2016-2020 meningkat, sedangkan rasio ketergantungan cenderung berfluktuasi. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 3,3% dan paling rendah pada Tahun 2016 sebesar 2,8%. Rasio ketergantungan paling tinggi di Tahun 2020 sebesar 42,10%, terendah di Tahun 2017 sebesar 22,74%.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD**

Penetapan indikator kinerja utama daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian kinerja program (*outcome*) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Belu pada Tahun 2021 diukur

berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Capaian Sasaran yang diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian sasaran IKU) per Misi dapat diuraikan sebagai berikut:

***Misi 1: Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.***

Dalam rangka pencapaian misi 1 yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.83**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	62,68	62,77	Tercapai	▲
2	Persentase Stunting (%)	21,2	17,9	Tercapai	▼
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	15,37	15,68	Tidak Tercapai	▲

***Misi 2: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif.***

Pencapaian misi 2 diukur dengan 4 (Empat) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.84**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi II**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
----	-------------------------	-------------	----------------	--	--------------------------------------



No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,4	1,75	Tercapai	▲
2	TPT (%)	7,42	5,35	Tercapai	▼
3	Inflasi (Angka)	1,14	-*)		
4	Indeks Gini (Indeks)	0,32	-*)		

\*) Data Belum Rekon dan Rilis Oleh BPS.

***Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.***

Pencapaian misi 3 diukur dengan 2 (Dua) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran dapat dilihat pada tabel

**Tabel 2.85**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi III**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak (%)	30,20	30,73	Tercapai	▲
2	Indeks Kualitas Lingkungan (Indeks)	71,40	70,38	TidakTercapai	▼

***Misi 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi***

Pencapaian misi 4 diukur dengan 3 (Tiga) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran seperti terlihat pada tabel



berikut.

**Tabel 2.86**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi IV**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Indeks)	48,83	*)		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,64	88,84	Tercapai	▲
3	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan (%)	9,11	8,47	Tidak Tercapai	▼

\*) : Data Belum Rilis

***Misi 5: Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaskan Budaya Lokal***

Pencapaian misi 5 diukur dengan 1 (Satu) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.87**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi V**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Persentase Desa Berkembang (%)	56,52	56,52	Tercapai	≈

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021, dari 13 IKU yang



mendukung 5 misi Bupati dan Wakil Bupati Belu terdapat 6 indikator (46,15%) yang melampaui target, 1 indikator (7,69%) yang mencapai target, dan 3 indikator (23,07%) yang belum tercapai sedangkan sisanya sebanyak 2 indikator (15,38%) belum ada rilis data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

Lebih lanjut keberhasilan pembangunan Kabupaten Belu tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang menjadi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil di Bab VIII RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Belu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Hasil evaluasi indikator kinerja perangkat daerah Kabupaten Belu tertuang di dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.88**  
**Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Belu Tahun 2021**

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	OPD Penanggungjawab	Keterangan
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>					
a.1	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,37	15,68	BPS	Tidak Tercapai



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	OPD Penanggungjawab	Keterangan
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	15,26	50,00	Dinas Sosial	Tercapai
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	75,78	62,03	Dinas Sosial	Tidak Tercapai
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja</b>					
a.1	TPT	persen	7,42	5,35	BPS	Tidak Tercapai
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2,4	1,51	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Tidak Tercapai
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
b.1.2	<i>Gender Vocal Point</i>	persen	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Target baru ada di 2022
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>					
c.1.1	Skor PPH	angka	84,5	84,58	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	Tercapai
<b>d</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa</b>					
d.1	Persentase Desa Berkembang	persen	56,52	56,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tercapai
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	persen	56,52	56,52		Tercapai
<b>e</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>					
e.1.1	<i>Total Fertility Rate (Rate)</i>	angka	2,98	2,96	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tidak Tercapai
<b>C</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>					
<b>a</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>					
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	62,77	BPS	Tercapai
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7,479	7,431	BPS	Tidak Tercapai
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	0,40	1,75	BPS	Tercapai
a.3	Inflasi	angka	1,14		BPS	Belum Rilis
a.4	Indeks GINI	indeks	0,32		BPS	Belum Rilis
<b>II. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						





No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	OPD Penanggungjawab	Keterangan
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	62,77	BPS	Tercapai
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,35	7,36	BPS	Tercapai
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	tahun	12,27	12,28	BPS	Tercapai
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>				Dinas Kesehatan	
b.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	62,77	BPS	Tercapai
b.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	64,61	64,89	BPS	Tercapai
b.2	Persentase <i>Stunting</i>	persen	21,2	17,9	Dinas Kesehatan	Tercapai
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	12,24	11,8	Dinas Kesehatan	Tidak Tercapai
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>					
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	40	22,98	Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak Tercapai
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3,7	3,7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercapai
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup</b>				Dinas Lingkungan Hidup	
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	71,40	70,38	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Tercapai
a.1.1	Indeks Kualitas Air	angka	58,67	57,14		Tidak Tercapai
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	angka	92,88	93,36		Tercapai
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	53,56		Tercapai
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17,81	17,77		Tidak Tercapai
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	4,94	7,40	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tercapai
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>					
c.1.1	SPBE	angka	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target baru ditetapkan di 2022
<b>d</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>					
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	persen	76,03	89,27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tercapai
<b>e</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal</b>					



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	OPD Penanggungjawab	Keterangan
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,03	81,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Tidak Tercapai
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	16		Tidak Tercapai
<b>C</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>					
<b>a</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>					
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,64	88,84	Kecamatan & Dinas PMPTSP	Tercapai
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	48,83	44,52 (C)	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai
a.2.1	Nilai SAKIP	predikat/ angka	CC/51,5	CC/51,60	Sekretariat Daerah	Tercapai
a.2.2	LPPD	angka	2,6	N/A	Sekretariat Daerah	Belum Rilis
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	persen	25	26,79	Sekretariat Daerah	Tercapai
<b>b</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>					
b.1.1	Maturitas SPIP	angka	2,85	N/A	Inspektorat	Belum Rilis
<b>c</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan</b>					
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100	85,47	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tidak Tercapai
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	persen	100	87		Tidak Tercapai
<b>D</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</b>					
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9,11	8,47	BPKAD	Tidak Tercapai
d.1.1	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	BPKAD	Tercapai
<b>E</b>	<b>Kepegawaian</b>					
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Persen	35	37,49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Tercapai
<b>f.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tercapai
		Skor	60,12	54,04		Tidak Tercapai
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0	0		Target baru ada di 2022
<b>III . ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	OPD Penanggungjawab	Keterangan
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang</b>					
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,20	30,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tercapai
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60,6	51,57		Tidak Tercapai
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37,89	38,87		Tercapai
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,78	69,08		Tercapai
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	angka	16,15	21,01		Tercapai
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0		Target baru ditetapkan di Tahun 2023
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>					
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>					
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993,19	1031,73	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tercapai
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>					
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	16,52	17,181	Dinas Pariwisata	Tercapai
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	90	274		Tidak Tercapai
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>					
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	627,42	671,45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tercapai
<b>d</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>					
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	32,11	50,628	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tercapai

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa dari total 59 IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk Tahun 2021 terdapat 32 indikator (54,24%) yang mencapai target, dan 19 indikator (32,20%) yang tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan ketidaktercapaian target



indikator kinerja kunci, antara lain: Terbatasnya kapasitas keuangan daerah sehingga saat dilakukan efisiensi dan rasionalisasi sebagai dampak penanganan pandemi global Covid-19 berakibat pada menurunnya kinerja perangkat daerah dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik.

### **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu. Cakupan identifikasi permasalahan pembangunan meliputi seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma berikut: a. Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah; b. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sekitar jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah; d. Terintegrasi, sehingga dapat mengfisisenkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan e. Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Identifikasi permasalahan pembangunan juga memperhatikan permasalahan yang muncul dari hasil penelaahan



pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan pembangunan diperoleh dari proses musrenbang. Identifikasi permasalahan pembangunan yang diperoleh dari proses musrenbang menandakan bahwa proses perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan bawah-atas, yang berarti juga mengakomodir dan menyelaraskan aspirasi masyarakat. Basis data yang digunakan dalam memetakan permasalahan pembangunan berasal dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang belum memuaskan.

**Tabel 2.89**  
**Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Belu Tahun 2023**

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
(1)	(2)
A	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>
	<b>Pendidikan :</b>
1	Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan
2	Rendahnya aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
	<b>Kesehatan:</b>
1	Masih adanya kasus gizi buruk dan <i>stunting</i>
2	Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1	Akses jaringan jalan desa dan jalan lingkungan yang belum merata, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi.
2	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi
3	Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih
	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
1	Rendahnya kualitas perumahan
2	Pembangunan perumahan belum sesuai dengan rencana pembangunan perkotaan
	<b>Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat</b>



No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
1	Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
2	Masih adanya potensi konflik sosial dan lemahnya ketahanan sosial masyarakat
3	Masih rendahnya Tingkat Waktu waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)
4	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
5	Kurangnya pelayanan informasi rawan bencana
6	Kurangnya simulasi dan mitigasi untuk pengurangan resiko bencana
	<b>Sosial</b>
1	Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2	Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS
	<b>B Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>
	<b>Tenaga Kerja</b>
1	Rendahnya produktivitas tenaga kerja
2	Masih tingginya angka pengangguran terbuka
3	Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan vokasi
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
1	Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Masih rendahnya partisipasi publik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
3	Minimya fasilitas publik yang responsive gender
	<b>Pangan</b>
1	Ketersediaan dan distribusi pangan antar daerah masih rendah
2	Pola konsumsi masyarakat terhadap pangan bergizi masih rendah
3	Masih rendahnya prevalensi kecukupan pangan/nilai tambah petani
	<b>Pertanahan</b>
1	Masih adanya kepemilikan lahan masyarakat yang belum bersertifikasi
2	Masih adanya konflik agrarian
	<b>Lingkungan Hidup</b>
1	Rendahnya pengelolaan SDA yang berorientasi pada kelestarian lingkungan
2	Pengelolaan dan perlindungan DAS yang belum optimal
3	Penataan ruang terbuka hijau yang belum optimal
	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>
1	Jangkauan pelayanan dokumentasi administrasi kependudukan kepada daerah yang terpencil belum memadai
2	Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan pencatatan sipil yang rendah
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1	Rendahnya manajemen pengelolaan ADD dan kelembagaan PEMDES

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
2	Rendahnya manajemen pengelolaan kualitas BUMDES
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
1	Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi PUS
2	Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan kontrasepsi
	<b>Perhubungan</b>
1	Terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan dan tempat wisata
2	Rendahnya kualitas layanan sarana transportasi publik (terminal)
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
1	Belum optimalnya layanan informasi publik melalui PPID
2	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Kelompok Komunikasi Sosial Desa (Komsodes)
3	Belum tersedianya Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan database yang memadai sebagai prasyarat penerapan SPBE
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
1	Rendahnya peran dan fungsi koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi rakyat
2	Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM
	<b>Penanaman Modal</b>
1	Minimnya realisasi penanaman modal dalam daerah
2	Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>
1	Rendahnya keahlian dasar dan minat berusaha dari kalangan pemuda
2	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar
	<b>Statistik</b>
1	Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Statistik Sektor
2	Belum tersedianya SDM Statistik yang memadai
	<b>Persandian</b>
1	Belum tersedianya system dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Persandian
2	Terbatasnya tenaga Sandiman daerah
	<b>Kebudayaan</b>
1	Kurang optimalnya promosi budaya lokal
2	Rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan hak paten terhadap budaya lokal
	<b>Perpustakaan</b>

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
1	Masih kurangnya kualitas pustakawan dan teknisi perpustakaan
2	Rendahnya kuantitas dan kualitas bacaan di perpustakaan daerah
	<b>Kearsipan</b>
1	Belum tersedianya arsip elektronik
	<b>C Urusan Pemerintahan Pilihan</b>
	<b>Perikanan</b>
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan air tawar dan air payau
	<b>Pariwisata</b>
1	Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum maksimal dengan potensi pariwisata
2	Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata belum secara maksimal
	<b>Pertanian</b>
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2	Belum optimalnya pengembangan mekanisasi pertanian
3	Adopsi dan inovasi pertanian oleh petani belum maksimal
4	Belum optimalnya pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan pariwisata
	<b>Peternakan</b>
1	Belum optimalnya peningkatan populasi ternak sapi melalui IB
2	Pengembangan lahan pakan ternak masih rendah
	<b>Perdagangan</b>
1	Kegiatan perdagangan (ekspor dan import) produk unggulan daerah belum secara optimal
	<b>Perindustrian</b>
1	Rendahnya pengembangan kawasan perindustrian
	<b>Transmigrasi</b>
1	Penguatan dan pengelolaan kawasan transmigrasi lokal masih terbatas
	<b>D Urusan Pemerintahan Penunjang</b>
	<b>Perencanaan</b>
1	Belum terdapat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan teknis lainnya
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>
1	Belum adanya tenaga fungsional peneliti



No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
2	Hasil penelitian dan pengembnagn belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan
	<b>Keuangan</b>
1	Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi karena belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah
2	Belum optimalnya pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD
	<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>
1	Pengembangan profesionalisme ASN belum secara maksimal
2	Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai
	<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>
1	Manajemen pengawasan dan kapabilitas APIP masih terbatas
2	Kontribusi pajak daerah dalam PAD masih rendah
3	Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
4	Minimnya pembangunan pada kawasan perbatasan sebagai serambi depan NKRI
5	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, (2022)



## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Belu secara makro yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan antara lain terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di Tahun 2023. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021**

###### **1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Keberhasilan penanganan Covid-19 ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik. Perbaikan kinerja perekonomian Tahun 2021 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga Triwulan IV di Tahun 2021 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Sehingga secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga akhir Tahun 2021 yakni sebesar 1,75 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,4 persen.



**Tabel 3.1**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2020-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	0,40
2021	1,75

*Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022*

## 2. Pertumbuhan PDRB

Dampak perbaikan ekonomi sebagai hasil keberhasilan penanganan Covid-19 tercermin dari beberapa indikator makro Kabupaten Belu Tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan positif. Tekanan akibat dampak Covid-19 yang terjadi hingga saat ini membuat perekonomian Kabupaten Belu mengalami pertumbuhan terkontraksi di akhir Tahun 2020. Program-program strategis pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan diyakini mampu meningkatkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kabupaten Belu, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan perekonomian Kabupaten Belu terbaru hingga triwulan IV Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2021 berdasarkan ADHb mencapai 4,700,075.35 Rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21.95%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 15.75%; dan (3) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,05%.

Selaras dengan peningkatan PDRB ADHb Kabupaten Belu hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun dasar. PDRB Kabupaten Belu 2021 berdasarkan ADHk sebesar 3,020,197.86 Rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22.60%; (2) sektor jasa pendidikan

sebesar 15.17%; dan (3) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,68%. Kontribusi masing-masing sektor PDRB ADHb dan ADHk Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
Perkembangan PDRB ADHb dan ADHk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu Tahun 2020 s/d 2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	
	2020	2021	2020	2021
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	663630.95	682510.94	993185.83	1031732.83
B.Pertambangan dan Penggalian	61221.44	63500.60	92327.27	96025.99
C.Industri Pengolahan	32112.93	32192.54	49453.68	50268.97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2163.96	2276.32	3151.92	3371.19
E. pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Duar Ulang	664.55	730.06	1088.8	1217.77
F. Konstruksi	224036.82	234599.03	382989.65	408859.31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	359207.76	375646.76	627423.8	671450.33
H. Transportasi dan Perdagangan	145597.86	150294.33	211680.48	220267.26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11296.54	11765.35	16515.53	17181.88
J. Informasi dan Komunikasi	150173.10	156776.51	191707.14	201496.38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	185952.59	190434.75	269207.03	288468.7
L. Real Estate	80177.68	81952.32	103333.21	104528.74
M,N. Jasa Perusahaan	1651.56	1414.41	2554.65	2215.09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	416458.03	413243.20	611824.14	613525.31
P. Jasa Pendidikan	465876.93	458098.19	744565.1	740178.01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77513.21	82720.23	114247.08	124288.15
R, S , T, U. Jasa Lainnya	90639.98	82042.32	136479.77	124999.44
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>2968375.90</b>	<b>3,020,197.9</b>	<b>4551735.09</b>	<b>4700075.35</b>

Sumber : BPS Kabupaten Belu, 2022

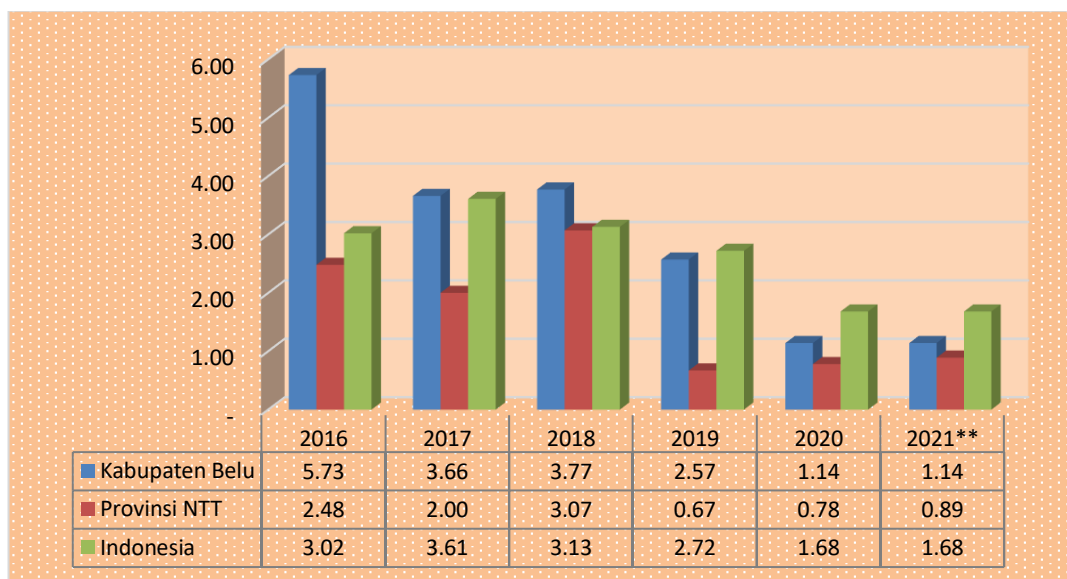
### 3. Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Belu hingga Tahun 2020 cenderung menunjukkan kecenderungan yang menurun. Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka untuk data inflasi Tahun 2016-2020 dipakai data Laju Implisit PDRB dari BPS Kabupaten Belu, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Grafik 3.1**

Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2021  
BPS, Provinsi NTT, Tabel Indikator Inflasi Menurut Bulan 1983-2020  
BPS, Kabupaten Belu Laju Implisit PDRB\*\*

Rata-rata inflasi Kabupaten Belu (3,002%) lebih tinggi dari pada rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,64%) dan Nasional (2,64%). Laju inflasi tahun 2021 diproyeksi masih sama dengan tahun 2020 sebesar 1,14%, hal ini memberikan gambaran bahwa meningkatnya kegiatan ekonomi yang diharapkan untuk mampu mendorong peningkatan permintaan ternyata masih tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Kabupaten Belu.

#### 4. Investasi

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Belu cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk

menstimulus perekonomian Kabupaten Belu sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

**Tabel 3.3**

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2020

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penanaman Modal (Rp)</b>
2017	31,061,606,843
2018	50,720,000,000
2019	144,065,695,472
2020	226,351,950,000
2021	81,500,000,000

Sumber: DPMPTSP, 2022

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Belu, nilai total investasi di Kabupaten Belu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya namun turun signifikan di Tahun 2021 sebagaimana terangkum dalam tabel diatas. Dari tabel tersebut, nilai investasi Kabupaten Belu Tahun 2021 sebesar Rp 81,500,000,000,-.

### **5. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Belu pada Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,35% yang mulanya sebesar 7,42% atau turun sebesar 2,07% dibandingkan Tahun 2020. Penurunan TPT Kabupaten Belu yang belum signifikan disebabkan oleh belum meredanya ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 menjadikan para investor maupun pelaku usaha melakukan *wait and see* untuk melakukan ekspansi usahanya kembali. Ditambah lagi, kebijakan pelonggaran PPKM

yang belum konsisten turut mempengaruhi tertahannya permintaan akan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja selama Tahun 2021 belum optimal.

**Tabel 3.4**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2021

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2020	7.42
2021	5.35

*Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022*

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100.000 jiwa, pada Tahun 2020 jumlah usia produktif Kabupaten Belu (15-64 Tahun) sebesar 156.101 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan masalah baru dikarenakan adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga /perusahaan, dan pekerja); dan
5. Dampak Pandemi COVID yang menyebabkan pembatasan semua kegiatan.



### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023**

#### **1. Tantangan**

Prospek perekonomian Kabupaten Belu Tahun 2023 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan dunia sebesar 3,2% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 pada kisaran 6,0%, namun ada beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Belu yaitu:

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID terutama varian baru Omicron, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama dibatasinya perjalanan internasional baik dalam rangka bisnis maupun liburan hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Belu;
- b. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
- c. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik paska pandemi COVID, antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi;
- d. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal paska pandemi COVID. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali;
- e. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk




mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID;

- f. Meski letak Kabupaten Belu yang strategis sebagai wilayah yang berada di perbatasan dan juga Atambua sebagai Pusat Kawasan strategis Nasional namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## **2. Prospek**

Kabupaten Belu memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat potensial terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja. Kemudahan akses permodalan dan investasi menjadi faktor yang strategis untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Selain itu, posisi strategis sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Negara RDTL sangat potensial untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan pasar perbatasan bertaraf internasional, jasa pergudangan dan penyediaan komoditas ekspor yang berkualitas. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat 

- dapat terselenggara dengan baik;
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
  - d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
  - e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
  - f. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
  - g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memasuki tahun kedua sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada perencanaan Tahun 2023 yang terdapat dalam dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya

masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Resposibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk;
  - a. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
  - b. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
  - c. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah di Bank NTT dan Dana Cadangan Pilkada serentak Tahun 2024.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**



Pada Tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas COVID.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah kabupaten Belu.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Belu masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah kabupaten Belu dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 Tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026;



c. Dampak ekonomi dari pandemi COVID.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
  - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
  - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
  - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
  - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
  - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.



- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka;
- 4) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- 5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- 7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
- 8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- 9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
- 10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah;
- 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non-PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
- 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;



- 15) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan Kabupaten Belu Tahun 2021 dikelola oleh 13 Perangkat Daerah. Target pendapatan Tahun 2022 dan proyeksi target pendapatan Tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel. 3.5**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu**  
**Tahun 2021-2024**

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>853,299,683,402</b>	<b>938,288,326,572</b>	<b>928,201,621,536</b>	<b>938,946,901,297</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>72,104,344,504.52</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>84,913,294,964</b>	<b>119,111,783,511</b>
4.1.01	Pajak daerah	14,389,504,845	29,890,810,812	19,901,783,102	22,000,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	5,066,281,436	10,870,462,000	8,472,784,674	16,668,282,349
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	6,238,725,900	7,500,000,000	7,500,000,000	12,000,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	46,409,832,323.52	46,738,727,188	49,038,727,188	68,443,501,162
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>735,142,735,826</b>	<b>791,458,254,097</b>	<b>791,458,254,097</b>	<b>793,131,346,086</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	717,221,590,088.00	759,914,050,000	759,914,050,000	765,631,346,086
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17921145738	31,544,204,097	31,544,204,097	27,500,000,000
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>46,052,603,071</b>	<b>51,830,072,475</b>	<b>51,830,072,475</b>	<b>26,703,771,700</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	21,253,304,700	3,503,596,475	3,503,596,475	3,294,571,700
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24,799,298,371	48,326,476,000	48,326,476,000	23,409,200,000

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (2021), BPKAD Kab. Belu (2022)

## B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan berdasar proyeksi pada Rancangan RPJMD sebagai berikut:



- a. Proyeksi belanja daerah diproyeksikan naik sebesar 2% dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Perhitungan gaji pegawai diproyeksikan naik sebesar 2% dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan perhitungan tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5449 Tahun 2019 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ Tahun 2019
- c. Belanja Pegawai dalam rangka pengadaan PPPK Tahun 2023.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID;
- b. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- c. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*);
- d. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- g. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: Pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna



menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan.

Adapun APBD dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belu Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 3.6**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2021 – 2024**

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>820,075,743,149</b>	<b>968,708,010,074</b>	<b>1,063,829,066,415</b>	<b>958,271,286,787</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>591,187,819,942</b>	<b>712,070,973,357</b>	<b>696,575,801,179</b>	<b>710,288,395,142</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	322,590,607,414	375,959,673,589	402,236,127,608	375,000,000,000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254,085,050,403.52	323,447,445,725	285,891,299,364	270,812,769,642
4.1.05	Belanja Hibah	7,510,762,124	12,143,854,043	7,948,374,207	50,000,000,000
	Belanja Bantuan Sosial	7,001,400,000	520,000,000	500,000,000	14,475,625,500
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>91,345,686,467</b>	<b>128,298,960,639</b>	<b>238,915,189,158</b>	<b>93,980,489,615</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,288,119,775	35,673,514,379	6,616,350,064	14,716,987,696
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23,383,178,239.58	30,257,660,018	47,936,087,528	19,875,922,547
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	34,282,396,552	58,610,856,826	155,721,772,310	52,255,420,372
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2,391,991,900	3,756,929,416	3,413,900,000	7,132,159,000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			25,227,079,256	
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>925,724,000</b>	<b>3,234,868,078</b>	<b>3,234,868,078</b>	<b>15,000,000,000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	925,724,000	3,234,868,078	3,234,868,078	15,000,000,000
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>136,616,512,741</b>	<b>125,103,208,000</b>	<b>125,103,208,000</b>	<b>139,002,402,030</b>
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,705,811,840	1,325,632,100	1,325,632,100	2,208,693,194
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134,910,700,901	123,777,575,900	123,777,575,900	136,793,708,836

Sumber : RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (2021), BPKAD Kab. Belu (2022)

### C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan Tahun 2023 dan Tahun 2024. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023 di kabupaten Belu antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan Pilkada serentak Tahun 2024.

**Tabel. 3.7**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2024**

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
<b>6</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>				
<b>6.01</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>26,725,890,760</b>	<b>35,419,683,502</b>	<b>150,445,714,285</b>	<b>445,714,285</b>
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26,302,467,772	34,973,969,217	0	0
06.01.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	423,422,988	445,714,285	445,714,285	445,714,285
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			150,000,000,000	
<b>6.02</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>15,018,269,406</b>	<b>43,760,868,588</b>
06.02.01	Penyertaan Modal kepada Bank NTT	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	13,779,137,994
	Pembiayaan Pemilu			9,818,269,406	29,981,730,594
	Pembayaran Pokok Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank				37,500,000,000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>14,818,269,406</b>	<b>43,760,868,588</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21,725,890,760</b>	<b>30,419,683,502</b>	<b>135,627,444,879</b>	<b>-43,315,154,303</b>

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (2021), BPKAD Kab. Belu (2022)

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belu masih cukup rentan. Mengingat

besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten Belu baik infrastruktur maupun non infrastruktur, terlebih dengan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 maka anggaran pembiayaan yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kabupaten Belu untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya. Salah satunya adalah melalui pinjaman daerah.

Pinjaman daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen pembiayaan alternatif yang potensial dan sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi defisit APBD dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dijamin oleh UU. Pasal 300 ayat (1) UU 23/2014 yang menyatakan bahwa “daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat”. Pesatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah mendorong kecenderungan meningkatnya permohonan pinjaman untuk membiayainya, demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Belu. Ditengah keterbatasan fiskal yang disebabkan karena pandemi Covid-19, berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 mengalami progress yang kurang signifikan sebagai akibat dari terbatasnya anggaran yang tersedia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu akan mengajukan pinjaman lembaga keuangan bank sebesar 150 miliar rupiah dengan penggunaan pinjaman daerah tersebut akan difokuskan dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan, sistem penyediaan air minum dan pengadaan *traffic light* yang tersebar di 12 kecamatan sebesar lebih kurang 127 miliar, pembangunan ruang terbuka hijau kurang lebih sebesar 16 miliar dan pembangunan gedung kantor pelayanan terpadu sebesar 7 miliar.

Alokasi penggunaan pinjaman daerah untuk infrastruktur



jalan, air bersih dan traffic light bukanlah tanpa alasan. Dalam rangka pemulihan ekonomi daerah paska Covid-19, setidaknya terdapat 4 manfaat yang bisa diperoleh dari pembangunan infrastruktur jalan, diantaranya: 1. mewujudkan biaya angkut logistik yang lebih kompetitif; 2. peningkatan daya saing investasi; 3. penciptaan lapangan pekerjaan; dan 4. meningkatkan pelayanan publik. Pemasangan air bersih sambungan rumah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang adil dan merata di Kabupaten Belu dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, pemasangan traffic light di jalan-jalan strategis sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Dengan adanya traffic light diharapkan bisa: Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan, memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin dan mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.

Sedangkan penggunaan pinjaman daerah untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan pembangunan gedung kantor pelayanan terpadu bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air serta menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan binaan untuk kesejahteraan masyarakat.

**Tabel. 3.8**  
**Ringkasan APBD Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Anggaran**  
**Kabupaten Belu Tahun 2023 – 2024**

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
4	<b>Pendapatan</b>	<b>853,299,683,402</b>	<b>938,288,326,572</b>	<b>928,201,621,536</b>	<b>938,946,901,297</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>72,104,344,504.52</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>84,913,294,964</b>	<b>119,111,783,511</b>
4.1.01	Pajak daerah	14,389,504,845	29,890,810,812	19,901,783,102	22,000,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	5,066,281,436	10,870,462,000	8,472,784,674	16,668,282,349



4.1.03	Hasil Pengelolaan	7,500,000,000	12,000,000,000
--------	-------------------	---------------	----------------

Kekayaan daerah	6,238,725,900	7,500,000,000
-----------------	---------------	---------------





4.1.04	Lain-lain PAD Yang	46,738,727,188	68,443,501,162
--------	--------------------	----------------	----------------



Sah	46,409,832,323.52	49,038,727,188
-----	-------------------	----------------

4.2	Pendapatan	735,142,735,826	791,458,254,097	791,458,254,097	793,131,346,086
-----	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

---

	<b>Transfer</b>				
--	-----------------	--	--	--	--



4.2.01	Pendapatan	717,221,590,088.00	759,914,050,000	759,914,050,000	765,631,346,086
--------	------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------





4.2.02	Pendapatan	17921145738	31,544,204,097	31,544,204,097	27,500,000,000
--------	------------	-------------	----------------	----------------	----------------







4.3	Lain-lain	46,052,603,071	51,830,072,475	51,830,072,475	26,703,771,700
-----	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Pendapatan Yang</b>				
------------------------	--	--	--	--





4.3.01	Pendapatan Hibah	21,253,304,700	3,503,596,475	3,503,596,475	3,294,571,700
--------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

4.3.03	Lain-lain	24,799,298,371	48,326,476,000	48,326,476,000	23,409,200,000
--------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------













5	Belanja	820,075,743,149	968,708,010,074	1,063,829,066,415	958,271,286,787
---	---------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

5.1	Belanja Operasi	591,187,819,942	712,070,973,357	696,575,801,179	710,288,395,142
-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

5.1.01	Belanja Pegawai	322,590,607,414	375,959,673,589	402,236,127,608	375,000,000,000
--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

5.1.02	Belanja Barang dan	254,085,050,403.52	323,447,445,725	285,891,299,364	270,812,769,642
--------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------







4.1.05	Belanja Hibah	7,510,762,124	12,143,854,043	7,948,374,207	50,000,000,000
--------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

	Belanja Bantuan	7,001,400,000	520,000,000	500,000,000	14,475,625,500
--	-----------------	---------------	-------------	-------------	----------------



5.2	Belanja Modal	91,345,686,467	128,298,960,639	238,915,189,158	93,980,489,615
-----	---------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,288,119,775	35,673,514,379	6,616,350,064	14,716,987,696
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23,383,178,239.58	30,257,660,018	47,936,087,528	19,875,922,547
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	34,282,396,552	58,610,856,826	155,721,772,310	52,255,420,372
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2,391,991,900	3,756,929,416	3,413,900,000	7,132,159,000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			25,227,079,256	
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>925,724,000</b>	<b>3,234,868,078</b>	<b>3,234,868,078</b>	<b>15,000,000,000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	925,724,000	3,234,868,078	3,234,868,078	15,000,000,000
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>136,616,512,741</b>	<b>125,103,208,000</b>	<b>125,103,208,000</b>	<b>139,002,402,030</b>
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,705,811,840	1,325,632,100	1,325,632,100	2,208,693,194
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134,910,700,901	123,777,575,900	123,777,575,900	136,793,708,836
	<b>Defisit</b>	<b>33,223,940,252</b>	<b>-30,419,683,502</b>	<b>(135,627,444,879)</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>				
<b>6.01</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>26,725,890,760</b>	<b>35,419,683,502</b>	<b>150,445,714,285</b>	<b>445,714,285</b>
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26,302,467,772	34,973,969,217	-	0
06.01.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	423,422,988	445,714,285	445,714,285	445,714,285
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			150,000,000,000	
<b>6.02</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>14,818,269,406</b>	<b>43,760,868,588</b>
06.02.01	Penyertaan Modal kepada Bank NTT	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	13,779,137,994
	Pembiayaan Pemilu			9,818,269,406	29,981,730,594
	Pembayaran Pokok Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank				37,500,000,000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>14,818,269,406</b>	<b>43,760,868,588</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21,725,890,760</b>	<b>30,419,683,502</b>	<b>135,627,444,879</b>	<b>-43,315,154,303</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>54,949,831,012.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(43,315,154,303)</b>

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (2021), BPKAD Kab. Belu (2022)



## **BAB. IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan turunan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, fokus pembangunan daerah Kabupaten Belu pada Tahun 2023 adalah “Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Peningkatan Daya Saing Daerah”. Tema ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kabupaten Belu Tahun 2023.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Belu pada Tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis proses, menggunakan pendekatan: a. teknokratik; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 diimplementasikan dengan: 1) tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belu dengan pendekatan penganggaran berbasis program; 2) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan; dan 3) melibatkan secara aktif stakeholder di dalam dan di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021; (4) Prioritas Nasional Nusa Tenggara dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT dalam Rancangan RKPD Tahun 2023; dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2023.

Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Belu periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Belu. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Belu.

Adapun penjabaran dari prioritas pembangunan Tahun 2023 “Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Peningkatan Daya Saing Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan: ketersediaan tenaga kesehatan trampil (terdidik dan terlatih) pada setiap fasilitas kesehatan;



2. Peningkatan kualitas pendidikan: pengembangan kapasitas tenaga pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat: peningkatan kapasitas wirausaha bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan membangun mental petani guna meningkatkan pendapatan;
4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja: peningkatan kapasitas angkatan kerja terutama pemuda/pemudi guna menumbuhkan peluang-peluang usaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja;
5. Penyediaan infrastruktur: penguatan kapasitas SDM pengelolaan infrastruktur pelayanan dasar guna meningkatkan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik: mengoptimalkan pemanfaatan SDM TIK guna peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik (*e-governance*);
7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan.

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023**

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023 memasuki tahun kedua RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 yang dalam prosesnya tidak terlepas dari evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu tahun 2023 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.





Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu guna penyelarasan perencanaan Nasional dan Daerah adalah: a) Pemerintah daerah mengidentifikasi pokok-pokok program, kegiatan dan output prioritas nasional dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT; b) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program, kegiatan dan output dalam RPJMD dan Renstra SKPD 2023-2026 yang sesuai dengan program, kegiatan dan output dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi NTT; dan c) Pemerintah Daerah menegaskan dalam narasi dan matriks RPJMD dan Renstra 2023-2026 tentang dukungan terhadap prioritas nasional.

**Tabel 4.1**

Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Belu

<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Provinsi NTT</b>	<b>Prioritas Kabupaten Belu</b>
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------



<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Provinsi NTT</b>	<b>Prioritas Kabupaten Belu</b>
<p>(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;</p> <p>(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;</p> <p>(3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;</p> <p>(4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;</p> <p>(5) Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;</p> <p>(6) Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta</p> <p>(7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.</p>	<p>(1) Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;</p> <p>(2) Penguatan system kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;</p> <p>(3) Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;</p> <p>(4) Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;</p> <p>(5) Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan system pemerintahan berbasis</p>	<p>(1)Peningkatan pelayanan kesehatan;</p> <p>(2)Peningkatan kualitas Pendidikan;</p> <p>(3)Peningkatan perekonomian masyarakat;</p> <p>(4)Peningkatan partisipasi Angkatan kerja;</p> <p>(5)Penyediaan infrastruktur;</p> <p>(6)Peningkatan kualitas pelayanan publik;</p> <p>(7)Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa.</p>



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTT	Prioritas Kabupaten Belu
	elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi; (6) Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	

#### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat *unprecedented shock* dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut. Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penetapan tema tersebut mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2021, evaluasi



kebijakan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan tema juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020– 2024. Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKP Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN, serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023, merupakan agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang terdiri dari: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tahun 2023 merupakan momentum untuk menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN.



Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: 1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja; 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan 5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan yaitu:



### **1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

### **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

### **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya

manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; f. pengentasan kemiskinan; dan g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

#### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: a. revolusi mental dalam sistem pendidikan; b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

#### **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

#### **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**



Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: a. peningkatan kualitas lingkungan hidup; b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta c. pembangunan rendah karbon.

## **7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil; c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Wilayah Nusa Tenggara menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan terendah di antara wilayah lainnya pada tahun 2021, yaitu sebesar 2,4 persen. Pada Tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara diperkirakan tumbuh sebesar 4,8–5,9 persen yang sejalan dengan arah pemulihan ekonomi. Untuk Tahun 2023 upaya Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara adalah dengan mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara termasuk Nusa Tenggara Timur. Salah satu kawasan yang





diprioritaskan adalah PKSN Atambua di Kabupaten Belu dengan sasaran program prioritas pembangunan meliputi Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap kecamatan - kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Kabupaten Belu.

Beberapa sasaran utama pembangunan nasional yang sejalan dengan indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Belu antara lain meliputi: Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

#### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023**

Visi Pembangunan Provinsi NTT seperti yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty);
3. Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;



5. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, bahwa arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 diarahkan pada “Kemandirian Lokal” yang dielaborasikan melalui: a) Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan; b) Peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan c) Pembangunan industri pariwisata sebagai penggerak multisektor. Tema dan prioritas pembangunan daerah Provinsi NTT Tahun 2023 adalah: “Pemulihan Kesehatan Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dan Kemandirian Lokal” dengan mengusung 6 prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
3. Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
5. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi;
6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Target capaian indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertera pada tabel berikut:



**Tabel 4.2**

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Tahun 2023</b>
1	Pertumbuhan PDRB (%)	6,7 – 7,3
2	Inflasi (%)	3 – 3,2
3	Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	15 – 12
4	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	25 – 27
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,9 – 1,5
6	% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	39,74
7	Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32
8	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	95
9	Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	8
10	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4
11	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.534.144
12	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	100
13	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	74,81
14	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	78.46
15	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	9.238
16	Rasio Elektrifikasi (%)	85
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	75
18	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829
19	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	100
20	Indeks Resiko Bencana (Poin)	135
21	Angka Melek Huruf (%)	100
22	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,5
23	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15

No	Indikator	Target Tahun 2023
24	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69
25	Prevelensi Stunting (%)	10-12
26	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	80
27	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	71
28	Opini BPK (Opini)	WTP
29	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	A
30	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,7
31	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	75
32	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	90
33	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	83

#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023**

Prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta arah kebijakan pembangunan, maka pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023 mengusung tema “Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Peningkatan Daya Saing Daerah”.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Belu Tahun 2023 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;**

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator-indikator, antara lain angka kematian anak/ibu,

persentase stunting dan jumlah penduduk yang dilindungi jaminan kesehatan daerah.

Kondisi sektor kesehatan di Kabupaten Belu pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, serta perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 17,9% bayi mengalami stunting. Beberapa aspek non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Terlebih dari sisi pelayanan, rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Belu masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan.

Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan, serta menjamin ketersediaan tenaga kesehatan terampil (terdidik dan terlatih) pada setiap fasilitas kesehatan guna peningkatan mutu sesuai standard pelayanan kesehatan. Lebih lanjut untuk stunting, diperlukan kerjasama yang baik lintas stakeholder yang berkaitan perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.

## **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan;**

Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Belu mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain



masih rendahnya pelayanan pendidikan di Kabupaten Belu yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai 100%.

Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antardaerah, pemerataan jumlah sekolah yang masih terbatas jumlahnya dari total wilayah administrasi dan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Belu. Lebih lanjut, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Inovasi untuk prioritas pembangunan ini adalah dengan melakukan pengembangan kapasitas tenaga pendidik sehingga mampu memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran terlebih dalam kondisi pandemi sekarang ini yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh.

### **3. Peningkatan perekonomian masyarakat;**

Dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Kabupaten Belu telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi para pelaku

UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.

Terjadinya penurunan realisasi PMA yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan lockdown di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, *social distancing* di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bahkan pada saat PSBB tidak diberlakukan lagi dan diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan

sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, regenerasi petani masih rendah dan usia petani Kabupaten Belu berada di atas usia produktif; teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Kabupaten Belu; jumlah gudang penyimpanan hasil panen masih terlalu minim. Disamping itu, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi.

Upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas wirausaha bagi masyarakat meliputi usaha rumah tangga, kelompok usaha terutama kelompok rentan dan membangun mental/*mindset* petani guna meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan.

#### **4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja.**

Kemiskinan dan rendahnya produktivitas ekonomi telah berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu karena dengan pendapatan tersebut masyarakat tidak mampu memperoleh pendidikan formal yang baik dan kondisi kesehatan masyarakat yang masih minim, sehingga menyebabkan SDM masyarakat masih rendah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu pada Tahun 2021 sebesar 62,77 dari target 62,68 masih dibawah capaian IPM nasional 71,9 dan Provinsi NTT 65,28 serta Kabupaten TTU 63,53.

Rendahnya IPM tersebut karena rendahnya akses terhadap pendidikan, dimana dipengaruhi oleh ketidakmampuan secara ekonomi dari peserta didik, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta nuansa akademik pada setiap level pendidikan yang masih kurang. Sedangkan aspek kesehatan berkaitan dengan kekurangan prasarana dan sarana kesehatan serta kurangnya tenaga paramedis. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh rendahnya pola hidup sehat. Oleh karena itu, perlu





ada peningkatan mutu pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan adalah mampu menggerakkan perekonomian pada berbagai sektor, bahkan menghasilkan masyarakat yang kritis sehingga keberhasilan pembangunan menjadi lebih terwujud.

Produktivitas tenaga kerja perlu untuk ditingkatkan dengan: 1) menurunkan angka pengangguran terbuka melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan kejuruan dan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui program pengembangan keahlian/keterampilan baik itu bersifat *life skill* maupun pelatihan berbasis kompetensi (IT) dan berbasis vokasi untuk kemampuan daya saing masyarakat yang lebih baik; 2) peningkatan kapasitas angkatan kerja terutama pemuda/pemudi guna menumbuhkan peluang-peluang usaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja.

#### **5. Penyediaan infrastruktur;**

Prasarana dan sarana transportasi antar wilayah di Kabupaten Belu belum tersedia secara memadai, sehingga akses masyarakat antar kota dengan desa atau sebaliknya kurang sinergis. Hal tersebut, berakibat pada minimnya informasi pasar produk pertanian yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan, maupun sebaliknya produk-produk dari sektor industri yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Padahal *multiplier effect* dapat ditimbulkan dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi akan dapat menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan infrastruktur adalah kurang optimalnya utilitas lingkungan, seperti jaringan air bersih yang belum menjangkau seluruh rumah tangga. Selain itu, minimnya jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi publik secara baik. Fokus



pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan dalam upaya untuk peningkatan aksesibilitas daerah antara lain:

1. Penyediaan dan perbaikan jaringan jalan strategis yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pergerakan barang dan jasa;
2. Penyediaan ruas-ruas jalan akses ke ibukota Kecamatan;
3. Pengembangan Bandara Udara Haliwen (A.A Bere Tallo) dan Pelabuhan Laut Atapupu;
4. Memperluas cakupan infrastruktur air minum untuk pelayanan air bersih di perkotaan Atambua dan pedesaan;
5. Memperluas cakupan pelayanan listrik bagi masyarakat dengan pembiayaan PLTS atau energi baru terbarukan ;
6. Pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB)
7. Pengembangan Perumahan layak huni dan lingkungan sehat;
8. Peningkatan jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kabupaten Belu memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap eksploitasi SDA melalui penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi. Selain itu masih ada kegiatan pertambangan (Galian C) yang tidak ramah lingkungan, tidak akan mengembalikan lingkungan seperti sedia kala karena keanekaragaman hayati akan berkurang bahkan ada yang punah. Kesanggupan mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup adalah hal yang penting karena kegiatan penambangan pasti akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sehingga diperlukan komitmen bersama untuk meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan dan bila terjadi kerusakan, maka perlu pengelolaan lingkungan yang tepat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun generasi selanjutnya. Oleh karena itu pencegahan degradasi lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang perlu mendapat perhatian secara serius untuk ditangani di Kabupaten Belu dengan peningkatan sosialisasi dan



penyuluhan terkait isu ini, disertai dengan penguatan kapasitas SDM.

#### **6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;**

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Belu, masih terus untuk ditingkatkan walaupun telah ada peningkatan yang signifikan dari aspek tingkat pendidikan aparatur namun budaya kerja dan motivasi diri belum sepenuhnya menggambarkan tingkat pelayanan publik secara maksimal karena aspek politik telah mendominasi daripada aspek taktis operasional. Pelayanan publik yang kurang optimal yang selain diindikasikan dengan kurang transparannya arus informasi juga diakibatkan oleh fungsi lembaga pemerintah yang belum berperan optimal, sehubungan dengan tumpang-tindihnya tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, masih rendahnya sumber daya aparatur mengakibatkan kurangnya kesadaran dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin rendah. Padahal *good governance* juga diindikasikan dengan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi (Tusi) perangkat daerah urusan penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk memperkuat kebijakan pembangunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai salah satu bentuk interaksi antara sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan sistem inovasi produksi sektor primer (pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan) maupun sektor industrial sebagai sumber penggerak kemajuan dan modal utama kemandirian masyarakat belum dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu.

Oleh karena itu ke depannya perlu untuk dibentuk perangkat daerah yang memfokuskan pada bidang penelitian dan pengembangan untuk peningkatan bidang pengembangan inovasi teknologi berbasis lokal maupun rekayasa dan rancang bangun berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan budaya inovasi pelayanan publik melalui *Research and Deveelopment (R & D)*. Ditambah dengan mengoptimalkan pemanfaatan SDM TIK dalam rangka membangun dan

mengembangkan infrastruktur TIK guna peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik (*e-governance*).

#### **7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa;**

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah pengelolaan potensi SDA unggulan untuk dikembangkan, terutama pada sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) maupun sektor pariwisata (wisata budaya, alam, dan religius) yang didukung oleh penanaman modal/investasi oleh investor. Hal lain yang dapat mendukung sektor primer untuk diminati oleh investor luar dan dalam negeri, yakni dengan meningkatkan sarana prasarana pendukung seperti ketenagakerjaan, transportasi, kondisi keamanan, kelistrikan dan stabilitas politik daerah serta dengan menyederhanakan regulasi.

Pengembangan pada sub sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Belu telah menghasilkan produk unggulan seperti padi, jagung, kopi dan jambu mete. Begitu pula pada sub sektor peternakan telah menghasilkan produk unggulan seperti ternak sapi dan babi yang sangat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pengembangannya, peningkatan komoditas unggulan ini belum optimal karena masih belum didukung dengan ketersediaan prasarana produksi (industri pengolahan hasil), pasar dan tenaga kerja yang terampil. Padahal pengembangan sektor pertanian akan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Belu. Selain itu, dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya yang menyediakan input bagi sektor pertanian, ataupun memanfaatkan produk sektor pertanian sebagai input.

Peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan, didukung pula dengan letak Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara Republic Democratic Timor Leste (RDTL) sebagai Pusat Kawasan Strategi Nasional (PKSN) dapat memberikan daya dongkrak terhadap penyaluran produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun aspek distribusinya lebih terbuka peluang perdagangan antar negara, sehingga secara ekonomik dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat di Kabupaten Belu jika hal ini di dukung oleh kerjasama bilateral ekonomi maupun intensitas pelaksanaan promosi produk unggulan daerah lewat *event expo* Indonesia-Timor Leste (Indo-Tiles).

Selanjutnya peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan dengan menghasilkan berbagai produk unggulan hasil pertanian/perkebunan, hasil peternakan, hasil laut dan perikanan, dan hasil industri kerajinan untuk mendukung program “Tol Laut” sehingga kapal pengangkut dari Indonesia Bagian Barat yang singgah di pelabuhan laut Atapupu sebagai Zona Pelabuhan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dapat membawa produk-produk dimaksud ke Indonesia Bagian Barat.

Revitalisasi peranan lembaga adat dan kearifan lokal yang mendukung berbagai kegiatan pembangunan pedesaan (termasuk sosial kemasyarakatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup) dengan terus untuk menghidupkan lagi peranan struktur adat (*Na'I, Kapitan, Makleat, Dato*) untuk mengatur tata kehidupan sosial yang dapat mendukung pembangunan wilayah lewat berbagai kegiatan pemberdayaan.

Diikuti dengan pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan. Selama ini dilihat dari konteks sosial ekonomi, BUMDES di Kabupaten Belu masih belum menguntungkan dan berdampak bagi peningkatan ekonomi desa, selain itu BUMDES juga menghadapi kelangkaan tenaga kerja produktif karena mereka banyak terserap di sektor jasa dan industri di perkotaan. Akibatnya BUMDes diurus oleh warga senior yang kurang memiliki pengalaman bisnis maupun kompetisi pasar. Pengurus tidak memiliki kompetensi sebagai pelaku usaha, namun lebih merupakan adanya kelonggaran waktu dari pengelolanya yang juga sebagian besar memiliki pekerjaan utama.

Target capaian indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2023 yang tertera pada tabel berikut:



**Tabel 4.3**

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belu Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Tahun 2023</b>
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	63,67
2	Persentase Stunting (%)	10
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	15,07
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,45
5	TPT (Poin)	5
6	Inflasi (%)	1,03
7	Indeks GINI (Poin)	0,32
8	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak (%)	33,72
9	Indeks Kualitas Lingkungan (Poin)	72,22
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Poin)	56
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	88,82
12	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan (%)	9,57
13	Persentase Desa Berkembang (%)	66,66



## **BAB. V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 untuk RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Belu. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota.

Kebijakan pendanaan daerah Tahun 2023 tidak terlepas dari upaya pemulihan dan penguatan perekonomian serta kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan pendanaan juga diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan program unggulan RPJMD Kabupaten Belu 2021-2026 serta kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Tahun 2023 pendapatan daerah Kabupaten Belu diproyeksikan sebesar Rp. 928.201.294.964 yang bersumber dari PAD dan Dana Transfer. Sementara itu, belanja daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.063.629.066.415 terdiri dari belanja operasi, belanja modal sebesar, belanja tidak terduga sebesar, serta belanja transfer sebesar. Pembiayaan daerah untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja diperoleh dari Pinjaman Daerah sebesar Rp. 150.000.000.000. Belanja daerah Tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan

mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN).

### **5.1. Program Prioritas Tahun 2023**

Perencanaan pembangunan Kabupaten Belu pada Tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis proses, menggunakan pendekatan: a. teknokratik; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas. Rencana program Tahun 2023 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023, yang mempertimbangkan RPJMN, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang Kabupaten), dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Terkait hasil penelaahan Pokir DPRD dalam dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 telah disampaikan melalui SIPD. Hasilnya adalah 22 usulan yang masuk dalam perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dari 402 usulan program/kegiatan yang diinput, sebanyak 214 usulan yang ditolak, sisanya diteruskan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. Program – program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh disajikan pada tabel berikut:



**Tabel. 5.1**

## Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023

Nomor	Urusan/Program	Indikator Kinerja Tahun 2023	Target 2023
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi Murni SMP, Angka Kelulusan SMP, Angka Putus Sekolah SMP, Rasio Ruang Kelas Kategori Baik Terhadap Ruang Kelas SMP dan Peta Mutu Pendidikan	99,80 Angka; 1.03 Angka; 90.17 Angka; 88.19 Angka; 94,91 rasio
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya lembaga PAUD yang menerapkan kurikulum muatan local	6.98/15 %/Lembaga
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi Guru Pendidikan S1/D4	85 %
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Yang Direkomendasikan	10 Jumlah
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>		
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Persentase Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Jiwa Dan Penyehatan Lingkungan	65.4252 Angka; 0 Angka; 0 Angka; 0 Angka; 100 %; 84 %
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	70 %
3.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan	73 %
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan STBM	41 Desa/ Kelurahan 50.62 %
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	19.3 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Keluarga dengan akses terhadap air minum layak	33.72 %
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	66.67 %
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	39,78 %

	LIMBAH		
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Menurunnya Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	37,78 %
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kesesuaian Tertib Administrasi Tata Bangunan	50 %
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	63.4 %
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Tenaga Kerja Terampil Yang Bersertifikat	40 %
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Rinci	14.29 %
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
1.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	69.14 %
2.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Dokumen Rencana Rinci	69,14 %
<b>1.05</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>		
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	22.84 %
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	60 %
3.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100 %
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>		
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya PMKS Yang Diberdayakan	16 %
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS Yang Direhabilitasi	7.7 %
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial Untuk Masyarakat Miskin Dan Rentan Miskin	76.5 %
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Laporan Ketanggapdaruratan Bencana	100 %
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>2.07</b>	<b>Tenaga Kerja</b>		
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	4.8 %
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	4,86 %
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran Kasus Ketenagakerjaan Yang Diselesaikan	249 kasus
<b>2.08</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Mempertahankan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,17 Indeks

	PEREMPUAN		
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100 %
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Gender "Vocal Point"	40 kelompok
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Buku Profil Gender Dan Anak	3 Buku
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Desa/Kelurahan Layak Anak	10 Desa/ Kelurahan
<b>2.09</b>	<b>Pangan</b>		
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	84.9 Skor
<b>2.10</b>	<b>Pertanahan</b>		
1.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan	40 %
2.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat Yang Teridentifikasi	40 %
3.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemda	27,56 %
<b>2.11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>		
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan LH Yang Dibutuhkan	66,67 %
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Meningkatnya Indeks Kualitas Udara,	59,35 Indeks; 93,10 Indeks
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55,73 Angka 55,73 poin
4.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan Hak MHA	1,45 %
5.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya luasan tutupan lahan	30 Hektar
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	18,63 %
<b>2.12</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>		
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP	95.46 %
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Berusia 0-18 Tahun	83.75 %
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya Data Kependudukan	3 Dokumen
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Data Kependudukan	3 Dokumen
<b>2.13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		

1.	PROGRAM PENATAAN DESA	Pemekaran Desa	4 Desa
2.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Terbentuknya Kawasan Perdesaan berbasis potensi SDA	2 Desa
3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDES yang aktif	73,91 Persen
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Strata Posyandu	37,93 Persen
<b>2.14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	17.18 %
2.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	47.06 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB	36 Dokumen
<b>2.15</b>	<b>Perhubungan</b>		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	29.25 %
<b>2.16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	2,2 Angka
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	SPBE	2.2 angka
<b>2.17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>		
1.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Persentase Koperasi Yang Berkualitas	73.08/19 %/Koperasi
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Persentase Koperasi Aktif	60,99/86 %/Jumlah Koperasi
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Persentase Akses Permodalan Koperasi	40/14 %/Koperasi
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Persentase UMKM Aktif	83.82 %
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Persentase Akses Permodalan Dan Pemasaran Produk Usaha Mikro	40/20 %/Usaha Mikro
<b>2.18</b>	<b>Penanaman Modal</b>		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	89,15 Angka
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,15 Angka
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	89,15 Angka
<b>2.19</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Jumlah Wirausaha Pemuda Pemula	CC/54 predikat/



	KEPEMUDAAN		angka
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	8 cabang olahraga
<b>2.20</b>	<b>Statistik</b>		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	40 %
<b>2.21</b>	<b>Persandian</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi	41,18 %
<b>2.22</b>	<b>Kebudayaan</b>		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Festival Budaya Yang Dilaksanakan	3 Festival
2.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Situs, Benda Dan Kawasan Cagar Yang Dilestarikan	8 Cagar Budaya
<b>2.23</b>	<b>Perpustakaan</b>		
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	89,03/24340 %/Eksemplar
<b>2.24</b>	<b>Kearsipan</b>		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi	77.45 % 5151 Dokumen
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>		
<b>3.25</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1.658,03 Ton
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Ikan Air Tawar, Meningkatnya Produksi Ikan Air Payau	14,88/150,16 Ton
3.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan	62,5 persen/ 20 Kelompok
<b>3.26</b>	<b>Pariwisata</b>		
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	2 Hari
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	2 Hari
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	45.45/5 %/Jumlah
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	140 kelompok
<b>3.27</b>	<b>Pertanian</b>		
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung; Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Meningkatnya Populasi Ternak Babi	65581/29468 Ekor
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung; Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Meningkatnya Populasi	65581/29468 Ekor

		Ternak Babi	
2.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Meningkatnya Populasi Ternak Babi	65581/29468 Ekor
3.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung	25750/59230 Ton
4.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya; Meningkatnya Kelas Kemampuan Tani Ternak Menjadi Kelas Madya	6.58 %
<b>3.28</b>	<b>Kehutanan</b>		
<b>3.29</b>	<b>Energi dan Sumber Daya mineral</b>		
<b>3.30</b>	<b>Perdagangan</b>		
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar	1700 Juta Rupiah
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan	201,362 Miliar Rp
3.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Yang Standar Dan Perlindungan Konsumen	75 %
<b>3.31</b>	<b>Perindustrian</b>		
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pemberdayaan Industri	15 %
<b>3.32</b>	<b>Transmigrasi</b>		
1.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Dan Lokasi Transmigrasi Yang Difasilitasi Pencadangannya	40/2 %/Kawasan
2.	ROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Unit Permukiman Yang Difasilitasi Pembinaannya	50/6 %/Unit
<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>		
<b>4.1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai SAKIP, LPPD, Persentase Produk Hukum Yang Sesuai Dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum, Persentase Pengelolaan Bina Mental Spritual	2,7 angka cc/54 Predikat/Angka
2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian, Proporsi Kesesuaian Program Pembangunan, Proporsi Pengadaan Barang Dan Jasa	62,50 %
<b>4.5</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dihasilkan	40 Dokumen
<b>5</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>		
<b>5.1</b>	<b>Perencanaan</b>		
1	PROGRAM PERENCANAAN,	Persentase Capaian Kinerja	100 %

	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Dalam RKPD Dengan RPJMD	100 %
<b>5.2</b>	<b>Keuangan</b>		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Atas Audit BPK	WTP Opini
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini Atas Audit BPK	WTP Opini
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	9.57 %
<b>5.3</b>	<b>Kepegawaian</b>		
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	61.75 %
<b>5.4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	48.53 %
<b>5.5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>		
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Government Award (IGA), Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	75/Sangat Inovatif Skor/Kategori 38.46 %
<b>5.6</b>	<b>Pengelolaan Perbatasan Daerah</b>		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	75 %
<b>5.7</b>	<b>Pengelolaan Penghubung</b>		
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan</b>		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	Level 3 Level
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	3 Angka
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.82 Indeks
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	70 %
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>		
<b>8.1</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan politik</b>		
1.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat	790 Orang
2.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat	402 Orang
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonsosbud Dan Organisasi Kemasyarakatan	49,15 %

4.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Menurunnya Kasus Unjuk Rasa/Demonstrasi	4 Kasus
----	--	---	---------

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua program yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2023 merupakan penjabaran langsung dari RPMJD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 sebagai salah satu dasar penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Program	Fokus Kegiatan
	<b>Non Urusan</b>	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;</li> <li>- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;</li> <li>- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah.</li> </ul>

Program – program tersebut dielaborasikan dalam 495 kegiatan dan 1.296 sub kegiatan untuk dilaksanakan di Tahun 2023. Lebih lanjut, pendanaan indikatif untuk keseluruhan rencana program dan kegiatan menjadi pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kabupaten Belu pada RKPD Tahun 2023. Pagu indikatif RKPD Tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2023.





Pagu indikatif tiap perangkat daerah Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2 dengan rincian terlampir dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belu.

**Tabel 5.2**  
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023

<b>Kode Urusan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Rencana Anggaran Tahun 2023</b>
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayan Dasar</b>	<b>664,705,401,648</b>
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>228,101,912,630</b>
	01 Dinas Pendidikan dan kebudayaan	228,101,912,630
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>217,477,033,810</b>
	01 Dinas Kesehatan	87,890,258,063
	02 RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD	129,586,775,747
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>203,134,432,229</b>
	03 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	203,134,432,229
<b>5</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9,426,276,029</b>
	03 Satuan Polisi Pamong Praja	5,944,059,182
	04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,482,216,847
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	<b>6,565,746,950</b>
	01 Dinas Sosial	6,565,746,950
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>76,064,991,465</b>
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>4,796,640,085</b>
	01 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4,796,640,085
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>3,492,395,400</b>

<b>Kode Urusan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Rencana Anggaran Tahun 2023</b>
	01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,492,395,400
<b>11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>18,361,636,176</b>
	01 Dinas Lingkungan Hidup	18,561,636,176
<b>12</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Cakil</b>	<b>3,703,022,527</b>
	01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,703,022,527
<b>13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>5,774,971,577</b>
	01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,774,971,577
<b>14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>7,106,722,944</b>
	02 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7,106,722,944
<b>15</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>8,383,129,485</b>
	01 Dinas Perhubungan	8,383,129,485
<b>16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3,904,507,478</b>
	01 Dinas Komunikasi dan Informatika	3,904,507,478
<b>17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>3,279,300,478</b>
	01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3,279,300,478
<b>18</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>10,324,930,644</b>
	01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,324,930,644
<b>19</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3,968,105,686</b>
	01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3,968,105,686

<b>Kode Urusan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Rencana Anggaran Tahun 2023</b>
<b>23</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>2,969,628,985</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,969,628,985
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>40,609,677,937</b>
<b>25</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>4,204,684,714</b>
	01 Dinas Perikanan	4,204,684,714
<b>26</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>4,067,146,305</b>
	01 Dinas Pariwisata	4,067,146,305
<b>27</b>	<b>Pertanian</b>	<b>25,655,513,874</b>
	01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8,855,782,754
	02 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16,799,731,120
<b>30</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>6,682,333,044</b>
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6,682,333,044
<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	<b>53,862,638,513</b>
4.1	Sekretariat Daerah	<b>26,492,614,280</b>
	Sekretariat Daerah	26,492,614,280
4.5	Sekretariat DPRD	<b>27,370,024,233</b>
	04 Sekretariat DPRD	27,370,024,233
<b>5</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	<b>190,668,807,452</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>7,049,090,934</b>
	01 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7,049,090,934
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>	<b>162,829,170,736</b>
	05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	156,941,836,606
	12 Badan Pendapatan Daerah	5,887,334,130
<b>3</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>12,282,406,364</b>
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12,282,406,364

<b>Kode Urusan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Rencana Anggaran Tahun 2023</b>
<b>6</b>	<b>Perbatasan Daerah</b>	<b>2,103,699,792</b>
	09 Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,103,699,792
<b>6</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>6,404,439,626</b>
	01 Inspektorat	6,404,439,626
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	<b>33,049,283,327</b>
	17 Kecamatan Kota Atambua	5,600,000,000
	18 Kecamatan Tasifeto Barat	2,028,096,769
	19 Kecamatan Tasifeto Timur	2,251,226,611
	20 Kecamatan Raihat	1,889,105,247
	21 Kecamatan Lamaknen	1,710,581,618
	22 Kecamatan Kakuluk Mesak	2,127,928,981
	23 Kecamatan Raimanuk	2,143,717,888
	24 Kecamatan Lasiolat	1,484,054,989
	25 Kecamatan Atambua Selatan	5,477,611,847
	26 Kecamatan Atambua Barat	4,663,663,579
	27 Kecamatan Lamaknen Selatan	2,021,032,648
	28 Kecamatan Nanaet Duabesi	1,652,263,150
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	<b>4,668,266,073</b>
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	4,668,266,073
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,668,266,073
	<b>T O T A L</b>	<b>1,063,829,066,415</b>

## **BAB. VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2026. Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 ini mengacu pada Sasaran Pokok RPJMD Kabupaten Belu Tahun Kedua. Pencantuman indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Belu

Tahun 2021-2026 dalam bab ini disajikan dalam tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dikelompokkan berdasarkan indikator Program Pembangunan Daerah untuk memenuhi kinerja pada aspek: (1) Kesejahteraan Masyarakat, (2) Pelayanan Umum, dan (3) Daya Saing Daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Belu terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Belu, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan; 3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan; 4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah. Gambaran pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertera pada tabel berikut.

**Tabel 6.1**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Daerah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian Tahun 2021</b>	<b>Target IKU Tahun 2022</b>	<b>Target IKU Tahun 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>6</b>
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,77	63,23	63,67
2	Persentase Stunting	persen	17,9	17	10
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,68	15,28	15,07
4	Pertumbuhan Ekonomi	persen	1,75	1,25	2,45
5	TPT	persen	5,35	6	5
6	Inflasi	angka	N/A	1,08	1,03
7	Indeks GINI	indeks	N/A	0,34	0,32
8	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,73	31,96	33,72
9	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	70,38	71,81	72,22
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	48,70	50	56
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,84	88,73	88,82
12	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	8,47	9,11	9,57
13	Persentase Desa Berkembang	Persen	56,52	63,76	66,66

Target dan Capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2023

Sumber : Hasil Evaluasi Tahun 2021 & RPJMD Kab. Belu Tahun 2021 – 2026

**Tabel 6.2**

Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan  
 Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu Tahun 2021-2023

No.	Aspek/Usuran/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
<b>A</b>	<b>Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>A</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Sosial</b>				
a.1	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,68	15,28	15,07
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	50,00	15,5	16
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	62,03	76	76,5
<b>B</b>	<b>Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>A</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga kerja</b>				
a.1	TPT	persen	5,35	6	5
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	1,51	3,1	3,9
<b>b</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
b.1.2	Gender Vocal Point	persen	0	20	40
<b>c</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pangan</b>				
c.1.1	Skor PPH	angka	84,58	84,7	84,9
<b>d</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa</b>				
d.1	Persentase Desa Berkembang	persen	56,52	63,76	66,66
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	persen	56,52	65,22	73,91
<b>e</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>				
e.1.1	Total Fertility Rate (Rate)	angka	2,96	2,9	2,83



No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
<b>C</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
<b>a</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,77	63,23	63,67
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7,431	7,712	7,813
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	1,75	1,25	2,45
a.3	Inflasi	angka	N/A	1,08	1,03
a.4	Indeks GINI	indeks	N/A	0,34	0,32
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,77	63,23	63,67
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,36	7,37	7,37
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	tahun	12,28	12,36	12,36
<b>b</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>				
b.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,77	63,23	63,67
b.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	64,89	65,00	65,43
b.2	Persentase Stunting	persen	17,9	21	20
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	11,8	0	0
<b>c</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>				
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	22,98	40	60
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3,7	7,41	11,11
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>a</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup</b>				
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	70,38	72,90	73,14
a.1.1	Indeks Kualitas Air	angka	57,14	58,67	59,01
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	angka	93,36	92,88	92,99

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	59,27	59,58
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17,77	18,23	18,63
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	7,40	7,41	14,81
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>				
c.1.1	SPBE	angka	0	1,5	2,2
<b>D</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>				
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	persen	89,27	79,82	83,82
<b>E</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal</b>				
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	81,50	569,03	694,03
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	16	15,19	15,37
<b>C</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
<b>A</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,84	88,73	88,82
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	44,52 (C)	50	56
a.2.1	Nilai SAKIP	predikat/ angka	CC/51,60	CC/52	CC/54
a.2.2	LPPD	angka	N/A	2,65	2,70
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Persen	26,79	37,5	51,79
<b>B</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>				
b.1.1	Maturitas SPIP	Angka	N/A	2,9	3
<b>C</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan</b>				

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	Persen	85,47	100	100
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	Persen	87	100	100
<b>D</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</b>				
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	8,47	9,11	9,57
d.1.1	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
<b>E</b>	<b>Kepegawaian</b>				
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Persen	37,49	37,84	46,82
<b>f.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Skor	54,04	70	75
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0	20	38,46
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang</b>				
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,73	31,96	33,72
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	51,57	61,99	63,4
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	38,87	38,83	39,78
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	69,08	68,96	69,14
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	angka	21,01	18,53	19,3
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	0	14,29
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>				
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>				
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	1031,73	1067,86	1115,96

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>				
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	17,181	19,26	19,71
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	274	115	140
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>				
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	671,45	680,63	724,99
<b>D</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>				
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	50,268	32,65	33,11

Sumber: Evaluasi Tahun 2021, RPJMD Kab. Belu Tahun 2021 - 2026

## **BAB. VII**

### **P E N U T U P**

Perumusan Dokumen RKPD kabupaten/kota merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi Dokumen RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota, rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi serta hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja perangkat daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2023 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Dokumen RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2023, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2023 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan di Perangkat Daerah masing - masing.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 yaitu RKPD Tahun 2023 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Dokumen Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan "Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif".

Bupati Belu, 



R. dr. Agustinus Taolin, SpPD., KG-EH, FINASIM 

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>227,769,824,130</b>						<b>223,553,692,630</b>		
<b>1 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>165,724,656,316</b>					CC/54 predikat/ angka	<b>165,762,214,266</b>		
<b>1 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya perencanaan , penganggaran dan pelaporan perangkat daerah	%		%	100 %	<b>164,883,953,216</b>					100 %	<b>164,800,753,216</b>		
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan lainnya				1571 org/bln	164,450,753,216	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Apartur Sipil Negara	1571 org/bln	164,450,753,216	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD				1 Dokumen	433,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Apartur Sipil Negara	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>6,000,000</b>					100 %	<b>6,000,000</b>		
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>407,127,800</b>					100 %	<b>412,190,000</b>		
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia				1 paket	8,114,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 paket	7,683,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2 paket	77,818,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	2 paket	79,404,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 paket	53,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	2 paket	56,427,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				75 Laporan	24,600,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	75 Laporan	25,275,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				50 Laporan	242,695,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	50 Laporan	243,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	<b>257,186,600</b>						100 %	<b>369,650,000</b>	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan peralatan dan mesin lainnya tersedia				1 unit	68,476,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 unit	174,650,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang tersedia				2 paket	188,710,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	2 paket	195,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	<b>68,434,700</b>						100 %	<b>70,617,050</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				280 lbr/meterai	3,480,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	280 lbr/meterai	3,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Laporan	57,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	58,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1 Laporan	7,504,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	8,317,050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	<b>101,954,000</b>						100 %	<b>103,004,000</b>	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				11 Unit	67,358,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	11 Unit	67,818,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				15 Unit	12,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	15 Unit	12,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				1 paket	22,096,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara	1 paket	22,686,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Kelulusan SMP Angka Putus Sekolah SMP APK SMP APM SMP Ratio Ruang Kelas Kategori Baik terhadap Ruang Kelas SMP	Angka Angka Angka Angka rasio		Angka Angka Angka Angka rasio	99,80 Angka 1.03 Angka 90.17 Angka 88.19 Angka 94,91 rasio	<b>61,589,636,314</b>						99,80 Angka 1.03 Angka 90.17 Angka 88.19 Angka 94,91 rasio	<b>57,264,846,864</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	%		%	100 %	<b>26,299,850,800</b>						100 %	<b>25,332,478,250</b>	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun				4 Ruang	899,548,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4 Ruang	899,548,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun				1 Unit	235,612,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Unit	235,612,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun				1 Ruangan	104,226,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruangan	104,226,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun				1 Ruangan	234,650,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruangan	234,650,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sapras utilitas sekolah yang dibangun				10 Unit	1,408,510,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Unit	1,408,510,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat				7 Ruang	1,765,247,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7 Ruang	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	158,592,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	158,592,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan				51 paket	2,009,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	51 paket	2,505,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian				147 Pendidikan	114,444,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	147 Pendidikan	114,445,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah pendidikan dasar yang dievaluasi satuan pendidikan dasar				147 Satuan pendidikan	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	147 Satuan pendidikan	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik non akademik				350 Peserta didik	49,584,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	350 Peserta didik	49,584,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan dasar				125 Orang	2,625,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	125 Orang	2,625,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar				24 Orang	283,471,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	24 Orang	283,530,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekola Dasar yang mengelola dana BOS				147 Satuan pendidikan	14,801,740,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	147 Satuan pendidikan	14,801,740,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang dibangun				8 Ruang	1,560,025,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8 Ruang	1,161,841,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1 01 02 2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	%		%	100 %	<b>26,170,739,514</b>						100 %	<b>22,813,013,914</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	02		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun				4 Ruang	3,260,977,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4 Ruang	730,978,889	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun				2 Ruang	327,112,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Ruang	327,112,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang dibangun				3 Ruang	548,234,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Ruang	548,234,167	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	06		Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang dibangun				5 Ruang	913,723,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5 Ruang	913,723,611	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	09		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah ruma dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun				3 Unit	401,387,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Unit	401,387,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana parasrana utilitas sekolah yang dibangun				2 Unit	375,550,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Unit	233,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat				10 Ruang	1,659,018,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Ruang	997,506,389	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	300,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhabilitasisedang/berat				2 Ruang	220,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	300,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilit sekolah yang direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	200,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan alat peraga siswa yang tersedia				17 paket	535,480,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17 paket	535,480,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian				55 Satuan pendidikan	138,515,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	55 Satuan pendidikan	138,515,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik				165 Peserta didik	52,110,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	165 Peserta didik	52,110,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan menengah pertama				50 Orang	1,050,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	1,050,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat fasilitaskenaikan pangkat/golongan				84 Orang	77,985,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	84 Orang	125,997,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang melaksanakan kelembagaan dan manajemen sekolah				55 Satuan pendidikan	72,086,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	55 Satuan pendidikan	21,121,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah SMP yang mengelola dana BOS				55 Satuan pendidikan	15,238,561,014	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	55 Satuan pendidikan	15,237,647,858	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang direhabilitasi sedang/ berat				4 Ruang	400,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4 Ruang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Meningkatnya Kualitas Pendidikan PAUD	%		%	100 %	<b>7,761,759,000</b>						100 %	<b>7,761,762,700</b>	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana prasarana utilitas PAUD yang dibangun				2 unit	410,323,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan PAUD	2 unit	410,323,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar mengajar				7693 orang	2,646,387,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan PAUD	7693 orang	2,646,389,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD				7 orang	147,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan PAUD	7 orang	147,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen				215 Satuan pendidikan	187,049,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan PAUD	215 Satuan pendidikan	187,050,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP				215 Satuan pendidikan	4,371,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan PAUD	215 Satuan pendidikan	4,371,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Meningkatnya Kualitas Pendidikan PAUD/PNF	%		%	100 %	<b>1,357,287,000</b>						100 %	<b>1,357,592,000</b>	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana prasarana dan utiliti satuan pendidikan non formalyang dibangun				2 Unit	518,683,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Kesetaraan	2 Unit	518,684,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah Non Formal/Kesetaraan yang mengelola dana BOP				6 Satuan pendidikan	838,604,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Satuan Pendidikan Kesetaraan	6 Satuan pendidikan	838,908,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Meningkatnya lembaga paud yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%/Lembaga		%/Lembaga	6.98/15 %/Lembaga	<b>18,400,000</b>						6.98/15 %/Lembaga	<b>50,000,000</b>	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya penyusunan kompetensi dasar muatan lokal PAUD/PNF	%		%	100 %	<b>18,400,000</b>						100 %	<b>50,000,000</b>	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				5 Dokumen	18,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat PAUD/PNF	5 Dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Kualifikasi guru pendidikan S1/D4	%		%	85 %	<b>426,631,500</b>						85 %	<b>426,631,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pemerataan kuantitas dan kualitas PTK satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan menengah	%		%	100 %	426,631,500						100 %	426,631,500	
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian PTK satuan pendidikan dasar, PAUD, PNF/kesetaraan dan pendidikan menengah				1 Dokumen	426,631,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	1 Dokumen	426,631,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang direkomendasikan	Jumlah		Jumlah	10 Jumlah	10,500,000						10 Jumlah	50,000,000	
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya usul perizinan PAUD dan PNF terverifikasi	%		%	100 %	10,500,000						100 %	50,000,000	
1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan Non Formal yang diverifikasi				1 Dokumen	10,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Masyarakat Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							332,088,500						536,700,000	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah festival budaya yang dilaksanakan	Festival		Festival	3 Festival	179,315,000						3 Festival	179,890,000	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya	%		%	100 %	179,315,000						100 %	179,890,000	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengelola kebudayaan				10 objek	179,315,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Pelaku Kebudayaan	10 objek	179,890,000	179,890,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah situs, benda dan kawasan cagar yang dilestarikan	Cagar Budaya		Cagar Budaya	8 Cagar Budaya	152,773,500						8 Cagar Budaya	356,810,000	
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan cagar budaya peringkat kab/kota	%		%	100 %	152,773,500						100 %	356,810,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga cagar budaya yang didaftarkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			25 objek 0 Objek	46,235,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Pelaku Kebudayaan	25 objek 0 Objek	85,430,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2	22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan			5 objek	106,538,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Pelaku Kebudayaan	5 objek	271,380,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>1</b>	<b>02</b>							<b>87,890,258,063</b>							<b>99,277,549,554</b>				
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>28,637,975,263</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>28,612,713,383</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>70,000,000</b>							100 Persen	<b>20,220,000</b>	
1	02	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	20,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN	1 dokumen	20,220,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen 1 dokumen	50,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN	1 dokumen 1 dokumen	0	Dinas Kesehatan	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>27,791,499,263</b>							100 Persen	<b>27,784,850,650</b>	
1	02	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				438 orang	27,453,699,263	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN	438 orang	27,446,940,650	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 dokumen	337,800,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN	1 dokumen	337,910,000	Dinas Kesehatan	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>174,326,000</b>							100 Persen	<b>176,160,233</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	15,080,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan	1 paket	15,245,880	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	7,123,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan	1 paket	7,201,353	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	52,123,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan	1 paket	52,123,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	40,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan	1 paket	40,440,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	10,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan	1 laporan	10,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	50,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan	1 laporan	50,550,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>70,400,000</b>						100 Persen	<b>70,855,000</b>	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	5,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Perkantoran	1 laporan	5,055,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	65,400,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Perkantoran	1 laporan	65,800,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>531,750,000</b>						100 Persen	<b>560,627,500</b>	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 unit	507,550,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Barang Milik Daerah	130 unit	507,550,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 unit	24,200,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Barang Milik Daerah	25 unit	53,077,500	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Harapan Hidup Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Kesehatan jiwa dan penyehatan lingkungan	Angka Angka Angka Angka % %		Angka Angka Angka Angka % %	65.4252 Angka 0 Angka 0 Angka 0 Angka 100 % 84 %	<b>44,094,133,300</b>						65.4252 Angka 0 Angka 0 Angka 0 Angka 100 % 84 %	<b>53,581,005,556</b>	
1 02 02 2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	<b>4,796,518,000</b>						100 Persen	<b>4,421,669,364</b>	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 paket	748,470,000	Kab. Belu, Lasiolat, Lasiolat	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan serta masyarakat	1 paket	1,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				17 Unit	99,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan serta masyarakat	17 Unit	101,100,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 paket	2,412,224,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan serta masyarakat	1 paket	2,767,137,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 paket	1,521,524,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan serta masyarakat	1 paket	1,538,260,764	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				17 Unit	15,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan serta masyarakat	17 Unit	15,165,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	<b>39,081,615,300</b>						100 Persen	<b>48,940,879,312</b>	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5297 orang	3,836,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	5297 orang	3,944,488,450	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5055 orang	700,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	5055 orang	708,355,128	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151.973 orang	86,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	151.973 orang	87,540,670	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8664 orang	240,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	8664 orang	240,997,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				580 orang	96,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	580 orang	97,258,200	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6103 orang	348,424,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	6103 orang	352,256,664	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 dokumen	2,518,848,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 dokumen	2,518,908,650	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 dokumen	270,100,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 dokumen	273,046,836	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 dokumen	316,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 dokumen	320,421,285	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 dokumen	590,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 dokumen	596,667,734	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"				1 Dokumen	26,153,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	26,441,290	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	"Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular" Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen 0 Dokumen	3,381,836,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 Dokumen 0 Dokumen	3,588,875,872	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat" Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen 0 Dokumen	21,290,887,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 Dokumen 0 Dokumen	31,385,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	36,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	2 Paket	36,863,082	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1,242,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1,242,093,680	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	3,274,565,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	2,688,160,796	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				8 Unit	755,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	8 Unit	763,743,774	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	"Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)"					1 Laporan	20,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 Laporan	20,422,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah"					1 Dokumen	48,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	49,336,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>216,000,000</b>							100 Persen	<b>218,456,880</b>	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan"					2 Dokumen	216,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	218,456,880	Dinas Kesehatan
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar	%		%	58.94 %	<b>12,273,784,800</b>							58.94 %	<b>14,196,141,846</b>	
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	<b>12,273,784,800</b>							100 Persen	<b>14,196,141,644</b>	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					1 Dokumen	4,500,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	4,544,440,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	"Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)"					631 orang	7,399,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan	631 orang	9,273,046,885	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan"				1 Dokumen	374,534,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	378,654,759	Dinas Kesehatan
1 02 04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan	%		%	73 %	<b>303,311,700</b>						73 %	<b>306,638,019</b>	
1 02 04 2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persen		Persen	100 Persen	<b>170,411,700</b>						100 Persen	<b>172,286,128</b>	
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	170,411,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Sarana IRTP	1 Dokumen	172,286,128	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persen		Persen	100 Persen	<b>132,900,000</b>						100 Persen	<b>134,351,790</b>	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	132,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Sarana produksi makanan dan minuman	1 Dokumen	134,351,790	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Meningkat nya Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Desa/Kelurahan STBM	% % %		% % %	75,9 % 75,9 % 50.62 %	2,581,053,000					75,9 % 75,9 % 50.62 %	2,581,050,750		
1 02 05 2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	2,581,053,000					100 Persen	2,581,050,750		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	2,581,053,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat	1 Dokumen	2,581,050,750	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						129,586,775,747						109,426,530,696		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	65,205,314,520						CC/54 predikat/ angka	71,835,846,357	
1 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						27,200,314,620							30,030,346,357	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				100 %	27,156,297,820	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 %	29,981,927,602	RSUD Atambua
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD				100 %	44,016,800	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 %	48,418,755	RSUD Atambua
1 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						4,999,900							5,500,000	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat				100 %	4,999,900	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 %	5,500,000	RSUD Atambua
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						38,000,000,000							41,800,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				100 %	38,000,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 %	41,800,000,000	RSUD Atambua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Pemberian layanan keawatdaruratan yang bersertifikat	%		%	70 %	51,853,155,727						70 %	23,809,548,236	
1 02 02 2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						51,853,155,727							23,809,548,236	
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Mes Tenaga Medis) yang dibangun Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				100 % 0 Unit	19,126,076,578	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 % 0 Unit	0	RSUD Atambua
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				100 % 0 Unit	25,227,079,256	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 % 0 Unit	21,038,648,236	RSUD Atambua
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				100 % 0 Paket	7,499,999,893	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 % 0 Paket	2,770,900,000	RSUD Atambua
1 02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Pemberian layanan keawatdaruratan yang bersertifikat	%		%	70 %	12,528,305,500						70 %	13,781,136,103	
1 02 03 2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>						12,528,305,500							13,781,136,103	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)				100 %	12,528,305,500	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 %	13,781,136,103	RSUD Atambua	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1 03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>199,632,017,273</b>							<b>59,557,143,801</b>		
<b>1 03 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>8,862,247,149</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>9,300,205,158</b>	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	21 dokumen	<b>120,000,000</b>							21 dokumen	<b>150,000,000</b>	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				6 Dokumen	20,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	6 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Dokumen	100,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	18 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
<b>1 03 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														<b>7,459,197,109</b>	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	6,459,197,109	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		83 Orang/bulan	6,459,197,109	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				97 Dokumen	914,400,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		97 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
<b>1 03 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>														<b>35,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	30,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	5 Orang	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>283,836,150</b>						<b>456,008,049</b>		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	5,986,350	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Manumutin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	7 Paket	6,008,049	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	29,999,800	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Manumutin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	3 Paket	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				100 Laporan	30,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Manumutin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	100 Laporan	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	217,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	150 Laporan	390,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	Unit		Unit	200 Unit	<b>54,961,790</b>					200 Unit	<b>50,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	54,961,790	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	100 Unit	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>149,875,000</b>						<b>150,000,000</b>		
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				412 Laporan	15,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		412 Laporan	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	109,875,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Manumutin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Manumutin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Manumutin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		12 Laporan	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>849,977,100</b>						<b>1,000,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			42 Unit	679,979,200	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	42 Unit	820,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			5 Unit	119,999,900	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	5 Unit	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	49,998,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Manumutin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	3 Unit	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
<b>1</b>	<b>03 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Rasio jaringan rigasi	%	%	19.3 %	<b>4,734,826,910</b>					19.3 %	<b>5,076,752,370</b>		
<b>1</b>	<b>03 02 2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1,334,946,990</b>						<b>2,545,409,344</b>		
1	03 02 2.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen LH untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang disusun			3 Dokumen	73,040,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	204,480,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03 02 2.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk air baku yang dibangun			2 Titik	149,983,560	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Kabuna Kab. Belu, Raimanuk, Rafee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	2 Titik	153,360,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun				1730 Meter	808,730,000	Kab. Belu, Lamaknen, Leowalu Kab. Belu, Tasifeto Timur, Umaklaran Kab. Belu, Tasifeto Barat, Bakustulama Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naitimu Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		1730 Meter	1,623,149,108	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 02 2.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	200,000,000	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Lawalutulus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		1 Unit	204,480,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Titik	53,193,430	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naekasa Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Fohoeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		5 Titik	53,220,236	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		5 Orang	51,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>3,399,879,920</b>							<b>2,531,343,026</b>	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	204,480,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.02.2.02.06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun				1 Titik	130,532,020	Kab. Belu, Raimanuk, Leuntolu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		1 Titik	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						750,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Leowalu	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi				1210 Meter	2,340,206,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1210 Meter	1,094,774,680	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan/dipelihara				200 Meter	29,141,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Tialai Kab. Belu, Tasifeto Barat, Bakustulama Kab. Belu, Raimanuk, Leuntolu Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Ekin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	200 Meter	178,920,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang mengelola pengukuran data realisasi alokasi air				12 Daerah Irigasi	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	12 Daerah Irigasi	51,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Keluarga dengan akses perpipaan air minum layak	%		%	33.72 %	<b>24,561,201,500</b>					33.72 %	<b>6,217,108,000</b>		
1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>24,561,201,500</b>						<b>6,217,108,000</b>		
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				50 SR	14,190,243,000	Kab. Belu, Lamaknen, Dirun Kab. Belu, Raimanuk, Teun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	50 SR	2,071,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang dibangun				370 SR	10,325,958,500	Kab. Belu, Raihat, Tohe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	370 SR	4,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi				3 Kelompok Masyarakat	45,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Dirun Kab. Belu, Raihat, Tohe Kab. Belu, Raimanuk, Teun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	3 Kelompok Masyarakat	46,008,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%		%	39,78 %	<b>5,593,468,500</b>					39,78 %	<b>3,704,293,464</b>		
1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>5,593,468,500</b>						<b>3,704,293,464</b>		
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tanki septic				616 RT	5,539,614,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	616 RT	3,642,949,464	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Klip Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik				12 Kelompok	53,854,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	12 Kelompok	61,344,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Menurunnya terjadi genangan 2 kali setahun	%		%	37,78 %	<b>1,192,590,000</b>					37,78 %	<b>2,100,000,000</b>		
1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Sistem Drainase yang dikelola dan dikembangkan	Km		Km	2 Km	<b>1,192,590,000</b>					2 Km	<b>2,100,000,000</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				1000 M	904,485,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1000 M	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				1000 M	288,105,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1000 M	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Kesesuaian tertib administrasi tata bangunan	%		%	50 %	<b>153,461,600</b>						50 %	<b>220,747,467</b>	
1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan	dokumen		dokumen	22 dokumen	<b>153,461,600</b>						22 dokumen	<b>220,747,467</b>	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan penerbitan persyaratan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA) pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG				12 Dokumen	78,461,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat	12 Dokumen	144,067,467	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota				10 Dokumen	75,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat	10 Dokumen	76,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%		%	63.4 %	<b>154,229,690,814</b>						63.4 %	<b>31,994,400,000</b>	
1 03 10 2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>154,229,690,814</b>							<b>31,994,400,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun				7 Km	134,029,690,814	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	7 Km	29,138,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi				5000 Meter	300,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	5000 Meter	1,022,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun				15 Meter	19,900,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	15 Meter	1,022,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase Dokumen Rencana Rinci	%		%	14.29 %	<b>304,530,800</b>					14.29 %	<b>230,197,342</b>		
1 03 12 2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>						<b>66,943,800</b>						<b>110,197,342</b>		
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang				12 Dokumen	66,943,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	12 Dokumen	110,197,342	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12 2.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>42,734,000</b>						<b>40,000,000</b>		
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat				12 Dokumen	42,734,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	12 Dokumen	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 03 12 2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilakukan	Kali		Kali	12 Kali	<b>62,738,000</b>					12 Kali	<b>40,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang				5 Dokumen	62,738,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat	5 Dokumen	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>1 03 12 2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>132,115,000</b>							<b>40,000,000</b>	
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				5 Dokumen	42,950,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		5 Dokumen	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				12 Dokumen	89,165,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		12 Dokumen	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>1 04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>2,702,414,956</b>						<b>2,272,414,956</b>	
<b>1 04 03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%		%	69.14 %	<b>2,457,186,979</b>						69.14 %	<b>2,027,186,979</b>	
<b>1 04 03 2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>						<b>650,000,000</b>							<b>650,000,000</b>	
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				3 Dokumen	100,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		3 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				3 Dokumen	450,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan			3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh				5 Laporan	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	5 Laporan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 03 2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>						<b>1,807,186,979</b>						<b>1,377,186,979</b>		
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				60 Unit Rumah	1,807,186,979	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	60 Unit Rumah	1,377,186,979	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1 04 04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%		%	69,14 %	<b>245,227,977</b>					69,14 %	<b>245,227,977</b>		
1 04 04 2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>245,227,977</b>						<b>245,227,977</b>		
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				11 Unit Rumah	245,227,977	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	11 Unit Rumah	245,227,977	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							<b>800,000,000</b>						<b>800,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 10 05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan	%		%	40 %	500,000,000						40 %	500,000,000		
2 10 05 2.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan	Kali		Kali	5 Kali	500,000,000						5 Kali	500,000,000		
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	500,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat	5 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2 10 07	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	Persentase Tanah Ulayat yang teridentifikasi	%		%	40 %	100,000,000						40 %	100,000,000		
2 10 07 2.01	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						100,000,000							100,000,000		
2 10 07 2.01 03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2 10 08	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	Persentase pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah	%		%	27,56 %	200,000,000						27,56 %	200,000,000		
2 10 08 2.01	<b>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>						200,000,000							200,000,000		
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				20 Laporan	200,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		20 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						5,944,059,182							7,548,691,032		
1 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	4,817,604,182							CC/54 predikat/ angka	5,251,141,032	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>4,486,637,532</b>					100 %	<b>4,313,191,032</b>		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang	4,335,437,532	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	51 Orang	4,263,191,032	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	151,200,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	1 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	<b>17,850,000</b>						100 %	<b>330,500,000</b>	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	17,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	2 Paket	110,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	100,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	2 Orang	220,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pengelolaan administrasi Umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>71,353,800</b>						100 %	<b>171,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	37,219,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	1 Paket	42,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Bahan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	11,489,300	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	2 Paket	47,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6,895,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	1 Laporan	15,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	15,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	2 Laporan	66,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>22,000,000</b>						100 %	<b>50,000,000</b>	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	22,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>45,324,000</b>						100 %	<b>69,875,000</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,704,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	1 Laporan	2,625,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	27,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	3 Laporan	47,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				1 Laporan	15,920,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	1 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>174,438,850</b>						100 %	<b>316,575,000</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	147,653,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	27 Unit	278,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				26 Unit	500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	26 Unit	6,825,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 Unit	21,285,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	3 Unit	26,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				20 Unit	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	20 Unit	5,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Meningkatnya Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%		%	22.84 %	<b>803,650,000</b>						22.84 %	<b>1,668,550,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Telaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu (1) daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>766,650,000</b>						100 %	<b>1,568,550,000</b>	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				8 Kasus	520,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu	8 Kasus	805,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan Penindakan				9 Kasus	30,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu	9 Kasus	91,190,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	62,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu	1 Dokumen	103,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	107,270,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu	2 Dokumen	262,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan Kapasitasnya				80 Orang	100,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu	80 Orang	253,960,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	46,230,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu	2 Dokumen	52,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	%		%	100 %	<b>37,000,000</b>						100 %	<b>100,000,000</b>	
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP				7 Laporan	37,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu	7 Laporan	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%		%	60 %	<b>322,805,000</b>						60 %	<b>629,000,000</b>	
1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>307,805,000</b>						100 %	<b>609,000,000</b>	
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				26 Laporan	307,805,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu	26 Laporan	609,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04 2.04	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	%		%	100 %	<b>15,000,000</b>						100 %	<b>20,000,000</b>	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				120 Orang	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN	120 Orang	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	05						3,482,216,847						3,449,853,291							
1	05	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	NILAI SAKIP	Predikat/ Angka		Predikat/ Angka	CC/52 Predikat/ Angka	2,293,578,880			CC/52 Predikat/ Angka	1,973,489,923				
1	05	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paket		Paket	1 Paket	30,000,000			1 Paket	50,000,000				
1	05	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen 0 Laporan	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulang an Bencana Daerah Kabupaten Belu	12 Dokumen 0 Laporan	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	1,743,625,230					2 Paket	1,395,549,165		
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan lainnya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang 16 Orang/bulan	1,630,225,230	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	16 Orang 16 Orang/bulan	1,282,149,165	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	113,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	1 Dokumen	113,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	104 Laporan	20,250,000						104 Laporan	30,000,000	
1	05	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	20,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN BPBD Kabupaten Belu	2 Orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	3 Paket	104,218,400						3 Paket	104,816,158	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 paket	3,747,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	1 paket	3,746,958	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,080,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	1 Paket	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	5,471,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	1 Paket	5,437,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Yang Dihasilkan				4 Dokumen	74,920,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	4 Dokumen	75,632,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	1 Paket	20,000,000						1 Paket	20,000,000	
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	3 Unit	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	3 Paket	33,625,450						3 Paket	31,224,600	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
															Nasional					Daerah		
1	05	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	1 Laporan	1,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik yang disediakan				3 Rekening	28,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	3 Rekening	25,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				1 Laporan	4,225,450	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	1 Laporan	4,224,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	1 Paket	<b>341,859,800</b>							1 Paket	<b>341,900,000</b>		
1	05	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharandan dibayar pajaknya				15 Unit	339,359,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	15 Unit	339,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				10 Unit	2,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur BPBD Kab. Belu	10 Unit	2,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	03				<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Desa Tangguh	%		%	11,11 %	<b>1,188,637,967</b>								11,11 %	<b>1,476,363,368</b>	
1	05	03	2.01			<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan Penaggulangan Bencana	Paket		Paket	1 Paket	<b>209,500,000</b>								1 Paket	<b>147,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				50 orang	209,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat di 12 Kecamatan dan Aparatur BPBD Kab. Belu	50 orang	147,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Paket		Paket	4 Paket	<b>475,388,717</b>						4 Paket	<b>603,345,780</b>	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				150 orang	19,169,217	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat di 12 Kecamatan dan Aparatur BPBD Kab. Belu	150 orang	22,100,167	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 dokumen	221,501,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat di 12 Kecamatan dan Aparatur BPBD Kab. Belu	1 dokumen	346,495,613	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				50 unit	134,718,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat di 12 Kecamatan dan Aparatur BPBD Kab. Belu	50 unit	134,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana				12 laporan	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat di 12 Kecamatan dan Aparatur BPBD Kab. Belu	12 laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Paket		Paket	2 Paket	<b>503,749,250</b>						2 Paket	<b>726,017,588</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 03 2.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	353,862,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat di 12 Kecamatan dan Aparatur BPBD Kab. Belu	1 Laporan	576,987,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	"Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 orang	149,887,150	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat di 12 Kecamatan dan Aparatur BPBD Kab. Belu	100 orang	149,030,488	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1 06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>6,565,746,950</b>							<b>6,793,710,345</b>		
<b>1 06 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>3,882,726,050</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>3,825,002,345</b>	
<b>1 06 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>134,256,500</b>							100 %	<b>120,000,000</b>	
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	134,256,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 Laporan	120,000,000	Dinas Sosial	
<b>1 06 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>3,043,268,070</b>							100 %	<b>2,926,307,417</b>	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 orang/Bulan	2,672,290,070	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	27 orang/Bulan	2,527,007,417	Dinas Sosial	
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	370,978,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 Dokumen	399,300,000	Dinas Sosial	
<b>1 06 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>259,896,200</b>							100 %	<b>271,528,620</b>	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan				1 Paket	2,994,500	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	3,293,950	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				1 Paket	69,341,500	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	76,275,650	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan				78794 Lembar	23,650,200	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	78794 Lembar	26,002,020	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	25,000,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 Laporan	25,135,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 Laporan	140,822,000	Dinas Sosial
<b>1 06 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>149,292,680</b>						100 %	<b>179,422,298</b>	
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				10 Paket	55,595,600	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	10 Paket	60,515,510	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				5 Unit	93,697,080	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	5 Unit	118,906,788	Dinas Sosial
<b>1 06 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>86,068,400</b>						100 %	<b>89,313,290</b>	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,492,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 Laporan	3,088,800	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	33,720,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 Laporan	37,092,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				4 Laporan	48,856,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 Laporan	49,132,490	Dinas Sosial



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>209,944,200</b>						100 %	<b>238,430,720</b>	
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan				17 unit	179,400,200	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	17 unit	211,205,720	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				19 Unit	4,750,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	19 Unit	5,225,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	25,794,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah	1 unit	22,000,000	Dinas Sosial
1 06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	%		%	16 %	<b>267,150,400</b>						16 %	<b>866,368,800</b>	
1 06 02 2.01	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	Terlaksananya Pemberdayaan KAT	%		%	100 %	<b>38,471,200</b>						100 %	<b>101,868,800</b>	
1 06 02 2.01 01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT Yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Keluarga	23,059,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Leosama Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Debululik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok KAT	150 Keluarga	47,098,700	Dinas Sosial
1 06 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT Yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				117 Keluarga	15,412,200	Kab. Belu, Lamaknen, Maudemu Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Nanaeoe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok KAT	117 Keluarga	54,770,100	Dinas Sosial
1 06 02 2.02	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengumpulan sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>30,787,700</b>						100 %	<b>82,500,000</b>	
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	30,787,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dunia Usaha	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02 2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%		%	100 %	<b>197,891,500</b>						100 %	<b>682,000,000</b>	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				305 Orang	33,767,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PSKS	305 Orang	385,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	20,562,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PSKS	12 Orang	27,500,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Keluarga	39,237,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PSKS	12 Keluarga	55,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Lembaga	104,324,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PSKS	24 Lembaga	214,500,000	Dinas Sosial
1 06 04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya PMKS yang direhabilitasi	%		%	7.7 %	<b>319,441,500</b>						7.7 %	<b>699,274,000</b>	
1 06 04 2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%		%	100 %	<b>250,679,000</b>						100 %	<b>395,300,000</b>	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Permakanan sesuai Standar Gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	75,717,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PMKS	100 Orang	104,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	66,849,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PMKS	50 Orang	110,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				20 Orang	51,882,500	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PMKS	20 Orang	88,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	5,620,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PMKS	20 Orang	30,800,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang Yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	10,680,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PMKS	20 Orang	22,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatakan layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	39,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PMKS	10 Orang	40,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	erlaksananya Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	%		%	100 %	<b>68,762,500</b>						100 %	<b>303,974,000</b>	
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Permakanan sesuai Standar Gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	3,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PMKS	50 Orang	110,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				80 Orang	68,759,500	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	PMKS	80 Orang	193,974,000	Dinas Sosial
1 06 05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	%		%	76.5 %	<b>938,303,000</b>						76.5 %	<b>1,009,753,200</b>	
1 06 05 2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>938,303,000</b>						100 %	<b>1,009,753,200</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				129112 Orang	805,266,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Orang Miskin	129112 Orang	843,990,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang mendapatkan Pengentasan fakir Miskin Kabupaten/Kota				26398 Keluarga	65,110,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Orang Miskin	26398 Keluarga	77,268,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang mendapat bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12002 Keluarga	67,927,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Orang Miskin	12002 Keluarga	88,495,200	Dinas Sosial
1 06 06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Pemenuhan Laporan Ketanggapdaruratan Bencana	%		%	100 %	<b>1,158,126,000</b>						100 %	<b>393,312,000</b>	
1 06 06 2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>122,726,000</b>						100 %	<b>254,592,000</b>	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat(Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	85,793,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Korban Bencana	1000 Orang	175,032,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Yang tersedia pada Masa Tanggap darurat/pengungsian dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Orang	36,933,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Korban Bencana	800 Orang	79,560,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	erlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>1,035,400,000</b>						100 %	<b>138,720,000</b>	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	1,035,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Korban Bencana dan Taruna Siaga Bencana	21 Orang	138,720,000	Dinas Sosial
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07							4,553,605,085						4,583,200,631		
2 07 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	3,084,760,085					CC/54 predikat/ angka	2,951,848,012		
2 07 01	2.02 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	paket		paket	2 paket	2,591,143,885					2 paket	2,609,845,287		
2 07 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,520,943,885		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Nakertrans	30 Orang/bulan	2,520,943,885	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2 07 01	2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				7 dokumen	70,200,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	7 dokumen	88,901,402	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2 07 01	2.06 <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket		paket	5 paket	150,834,500						5 paket	108,139,752	
2 07 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan				2 paket	2,508,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	2 paket	2,513,521	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2 07 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2 paket	48,730,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	2 paket	25,175,450	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2 07 01	2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan				2 paket	32,356,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	2 paket	13,060,120	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2 07 01	2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				2 laporan	11,030,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	2 laporan	11,060,120	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2 07 01	2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				10 laporan	56,210,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	10 laporan	56,330,541	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	paket		paket	2 paket	119,499,100						2 paket	10,000,000	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				2 unit	19,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	2 unit	10,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan				1 unit	99,999,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	1 unit	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	paket		paket	3 paket	38,056,000						3 paket	38,253,758	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				2 laporan	3,036,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	2 laporan	3,043,188	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	3 laporan	30,180,360	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	5,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	1 laporan	5,030,210	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	paket		paket	3 paket	185,226,600						3 paket	185,609,215	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	162,647,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Nakertrans	12 Unit	162,973,945	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				2 unit	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	2 unit	2,515,030	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	20,079,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Nakertrans	1 unit	20,120,240	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%		%	4.8 %	<b>1,192,825,000</b>						4.8 %	<b>1,333,726,456</b>	
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	paket		paket	1 paket	<b>1,192,825,000</b>						1 paket	<b>1,333,726,456</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				100 orang	1,192,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat pencari kerja	100 orang	1,333,726,456	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%		%	4,86 %	<b>115,540,000</b>						4,86 %	<b>118,623,026</b>	
2.07.04.2.01	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sumber daya manusia pelayanan antar kerja	paket		paket	1 paket	<b>39,050,000</b>						1 paket	<b>40,742,606</b>	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah sumber daya manusia pelayanan antar kerja				100 orang	39,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat pencari kerja	100 orang	40,742,606	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04.2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah paket pengelolaan bursa kerja	paket		paket	1 paket	<b>25,480,000</b>						1 paket	<b>26,558,717</b>	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah paket pengelolaan bursa kerja				2 paket	25,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PMI AKAD dan PMI AKAN	2 paket	26,558,717	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04.2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	paket		paket	2 paket	<b>51,010,000</b>						2 paket	<b>51,321,703</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya				100 orang	30,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PMI AKAD dan PMI AKAN	100 orang	30,185,390	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani				10 orang	20,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PMI AKAD dan PMI AKAN	10 orang	21,136,313	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	kasus		kasus	249 kasus	<b>160,480,000</b>						249 kasus	<b>179,003,137</b>	
2.07.05.2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	paket		paket	3 paket	<b>69,620,000</b>						3 paket	<b>75,314,184</b>	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online				24 perusahaan	22,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengusaha dan pekerja	24 perusahaan	27,206,085	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama				4 perusahaan	17,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengusaha dan pekerja	4 perusahaan	18,040,311	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI/PKB, struktur skala upah dan LKS bipartif dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan				2 laporan	29,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengusaha dan pekerja	2 laporan	30,067,788	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2 07 05 2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	paket		paket	2 paket	<b>90,860,000</b>						2 paket	<b>103,688,953</b>	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah				1 perkara	24,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengusaha dan Pekeja	1 perkara	33,097,593	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan				30 perkara	66,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengusaha dan Pekeja	30 perkara	70,591,360	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>						<b>243,035,000</b>							<b>245,765,036</b>	
3 32 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%/Kawasan		%/Kawasan	40/2 %/Kawasan	<b>73,275,000</b>						40/2 %/Kawasan	<b>73,275,475</b>	
3 32 02 2.01	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	kawasan		kawasan	1 kawasan	<b>73,275,000</b>						1 kawasan	<b>73,275,475</b>	
3 32 02 2.01 01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan trasmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain				1 dokumen	73,275,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Calon warga transmigrasi	1 dokumen	73,275,475	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 32 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Unit Permukiman yang difasilitasi pembinaannya	%/Unit		%/Unit	50/6 %/Unit	<b>169,760,000</b>						50/6 %/Unit	<b>172,489,561</b>	
3 32 04 2.01	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	Jumlah pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	paket		paket	1 paket	<b>169,760,000</b>						1 paket	<b>172,489,561</b>	
3 32 04 2.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman				2 satuan permukiman	169,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Transmigrasi	2 satuan permukiman	172,489,561	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						<b>3,492,395,400</b>							<b>3,749,427,800</b>	
2 08 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>2,790,963,020</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>2,876,515,750</b>	
2 08 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>2,515,185,220</b>						100 %	<b>2,515,184,650</b>	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,278,185,220	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3A Kab.Belu	22 Orang/bulan	2,278,184,650	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	237,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3A Kab.Belu	2 Dokumen	237,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya	%		%	100 %	<b>145,045,400</b>						100 %	<b>165,001,000</b>	
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,510,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3A Kab.belu	1 Paket	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,710,400	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas P3A Kab.belu	1 Paket	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	15,800,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas P3A Kab.belu	5 Laporan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"				10 Laporan	114,025,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3A Kab.belu	10 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>43,947,400</b>						<b>51,330,000</b>		
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,600,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	7,530,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	25,350,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	28,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9,997,400	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya	%		%	100 %	<b>86,785,000</b>					100 %	<b>140,000,000</b>		
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 unit	81,783,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Dinas P3A Kab. Belu	9 unit	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	5,002,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Dinas P3A Kab. Belu	3 unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Mempertahankan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks		Indeks	97,17 Indeks	<b>37,650,150</b>					97,17 Indeks	<b>38,650,850</b>		
2 08 02 2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>37,650,150</b>						<b>38,650,350</b>		
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				10 OPD	37,650,150	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 OPD	38,650,150	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%		%	100 %	<b>383,052,530</b>						100 %	<b>542,474,000</b>	
2 08 03 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya	%		%	100 %	<b>49,928,500</b>						100 %	<b>106,876,500</b>	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinrkonisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	49,928,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Korban Kekerasan	1 Dokumen	106,876,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>265,386,000</b>							<b>360,597,500</b>	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				100 Orang	265,386,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		100 Orang	360,597,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>67,738,030</b>							<b>75,000,000</b>	
2 08 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 OPD	45,198,030	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan		20 OPD	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	22,540,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	20 Orang	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Gender "Vocal Point"	kelompok		kelompok	40 kelompok	<b>50,598,000</b>					40 kelompok	<b>72,000,000</b>		
2.08.04.2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>50,598,000</b>						<b>51,000,000</b>		
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	50,598,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	2 Laporan	51,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Buku Profil Gender dan Anak	Buku		Buku	3 Buku	<b>106,786,900</b>					3 Buku	<b>108,786,900</b>		
2.08.05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>106,786,900</b>						<b>108,786,900</b>		
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	85,420,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	4 Dokumen	86,420,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	21,366,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	4 Dokumen	22,366,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Desa/Kelurahan Layak Anak	Desa/ Kelurahan		Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	<b>123,344,800</b>					10 Desa/ Kelurahan	<b>111,000,300</b>		
2.08.06.2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>109,874,800</b>						<b>111,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3 Paket	33,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	3 Paket	34,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	76,174,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	77,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>13,470,000</b>					100 %	<b>300</b>		
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	13,470,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat di Kab.Belu	2 Dokumen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>18,561,636,176</b>						<b>22,737,362,448</b>		
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>6,205,906,876</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>7,576,984,368</b>	
2.11.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>97,595,000</b>							<b>60,390,000</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 dokumen	63,470,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	22,852,500	Dinas Lingkungan Hidup	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 dokumen	14,525,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	20 dokumen	15,977,500	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 dokumen	19,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	7 dokumen	21,560,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>4,891,832,326</b>						<b>6,000,359,559</b>		
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 orang bulan	4,845,272,326	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	84 orang bulan	5,329,799,559	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	46,560,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	12 dokumen	670,560,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>23,750,000</b>						<b>46,200,000</b>		
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 orang	23,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	16 orang	46,200,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>133,061,050</b>						<b>190,093,695</b>		
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				3 paket	5,913,350	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	3 paket	6,504,685	Dinas Lingkungan Hidup	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	61,112,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 paket	70,932,510	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	12,025,300	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	2 paket	13,293,500	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41 laporan	54,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	41 laporan	99,363,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>92,077,500</b>						<b>102,921,445</b>		
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	7,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 laporan	8,030,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 laporan	64,350,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	3 laporan	70,785,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	5,050,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 laporan	7,072,120	Dinas Lingkungan Hidup	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	15,477,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 laporan	17,034,325	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>967,591,000</b>						<b>1,177,019,669</b>		
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 unit	850,356,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	42 unit	1,005,819,650	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	96,035,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	2 Unit	105,666,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	21,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	3 Unit	65,534,019	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase dokumen perencanaan LH yang dibutuhkan	%		%	66,67 %	<b>250,050,000</b>					66,67 %	<b>155,000,000</b>		
2.11.02.2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Tersusunnya IKPLHD Kabupaten Belu	dokumen		dokumen	1 dokumen	<b>50,050,000</b>					1 dokumen	<b>55,000,000</b>		
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan IKPLHD yang disusun				1 Dokumen	50,050,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>						<b>200,000,000</b>						<b>100,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun									2 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Meningkatnya indeks kualitas air Meningkatnya indeks kualitas udara	Indeks Indeks		Indeks Indeks	59,35 Indeks 93,10 Indeks	<b>278,990,000</b>				59,35 Indeks 93,10 Indeks	<b>348,293,000</b>		
2	11	03	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>182,170,000</b>					<b>200,442,000</b>		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				12 12 Dokumen	52,170,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	12 12 Dokumen	57,442,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			11 parameter 12 Dokumen	130,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	11 parameter 12 Dokumen	143,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>67,620,000</b>					<b>115,401,000</b>		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				6 laporan	16,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	6 laporan	22,275,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				18 lokasi	30,370,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	18 lokasi	62,326,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan					6 titik	21,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		6 titik	30,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.03		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>							<b>29,200,000</b>							<b>32,450,000</b>	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi					5 dokumen	29,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		5 dokumen	32,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Indeks Kualitas Tutupan Lahan meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	Angka poin			Angka poin	55,73 Angka 55,73 poin	<b>9,712,826,300</b>						55,73 Angka 55,73 poin	<b>10,684,108,930</b>	
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Luasan RTH, Taman Kehati dan Sarana Prasarana Kehati yang dikelola	paket			paket	3 paket	<b>9,712,826,300</b>						3 paket	<b>10,684,108,930</b>	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten Kota					117.81 ha	9,655,298,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		117.81 ha	10,620,828,680	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					11.04 Ha	47,927,500	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Tialai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		11.04 Ha	52,720,250	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola					2 item	9,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		2 item	10,560,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Persentase Penetapan hak MHA	%		%	1,45 %	66,200,000						1,45 %	72,820,000	
2 11 07 2.02	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>						66,200,000							72,820,000	
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumah penyuluhan dan kampanye yang dilakukan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Jumlah Kader Lingkungan/ Masyarakat Hukum Adat yang Dibina Jumlah kasus/sengketa lingkungan yang dielesaikan Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang di awasi				1 kali 1 Dokumen 23 orang 40 kasus 75 usaha/kegiatan	66,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		1 kali 1 Dokumen 23 orang 40 kasus 75 usaha/kegiatan	72,820,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Hektar		Hektar	30 Hektar	52,350,000						30 Hektar	57,585,000	
2 11 09 2.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						52,350,000							57,585,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	52,350,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		3 Entitas	57,585,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	11	11															
2	11	11	2.01														
2	11	11	2.01	03													
2	11	11	2.01	04													
2	11	11	2.01	07													
2																	
2	12																
2	12	01															
2	12	01	2.02														
2	12	01	2.02	01													
2	12	01	2.02	03													
2	12	01	2.06														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Laporan	4,409,300	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	2,387,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Paket	106,729,700	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	61,458,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Paket	22,453,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 Paket	21,708,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	19,423,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu				1 Laporan	2,875,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	188,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	23 Laporan	69,016,354	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD	paket		paket	3 paket	<b>90,688,000</b>						3 paket	<b>61,460,600</b>	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	6,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 Laporan	48,480,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	51,440,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 Laporan	37,208,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	3,520,600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	paket		paket	3 paket	<b>75,575,500</b>						3 paket	<b>81,272,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pelihara				10 Unit	53,595,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	10 Unit	58,932,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				67 Unit	16,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	67 Unit	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 Unit	5,080,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenunikiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Unit	10,339,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Cakupan penerbitan KTP (%)	%		%	95.46 %	<b>301,750,000</b>						95.46 %	<b>1,076,880,323</b>	
2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	paket		paket	1 paket	<b>70,500,000</b>						1 paket	<b>485,653,823</b>	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil pencatatan/penatausahaan dan penerbitan atas pendaftaran penduduk				5000 Dokumen	70,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Penduduk Belu	5000 Dokumen	485,653,823	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.02	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah kegiatan penataan pendaftaran penduduk	paket		paket	1 paket	<b>231,250,000</b>						1 paket	<b>591,226,500</b>	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia				18 Jenis	231,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	18 Jenis	591,226,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Cakupan penerbitan akte lahiran bagi anak berusia 0-18 tahun (%)	%		%	83.75 %	<b>66,000,000</b>						83.75 %	<b>540,035,395</b>	
2.12.03.2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>66,000,000</b>						1 Kegiatan	<b>540,035,395</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	66,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur dan Masyarakat	5000 Dokumen	540,035,395	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Tersedianya Data Kependudukan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	<b>495,165,000</b>						3 Dokumen	<b>1,282,026,996</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pengumpulan data kependudukan	paket		paket	1 paket	58,800,000						1 paket	90,836,000	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan				2 Dokumen	58,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Dokumen	90,836,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi adm kependudukan	paket		paket	2 paket	416,365,000						2 paket	1,032,242,296	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	379,865,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	1 Laporan	921,084,396	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				5 Laporan	36,500,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	5 Laporan	111,157,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi adm kependudukan	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	158,948,700	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan				4 Laporan	20,000,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Tulakadi Kab. Belu, Raihat, Raifatus Kab. Belu, Tasifeto Barat, Lookeu Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus Kab. Belu, Raimanuk, Teun Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Lakmaras	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	4 Laporan	158,948,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Tersedianya Data Kependudukan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	<b>71,450,000</b>						3 Dokumen	<b>90,439,977</b>	
2 12 05 2.01	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Jumlah penyusunan profil kependudukan	paket		paket	1 paket	<b>71,450,000</b>						1 paket	<b>90,439,977</b>	
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Paket	71,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	1 Paket	90,439,977	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						<b>5,774,971,577</b>							<b>5,782,813,350</b>	
2 13 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	Predikat/Angka		Predikat/Angka	CC/54 Predikat/Angka	<b>2,974,463,777</b>						CC/54 Predikat/Angka	<b>3,379,190,996</b>	
2 13 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>2,426,947,027</b>						2 Paket	<b>2,426,905,696</b>	
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang	2,276,947,027	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	27 Orang	2,276,905,696	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	150,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	paket		paket	3 paket	<b>123,215,000</b>						3 paket	<b>350,000,000</b>	
2.13.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugan dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				10 Orang	23,220,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	10 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perundang - Undangan				50 Orang	49,995,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	50 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	6 Paket	<b>150,016,750</b>						6 Paket	<b>260,000,000</b>	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,001,650	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	1 Paket	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				2 Paket	25,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	2 Paket	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	35,000,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	2 Paket	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	12 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50,015,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	paket		paket	4 paket	<b>49,245,500</b>						4 paket	<b>57,800,000</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan	26,400,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	3 Laporan	26,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan 0 Laporan	17,845,500	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	1 Laporan 0 Laporan	26,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	paket		paket	3 paket	225,039,500						3 paket	284,485,300	
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				30 Unit	196,540,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	30 Unit	254,485,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara				14 Unit	3,500,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	14 Unit	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	24,999,500	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	5 Unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Pemekaran Desa	Desa		Desa	4 Desa	1,511,801,000						4 Desa	836,824,775	
2 13 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	Jumlah penyelenggaraan Penataan Desa	paket		paket	1 paket	1,511,801,000						1 paket	836,824,775	
2 13 02 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumah Desa YANG Melakukan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				4 Desa 0 Desa	1,511,801,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa	4 Desa 0 Desa	836,824,775	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	Terbentuknya KAWASAN Perdesaan Berbasis SDA	Desa		Desa	2 Desa	90,000,000						2 Desa	150,000,000	
2 13 03 2.01	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	Jumlah Fasilitasi kerja sama antar desa	paket		paket	1 paket	90,000,000						1 paket	150,000,000	
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen 6 Kawasan	90,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa	0 Dokumen 6 Kawasan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase Bumdes Yang Aktif	Persen		Persen	73,91 Persen	472,547,300						73,91 Persen	517,995,500	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemdes	paket		paket	8 paket	472,547,300						8 paket	517,995,500	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				69 Dokumen	10,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa, Kecamatan	69 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				69 Dokumen	39,995,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa, Kecamatan	69 Dokumen	39,995,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				150 Orang	45,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa, Kecamatan	150 Orang	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa				69 Laporan	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa, Kecamatan	69 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desaa				69 Dokumen	154,555,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa, Kecamatan	69 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa				69 Dokumen	72,999,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa, Kecamatan	69 Dokumen	73,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa				4 Desa	49,998,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa, Kecamatan	4 Desa	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Laporan	49,999,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Desa,Kecamat an	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Peningkatan Strata Posyandu	Persen		Persen	37,93 Persen	<b>726,159,500</b>						37,93 Persen	<b>898,802,079</b>	
2.13.05.2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	paket		paket	4 paket	<b>726,159,500</b>						4 paket	<b>898,802,079</b>	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0 Dokumen 2 Dokumen	560,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Posyandu	0 Dokumen 2 Dokumen	711,302,079	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	55,459,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Posyandu	2 Dokumen	76,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Posyandu	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Dokumen	60,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Posyandu	2 Dokumen	60,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2 14							<b>7,106,722,944</b>							<b>8,430,035,640</b>	
2 14 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	CC		CC	54 CC	<b>2,998,772,944</b>						54 CC	<b>3,536,345,790</b>	
2 14 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>2,266,405,944</b>						100 %	<b>2,693,795,790</b>	
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan 26 orang	2,184,305,944	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	14 bulan 26 orang	2,608,535,790	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	82,100,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	1 Dokumen	85,260,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	%		%	100 %	<b>149,000,000</b>						100 %	<b>210,000,000</b>	
2 14 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	149,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	1 Dokumen	210,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah	%		%	100 %	<b>171,540,000</b>						100 %	<b>272,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 paket	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	2 paket	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				3 laporan	141,540,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	3 laporan	262,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>31,546,000</b>						100 %	<b>34,800,000</b>	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				12 laporan	4,800,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	12 laporan	4,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				3 laporan	21,600,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	3 laporan	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	5,146,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	1 laporan	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>380,281,000</b>						100 %	<b>325,250,000</b>	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				45 unit	359,278,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	45 unit	315,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				5 unit	8,555,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	5 unit	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 unit	12,448,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab. Belu	3 unit	5,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (ASFR)	%		%	17.18 %	<b>185,000,000</b>						17.18 %	<b>124,960,500</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 02 2.02	<b>Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	%		%	100 %	185,000,000						100 %	124,960,500	
2 14 02 2.02 02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyediaan dan pengolahan data kependudukan				1 Dokumen	65,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB dan Masyarakat di Kabupaten Belu	1 Dokumen	8,410,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK				12 laporan	120,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB dan Masyarakat di Kabupaten Belu	12 laporan	116,550,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49	%		%	47.06 %	2,614,950,000						47.06 %	3,507,154,350	
2 14 03 2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	%		%	100 %	387,700,000						100 %	296,982,000	
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan Budaya lokal				1 Dokumen	65,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat di Kabupaten Belu	1 Dokumen	26,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang				4 Dokumen	100,100,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat di Kabupaten Belu	4 Dokumen	74,172,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana ( Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa ( Rakordes), dan Mini Lokakarya ( Minilok)				4 laporan	222,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat di Kabupaten Belu	4 laporan	196,560,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB ( PKB/PLKB)	%		%	100 %	<b>2,180,450,000</b>						100 %	<b>2,191,428,750</b>	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia				15 unit	1,640,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab.Belu dan Kader IMP	15 unit	1,783,188,750	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				324 orang	540,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB Kab.Belu dan Kader IMP	324 orang	408,240,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>46,800,000</b>						100 %	<b>366,693,600</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya				2 laporan	46,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas PPKB dan Masyarakat di Kabupaten Belu	2 laporan	8,977,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%		%	62.29 %	<b>1,308,000,000</b>						62.29 %	<b>1,261,575,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 04 2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%		%	100 %	<b>1,308,000,000</b>						100 %	<b>1,261,575,000</b>	
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1316 orang	1,308,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1316 orang	1,261,575,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>8,383,129,485</b>							<b>6,031,731,385</b>	
2 15 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>3,579,937,485</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>5,006,731,385</b>	
2 15 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	<b>88,800,000</b>						12 Laporan	<b>90,000,000</b>	
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	88,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Dinas perhubungan Kabupaten Belu	12 Laporan	90,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	paket		paket	2 paket	<b>2,739,579,085</b>						2 paket	<b>3,952,731,385</b>	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2,200,428,085				3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Dishub Kab. Belu	28 Orang/bulan	2,982,731,385	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	539,151,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Dishub Kab. Belu	12 Laporan	970,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	paket		paket	1 paket	<b>116,219,000</b>						1 paket	<b>150,000,000</b>	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	48,399,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Dishub Kab. Belu	27 Paket	75,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 orang	67,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Dishub Kab. Belu	3 orang	75,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket		paket	5 paket	<b>207,304,400</b>						5 paket	<b>280,000,000</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7,486,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	12 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 paket	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	2 paket	50,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	25,001,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	1 paket	45,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	27,247,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	1 paket	45,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	4 Laporan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	95,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	25 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	paket		paket	4 paket	<b>47,672,000</b>						4 paket	<b>99,000,000</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5,036,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	2 Laporan	6,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	32,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	3 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	13 Laporan	8,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	6,886,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	4 Laporan	50,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	paket		paket	2 paket	<b>380,363,000</b>						2 paket	<b>435,000,000</b>	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	351,804,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	34 Unit	390,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	28,559,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN dan Masyarakat	4 Unit	45,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		%	29.25 %	<b>4,803,192,000</b>						29.25 %	<b>1,025,000,000</b>	
2.15.02.2.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>846,950,000</b>							<b>500,000,000</b>	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2300 unit	846,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		2300 unit	500,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>						<b>37,500,000</b>							<b>80,000,000</b>	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				800 Dokumen	37,500,000				3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		800 Dokumen	80,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>3,838,882,000</b>							<b>400,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									50 unit	400,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>45,000,000</b>			
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									12 Laporan	45,000,000	Dinas Perhubungan		
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>3,717,901,975</b>							<b>3,717,940,089</b>	
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>2,995,258,998</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>2,995,296,998</b>	
2	16	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paket		Paket	1 Paket	<b>20,000,000</b>					1 Paket	<b>20,000,000</b>		
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Kominfo	4 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>2,759,733,280</b>						2 Paket	<b>2,759,741,280</b>	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2,160,941,280	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Kominfo	21 Orang/bulan	2,160,941,280	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	598,792,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Kominfo	4 Dokumen	598,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Lancarnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>65,470,000</b>						2 Paket	<b>65,500,000</b>	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kominfo.	1 Paket	3,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,525,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kominfo.	1 Paket	15,525,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16,390,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kominfo.	2 Paket	16,390,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	5,585,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kominfo.	4 Laporan	5,585,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	24,970,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Kominfo.	4 Laporan	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Di Sediakan	Paket		Paket	2 Paket	<b>50,000,000</b>						2 Paket	<b>50,000,000</b>	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2,400,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Kominfo.	2 Laporan	2,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	40,600,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Kominfo.	6 Laporan	40,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	7,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Kominfo.	18 Laporan	7,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	15 Unit	<b>100,055,718</b>						15 Unit	<b>100,055,718</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	100,055,718	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dinas Kominfo.	15 Unit	100,055,718	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	SPBE SPBE	Angka Angka		Angka Angka	2,2 Angka 2.2 Angka	<b>635,971,000</b>						2,2 Angka 2.2 Angka	<b>635,971,114</b>	
2 16 02 2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	Paket		Paket	5 Paket	<b>635,971,000</b>						5 Paket	<b>635,971,114</b>	
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				500 Dokumen	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	500 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	93,365,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	12 Dokumen	93,365,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				10 Layanan	185,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	10 Layanan	185,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				68 Orang	250,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	68 Orang	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	7,606,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	2 Dokumen	7,606,114	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	SPBE	angka		angka	2.2 angka	<b>86,671,977</b>						2.2 angka	<b>86,671,977</b>	
2 16 03 2.02	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Paket		Paket	1 Paket	<b>86,671,977</b>						1 Paket	<b>86,671,977</b>	
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				12 Dokumen	86,671,977	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kabupaten Belu	12 Dokumen	86,671,977	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>125,500,000</b>							<b>125,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	20	02																
2	20	02	2.01															
2	20	02	2.01	01														
2	20	02	2.01	02														
2	21																	
2	21	02																
2	21	02	2.01															
2	21	02	2.01	04														
2																		
2	17																	
2	17	01																
2	17	01	2.02															

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 22 Orang	1,557,933,878	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Orang/bulan 22 Orang	1,557,933,739	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22 Dokumen 0 Dokumen	263,564,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22 Dokumen 0 Dokumen	263,564,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>40,000,000</b>						<b>40,000,000</b>		
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan-Undangan				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>147,130,300</b>						<b>147,130,300</b>		
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Paket	1,508,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Paket	1,508,700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	18,001,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Paket	18,001,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12,380,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	12,380,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	115,240,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	115,240,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>20,528,900</b>						<b>20,528,900</b>		
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan	10,095,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 Laporan	10,095,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	3,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				1 Laporan	1,933,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,933,900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>102,286,000</b>						<b>102,286,000</b>		
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak				12 Unit	87,286,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Unit	87,286,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara				1 Unit	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Unit	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Meningkatnya persentase koperasi yang berkualitas	%/Koperasi		%/Koperasi	73.08/19 %/Koperasi	<b>160,372,400</b>					73.08/19 %/Koperasi	<b>160,372,539</b>		
2 17 04 2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>160,372,400</b>						<b>160,372,539</b>		
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian				60 Unit Usaha	120,022,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-PK2UKM		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60 Unit Usaha	120,022,539	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				30 Unit Usaha	40,350,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 Unit Usaha	40,350,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Meningkatnya persentase koperasi aktif	%/Jumlah Koperasi		%/Jumlah Koperasi	60,99/86 %/Jumlah Koperasi	<b>215,284,000</b>					60,99/86 %/Jumlah Koperasi	<b>215,284,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 05 2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						215,284,000						215,284,000		
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang	215,284,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		120 Orang	215,284,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Meningkatnya persentase akses permodalan koperasi	%/Koperasi		%/Koperasi	40/14 %/Koperasi	35,000,000						40/14 %/Koperasi	35,000,000	
2 17 06 2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						35,000,000							35,000,000	
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				60 Orang	35,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		60 Orang	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Meningkatnya Persentase UMKM aktif	%		%	83.82 %	206,450,500						83.82 %	206,450,500	
2 17 07 2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>						206,450,500							206,450,500	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembayaran, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota				200 Unit Usaha	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		200 Unit Usaha	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				200 Unit Usaha	10,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	200 Unit Usaha	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	181,450,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-PK2UKM		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	200 Unit Usaha	181,450,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Meningkatnya persentase akses permodalan dan pemasaran produk usaha mikro	%/Usaha Mikro		%/Usaha Mikro	40/20 %/Usaha Mikro	<b>530,750,000</b>					40/20 %/Usaha Mikro	<b>530,750,000</b>		
2 17 08 2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>						<b>530,750,000</b>						<b>530,750,000</b>		
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi				200 Unit Usaha	530,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	200 Unit Usaha	530,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						<b>10,324,930,644</b>							<b>3,717,425,644</b>	
2 18 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	Predikat/Angka		Predikat/Angka	CC/54 Predikat/Angka	<b>3,383,293,014</b>					CC/54 Predikat/Angka	<b>3,383,293,014</b>		
2 18 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	<b>4,250,000</b>					10 Dokumen	<b>3,950,000</b>		
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 dokumen 0 Dokumen	4,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	10 dokumen 0 Dokumen	3,950,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	Orang		Orang	27 Orang	<b>2,579,500,144</b>					27 Orang	<b>2,655,694,939</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Belu**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan				27 orang/14 bulan	2,497,300,144	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	27 orang/14 bulan	2,484,094,939	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD				10 laporan	82,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	10 laporan	171,600,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				Paket 1 Paket Paket 1 Paket Paket 1 Paket	<b>68,586,800</b>						1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	<b>88,657,675</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik yang dibeli				1 paket	547,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 paket	1,722,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	2,070,675	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	10,287,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	10,287,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 paket	25,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	25,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				10 laporan	30,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	10 laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Meubelair yang dibeli	Paket		Paket	1 Paket	<b>7,000,000,000</b>						1 Paket	<b>108,495,000</b>	
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				6 unit	7,000,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 unit	58,495,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	<b>93,970,400</b>						1 Paket	<b>319,800,000</b>	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	4,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 laporan	4,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				3 paket	75,300,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 paket	105,600,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 paket	14,470,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	204,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	Paket Unit Paket		Paket Unit Paket	1 Paket 14 Unit 1 Paket	<b>111,990,000</b>						1 Paket 14 Unit 1 Paket	<b>95,695,400</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				14 unit	89,990,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	14 unit	92,695,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				14 unit	1,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	14 unit	1,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				1 unit	21,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 unit	2,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka		Angka	89,15 Angka	<b>22,800,000</b>						89,15 Angka	<b>250,000</b>	
2 18 02 2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	<b>22,800,000</b>						2 Dokumen	<b>250,000</b>	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan daerah (Perda ) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota				3 dokumen	2,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peneliti	3 dokumen	150,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupen /kota				2 dokumen	20,550,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peneliti	2 dokumen	100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka		Angka	89,15 Angka	<b>110,225,000</b>						89,15 Angka	<b>281,000</b>	
2 18 04 2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	pelaku usaha		pelaku usaha	1000 pelaku usaha	<b>110,225,000</b>						1000 pelaku usaha	<b>281,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik lintas daerah kabupaten/kota				1000 pelaku usaha	46,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	1000 pelaku usaha	50,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota				1000 pelaku usaha	49,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	1000 pelaku usaha	50,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat rehadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan				1000 orang	14,225,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	1000 orang	181,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka		Angka	89,15 Angka	<b>333,608,300</b>						89,15 Angka	<b>333,601,630</b>	
2 18 05 2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pengawasan terhadap pelaku usaha	pelaku usaha		pelaku usaha	1000 pelaku usaha	<b>333,608,300</b>						1000 pelaku usaha	<b>333,601,630</b>	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal				1000 pelaku usaha	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pelaku usaha	1000 pelaku usaha	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal				1000 pelaku usaha	234,829,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pelaku usaha	1000 pelaku usaha	234,823,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan				1000 pelaku usaha	83,778,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pelaku usaha	1000 pelaku usaha	83,778,630	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							<b>3,968,105,686</b>						<b>6,412,601,297</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>2,732,591,797</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>2,882,601,297</b>	
2 19 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja	paket		paket	1 paket	<b>8,600,000</b>						1 paket	<b>20,000,000</b>	
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	8,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	2 Laporan	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan PD	paket		paket	6 paket	<b>2,306,834,697</b>						6 paket	<b>2,418,914,697</b>	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,967,914,697	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	14 Orang/bulan	1,967,914,697	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	338,920,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	1 Dokumen	451,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan adm. umum PD	paket		paket	5 paket	<b>130,745,000</b>						5 paket	<b>136,126,000</b>	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,126,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	1 Paket	6,126,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,886,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	1 Paket	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 paket	10,652,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	2 paket	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Belu**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan 0 Laporan	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	20 Laporan 0 Laporan	25,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	86,080,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	25 Laporan	65,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
<b>2.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	paket		paket	3 paket	<b>63,394,500</b>						3 paket	<b>52,000,000</b>	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	1 Laporan	6,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	12 Laporan	35,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4,994,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	1 Laporan	10,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pengelolaan barang milik daerah	paket		paket	4 paket	<b>223,017,600</b>						4 paket	<b>255,560,600</b>	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	177,107,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	11 Unit	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara				4 unit	4,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	4 unit	5,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,612,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	1 Unit	10,560,600	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30,498,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	2 Unit	40,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>432,826,900</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>1,470,000,000</b>	
2 19 02 2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penyadaran, pemberdayaan pemuda	paket		paket	8 paket	<b>357,826,900</b>						8 paket	<b>1,390,000,000</b>	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				4 Orang	134,999,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Organisasi Pemuda	4 Orang	140,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				2 Orang	59,098,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Organisasi Pemuda	2 Orang	100,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02 2.01 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	63,729,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Organisasi Pemuda	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				3 Orang	99,999,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Organisasi Pemuda	3 Orang	1,075,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Paket		Paket	2 Paket	75,000,000						2 Paket	80,000,000	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Jumlah prestasi cabang olahraga	cabang olahraga		cabang olahraga	8 cabang olahraga	802,686,989						8 cabang olahraga	2,060,000,000	
2 19 03 2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga	paket		paket	3 paket	67,991,900						3 paket	150,000,000	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				8 Unit	67,991,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Olahraga Pelajar	8 Unit	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kejurda	paket		paket	3 paket	363,087,050						3 paket	550,000,000	
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				50 Orang	363,087,050	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelompok Masyarakat	50 Orang	425,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	paket paket		paket paket	4 paket 4 paket	50,000,000						4 paket 4 paket	150,000,000	
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				10 Orang	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelompok Masyarakat	10 Orang	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	paket		paket	3 paket	276,108,039						3 paket	1,110,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi 1 Organisasi	246,208,039	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Olahraga	0 Organisasi 1 Organisasi	1,050,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 Dokumen	29,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Olahraga	0 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	paket			4 paket	<b>45,500,000</b>						4 paket	<b>100,000,000</b>	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	45,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>2,952,628,985</b>							<b>2,549,443,722</b>	
2 23 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>2,871,533,985</b>							<b>2,350,693,722</b>	
2 23 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>7,658,000</b>							<b>8,441,000</b>	
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				3 Laporan	7,658,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	8,441,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>2,608,770,685</b>							<b>2,038,282,722</b>	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/Bulan	2,534,325,685	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26 Orang/Bulan	1,921,779,672	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	74,445,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Dokumen	116,503,050	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>120,001,600</b>						100 %	<b>139,270,000</b>	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Paket	4,507,100	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Paket	4,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	26,064,500	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	0	1 Paket	26,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 Paket	25,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	0	2 Paket	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan				3 Paket	4,620,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	0	3 Paket	4,620,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	11,900,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	0	1 Laporan	14,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	47,910,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	0	8 Laporan	65,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>44,551,700</b>						100 %	<b>47,200,000</b>	
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6,200,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	6,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 Laporan	37,050,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Laporan	37,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1 Laporan	1,301,700	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik				ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	4,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>90,552,000</b>						100 %	<b>117,500,000</b>	
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				10 Unit	78,552,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Unit	105,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				24 Unit	12,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24 Unit	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Persentase Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	%/Eksemplar		%/Eksemplar	89,03/24340	<b>81,095,000</b>						89,03/24340	<b>198,750,000</b>	
2 23 02 2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	<b>81,095,000</b>						100 %	<b>198,750,000</b>	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK				1 Layanan	10,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Layanan	39,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kab/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kab./kota sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	14,645,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Perpustakaan	34,550,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang dicetak dan diadakan				24340 Eksemplar	56,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24340 Eksemplar	120,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>							<b>17,000,000</b>						<b>55,000,000</b>	
2 24 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi (satuan dokumen)	% Dokumen		% Dokumen	77.45 % 5151 Dokumen	<b>17,000,000</b>						77.45 % 5151 Dokumen	<b>55,000,000</b>	
2 24 02 2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	<b>17,000,000</b>						100 %	<b>55,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan					1 Berkas	10,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Berkas	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota					12 laporan	7,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 laporan	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
<b>3</b>	<b>25</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>4,204,684,714</b>								<b>4,325,734,714</b>		
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	Predikat/Angka					<b>2,059,130,314</b>								<b>2,180,180,381</b>		
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket			Paket	2 Paket	<b>1,602,330,314</b>								2 Paket	<b>1,654,830,381</b>	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17 Orang/Bulan	1,516,830,314	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	17 Orang/Bulan	1,516,830,381	Dinas Perikanan		
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10 Dokumen	85,500,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	10 Dokumen	138,000,000	Dinas Perikanan		
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket			Paket	5 Paket	<b>189,570,000</b>								5 Paket	<b>189,550,000</b>	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	1 Paket	5,000,000	Dinas Perikanan		
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	55,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	1 Paket	55,000,000	Dinas Perikanan		
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	25,050,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	1 Paket	25,050,000	Dinas Perikanan		
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	19,500,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	19,500,000	Dinas Perikanan		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85,020,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	85,000,000	Dinas Perikanan
<b>3 25 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	4 Paket	<b>48,000,000</b>						4 Paket	<b>48,000,000</b>	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,500,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	7,500,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	3 Laporan	30,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	3,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7,500,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	7,500,000	Dinas Perikanan
<b>3 25 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>219,230,000</b>						2 Paket	<b>219,250,000</b>	
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	198,480,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	26 Unit	198,500,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	20,750,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan	5 Unit	20,750,000	Dinas Perikanan
<b>3 25 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	1.658,03 Ton	<b>725,275,000</b>						1.658,03 Ton	<b>725,275,000</b>	
<b>3 25 03 2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan	Paket		Paket	2 Paket	<b>603,250,000</b>						2 Paket	<b>603,250,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	41,200,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Silawan Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Nelayan	1 Dokumen	41,200,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				72 Unit	562,050,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Silawan Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Nelayan	72 Unit	562,050,000	Dinas Perikanan
<b>3 25 03 2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sub Pemberdayaan Nelayan Kecil	Paket		Paket	3 Paket	<b>122,025,000</b>						3 Paket	<b>122,025,000</b>	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	45,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Jenilu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Nelayan	20 Orang	45,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	40,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Nelayan	20 Kelompok	40,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				3 Unit Usaha	37,025,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Silawan Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Nelayan	3 Unit Usaha	37,025,000	Dinas Perikanan
<b>3 25 04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Meningkatnya Produksi Ikan Air Tawar/Ikan Air Payau	Ton		Ton	14,88/150,16	<b>1,250,009,400</b>						14,88/150,16	<b>1,250,009,333</b>	
<b>3 25 04 2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Jumlah Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Paket		Paket	3 Paket	<b>906,910,000</b>						3 Paket	<b>906,910,000</b>	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7 Kelompok	806,510,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	7 Kelompok	806,510,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				2 Kelompok	37,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	2 Kelompok	37,400,000	Dinas Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	25	04	2.02	04				4 Kelompok	63,000,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Manleten Kab. Belu, Raimanuk, Teun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	4 Kelompok	63,000,000	Dinas Perikanan
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>				4 Paket	<b>343,099,400</b>						4 Paket	<b>343,099,333</b>		
3	25	04	2.04	01			1 Dokumen	37,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	37,400,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	02			1 Unit	150,000,000	Kab. Belu, Raimanuk, Teun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	1 Unit	150,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	03			1 Unit	115,699,400	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus Kab. Belu, Raimanuk, Teun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	1 Unit	115,699,333	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	04			1 Dokumen	40,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus Kab. Belu, Raimanuk, Teun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Perikanan dan Masyarakat Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Perikanan	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>					62,50 / 20 Persen/Kelompok	<b>170,270,000</b>						62,50 / 20 Persen/Kelompok	<b>170,270,000</b>		
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>				1 Paket	<b>68,695,000</b>						1 Paket	<b>68,695,000</b>		
3	25	06	2.01	01			1 Dokumen	68,695,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	68,695,000	Dinas Perikanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
3	25	06	2.02															
3	25	06	2.02	01														
3	25	06	2.03															
3	25	06	2.03	02														
3																		
3	26																	
3	26	01																
3	26	01	2.02															
3	26	01	2.02	03														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
										Nasional					Daerah						
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 laporan	10,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	1 laporan	10,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 laporan	3,845,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	12 laporan	10,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket			Paket	4 Paket	12,000,000							4 Paket	20,000,000	
3	26	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					2 laporan	12,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	2 laporan	20,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	Paket			Paket	5 Paket	39,220,000							5 Paket	95,500,000	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	39,220,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	5 Orang	95,500,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	Paket			Paket	5 Paket	336,351,500							5 Paket	434,920,000	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor					1 Paket	3,201,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	1 Paket	3,420,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	76,618,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	1 Paket	96,800,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	70,392,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	1 Paket	95,500,000	Dinas Pariwisata	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	22,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	1 laporan	24,200,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 laporan	164,140,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	4 laporan	215,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>47,807,750</b>							<b>54,000,000</b>	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat-menysurat				4 laporan	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		4 laporan	5,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				3 laporan	37,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		3 laporan	42,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				1 laporan	5,007,750	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 laporan	7,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>225,119,600</b>						2 Paket	<b>261,000,000</b>	
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	211,919,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	14 Unit	220,500,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	3 Unit	3,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	1 Unit	25,000,000	Dinas Pariwisata



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	4,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	6 Unit	7,500,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Meningkatnya lama kunjungan wisata	Hari		Hari	2 Hari	<b>201,727,663</b>						2 Hari	<b>382,793,187</b>	
3 26 02 2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan Tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, dan Revitalisasi)	Paket		Paket	1 Paket	<b>28,961,863</b>						1 Paket	<b>42,000,000</b>	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 lokasi	18,411,863	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	3 lokasi	20,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				4 dokumen	10,550,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	4 dokumen	22,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 02 2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (DTW)	Paket		Paket	1 Paket	<b>139,315,800</b>						1 Paket	<b>160,793,187</b>	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	84,790,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	1 Unit	60,793,187	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				4 dokumen	20,150,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	4 dokumen	50,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 lokasi	34,375,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	3 lokasi	50,000,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DTW))	Paket		Paket	1 Paket	<b>30,000,000</b>						1 Paket	<b>30,000,000</b>	
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 dokumen	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	4 dokumen	30,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.04	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan Tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, dan Revitalisasi)	dokumen		dokumen	1 dokumen	<b>3,450,000</b>						1 dokumen	<b>150,000,000</b>	
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				1 laporan	3,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	1 laporan	150,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Meningkatnya lama kunjungan wisata	Hari		Hari	2 Hari	<b>165,180,000</b>						2 Hari	<b>207,765,786</b>	
3 26 03 2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	lancarnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	%		%	100 %	<b>165,180,000</b>						100 %	<b>207,765,786</b>	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				12 dokumen	97,880,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kab. Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	12 dokumen	150,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 laporan	24,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kab. Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	2 laporan	25,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 dokumen	25,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kab. Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	3 dokumen	20,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				4 dokumen	17,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kab. Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	4 dokumen	12,765,786	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	%/Jumlah		%/Jumlah	45.45/5 %/Jumlah	<b>100,000,000</b>						45.45/5 %/Jumlah	<b>100,000,000</b>	
3 26 04 2.01	<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kab//Kota	Paket		Paket	1 Paket	<b>40,000,000</b>						1 Paket	<b>40,000,000</b>	
3 26 04 2.01 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	40,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	1 Unit	40,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 2.02	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kab//Kota	Paket		Paket	1 Paket	<b>60,000,000</b>						1 Paket	<b>60,000,000</b>	
3 26 04 2.02 03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				2 laporan	2,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kab. Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	2 laporan	15,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 2.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 dokumen	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kab. Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	1 dokumen	15,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 2.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 dokumen	25,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kab. Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	1 dokumen	25,000,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					4 dokumen	2,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kab. Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	4 dokumen	5,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah usaha ekonomi kreatif	kelompok			kelompok	140 kelompok	<b>268,485,000</b>						140 kelompok	<b>431,648,494</b>	
3	26	05	2.01		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Paket			Paket	4 Paket	<b>233,685,000</b>						4 Paket	<b>347,648,494</b>	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan Ekonomi Kreatif					80 Orang	41,230,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	80 Orang	75,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta Pelatihan Pelaku Ekraf					100 Orang	85,100,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	100 Orang	92,648,494	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					80 Orang	56,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	80 Orang	75,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf					4 laporan	21,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	4 laporan	45,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Ekraf					20 Orang	18,705,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	20 Orang	25,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					4 dokumen	10,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	4 dokumen	35,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Paket			Paket	7 Paket	<b>34,800,000</b>						7 Paket	<b>84,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				10 Orang	15,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	10 Orang	52,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				20 Orang	19,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Kabupaten Belu dan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belu	20 Orang	32,000,000	Dinas Pariwisata	
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>8,855,782,754</b>							<b>13,256,377,640</b>		
3	27	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>5,283,343,214</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>6,348,428,640</b>	
3	27	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	<b>37,800,000</b>							5 Dokumen	<b>57,200,000</b>	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	37,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	5 Dokumen	57,200,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>4,332,616,214</b>							2 Paket	<b>4,447,266,640</b>	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Gaji ASN				46 orang	4,285,816,214	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	46 orang	4,392,266,640	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD null				5 Dokumen 0 null	46,800,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	5 Dokumen 0 null	55,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>66,000,000</b>							2 Paket	<b>170,000,000</b>	
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	66,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	27	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	5 Paket	<b>259,879,500</b>					5 Paket	<b>449,250,000</b>		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan null				7 paket 0 null	5,559,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	7 paket 0 null	8,250,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan null				10 paket 0 null	34,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	10 paket 0 null	38,500,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan null				3 paket 0 null	26,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	3 paket 0 null	25,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu null				2 laporan 0 null	38,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	2 laporan 0 null	45,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD null				4 Laporan 0 null	154,360,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	4 Laporan 0 null	250,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	1 Unit	<b>15,550,000</b>						1 Unit	<b>450,000,000</b>	
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	15,550,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	0 Unit	450,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>117,851,500</b>						3 Paket	<b>96,300,000</b>	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	7,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	4 Laporan	8,800,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik				12 Laporan	93,150,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pernakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	60,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor null					4 Laporan 0 null	17,701,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Laporan 0 null	27,500,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket			Paket	3 Paket	<b>453,646,000</b>						3 Paket	<b>678,412,000</b>	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					55 unit	317,980,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Peternakan dan Kesehatan Hewan	55 unit	417,912,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					42 Unit	10,500,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Peternakan dan Kesehatan Hewan	42 Unit	10,500,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi null					3 unit 0 null	125,166,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Manleten Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 unit 0 null	250,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Meningkatnya Populasi ternak Sapi/Babi	Ekor			Ekor	65581/29468	Ekor <b>2,206,170,000</b>						65581/29468	Ekor <b>2,740,879,000</b>	
3	27	02	2.01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>							<b>53,900,000</b>							<b>143,900,000</b>	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					4 Laporan	53,900,000	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Bakustulama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		4 Laporan	143,900,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	2.05		<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>2,152,270,000</b>							<b>2,596,979,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak Ayam KUB yang Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak Babi yang Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak Kambing yang Tersedia Jumlah Benih/Bibit Ternak Sapi yang Tersedia	100 kg 45 Boks 60 ekor 65 ekor 100 ekor	2,152,270,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 kg 45 Boks 60 ekor 65 ekor 100 ekor	2,596,979,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Meningkatnya Populasi ternak Sapi/Babi	Ekor		Ekor	65581/29468	Ekor	45,000,000		65581/29468	Ekor	2,572,000,000	
3	27	03	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>											1,672,000,000	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	45,000,000	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Bakustulama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Unit	1,342,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3	27	04			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Meningkatnya Populasi ternak Sapi/Babi	Ekor		Ekor	65581/29468	Ekor	1,186,271,240		65581/29468	Ekor	1,445,070,000	
3	27	04	2.01		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>											1,100,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	883,867,040	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Laporan	1,100,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3	27	04	2.02		<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>											161,920,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				6 Laporan	135,904,200	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		6 Laporan	161,920,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.27.04.2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>						<b>166,500,000</b>						<b>183,150,000</b>		
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan				4 Laporan	166,500,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		4 Laporan	183,150,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Meningkat Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya	%/kelompok		%/kelompok	30,77/60 %/kelompok	134,998,300						30,77/60 %/kelompok	150,000,000		
3 27 07 2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>						134,998,300							150,000,000		
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	134,998,300	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6 Unit	150,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						29,008,700							29,009,088		
2 09 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Skor PPH	Skor		Skor	84.9 Skor	29,008,700							84.9 Skor	29,009,088	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 09 03 2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Paket		Paket	1 Paket	9,669,500						1 Paket	9,669,696		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	3,384,300	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat	1 Laporan	3,384,394	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 laporan	3,384,300	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat	1 laporan	3,384,393	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				8 unit	2,900,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat	8 unit	2,900,909	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2 09 03 2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kab/Kota Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Laporan Laporan		Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan	9,669,600						1 Laporan 1 Laporan	9,669,696		
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1 laporan	9,669,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat	1 laporan	9,669,696	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2 09 03 2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Jumlah Dokumen Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Sesuai AKG	dok		dok	1 dok	9,669,600						1 dok	9,669,696		
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 dokumen	9,669,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat	1 dokumen	9,669,696	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							<b>16,770,722,420</b>							<b>16,041,722,257</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>9,935,751,288</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>9,310,360,217</b>	
3 27 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>8,953,547,488</b>						2 Paket	<b>7,549,654,940</b>	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 OB	8,848,647,488	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	111 OB	7,247,668,743	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	104,900,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	301,986,197	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	1 Paket	<b>251,175,300</b>						1 Paket	<b>511,510,773</b>	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,103,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Paket	5,115,107	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Paket	40,920,862	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	117,647,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Paket	117,647,478	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40,975,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Paket	40,920,862	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20,450,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Laporan	20,460,431	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"				1 Laporan	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Laporan	286,446,033	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>61,850,000</b>						3 Paket	<b>319,713,310</b>	
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6,050,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Laporan	6,050,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	40,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Laporan	281,347,713	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan 1 Laporan	15,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	1 Laporan 1 Laporan	32,315,597	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>669,178,500</b>						2 Paket	<b>929,481,194</b>	
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				131 Unit	660,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	131 Unit	892,301,946	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	9,178,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP	17 Unit	37,179,248	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Meningkatnya produksi tanaman padi/jagung	Ton		Ton	25750/59230	<b>189,927,000</b>						25750/59230	<b>210,662,566</b>	
3 27 02 2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>189,927,000</b>						1 Laporan	<b>210,662,566</b>	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	"Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi"				1 Laporan	162,477,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP, Kelompok Tani	1 Laporan	167,889,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					1 Laporan	27,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN DPKP, Kelompok Tani	1 Laporan	42,773,566	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Meningkatnya produksi tanaman padi/jagung	Ton		Ton	25750/59320	Ton	<b>4,971,207,500</b>						25750/59320	Ton	<b>4,170,341,455</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	Paket		Paket	1 Paket		<b>4,722,407,500</b>						1 Paket		<b>3,002,645,848</b>	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	4,602,707,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	1 Dokumen	2,702,645,848	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	119,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Pembangunan Prasarana pertanian	Unit		Unit	7 Unit		<b>248,800,000</b>						7 Unit		<b>1,167,695,607</b>	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	221,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	2 Unit	300,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	27,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	1 Unit	27,695,607	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Meningkatnya produksi tanaman padi/jagung	Ton		Ton	25750/59230	Ton	<b>79,958,700</b>						25750/59230	Ton	<b>79,958,879</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian Kab/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan		<b>79,958,700</b>						1 Laporan		<b>79,958,879</b>	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				50 Hektar	79,958,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Tani	50 Hektar	79,958,879	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Meningkat Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya	%		%	6.58 %	<b>1,593,877,932</b>						6.58 %	<b>2,270,399,140</b>		
3 27 07 2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>1,593,877,932</b>						1 Kegiatan	<b>2,270,399,140</b>		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 unit	104,696,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPL dan Kelompok Tani	12 unit	104,696,633	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	1,019,383,832	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPL dan Kelompok Tani	20 Unit	2,095,904,751	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian				12 Unit	469,797,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPL dan Kelompok Tani	12 Unit	69,797,756	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>3,824,357,644</b>							<b>4,138,912,819</b>		
3 30 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>3,110,562,544</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>3,235,881,588</b>	
3 30 01 2.01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>10,193,000</b>								<b>10,404,000</b>	
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 Dokumen	10,193,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2 Dokumen	10,404,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>2,687,808,094</b>								<b>2,805,225,181</b>	
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang 36 bulan	2,576,448,094	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		14 Orang 36 bulan	2,636,625,181	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	111,360,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Dokumen	168,600,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Paket		Paket	1 Paket	<b>19,980,000</b>								<b>20,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan				2 Orang	19,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	2 Orang	20,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>3 30 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>119,567,250</b>							<b>133,207,907</b>	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,493,050	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Paket	2,498,350	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61,507,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Paket	61,508,500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"				1 Paket	27,147,200	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Paket	37,007,200	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Laporan	2,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"				1 Laporan	25,920,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Laporan	29,693,857	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>3 30 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>61,387,300</b>							<b>62,785,300</b>	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"				1 Laporan	14,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Laporan	15,400,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	38,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		4 Laporan	38,400,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"				4 Laporan	8,987,300	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		4 Laporan	8,985,300	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						211,626,900						204,259,200		
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 unit 0 Unit	196,252,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		23 unit 0 Unit	196,259,200	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"				4 unit	3,950,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		4 unit	4,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				1 Gedung	11,424,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Gedung	4,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar	Juta Rupiah		Juta Rupiah	1700 Juta Rupiah	<b>578,349,100</b>						1700 Juta Rupiah	<b>767,409,000</b>	
3 30 03 2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>						<b>381,940,000</b>							<b>550,000,000</b>	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 unit	136,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 unit	200,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	"Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan" Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				11 unit 0 Unit	244,945,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		11 unit 0 Unit	350,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03 2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>						<b>196,409,100</b>							<b>217,409,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan" Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								1 Dokumen 0 Dokumen	125,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								0 Dokumen	92,409,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Meningkatnya ekspor bersih perdagangan	Miliar Rp			Miliar Rp	201,362 Miliar Rp	<b>51,934,000</b>			201,362 Miliar Rp	<b>51,939,637</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>51,934,000</b>			<b>51,939,637</b>		
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina								15 Pelaku Usaha	10,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang								5 pelaku usaha 0 Pelaku Usaha	10,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae				5 pelaku usaha 0 Pelaku Usaha	5,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina								15 pelaku usaha	26,944,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase meningkatnya pelayanan yang standar dan perlindungan konsumen	%			%	75 %	<b>83,512,000</b>		75 %	<b>83,682,594</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						83,512,000						83,682,594		
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2550 unit	55,712,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2550 unit	43,682,594	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	"Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina"				1000 Orang	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1000 Orang	20,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06 2.01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				10 unit	7,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		10 unit	20,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>							<b>2,857,975,400</b>						<b>1,844,203,294</b>	
3 31 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Meningkatnya Cakupan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan industri	%		%	15 %	<b>2,857,975,400</b>						15 %	<b>1,844,203,294</b>	
3 31 02 2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>						<b>2,857,975,400</b>							<b>1,844,203,294</b>	
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri"				2 Dokumen	879,581,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2 Dokumen	1,250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri"				4 Dokumen	1,846,114,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		4 Dokumen	381,923,294	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	90,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2 Dokumen	90,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	"Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri"				2 Dokumen	42,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2 Dokumen	42,280,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>														
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	Predikat/Angka		Predikat/Angka	CC/54 Predikat/Angka	26,492,614,280						CC/54 Predikat/Angka	26,863,763,580	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan Laporan		Laporan Laporan	2 Laporan 2 Laporan	42,000,000						2 Laporan 2 Laporan	42,000,000	
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				2 laporan	42,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 laporan	42,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	dokumen dokumen orang/bulan		dokumen dokumen orang/bulan	1 dokumen 9 dokumen 110 orang/bulan	10,260,980,080						1 dokumen 9 dokumen 110 orang/bulan	10,723,790,348	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				110 orang/bulan	8,880,178,080	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	110 orang/bulan	8,429,779,348	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD				9 dokumen	1,380,802,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	9 dokumen	2,047,411,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	paket orang		paket orang	3 paket 81 orang	232,490,000						3 paket 81 orang	276,962,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				3 paket	104,890,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 paket	123,690,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				81 Orang	127,600,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	81 Orang	153,272,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	dokumen Laporan Laporan paket paket paket paket	dokumen Laporan Laporan paket paket paket paket	4 dokumen 7 Laporan 9 Laporan 8 paket 8 paket 3 paket 4 paket	<b>2,971,773,850</b>							4 dokumen 7 Laporan 9 Laporan 8 paket 8 paket 3 paket 4 paket	<b>3,459,993,798</b>	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				3 paket	62,236,300	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 paket	63,283,650	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				4 paket	93,727,050	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 paket	90,652,950	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				8 paket	145,260,300	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	8 paket	143,904,875	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				8 paket	154,380,200	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	8 paket	144,309,023	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				4 dokumen	11,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				7 laporan	1,107,190,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	7 laporan	1,107,195,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				9 laporan	1,397,980,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	9 laporan	1,899,648,300	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	jumlah paket mebel yang disediakan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit unit unit unit		unit unit unit unit	14 unit 0 unit 4 unit 7 unit	<b>638,307,650</b>						14 unit 0 unit 4 unit 7 unit	<b>866,047,350</b>	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan				14 unit	431,320,800	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	14 unit	650,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				4 unit	78,439,500	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 unit	67,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				7 unit	128,547,350	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	7 unit	148,547,350	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan	8 Laporan 4 Laporan 9 Laporan 9 Laporan	<b>766,494,350</b>						8 Laporan 4 Laporan 9 Laporan 9 Laporan	<b>739,398,644</b>	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				9 laporan	32,242,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	9 laporan	32,257,160	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				9 laporan	562,750,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	9 laporan	555,916,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				4 laporan	8,470,600	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 laporan	8,250,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				8 laporan	163,031,750	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	8 laporan	142,975,484	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit unit unit unit unit		unit unit unit unit unit	2 unit 104 unit 2 unit 186 unit 1 unit 3 unit	<b>2,648,395,350</b>					2 unit 104 unit 2 unit 186 unit 1 unit 3 unit	<b>1,981,479,646</b>		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				2 unit	80,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 unit	80,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				104 unit	1,536,865,350	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	104 unit	1,574,070,746	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				186 unit	65,530,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	186 unit	69,350,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	850,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 unit	142,130,352	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	91,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 unit	90,928,548	Sekretariat Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 unit	25,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	orang/bulan orang paket		orang/bulan orang paket	2 orang/bulan 2 orang 5 paket	<b>2,888,289,000</b>						2 orang/bulan 2 orang 5 paket	<b>2,856,819,000</b>	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan				5 paket	114,846,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	5 paket	114,876,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah				2 orang	197,210,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 orang	197,210,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah				2 orang/bulan	2,576,233,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 orang/bulan	2,544,733,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	unit		unit	3 unit	<b>15,000,000</b>						3 unit	<b>80,061,900</b>	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan				3 paket	15,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 paket	80,061,900	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	dokumen paket paket		dokumen paket paket	1 dokumen 1 paket 1 paket	<b>343,710,000</b>						1 dokumen 1 paket 1 paket	<b>397,721,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab				1 dokumen	109,720,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 dokumen	197,721,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana				1 paket	134,220,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi				1 dokumen	99,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolanan Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	3 Laporan 3 Laporan	<b>733,318,000</b>						3 Laporan 3 Laporan	<b>480,398,000</b>	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolanan	jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolanan				3 laporan	409,098,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 laporan	409,198,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan				3 laporan	324,220,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 laporan	71,200,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	LPPD Nilai Sakip	angka Predikat/Angka		angka Predikat/Angka	2,7 angka cc/54 Predikat/Angka	<b>3,713,685,000</b>						2,7 angka cc/54 Predikat/Angka	<b>3,713,685,000</b>	
<b>4 01 02 2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	jumlah dokumen LKPJ dan LPPD dan memori akhir jabatan Jumlah laporan kinerja perangkat daerah terlaksananya administrasi tata pemerintahan	% Laporan dokumen		% Laporan dokumen	100 % 18 Laporan 3 dokumen	<b>516,975,000</b>						100 % 18 Laporan 3 dokumen	<b>516,975,000</b>	
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan otonomi daerah				3 dokumen	516,975,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 dokumen	516,975,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	paket paket		paket paket	2 paket 0 paket	<b>2,196,710,000</b>						2 paket 0 paket	<b>2,196,710,000</b>	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual				2 paket	2,167,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 paket	2,196,710,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB				0 dokumen	29,010,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	0 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	dokumen		dokumen	4 dokumen	<b>1,000,000,000</b>						4 dokumen	<b>1,000,000,000</b>	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum daerah yang disusun				4 dokumen	500,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 dokumen	500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum				6 kasus	300,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 kasus	300,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi				4 dokumen	200,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Presentase rumusan kebijakan bidang perekonomian	%		%	62,50 %	<b>1,238,171,000</b>						62,50 %	<b>1,245,406,894</b>	
4 01 03 2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen		dokumen	12 dokumen	<b>490,000,000</b>						12 dokumen	<b>490,000,000</b>	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD				12 dokumen	85,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 dokumen	85,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian				12 laporan	340,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 laporan	340,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil				12 dokumen	65,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 dokumen	65,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	dokumen		dokumen	0 dokumen	<b>289,921,000</b>						0 dokumen	<b>289,921,000</b>	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan				12 laporan	158,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 laporan	158,400,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan				12 laporan	131,521,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 laporan	131,521,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	dokumen		dokumen	1 dokumen	<b>398,250,000</b>						1 dokumen	<b>405,485,894</b>	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa				1 dokumen	141,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 dokumen	141,269,689	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik				1 dokumen	174,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 dokumen	181,500,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa				25 orang	82,550,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	25 orang	82,716,205	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	dokumen		dokumen	8 dokumen	<b>60,000,000</b>						8 dokumen	<b>60,000,000</b>		
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian				8 dokumen	60,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	8 dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah	
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 02								<b>27,370,024,233</b>							<b>32,325,758,953</b>	
4 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>19,528,484,233</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>22,698,252,753</b>	
4 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>17,011,759,133</b>							2 Paket	<b>18,535,312,883</b>	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang	16,913,359,133	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	61 Orang	17,759,026,883	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 dokumen	98,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	1 dokumen	776,286,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket		paket	7 paket	<b>499,897,200</b>							7 paket	<b>1,359,822,870</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,021,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	1 Paket	94,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	46,303,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	1 paket	227,563,665	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan				2 paket	73,103,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	2 paket	115,806,705	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan				1 dokumen	4,320,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	1 dokumen	4,536,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	265,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	1 laporan	528,916,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 laporan	91,150,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	25 laporan	157,500,000	Sekretariat DPRD
<b>4 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>127,177,900</b>						100 %	<b>299,145,000</b>	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	1 Laporan	6,720,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	105,300,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	3 Laporan	210,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	18,077,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	1 Laporan	82,425,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>115,400,000</b>						3 Paket	<b>160,750,000</b>	
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				8 unit	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	8 unit	109,200,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 unit	5,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	32 unit	11,550,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 unit	10,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD, Aparatur	4 unit	40,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	paket		paket	1 paket	<b>197,900,000</b>						1 paket	<b>207,795,000</b>	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 paket	197,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD	1 paket	207,795,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Paket		Paket	3 Paket	<b>1,576,350,000</b>						3 Paket	<b>1,972,047,000</b>	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	60,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD	1 Laporan	78,750,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				120 Laporan	280,350,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD	120 Laporan	595,497,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 paket	1,236,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD	3 paket	1,297,800,000	Sekretariat DPRD
4 02 02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	<b>7,841,540,000</b>						40 Dokumen	<b>9,627,506,200</b>	
4 02 02 2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Paket		Paket	3 Paket	<b>624,580,000</b>						3 Paket	<b>712,408,750</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	407,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	3 Dokumen	500,414,250	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				1 Dokumen	141,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	125,569,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	75,180,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	86,425,500	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	paket		paket	1 paket	<b>604,480,000</b>						1 paket	<b>926,415,000</b>	
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				3 Dokumen	604,480,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	3 Dokumen	926,415,000	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Paket		Paket	2 Paket	<b>396,880,000</b>						2 Paket	<b>972,825,000</b>	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas DPRD				2 Dokumen	366,880,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Dokumen	920,325,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	52,500,000	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Paket		Paket	2 Paket	<b>3,082,650,000</b>						2 Paket	<b>3,437,499,450</b>	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	297,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	139,449,450	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2,785,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	3 Dokumen	3,298,050,000	Sekretariat DPRD
<b>4 02 02 2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Jumlah fasilitasi tugas DPRD	paket		paket	3 paket	<b>3,132,950,000</b>						3 paket	<b>3,578,358,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					1 Dokumen	2,534,050,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	2,296,108,500	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					1 Dokumen	250,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	232,239,000	Sekretariat DPRD		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					1 Dokumen	348,300,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	1,050,010,500	Sekretariat DPRD		
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
5	01				<b>PERENCANAAN</b>						<b>6,481,890,934</b>										<b>6,559,791,928</b>	
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>4,533,049,934</b>								CC/54 predikat/ angka	<b>4,599,790,928</b>		
5	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	4 sub kegiatan	<b>125,000,000</b>								4 sub kegiatan	<b>125,000,000</b>		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					2 dokumen	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D Kabupaten Belu	2 dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D Kabupaten Belu	2 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD					2 dokumen	10,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D Kabupaten Belu	2 dokumen	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah					3 dokumen	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D Kabupaten Belu	3 dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	subkegiatan		subkegiatan	3 subkegiatan	<b>3,693,138,634</b>								3 subkegiatan	<b>3,768,164,928</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				20 laporan	3,428,441,634	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	20 laporan	3,503,467,928	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				750 Dokumen	11,697,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	750 Dokumen	11,697,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD				900 dokumen	253,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	900 dokumen	253,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	subkegiatan		subkegiatan	1 subkegiatan	<b>25,000,000</b>						1 subkegiatan	<b>25,000,000</b>	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah	subkegiatan		subkegiatan	5 subkegiatan	<b>409,611,300</b>						5 subkegiatan	<b>403,126,000</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,126,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	1 Paket	3,126,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 paket	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	1 paket	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	91,485,300	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	1 Paket	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 laporan	25,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	1 laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	190,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	20 Laporan	190,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	3 sub kegiatan	<b>72,900,000</b>						3 sub kegiatan	<b>72,500,000</b>	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	1 Laporan	6,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	35,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	1 Laporan	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	31,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BP4D	1 Laporan	31,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	4 sub kegiatan	<b>207,400,000</b>						4 sub kegiatan	<b>206,000,000</b>	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				19 Unit	198,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D	19 Unit	198,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	2,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D	8 Unit	2,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D	1 unit	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	2,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D	1 Unit	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase capaian kinerja program	%		%	100 %	<b>1,048,026,000</b>						100 %	<b>1,059,186,000</b>	
5 01 02 2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan	sub kegiatan		sub kegiatan	7 sub kegiatan	<b>786,636,000</b>						7 sub kegiatan	<b>797,796,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD				1 dokumen	21,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah dan masyarakat	1 dokumen	21,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah				1 dokumen	88,840,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah dan masyarakat	1 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah berita acara konsultasi publik				1 BA	13,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah dan masyarakat	1 BA	13,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara				54 BA	105,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah dan masyarakat	54 BA	105,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota				1 berita acara	128,246,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah dan masyarakat	1 berita acara	128,246,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan				120 usulan	161,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah dan masyarakat	120 usulan	161,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJP/ RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	267,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah dan masyarakat	2 Dokumen	267,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	2 sub kegiatan	<b>75,610,000</b>						2 sub kegiatan	<b>75,610,000</b>	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	8,220,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah	1 Dokumen	8,220,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi				56 Orang	67,390,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah	56 Orang	67,390,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	<b>185,780,000</b>						100 %	<b>185,780,000</b>	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan				2 laporan	24,240,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah	2 laporan	24,240,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	61,540,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah	1 Kerja Sama	61,540,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah				4 laporan	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	perangkat daerah	4 laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	%		%	100 %	<b>900,815,000</b>						100 %	<b>900,815,000</b>	
5 01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	subkegiatan		subkegiatan	7 subkegiatan	<b>376,880,000</b>						7 subkegiatan	<b>376,880,000</b>	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 dokumen	59,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 dokumen	59,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah				20 Perangkat Daerah	30,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	20 Perangkat Daerah	30,230,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan				1 laporan	139,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 laporan	139,400,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	42,260,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	42,260,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				12 Perangkat Daerah	28,160,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	12 Perangkat Daerah	28,160,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan manusia				32 Perangkat Daerah	36,230,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	32 Perangkat Daerah	36,230,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 laporan	40,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 laporan	40,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	<b>284,185,000</b>						100 %	<b>284,185,000</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	84,030,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	84,030,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	31,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	6 Perangkat Daerah	31,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	30,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	6 Perangkat Daerah	30,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	75,230,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	75,230,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang SDA				3 Perangkat Daerah	25,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	3 Perangkat Daerah	25,450,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				3 Perangkat Daerah	37,375,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	3 Perangkat Daerah	37,375,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	subkegiatan		subkegiatan	6 subkegiatan	<b>239,750,000</b>						6 subkegiatan	<b>239,750,000</b>	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 dokumen	40,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 dokumen	40,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				2 Perangkat Daerah	35,550,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 Perangkat Daerah	35,550,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				6 Perangkat Daerah	45,050,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	6 Perangkat Daerah	45,050,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 dokumen	49,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2 dokumen	49,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang kewilayahan				4 Perangkat Daerah	38,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Perangkat Daerah	38,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang kewilayahan				4 Perangkat Daerah	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Perangkat Daerah	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>5 05</b>		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					<b>567,200,000</b>							<b>580,834,000</b>	
5 05 02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Indeks Government Award (IGA) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Skor/Kategori %		Skor/Kategori %	75/Sangat Inovatif Skor/Kategori 38.46 %	567,200,000						75/Sangat Inovatif Skor/Kategori 38.46 %	580,834,000	
5 05 02 2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	209,430,000						1 Dokumen	212,052,000	
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 dokumen 0 Dokumen	209,430,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen 0 Dokumen	212,052,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi Pembangunan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	181,920,000						1 Dokumen	189,150,000	
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen 0 Dokumen	181,920,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen 0 Dokumen	189,150,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 05 02 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah dokumen penelitian di bidang inovasi dan teknologi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	175,850,000						1 Dokumen	179,632,000		
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	175,850,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	179,632,000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5 02	<b>KEUANGAN</b>							<b>156,941,836,606</b>							<b>177,467,376,249</b>	
5 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	angka		angka	cc/52 predikat angka	<b>152,880,426,606</b>							cc/52 predikat angka	<b>173,158,445,249</b>	
5 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>91,290,000</b>								<b>119,890,000</b>	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	55,780,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		0 Dokumen 3 Dokumen	69,890,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 laporan 0 Laporan	35,510,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		3 laporan 0 Laporan	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>150,825,729,106</b>								<b>166,569,017,148</b>	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 ls 0 Orang/bulan	20,977,082,638	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		1 ls 0 Orang/bulan	8,039,829,045	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 dokumen 0 Dokumen	129,812,716,468	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		3 dokumen 0 Dokumen	158,479,188,103	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	35,930,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 Laporan	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5 02 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>293,200,000</b>						<b>300,000,000</b>		
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat				5 orang	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	5 orang	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimtek				0 Orang 100 orang	243,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0 Orang 100 orang	250,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5 02 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1,265,139,000</b>						<b>662,470,000</b>		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli				1 paket	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 paket	40,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket	75,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket 0 Paket	371,062,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket 0 Paket	90,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 paket 0 Paket	550,357,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	3 paket 0 Paket	193,750,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 paket	35,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket	35,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				20 orang	253,720,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	20 orang	253,720,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>35,528,500</b>						<b>5,141,753,101</b>		
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor				1 paket	35,528,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket	125,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>70,250,000</b>						<b>70,978,000</b>		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 paket	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket	20,028,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				2 paket	32,300,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	2 paket	33,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	17,950,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 laporan	17,950,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>299,290,000</b>						<b>294,337,000</b>		
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya				0 Unit 33 unit	235,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0 Unit 33 unit	230,491,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 unit 0 Unit	63,790,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	64 unit 0 Unit	63,846,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5	02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini atas Audit BPK	Opini	Opini	WTP Opini	2,972,282,000						WTP Opini	3,228,496,000	
5	02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1,633,600,000							1,660,000,000	
5	02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			1 dokumen 0 Dokumen	88,620,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			1 dokumen 0 Dokumen	84,370,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			53 dokumen 0 Dokumen	83,040,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		53 dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			53 dokumen 0 Dokumen	81,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		53 dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD			0 Dokumen 2 dokumen	92,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		0 Dokumen 2 dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD			0 Dokumen 2 dokumen	89,280,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		0 Dokumen 2 dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 dokumen 0 Dokumen	262,240,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	2 dokumen 0 Dokumen	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 dokumen 0 Dokumen	24,745,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 dokumen 0 Dokumen	652,710,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	2 dokumen 0 Dokumen	450,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 dokumen 0 Dokumen	24,595,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah				15 orang	150,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	15 orang	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>						<b>577,650,000</b>						<b>700,000,000</b>		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				8000 SP2D 0 Dokumen	161,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	8000 SP2D 0 Dokumen	223,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				54 dokumen 0 Dokumen	74,515,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	54 dokumen 0 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 dokumen 0 Dokumen	148,855,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Dokumen	165,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 dokumen 0 Dokumen	70,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Dokumen	85,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK				0 Laporan 1 dokumen	68,380,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 1 dokumen	82,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait  Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 dokumen 0 Dokumen	54,300,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Dokumen	65,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>						<b>761,032,000</b>						<b>868,496,000</b>		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah				1 laporan	80,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 laporan	80,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan  Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 laporan 0 Laporan	119,438,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 laporan 0 Laporan	138,288,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 laporan 0 Laporan	73,754,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 laporan 0 Laporan	90,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0 Dokumen 2 dokumen	183,179,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0 Dokumen 2 dokumen	232,050,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ABD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 dokumen 0 Dokumen	118,576,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Dokumen	120,208,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 dokum 0 Dokumen	136,910,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokum 0 Dokumen	157,950,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	49,175,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Opini atas Audit BPK	Opini		Opini	WTP Opini	<b>1,089,128,000</b>					WTP Opini	<b>1,080,435,000</b>		
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>						<b>1,089,128,000</b>						<b>1,080,435,000</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 dokumen 0 Dokumen	87,050,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	2 dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 dokumen 0 Laporan	135,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Laporan	147,380,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi barang milik daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 dokumen 0 Laporan	454,570,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Laporan	400,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				20 buah 0 Laporan	80,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	20 buah 0 Laporan	80,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 Laporan 1 Laporan	40,220,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0 Laporan 1 Laporan	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 dokumen 0 Dokumen	177,140,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 dokumen 0 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				54 dokumen 0 Laporan	39,190,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		54 dokumen 0 Laporan	47,380,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 dokumen 0 Laporan	75,358,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen 0 Laporan	80,675,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>5 02</b>	<b>KEUANGAN</b>						<b>5,887,334,130</b>							<b>6,156,934,130</b>		
<b>5 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	Predikat/Angka		Predikat/Angka	CC/54 Predikat/Angka	<b>4,576,959,921</b>							CC/54 Predikat/Angka	<b>4,637,781,671</b>	
<b>5 02 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>3,769,741,921</b>							2 Paket	<b>3,944,101,921</b>	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	3,442,877,921	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	0 Orang/bulan	3,442,877,921	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	326,864,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1 Dokumen	501,224,000	Badan Pendapatan Daerah	
<b>5 02 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket		Paket	1 Paket	<b>16,230,000</b>							1 Paket	<b>10,780,000</b>	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	16,230,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1 Orang	10,780,000	Badan Pendapatan Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	5 Paket	<b>365,924,750</b>						5 Paket	<b>342,122,250</b>	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,277,650	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1 Paket	5,277,650	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				4 Paket	70,398,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	4 Paket	38,356,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	123,488,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	8 Paket	123,488,600	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1 Laporan	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	141,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	32 Laporan	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>133,400,000</b>						2 Paket	<b>45,792,400</b>	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2,846,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1 Paket	11,384,800	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	130,553,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	2 Unit	34,407,600	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>127,566,750</b>						3 Paket	<b>126,820,600</b>	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	22,656,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	2 Laporan	22,656,000	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	54,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	3 Laporan	54,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	50,910,750	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	2 Laporan	50,164,600	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>164,096,500</b>						3 Paket	<b>168,164,500</b>	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	149,091,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	15 Unit	149,091,500	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	8,550,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	47 Unit	12,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,455,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1 Unit	6,273,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%		%	9.57 %	<b>1,310,374,209</b>						9.57 %	<b>1,519,152,459</b>	
5 02 04 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Paket		Paket	8 Paket	<b>1,310,374,209</b>						8 Paket	<b>1,519,152,459</b>	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				9 Dokumen	209,920,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Subjek dan Objek Pajak, ASN Bapenda Kab. Belu	9 Dokumen	153,680,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	62,300,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Subjek dan Objek Pajak, ASN Bapenda Kab. Belu	1 Laporan	70,600,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				9 Laporan	222,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Subjek dan Objek Pajak, ASN Bapenda Kab. Belu	9 Laporan	281,120,000	Badan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				9 Laporan	138,150,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Subjek dan Objek Pajak, ASN Bapenda Kab. Belu	9 Laporan	153,750,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan				9 Dokumen	426,454,209	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Subjek dan Objek Pajak, ASN Bapenda Kab. Belu	9 Dokumen	516,602,459	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan				9 Dokumen	46,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Subjek dan Objek Pajak, ASN Bapenda Kab. Belu	9 Dokumen	50,800,000	Badan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				9 Dokumen	204,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Subjek dan Objek Pajak, ASN Bapenda Kab. Belu	9 Dokumen	292,600,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5 03	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>11,201,786,364</b>							<b>13,228,245,235</b>		
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>9,453,545,864</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>11,176,156,399</b>	
5 03 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja	paket		paket	2 paket	<b>20,508,000</b>							2 paket	<b>20,896,000</b>	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 null 7 Dokumen	12,264,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	0 null 7 Dokumen	12,455,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8,244,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	1 Laporan	8,441,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5 03 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan PD	paket		paket	2 paket	<b>8,619,669,814</b>							2 paket	<b>8,762,620,099</b>	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang	8,559,423,314	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	100 Orang	8,721,293,599	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang Perangkat Daerah Jumlah Tenaga Kontrak Daerah				12 Dokumen 5 Orang 1 Orang	60,246,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	12 Dokumen 5 Orang 1 Orang	41,326,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah penataan administrasi kepegawaian PD	paket		paket	5 paket	<b>203,322,000</b>						5 paket	<b>242,357,000</b>	
5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				200 Dokumen	27,569,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	200 Dokumen	37,589,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	41,600,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	4 Dokumen	52,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Diklat Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsi				15 Orang	80,620,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	15 Orang	79,365,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian				1 Kegiatan	26,766,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	1 Kegiatan	36,701,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian				1 Kegiatan	26,766,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	1 Kegiatan	36,701,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan adm, umum PD	paket		paket	4 paket	<b>179,630,000</b>						4 paket	<b>240,035,300</b>	
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	34,280,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	1 Paket	40,525,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	13,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	2 Paket	13,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	14,150,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	4 Laporan	14,150,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	118,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	20 Laporan	172,160,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>5 03 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan barang milik daerah	paket		paket	3 paket	<b>202,197,800</b>						3 paket	<b>1,690,500,000</b>	
5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3 Unit	98,157,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	3 Unit	91,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	104,040,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	15 Unit	99,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>5 03 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	paket		paket	3 paket	<b>45,688,250</b>						3 paket	<b>46,822,000</b>	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD. KAB BELU	4 Laporan	6,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik				4 Laporan 0 Laporan	16,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD. KAB BELU	4 Laporan 0 Laporan	16,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Orang 12 Laporan 0 Laporan	23,788,250	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD. KAB BELU	1 Orang 12 Laporan 0 Laporan	24,422,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	paket		paket	4 paket	<b>182,530,000</b>						4 paket	<b>172,926,000</b>	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Tenaga Supir				13 Unit 1 Orang	125,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	13 Unit 1 Orang	125,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	5,250,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	21 Unit	5,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	1 Unit	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	1,780,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU	15 Unit	2,176,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	%		%	61.75 %	<b>1,748,240,500</b>						61.75 %	<b>2,052,088,836</b>	
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Jumlah pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	paket		paket	6 paket	<b>492,375,000</b>						6 paket	<b>517,923,600</b>	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	16,476,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	1 Dokumen	11,212,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				200 Dokumen	282,840,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	200 Dokumen	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				150 Dokumen	52,139,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	150 Dokumen	41,858,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				2 Dokumen	119,920,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	2 Dokumen	127,672,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Unit	21,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	1 Unit	21,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>5 03 02 2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Jumlah Paket Mutasi dan Promosi ASN	Paket		Paket	2 Paket	<b>560,692,000</b>						2 Paket	<b>653,634,236</b>	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				450 Dokumen	55,875,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	450 Dokumen	58,870,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				6 Dokumen	504,817,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	6 Dokumen	594,764,236	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>5 03 02 2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN	paket		paket	2 paket	<b>516,860,000</b>						2 paket	<b>662,610,000</b>	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	33,360,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	100 Orang	36,110,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				21 Orang	483,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	21 Orang	626,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>5 03 02 2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Jumlah penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	paket		paket	3 paket	<b>178,313,500</b>						3 paket	<b>217,921,000</b>	
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	27,673,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	1 Dokumen	27,347,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				150 Orang	21,310,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	150 Orang	31,374,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				25 Orang	129,330,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	25 Orang	159,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04							1,080,620,000						1,613,216,963		
5 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	%		%	48.53 %	1,080,620,000					48.53 %	1,613,216,963		
5 04 02 2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Jumlah Paket Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Paket		Paket	1 Paket	1,080,620,000					1 Paket	1,613,216,963		
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	1,080,620,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU	2 Laporan	1,613,216,963	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5															
5															
5 06							2,103,699,792						2,125,989,802		
5 06 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	1,807,624,792					CC/54 predikat/ angka	1,805,989,802		
5 06 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang		orang	19 orang	1,688,621,292					19 orang	1,688,021,292		
5 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 orang	1,665,821,292	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	19 orang	1,665,821,292	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	22,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	4 Dokumen	22,200,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5 06 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis		jenis	13 jenis	72,054,800					13 jenis	70,968,510		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1,496,200	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 paket	1,500,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	5,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 paket	5,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	3,500,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 paket	5,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	22,136,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 paket	19,468,510	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	15,042,600	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 paket	15,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	24,880,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 Laporan	25,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket		paket	3 paket	<b>22,000,000</b>						3 paket	<b>22,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 Laporan	1,500,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 Laporan	18,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,500,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 Laporan	2,500,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	10 unit	<b>24,948,700</b>						10 unit	<b>25,000,000</b>	
5.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 unit	19,947,200	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	14 unit	20,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	5,001,500	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	1 unit	5,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	Meningkatnya cakupan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan	%		%	75 %	<b>296,075,000</b>						75 %	<b>320,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 06 02 2.01	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	Jumlah kegiatan koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah Jumlah Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	kali paket		kali paket	7 kali 2 paket	<b>79,985,000</b>						7 kali 2 paket	<b>80,000,000</b>	
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 dokumen	39,990,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu yang berada di dalam wilayah Perbatasan Negara	1 dokumen	40,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 dokumen	39,995,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu yang berada di dalam wilayah Perbatasan Negara	1 dokumen	40,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5 06 02 2.02	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	Jumlah kegiatan pelaksanaan kewilayahan perbatasan	kali		kali	7 kali	<b>137,100,000</b>						7 kali	<b>160,000,000</b>	
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 dokumen	25,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu yang berada di dalam wilayah kawasan perbatasan negara	1 dokumen	40,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.06.02.2.02.03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara				50 pilar	31,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu yang berada di dalam wilayah kawasan perbatasan negara	50 pilar	40,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02.2.02.04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				50 pilar	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu yang berada di dalam wilayah kawasan perbatasan negara	50 pilar	40,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu yang berada di dalam wilayah kawasan perbatasan negara	1 Laporan	40,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02.2.03	<b>Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan</b>	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	paket		paket	2 paket	<b>78,990,000</b>						2 paket	<b>80,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
5	06	02	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan					1 dokumen	39,990,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu yang berada di dalam Kawasan Perbatasan Negara	1 dokumen	40,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
5	06	02	2.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan					1 dokumen	39,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu dan Masyarakat Kabupaten Belu yang berada di dalam Kawasan Perbatasan Negara	1 dokumen	40,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		
<b>6</b>					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
<b>6</b>	<b>01</b>				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>							<b>6,404,439,626</b>								<b>7,387,277,626</b>		
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	predikat/ angka			predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>4,757,985,626</b>								CC/54 predikat/ angka	<b>5,119,282,626</b>	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				paket	1 paket	<b>181,750,000</b>								1 paket	<b>183,000,000</b>	
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	181,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		3 Laporan	183,000,000	Inspektorat	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah					paket									2 paket	<b>4,150,446,626</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan				45 Orang	4,107,047,926	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	45 Orang	4,097,046,626	Inspektorat
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD				1 Dokumen	49,200,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	53,400,000	Inspektorat
6.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	paket		paket	4 paket	<b>112,351,200</b>						4 paket	<b>190,000,000</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				3 Paket	2,571,200	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 Paket	4,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	18,300,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 Paket	15,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30,500,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	36,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				25 kali	60,980,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	25 kali	135,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD	paket		paket	1 paket	<b>16,000,000</b>						1 paket	<b>85,000,000</b>	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan, Meubelair dan Mesin lainnya yang disediakan				10 Unit	16,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	10 Unit	85,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	paket		paket	3 paket	<b>99,237,500</b>						3 paket	<b>145,836,000</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,800,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	8,500,000	Inspektorat



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 Laporan	42,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 Laporan	45,600,000	Inspektorat
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	52,437,500	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	91,736,000	Inspektorat
6.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	paket		paket	2 paket	<b>192,399,000</b>						2 paket	<b>365,000,000</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya				22 Unit	191,024,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	22 Unit	265,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi				1 Unit	1,375,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Unit	100,000,000	Inspektorat
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Kapabilitas APIP	Level		Level	Level 3 Level	<b>1,166,670,000</b>						Level 3 Level	<b>1,748,000,000</b>	
6.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Jumlah penyelenggaraan pengawasan internal	paket		paket	4 paket	<b>1,166,670,000</b>						4 paket	<b>1,748,000,000</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				45 Laporan	847,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	OPD, Pemdes dan sekolah SD,SMP	45 Laporan	1,315,000,000	Inspektorat
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review				5 Laporan	196,320,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	OPD, Pemdes dan sekolah SD,SMP	5 Laporan	225,000,000	Inspektorat
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan				1 Laporan	76,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	OPD, Pemdes dan sekolah SD,SMP	1 Laporan	100,000,000	Inspektorat
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan APIP				2 Laporan	47,150,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	OPD, Pemdes dan sekolah SD,SMP	2 Laporan	108,000,000	Inspektorat
6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Maturitas SPIP	Angka		Angka	3 Angka	<b>479,784,000</b>						3 Angka	<b>519,995,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi	paket		paket	1 paket	234,384,000						1 paket	269,795,000		
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun				2 Rekomendasi	234,384,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Rekomendasi	269,795,000	Inspektorat	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi	paket		paket	1 paket	245,400,000						1 paket	250,200,000		
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	245,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	2 Kegiatan	250,200,000	Inspektorat	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>5,600,000,000</b>							<b>11,984,379,320</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai sakiap	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>4,439,000,000</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>5,320,952,495</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	4 Paket	<b>3,875,704,550</b>							4 Paket	<b>4,307,742,495</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	3,803,104,550	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		50 Orang/bulan	4,183,632,495	Kecamatan Kota Atambua	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	72,600,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250 Dokumen	124,110,000	Kecamatan Kota Atambua	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	0 Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0 Paket		0 Paket	0 0 4 Paket	<b>291,984,500</b>							0 0 4 Paket	<b>744,480,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	7,993,500	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas peralatan dan bangunan kantor	0 Paket	19,800,000	Kecamatan Kota Atambua	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	35,612,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas peralatan dan bangunan kantor	0 Paket	132,000,000	Kecamatan Kota Atambua	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	58,664,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas peralatan dan bangunan kantor	0 Paket	55,000,000	Kecamatan Kota Atambua
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	92,825,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas peralatan dan bangunan kantor	25 Laporan	165,000,000	Kecamatan Kota Atambua
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64 Laporan	96,890,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas peralatan dan bangunan kantor	64 Laporan	372,680,000	Kecamatan Kota Atambua
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>98,785,650</b>							<b>124,630,000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	9,996,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	11,000,000	Kecamatan Kota Atambua
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	57,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	62,700,000	Kecamatan Kota Atambua
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	31,789,650	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	50,930,000	Kecamatan Kota Atambua
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>172,525,300</b>							<b>144,100,000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	99,912,800	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	110,000,000	Kecamatan Kota Atambua
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Meubelair yang dipelihara				0 Unit 25 Unit	7,460,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 25 Unit	5,500,000	Kecamatan Kota Atambua
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	7,365,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43 Unit	11,000,000	Kecamatan Kota Atambua

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	57,787,500	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	17,600,000	Kecamatan Kota Atambua	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	<b>1,161,000,000</b>					70 %	<b>6,502,826,825</b>		
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah pmbwberdayaan lembaga kemasyaraatan di kelurah	paket paket		paket paket	2 paket 2 paket	<b>1,161,000,000</b>					2 paket 2 paket	<b>1,342,000,000</b>		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah aparat lingkungan dan kader posyandu dibayar				2 Paket	1,161,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	1,292,500,000	Kecamatan Kota Atambua	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,028,096,769</b>						<b>2,119,630,869</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai saki	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>1,907,746,869</b>					CC/54 predikat/ angka	<b>1,989,630,869</b>		
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>1,755,696,353</b>					2 Paket	<b>1,796,880,869</b>		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	1,713,096,353		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	14 Bulan	1,708,096,869	Kecamatan Tasifeto Barat
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Orang	42,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 Orang	88,784,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jum;ah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		laporan	1 laporan	<b>46,690,500</b>						1 laporan	<b>43,500,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 Jenis	1,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 jenis	10,190,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	30 jenis	10,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	23,000,000	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	7 Laporan	20,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	unit		unit	3 unit	<b>19,958,116</b>						3 unit	<b>90,000,000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (laptop)				0 Unit 3 Unit	19,958,116	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	0 Unit 3 Unit	10,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>10,085,000</b>						3 Paket	<b>10,250,000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 laporan	6,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 laporan	750,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Jenis	835,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	10 Jenis	1,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>75,316,900</b>						2 Paket	<b>49,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 unit	65,601,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 unit	40,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	9,715,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	4 Unit	9,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>57,625,000</b>							<b>70,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>25,000,000</b>							<b>15,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	25,000,000	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>						<b>32,625,000</b>							<b>55,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	32,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		4 Laporan	55,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						<b>62,724,900</b>							<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Paket		Paket	1 Paket	<b>62,724,900</b>						1 Paket	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				39 Kali	25,350,000	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat	39 Kali	20,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	37,374,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat	3 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tasifeto Barat	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,251,226,611</b>							<b>1,906,230,573</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai saki	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>2,080,826,611</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>1,826,230,573</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan PD	paket		paket	2 paket	<b>1,859,575,561</b>							2 paket	<b>1,724,527,273</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji/Tunjangan/Orang/Bulan)				14 Orang/Bulan	1,817,575,561	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	14 Orang/Bulan	1,686,727,273	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD				1 Dokumen	42,000,000	Kab. Belu, TasifetoTimur, Manleten		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Dokumen	37,800,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan adm. umum PD	paket		paket	6 paket	<b>116,361,450</b>							6 paket	<b>46,500,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan				1 Paket	1,759,250	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	1,500,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				1 Paket	3,390,200	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	1,500,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	12,417,000	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	6,865,000	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kelurahan				ASN	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	17,550,000	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	8,500,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	74,380,000	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD	paket		paket	1 paket	27,277,100						1 paket	6,500,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	27,277,100				4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Unit	6,500,000	Kecamatan Tasifeto Timur
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	paket		paket	3 paket	12,415,000						3 paket	11,500,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,440,000				4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	1,500,000	Kecamatan Tasifeto Timur
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,975,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	paket		paket	3 paket	65,197,500						3 paket	37,203,300	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara				7 Unit	56,000,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	7 Unit	32,703,300	Kecamatan Tasifeto Timur
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,250,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	4 Unit	2,500,000	Kecamatan Tasifeto Timur
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,947,500	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan			4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Unit	2,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88.82064 Indeks	60,000,000						88.82064 Indeks	30,000,000	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	paket		paket	1 paket	29,500,000						1 paket	10,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	29,500,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan			5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	4 Laporan	10,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan	paket		paket	1 paket	30,500,000						1 paket	20,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	30,500,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Manleten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	110,400,000						70 %	50,000,000		
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	paket		paket	2 paket	110,400,000						2 paket	50,000,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa				24 laporan	46,500,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	24 laporan	10,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat				1 Laporan	63,900,000	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat	1 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tasifeto Timur	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,889,105,247</b>							<b>1,949,014,347</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai saki	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>1,836,325,247</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>1,859,014,347</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>1,664,804,447</b>							2 Paket	<b>1,664,004,347</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang	1,625,204,447		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raihat	20 Orang	1,625,204,347	Kecamatan Raihat	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan OPD dan jumlah tenaga kontrak				5 Orang	39,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Raihat	5 Orang	38,800,000	Kecamatan Raihat	
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	paket		paket	1 paket	<b>10,450,000</b>							1 paket	<b>15,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang 0 Orang	10,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Raihat	1 Orang 0 Orang	15,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan adm. umum PD	paket		paket	6 paket	<b>56,893,900</b>						6 paket	<b>56,500,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1,423,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Raihat	1 paket	1,500,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Raihat	1 paket	2,500,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	9,995,000					ASN Kecamatan Raihat	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 paket	4,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Raihat	2 paket	5,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 Laporan	7,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Raihat	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Raihat	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	paket		paket	4 paket	<b>12,880,000</b>						4 paket	<b>16,000,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan dan jumlah surat yang dikirim null				174 lembar 0 null	2,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	174 lembar 0 null	2,500,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar null				3 Rekening 0 null	5,829,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 Rekening 0 null	6,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang diperbaiki null				2 unit 0 null	4,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 unit 0 null	7,500,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	paket		paket	3 paket	<b>91,296,900</b>						3 paket	<b>107,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara null				6 unit 0 null	70,747,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	6 unit 0 null	75,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara null				3 unit 0 null	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	3 unit 0 null	7,500,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara null				2 unit 0 null	8,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	2 unit 0 null	15,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas/rumah jabatan yang dipelihara null				2 unit 0 null	7,179,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	2 unit 0 null	10,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88.82064 Indeks	<b>17,575,000</b>						88.82064 Indeks	<b>30,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	paket		paket	1 paket	<b>7,900,000</b>						1 paket	<b>10,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 paket	7,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	1 paket	10,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan	paket		paket	1 paket	<b>9,675,000</b>						1 paket	<b>20,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				1 Laporan	9,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	<b>35,205,000</b>						70 %	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	paket		paket	2 paket	<b>35,205,000</b>						2 paket	<b>60,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa null				6 lembaga 0 null	7,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat	6 lembaga 0 null	15,000,000	Kecamatan Raihat
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan 0 Laporan	28,125,000	Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat	1 Laporan 0 Laporan	45,000,000	Kecamatan Raihat
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai saki	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>1,612,921,618</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>1,530,381,618</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>1,455,373,618</b>						2 Paket	<b>1,393,181,618</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang	1,412,773,618	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Kecamatan Lamaknen	16 Orang	1,350,581,618	Kecamatan Lamaknen
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	42,600,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Kecamatan Lamaknen	1 Dokumen	42,600,000	Kecamatan Lamaknen
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	5 Paket	<b>71,273,000</b>						5 Paket	<b>54,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan ASN Kecamatan Lamaknen	1 Paket	1,500,000	Kecamatan Lamaknen
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	15,023,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan ASN Kecamatan Lamaknen	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Lamaknen

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 Paket	6,500,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan ASN Kecamatan Lamaknen	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat dan ASN Kecamatan Lamaknen	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	38,250,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan ASN Kecamatan Lamaknen	15 Laporan	30,000,000	Kecamatan Lamaknen
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>22,275,000</b>						3 Paket	<b>22,200,000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,700,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lamaknen	1 Laporan	2,700,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik				1 Laporan	12,075,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Kecamatan Lamaknen	1 Laporan	12,000,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,500,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Kecamatan Lamaknen	1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Kecamatan Lamaknen	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Lamaknen
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>64,000,000</b>						3 Paket	<b>61,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	49,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Kecamatan Lamaknen	5 Unit	49,000,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara				2 Unit	5,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Kecamatan Lamaknen	2 Unit	2,000,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara				2 unit	10,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Kecamatan Lamaknen	2 unit	10,000,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88.82064 Indeks	<b>30,960,000</b>						88.82064 Indeks	<b>30,000,000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>10,000,000</b>							<b>10,000,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya				1 Laporan	10,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>						<b>20,960,000</b>							<b>20,000,000</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20,960,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal		1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Lamaknen
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	<b>66,700,000</b>						70 %	<b>60,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali		Kali	2 Kali	<b>66,700,000</b>						2 Kali	<b>60,000,000</b>		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Laporan	16,000,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Lembaga Kemasyarakatan dan ASN Kecamatan Lamaknen	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Lamaknen	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50,700,000	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Lembaga Kemasyarakatan dan ASN Kecamatan Lamaknen	1 Laporan	45,000,000	Kecamatan Lamaknen	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,127,928,981</b>							<b>2,154,428,981</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai saki	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>2,067,898,981</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>2,064,428,981</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>1,890,928,981</b>							2 Paket	<b>1,890,928,981</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1,853,128,981	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	24 Orang/bulan	1,853,128,981	Kecamatan Kakuluk Mesak	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	37,800,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	37,800,000	Kecamatan Kakuluk Mesak	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>51,470,000</b>							2 Paket	<b>48,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 paket	1,500,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 paket	1,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 paket	7,500,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	7,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 paket	10,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	10,000,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan				1 paket	5,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	1,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				1 Laporan	7,500,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				7 Laporan	19,970,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	7 Laporan	20,000,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>24,500,000</b>						3 Paket	<b>24,500,000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,500,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik				3 rekening	14,500,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 rekening	14,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 paket	7,500,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	7,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		unit	10 unit	<b>101,000,000</b>						10 unit	<b>101,000,000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				10 unit	87,500,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	10 unit	87,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 unit	3,500,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 unit	3,500,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				3 unit	10,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 unit	10,000,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88.82064 Indeks	<b>30,000,000</b>						88.82064 Indeks	<b>30,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>10,000,000</b>							<b>10,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya				1 Laporan	10,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Paket		Paket	1 Paket	<b>20,000,000</b>						1 Paket	<b>20,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	<b>30,030,000</b>						70 %	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	12 Laporan	<b>30,030,000</b>						12 Laporan	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dalam Forum Musrenbangdes				6 Lembaga	15,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN dan Masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak	6 Lembaga	15,000,000	Kecamatan Kakuluk Mesak

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				12 Laporan	15,030,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN dan Masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak	12 Laporan	45,000,000	Kecamatan Kakuluk Mesak
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,143,717,888</b>							<b>2,091,017,888</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai sikip peningkatan administrasi keuangan perangkat daerah	predikat/ angka bulan		predikat/ angka bulan	CC/54 predikat/ angka 14 bulan	<b>2,041,609,888</b>						CC/54 predikat/ angka 14 bulan	<b>1,998,517,888</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>1,841,917,888</b>						2 Paket	<b>1,821,517,888</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14 Bulan	1,783,717,888	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	14 Bulan	1,783,717,888	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" Jumlah TEKODA				1 dokumen 1 orang	58,200,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 dokumen 1 orang	37,800,000	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	6 Paket	<b>97,127,400</b>						6 Paket	<b>72,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KOmponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1,829,400	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	1,500,000	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 paket	24,500,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	8,000,000	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,998,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"				2 Paket	5,220,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20,500,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Raimanuk

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD				12 Laporan	35,080,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 Laporan	35,000,000	Kecamatan Raimanuk
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	4 Paket	<b>28,637,100</b>						4 Paket	<b>28,000,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	2,496,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 laporan	2,500,000	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				2 laporan	17,400,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 laporan	18,000,000	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1 laporan	8,741,100	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 laporan	7,500,000	Kecamatan Raimanuk
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>73,927,500</b>						2 Paket	<b>77,000,000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				6 unit	72,480,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 unit	75,000,000	Kecamatan Raimanuk
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor				1 Paket	1,447,500	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	2,000,000	Kecamatan Raimanuk
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	indeks kepuasan masyarakat	laporan		laporan	1 laporan	<b>53,410,000</b>						1 laporan	<b>30,000,000</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Paket		Paket	1 Paket	<b>22,160,000</b>						1 Paket	<b>10,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	22,160,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Raimanuk	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Paket		Paket	1 Paket	<b>31,250,000</b>						1 Paket	<b>20,000,000</b>		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	31,250,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Raimanuk	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	<b>48,698,000</b>						70 %	<b>62,500,000</b>		
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa	Persen		Persen	70 Persen	<b>48,698,000</b>						70 Persen	<b>62,500,000</b>		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang				7 Lembaga	10,050,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat	7 Lembaga	17,500,000	Kecamatan Raimanuk	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	38,648,000	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat	1 Laporan	45,000,000	Kecamatan Raimanuk	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,484,054,989</b>							<b>1,532,065,139</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai sakip	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>1,396,994,989</b>							CC/54 predikat/ angka	<b>1,417,065,139</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	paket		paket	2 paket	<b>1,247,975,139</b>							2 paket	<b>1,283,855,139</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 orang	1,204,055,139	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	15 orang	1,204,055,139	Kecamatan Lasiolat	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 dokumen	43,920,000	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 dokumen	79,800,000	Kecamatan Lasiolat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah pengelolaan adm, umum PD	paket		paket	6 paket	<b>43,880,000</b>						6 paket	<b>26,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan				1 paket	1,500,000	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 paket	1,500,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	9,996,200	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 paket	10,000,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan				2 paket	5,113,800	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	2 paket	5,000,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	7,500,000	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 laporan	7,500,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				16 laporan	19,770,000	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	16 laporan	2,000,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD	paket		paket	3 paket	<b>18,500,000</b>						3 paket	<b>20,010,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan				1 paket	10,000,000	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 paket	10,000,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin yang diadakan				1 paket	8,500,000	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 paket	10,000,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	paket		paket	3 paket	<b>21,245,100</b>						3 paket	<b>21,700,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,496,000	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	15,750,000	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 laporan	16,200,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1 laporan	2,999,100	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Lasiolat	1 laporan	3,000,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	paket		paket	3 paket	<b>65,394,750</b>						3 paket	<b>65,500,000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				6 unit	52,397,750	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Dinas dan Bangunan Gedung Kantor	6 unit	52,500,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				1 unit	2,999,500	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Dinas dan Bangunan Gedung Kantor	1 unit	3,000,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	9,997,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Dinas dan Bangunan Gedung Kantor	3 Unit	10,000,000	Kecamatan Lasiolat
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88.82064 Indeks	<b>30,000,000</b>						88.82064 Indeks	<b>30,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	paket		paket	1 paket	<b>10,000,000</b>						1 paket	<b>10,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	10,000,000	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Kecamatan Lasiolat, TNI, Polri, Muspimcam Lasiolat	4 Laporan	10,000,000	Kecamatan Lasiolat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	20,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	20,000,000	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Kecamatan Lasiolat, Muspincam Lasiolat, TNI, Polri	4 Laporan	20,000,000	Kecamatan Lasiolat	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa	%		%	70 %	57,060,000						70 %	85,000,000		
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Paket		Paket	2 Paket	57,060,000						2 Paket	85,000,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				7 kali	15,000,000	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelompok Masyarakat (POKMAS), ASN Kec. Lasiolat, Karang Taruna, TP. PKK	7 kali		0 Kecamatan Lasiolat	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan	42,060,000	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelompok Masyarakat (POKMAS), ASN Kec. Lasiolat, Karang Taruna, TP. PKK	1 laporan	85,000,000	Kecamatan Lasiolat	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>5,477,611,847</b>							<b>7,676,174,515</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai SAKIP	Predikat /angka		Predikat /angka	CC/52 Predikat /angka	<b>4,324,309,347</b>							CC/52 Predikat /angka	<b>4,981,974,515</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>3,901,774,515</b>							2 Paket	<b>4,141,974,515</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	3,782,374,515	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Atambua Selatan	46 Orang/bulan	3,956,974,515	Kecamatan Atambua Selatan	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 dokumen	119,400,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Kecamatan Atambua Selatan	1 dokumen	185,000,000	Kecamatan Atambua Selatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>199,545,232</b>						100 %	<b>345,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,349,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Kecamatan Atambua Selatan	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44,158,832	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Kecamatan Atambua Selatan	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36,627,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan	1 Paket	100,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	27,800,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Kecamatan Atambua Selatan	50 Laporan	50,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	86,610,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Kecamatan Atambua Selatan	45 Laporan	160,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	jumlah sarana prasarana yang disediakan	paket		paket	1 paket	<b>17,324,000</b>						1 paket	<b>0</b>	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	17,324,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Kecamatan atambua Selatan	10 Unit	0	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>81,264,500</b>						3 Paket	<b>120,000,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,040,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Atambua Selatan	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				14 Laporan	50,160,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Atambua Selatan	14 Laporan	55,000,000	Kecamatan Atambua Selatan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	26,064,500	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Atambua Selatan	1 Laporan	50,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Paket		Paket	3 Paket	<b>124,401,100</b>						3 Paket	<b>175,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				13 Unit	99,674,100	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Atambua Selatan	13 Unit	105,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	15,305,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Atambua Selatan	32 Unit	50,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	9,422,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Atambua Selatan	6 Unit	20,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indikator Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	88,73027 indeks	<b>41,250,000</b>						88,73027 indeks	<b>392,000,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	paket		paket	1 paket	<b>41,250,000</b>						1 paket	<b>32,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	41,250,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	masyarakat kecamatan atambua selatan	2 Laporan	32,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	60 %	<b>1,112,052,500</b>						60 %	<b>2,302,200,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	paket		paket	4 paket	<b>6,650,000</b>						4 paket	<b>20,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6,650,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat 4 Kelurahan di Kecamatan Atambua Selatan	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	60 %	<b>33,202,500</b>						60 %	<b>1,210,000,000</b>	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	33,202,500	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	0	3 Pokmas / Ormas	110,000,000	Kecamatan Atambua Selatan
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	paket		paket	4 paket	<b>1,072,200,000</b>						4 paket	<b>1,072,200,000</b>	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan jasanya Jumlah LPM yang dibayarkan jasanya Jumlah RT dan RW yang dibayarkan jasanya				149 orang 20 orang 139 Orang	1,072,200,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat 4 Kelurahan di Kecamatan Atambua Selatan	149 orang 20 orang 139 Orang	1,072,200,000	Kecamatan Atambua Selatan
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
7 01 01							<b>4,663,663,579</b>							<b>4,627,321,958</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	nilai saki	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>3,578,130,679</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>3,587,264,198</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	<b>2,980,118,513</b>						2 Paket	<b>2,929,482,499</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2,859,518,513	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Atambua Barat	33 Orang/bulan	2,766,882,499	Kecamatan Atambua Barat
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 dokumen	120,600,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Atambua Barat	4 dokumen	162,600,000	Kecamatan Atambua Barat
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>2,790,000</b>							<b>5,000,000</b>	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 orang	2,790,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		10 orang	5,000,000	Kecamatan Atambua Barat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						325,235,150						318,000,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	4,062,650	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket	5,523,520	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	112,498,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket	111,409,370	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	98,894,500	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 paket	100,355,370	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu				2 laporan	25,700,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	2 laporan	27,160,870	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				77 laporan	84,080,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	77 laporan	73,550,870	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						16,179,416						20,000,000		
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	16,179,416	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 unit	20,000,000	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						105,328,100						117,855,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				833 Laporan	9,996,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	833 Laporan	15,281,000	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				16 Laporan	67,150,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	16 Laporan	72,485,000	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	28,182,100	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	20 Laporan	30,089,000	Kecamatan Atambua Barat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						103,479,500						146,926,699		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 unit	71,609,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	9 unit	101,914,305	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 unit	5,300,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	19 unit	10,836,722	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 unit	26,570,500	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	5 unit	34,175,672	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 01 2.13	<b>Penataan Organisasi</b>						45,000,000						50,000,000		
7 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				185 dokumen	45,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	185 dokumen	50,000,000	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88.82064 Indeks	101,332,900					88.82064 Indeks	100,000,000		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						90,982,900						89,650,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	90,982,900	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	8 Laporan	89,650,000	Kecamatan Atambua Barat	
7 01 02 2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>						10,350,000						10,350,000		
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	10,350,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	10,350,000	Kecamatan Atambua Barat	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	<b>984,200,000</b>						70 %	<b>940,057,760</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	JUmlah Kegiatan Perberdayaan	paket		paket	2 paket	<b>101,900,000</b>						2 paket	<b>56,819,578</b>	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	101,900,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal		4 Pokmas / Ormas	56,819,578	Kecamatan Atambua Barat
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>						<b>882,300,000</b>							<b>883,238,182</b>	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				16 Lembaga	882,300,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal		16 Lembaga	883,238,182	Kecamatan Atambua Barat
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,021,032,648</b>							<b>1,978,792,148</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	predikat/ angka		predikat/ angka	CC/54 predikat/ angka	<b>1,915,087,648</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>1,873,792,148</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	paket		paket	2 paket	<b>1,733,832,648</b>						2 paket	<b>1,733,832,648</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang 0 Orang/bulan	1,696,032,648	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	21 Orang 0 Orang/bulan	1,696,032,648	Kecamatan Lamaknen Selatan
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"				1 Dokumen	37,800,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	37,800,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan adm.umu perangkat daerah	paket		paket	6 paket	<b>82,811,000</b>						6 paket	<b>64,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Paket	1,485,900	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	1,500,000	Kecamatan Lamaknen Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	9,999,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,006,100	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 Paket	5,000,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7,500,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	12,500,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				8 Laporan	58,820,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	8 Laporan	35,000,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemda	paket		paket	3 paket	<b>18,000,000</b>						3 paket	<b>16,500,000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan surat menyurat dan jumlah paket pengiriman				1 Laporan	3,000,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	1,500,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	7,500,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	3 Laporan	7,500,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7,500,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	paket		paket	4 paket	<b>80,444,000</b>						4 paket	<b>59,459,500</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, yang dibayarkan pajak dan perijinan				6 unit	53,442,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Loonuna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 unit	53,459,500	Kecamatan Lamaknen Selatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				6 unit	1,000,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 unit	1,000,000	Kecamatan Lamaknen Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				6 unit	23,502,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	6 unit	2,500,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2,500,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Unit	2,500,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88.82064 Indeks	<b>31,145,000</b>						88.82064 Indeks	<b>45,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	paket		paket	1 paket	<b>10,875,000</b>						1 paket	<b>25,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah				1 Laporan	10,875,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	0	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan	paket		paket	1 paket	<b>20,270,000</b>						1 paket	<b>20,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20,270,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	<b>74,800,000</b>						70 %	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Paket		Paket	2 Paket	<b>74,800,000</b>						2 Paket	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang				8 Laporan	25,000,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN dan Masyarakat Desa	8 Laporan	15,000,000	Kecamatan Lamaknen Selatan
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat				1 Laporan	49,800,000	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN dan Masyarakat Desa	1 Laporan	45,000,000	Kecamatan Lamaknen Selatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	01						<b>1,652,263,150</b>						<b>1,582,263,253</b>			
7	01	01					<b>1,558,754,150</b>						CC/54 predikat/ angka	<b>1,492,263,253</b>		
7	01	01	2.02										17 paket	<b>1,373,363,253</b>		
7	01	01	2.02	01			17 Orang/bulan	1,337,034,502	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	17 Orang/bulan	1,335,553,253	Kecamatan Nanaet Duabesi
7	01	01	2.02	03			1 dokumen	37,800,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 dokumen	37,800,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7	01	01	2.06				5 paket	<b>79,931,900</b>						5 paket	<b>49,500,000</b>	
7	01	01	2.06	01			1 paket	2,131,900	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 paket	1,500,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7	01	01	2.06	05			2 paket	10,320,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 paket	5,000,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7	01	01	2.06	08			0 Laporan 1 laporan	18,500,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	0 Laporan 1 laporan	8,000,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7	01	01	2.06	09			12 laporan	48,980,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	12 laporan	35,000,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7	01	01	2.08				1 Laporan	<b>36,967,748</b>						1 Laporan	<b>13,400,000</b>	
7	01	01	2.08	01			1 laporan	1,800,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 laporan	2,500,000	Kecamatan Nanaet Duabesi



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air dan listrik				2 laporan	8,400,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 laporan	8,400,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				5 pkt	26,767,748	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	5 pkt	2,500,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>67,020,000</b>							<b>56,000,000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak				7 unit	67,020,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		7 unit	56,000,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88.82064 Indeks	<b>34,472,000</b>						88.82064 Indeks	<b>30,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah kordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	paket		paket	1 paket	<b>11,400,000</b>						1 paket	<b>10,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	11,400,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan	paket		paket	1 paket	<b>23,072,000</b>						1 paket	<b>20,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	23,072,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	70 %	<b>59,037,000</b>						70 %	<b>60,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan PEMBERDAYAAN DESA</b>	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaaqn Desa	paket paket paket		paket paket paket	1 paket 2 paket 2 paket	<b>59,037,000</b>						1 paket 2 paket 2 paket	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musrenbangdes				1 Laporan	10,740,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat				1 kali	48,297,000	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 kali	50,000,000	Kecamatan Nanaet Duabesi
<b>8</b>		<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>													
<b>8 01</b>		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>4,668,266,073</b>							<b>4,622,469,746</b>	
<b>8 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	NILAI SAKIP	ANGKA/PREDIKAT		ANGKA/PREDIKAT	CC/54 ANGKA/PREDIKAT	<b>2,733,392,205</b>						CC/54 ANGKA/PREDIKAT	<b>2,718,375,669</b>	
8 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%		%	100 %	<b>6,000,000</b>						100 %	<b>0</b>	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja perangkat Daerah				1 Laporan	6,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>2,455,118,805</b>						100 %	<b>2,454,101,305</b>	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,382,518,805	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	30 Orang/bulan	2,382,518,805	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	72,600,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Dokumen	71,582,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>86,032,800</b>						100 %	<b>139,764,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	2,499,400	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Administrasi Perkantoran	1 Paket	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan				1 Paket	27,303,500	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Administrasi Perkantoran	1 Paket	27,304,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	24,999,900	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Administrasi Perkantoran	2 Paket	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	26,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Administrasi Perkantoran	15 Laporan	79,960,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	%		%	100 %	<b>15,675,000</b>						100 %	<b>15,950,030</b>	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan				2 unit	15,675,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 unit	15,950,030	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>48,978,100</b>						100 %	<b>46,730,500</b>	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	19,200,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	2 Laporan	16,950,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	24,778,100	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	1 Laporan	24,780,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>121,587,500</b>						100 %	<b>121,829,334</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	118,587,500	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	18 Unit	118,829,334	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	3,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	0 Unit	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat	Orang		Orang	790 Orang	<b>41,405,600</b>						790 Orang	<b>41,488,539</b>	
8.01.02.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	%		%	100 %	<b>41,405,600</b>						100 %	<b>41,488,539</b>	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Sub Kegiatan	41,405,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	1 Sub Kegiatan	41,488,539	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat	Orang		Orang	402 Orang	<b>729,816,168</b>						402 Orang	<b>731,291,575</b>	
8.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	%		%	100 %	<b>729,816,168</b>						100 %	<b>731,291,575</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Sub. Kegiatan	729,816,168	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	1 Sub. Kegiatan	731,291,575	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonsosbud dan Organisasi Kemasyarakatan	%		%	49,15 %	<b>160,662,600</b>						49,15 %	<b>160,984,054</b>	
8 01 05 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di susun	Dokumen		Dokumen	29 Dokumen	<b>160,662,600</b>						29 Dokumen	<b>160,984,054</b>	
8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,sosial budaya,dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dan Organisasi Kemasyarakatan				1 Sub Kegiatan	160,662,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Masyarakat	1 Sub Kegiatan	160,984,054	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Menurunnya Kasus Unjuk Rasa/Demonstrasi	Kasus		Kasus	4 Kasus	<b>1,002,989,500</b>						4 Kasus	<b>910,329,909</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Belu  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	%		%	100 %	1,002,989,500						100 %	910,329,909	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	1,002,989,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN/Masyarak at	100 Orang	910,329,909	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>TOTAL</b>							<b>1,063,829,066,415</b>							<b>954,037,027,755</b>	